



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024
DI UJOH BILANG**



**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DI SAMARINDA**

Nomor : 18.A/LHP/XIX.SMD/5/2025

Tanggal : 20 Mei 2025



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024
DI UJOH BILANG**

**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DI SAMARINDA**

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 terdiri dari dua laporan yaitu:

- I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan. Laporan ini memuat:
 - a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
 - b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; dan
 - c. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 yang memuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Bupati Mahakam Ulu.
- II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Laporan ini memuat:
 - a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan sebelumnya.

DAFTAR ISI

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	ii
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	1
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajiban estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 18.B/LHP/XIX.SMD/5/2025 tanggal 20 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.



GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 yang didasarkan pada kriteria:

- a. kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang memiliki 28 SKPD.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang terdiri dari:

- a. Neraca per 31 Desember 2024;
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Arus Kas (LAK);
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2024;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024;

- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 60 hari yang terdiri dari:

- a. Pemeriksaan interim dilakukan 35 hari mulai tanggal 10 Februari s.d. 16 Maret 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 24/ST/XIX.SMD/02/2025 tanggal 7 Februari 2025; dan
- b. Pemeriksaan terinci dilakukan selama 25 hari mulai tanggal 10 April s.d. 4 Mei 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 78/ST/XIX.SMD/04/2025 tanggal 8 April 2025.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN ANGGARAN
2024



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dengan segala Rahmad dan karunia-Nya, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Substansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama Tahun Anggaran 2024, sehingga tujuan transparansi pengelolaan keuangan dapat diwujudkan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu juga disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan pendekatan kinerja, artinya setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Kabupaten Mahakam Ulu berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas



Laporan Keuangan. Hal ini juga sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan kaidah – kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu mencerminkan kondisi keuangan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024 ini masih belum sempurna, dan kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu untuk periode yang akan datang. Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan dimaksudkan juga untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Demikian laporan ini disampaikan, sebagai media dalam menilai kinerja dalam Tahun Anggaran 2024 dan kami menyadari bahwa laporan keuangan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 ini memerlukan koreksi dan masukan yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja pada masa-masa mendatang.

Ulu, 20 Mei 2025
BUPATI MAHAKAM ULU

Dr. BONIFASIUS BELAWAN GEH, S.H., M.E.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xv
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	1
LAPORAN KEUANGAN	
I LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	2
II LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)	4
III NERACA	5
IV LAPORAN OPERASIONAL (LO)	7
V LAPORAN ARUS KAS (LAK)	9
VI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	11
VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)	
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	12
1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	13
1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CaLK	14
BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	17
BAB III. KEBIJAKAN AKUNTANSI	43
BAB IV. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
4.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	97
4.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)	131
4.3 PENJELASAN POS-POS NERACA	133
4.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)	175
4.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS (LAK)	192



4.6	PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	202
BAB V	PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	205
BAB VI	PENUTUP	206



DAFTAR TABEL

	<u>Halaman</u>
2.1.1.2 Letak Geografis dan Luas Kabupaten Mahakam Ulu	20
2.1.1.7 Jumlah Penduduk Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 – 2024	22
2.1.2.1 PDRB Kabupaten Mahakam Ulu ADHB 2020 – 2024	24
2.1.2.2 Perkembangan Inflasi Menurut Lapangan Usaha 2020 – 2024	25
2.1.2.3.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab.Mahakam Ulu 2018 – 2024	27
2.1.2.3.2 Rincian Indikator IPM Kabupaten Mahakam Ulu 2018 – 2024	27
2.1.2.4 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Mahakam Ulu	29
2.1.2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Mahakam Ulu	30
2.1.2.6.1 Gini Ratio Provinsi Kalimantan Timur	31
2.1.2.6.2 Gini Ratio Kabupaten Mahakam Ulu	31
2.1.2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024	32
2.2.3.1 <i>Mandatory Spending</i> Kabupaten Mahakam Ulu TA 2024	34
2.3 Laporan Realisasi Anggaran	36
2.3.1 Penggunaan Pendapatan Transfer Pusat	37
2.3.2 Program Prioritas RKPD Kabupaten Mahakam Ulu TA 2024	38
3.4.8.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah	56
3.4.8.2 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	56
3.4.8.3 Penyisihan Piutang Lainnya	56
3.4.11.1 Masa Manfaat Aset Tetap	65
3.4.11.2 Nilai Kapitalisasi Aset Tetap	68
3.4.11.3 Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap	69
4.1.1 Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan	97
4.1.1.1.A Realisasi Pendapatan Asli Daerah	98
4.1.1.1.B Realisasi Pendapatan Asli Daerah per SKPD	98
4.1.1.1.1 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	99
4.1.1.1.2 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah	101
4.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	101
4.1.1.1.4 Realisasi Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	102
4.1.1.1.4.1 Rincian Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak di Pisahkan	103
4.1.1.1.4.2 Rincian Jasa Giro	103
4.1.1.1.4.3 Rincian Pendapatan Bunga	104
4.1.1.1.4.4 Rincian Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	104



	<u>Halaman</u>
4.1.1.1.4.5 Rincian Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	104
4.1.1.1.4.6 Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	105
4.1.1.1.4.7 Rincian Pendapatan dari Pengembalian	105
4.1.1.2 Realisasi Pendapatan Transfer	106
4.1.1.2.1.A Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	106
4.1.1.2.1.B Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH)	107
4.1.1.2.1.C Rincian Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU)	107
4.1.1.2.1.D Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	108
4.1.1.2.1.E Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Non Fisik	108
4.1.1.2.1.F Rekapitulasi Dana Desa Per Kecamatan TA 2024	109
4.1.1.2.2 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	109
4.1.1.2.2.A Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak	110
4.1.1.2.2.B Rincian Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi	110
4.1.1.3 Rincian Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya	110
4.1.2 Realisasi Belanja Seluruh SKPD	111
4.1.2.A Realisasi Per Kelompok Belanja	112
4.1.2.B Realisasi Belanja Menurut Fungsi	112
4.1.2.1 Realisasi Per Jenis Belanja Operasi	114
4.1.2.1.1 Realisasi Per Rincian Obyek Belanja Pegawai	114
4.1.2.1.2 Realisasi Per Obyek Belanja Barang dan Jasa	116
4.1.2.1.3 Realisasi Belanja Subsidi	118
4.1.2.1.4 Realisasi Per Obyek Belanja Hibah	119
4.1.2.1.4.A Rincian Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	119
4.1.2.1.4.B Rincian Belanja Hibah kepada Partai Politik	121
4.1.2.1.5 Rincian Belanja Bantuan Sosial	121
4.1.2.1.5.A Rincian Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	122
4.1.2.1.5.B Jumlah Penerima Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu.....	122
4.1.2.1.5.C Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	122
4.1.2.2 Belanja Modal	123
4.1.2.2.A Belanja Modal Tanah	124
4.1.2.2.B Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125
4.1.2.2.C Belanja Modal Gedung dan Bangunan	126



	<u>Halaman</u>
4.1.2.2.D Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	126
4.1.2.2.E Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	127
4.1.2.3 Belanja Tidak Terduga	128
4.1.2.3.A Rincian Belanja Tak Terduga	128
4.1.2.4 Belanja Transfer	129
4.1.2.4.A Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	129
4.1.4.1 Rincian Penerimaan Pembiayaan	130
4.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)	131
4.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	132
4.3 Neraca Daerah	133
4.3.1 Rincian Aset Neraca	133
4.3.1.1 Rincian Aset Lancar	134
4.3.1.1.1 Rekening Kas Umum Daerah	135
4.3.1.1.3 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	136
4.3.1.1.4 Mutasi Kas di Bendahara BOS	136
4.3.1.1.5 Saldo Kas FKTP-JKN	137
4.3.1.1.6 Saldo Kas Lainnya – Bosda	137
4.3.1.1.8 Piutang Pajak Daerah	138
4.3.1.1.9 Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023	139
4.3.1.1.10 Rincian Piutang Lain – lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023	140
4.3.1.1.12 Piutang Bagi Hasil Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023	140
4.3.1.1.13 Rincian Piutang lainnya	141
4.3.1.1.15 Rincian Beban Dibayar Dimuka	142
4.3.1.1.16 Rincian Persediaan	142
4.3.1.3 Rincian Aset Tetap	145
4.3.1.3.A Mutasi Aset Tetap Tanah	145
4.3.1.3.1.A Mutasi Aset Tetap Tanah Per SKPD	146
4.3.1.3.1.B Aset Tetap Tanah dari Hibah Per SKPD	146
4.3.1.3.2 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	146
4.3.1.3.2.A Belanja Modal Peralatan dan Mesin	147
4.3.1.3.2.B Mutasi Tambah dari Belanja JKN yang realisasinya Aset Tetap Peralatan dan Mesin	148



	<u>Halaman</u>
4.3.1.3.2.C Mutasi Tambah Belanja Bosnas yang Menjadi Aset Tetap peralatan dan Mesin ...	148
4.3.1.3.2.D Mutasi Tambah Belanja Barang dan Jasa yang Menjadi Aset Tetap peralatan dan Mesin.....	149
4.3.1.3.2.E Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin dari Mutasi antar SKPD	149
4.3.1.3.2.F Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin dari Utang.....	150
4.3.1.3.2.G Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Tambah Belanja Modal ...	151
4.3.1.3.2.H Mutasi Kurang Aset Tetap peralatan dan Mesin	152
4.3.1.3.3 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	154
4.3.1.3.3.A Belanja Modal Gedung dan Bangunan	154
4.3.1.3.3.B Reklasifikasi Tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan	155
4.3.1.3.3.C Mutasi Tambah antar SKPD Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....	156
4.3.1.3.3.D Mutasi Kurang Aset Gedung dan Bangunan.....	157
4.3.1.3.3.E Koreksi Kurang BPK Gedung dan Bangunan.....	157
4.3.1.3.4 Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	158
4.3.1.3.4.A Belanja Modal Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	159
4.3.1.3.4.B Belanja Barang dan Jasa Jalan, Jaringan dan Irigasi	159
4.3.1.3.4.C Rincian Reklasifikasi masuk Jalan, Jaringan dan Irigasi	159
4.3.1.3.4.D Mutasi Antar SKPD Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	160
4.3.1.3.4.E Belanja Modal yang tidak menjadi aset tetap (diserahkan ke masyarakat/kesalahan penganggaran) Jalan Jaringan dan Irigasi	161
4.3.1.3.4.F Mutasi Keluar antar SKPD Jalan, Jaringan dan Irigasi	161
4.3.1.3.4.G Belanja yang tidak menjadi aset tetap (Aset yang bernilai dibawah kapitalisasi) ...	161
4.3.1.3.4.H Reklafikasi Kurang	162
4.3.1.3.4.I Koreksi BPK	163
4.3.1.3.5 Mutasi Aset Tetap Lainnya	163
4.3.1.3.5.A Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	163
4.3.1.3.5.B Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya Dari Belanja Bosnas	164
4.3.1.3.5.C Aset Tetap Lainnya Dari Mutasi antar SKPD	164
4.3.1.3.5.D Mutasi Aset Kurang Berupa Aset Diserahkan ke Masyarakat	164
4.3.1.3.5.E Reklasifikasi kurang Aset Tetap Lainnya	165
4.3.1.3.6 Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan	165
4.3.1.3.6.A Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Belanja Barang dan Jasa	166
4.3.1.3.6.B Reklasifikasi Masuk ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan	166



	<u>Halaman</u>
4.3.1.3.6.C Koreksi BPK ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan	167
4.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	167
4.3.1.3.7.A Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan	167
4.3.1.4 Rekap Aset Lainnya	168
4.3.1.4.1 Rincian Tagihan Jangka Panjang	168
4.3.1.4.2 Rincian Aset Tidak Berwujud	169
4.3.1.4.3 Rincian Aset Lain-Lain.....	170
4.3.1.4.3.4 Aset Lainnya Pinjam Pakai Bagian Umum.....	171
4.3.1.4.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	171
4.3.2 Rincian Kewajiban	172
4.3.2.3 Rincian Utang Belanja	173
4.3.2.3.A Mutasi Utang Belanja	174
4.4.1 Realisasi Pendapatan-LO	175
4.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO	176
4.4.1.1.1 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023	176
4.4.1.1.2 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023	177
4.4.1.1.4 Realisasi Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO.....	178
4.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO	179
4.4.1.2.1 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	179
4.4.1.2.2 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO	180
4.4.1.2.2.A Realisasi Pendapatan Bagi Hasil – LO	180
4.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO	181
4.4.2 Rincian Beban 2024	181
4.4.2.1 Rincian Beban Pegawai	182
4.4.2.2 Rincian Beban Persediaan	182
4.4.2.3 Rincian Beban Jasa	183
4.4.2.4 Rincian Pemeliharaan	184
4.4.2.5 Rincian Beban Perjalanan Dinas per SKPD	184
4.4.2.6 Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	185
4.4.2.9 Rincian Beban Hibah	186
4.4.2.10 Rincian Beban Bantuan Sosial 2024	186
4.4.2.11 Rincian Beban Penyisihan Piutang 2024	187



	<u>Halaman</u>
4.4.2.12 Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	187
4.4.2.13 Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	188
4.4.2.14 Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	189
4.4.2.17 Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud	189
4.4.2.19 Rincian Beban Bantuan Keuangan	190
4.5 Saldo Akhir Kas TA 2024 dan 2023	192
4.5.A Rincian Kas TA 2024 dan 2023	192
4.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	192
4.5.1.1 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	193
4.5.1.1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah TA 2024 dan 2023	193
4.5.1.1.2 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023	194
4.5.1.1.4 Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 dan 2023	194
4.5.1.1.5 Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 dan 2023	195
4.5.1.1.6 Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2024 dan 2023....	195
4.5.1.1.7 Rincian Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Umum	195
4.5.1.1.8 Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Khusus Pemerintah TA 2024 dan 2023	196
4.5.1.1.10 Realisasi Penerimaan Dana Desa	196
4.5.1.1.11 Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak TA 2024 dan 2023	196
4.5.1.2 Arus Keluar dari Aktivitas Operasi TA 2024 dan 2023	197
4.5.1.2.1 Rincian Pembayaran Pegawai	197
4.5.1.2.2 Rincian Pembayaran Barang	198
4.5.1.2.4 Rincian Pembayaran Hibah	198
4.5.1.2.5 Rincian Pembayaran Bantuan Sosial	198
4.5.1.2.8 Rincian Pembayaran Bagi Hasil Pajak	199
4.5.1.3 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi	199
4.5.1.3.1 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi	199
4.5.1.3.2 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi	200
4.5.2 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Tansitoris	200
4.5.2.1 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	200
4.5.2.2 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris	201
4.5.3 Rincian atas Kenaikan/Penurunan Kas	201
4.5.6 Rincian Saldo Akhir Kas	202
4.6 Laporan Perubahan Ekuitas	202



	<u>Halaman</u>
4.6.3 Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya	203



DAFTAR GAMBAR

		<u>Halaman</u>
2.1	Peta Geografis Kabupaten Mahakam Ulu	19
2.2	Distribusi Penduduk Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024	23
4.1	Perbandingan Komposisi Pendapatan-LRA 2024	97
4.2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	99
4.3	Perbandingan Komposisi Per Jenis Belanja Operasi 2024	114
4.4	Perbandingan Komposisi Belanja Hibah 2024	118
4.5	Perbandingan Belanja Modal 2024	124
4.6	Perbandingan Komposisi Aset Tahun 2024	134



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	BELANJA MODAL
LAMPIRAN 1.B	BELANJA MODAL PER SKPD
LAMPIRAN 2.A	KAS DI KAS DAERAH
LAMPIRAN 3	KAS DI BENDAHARA BOSNAS
LAMPIRAN 4	KAS DI BENDAHARA FKTP
LAMPIRAN 5	KAS LAINNYA
LAMPIRAN 5.A	KAS LAINNYA ATAS BOSDA
LAMPIRAN 5.B	KAS LAINNYA ATAS BOK
LAMPIRAN 6	PIUTANG PENDAPATAN
LAMPIRAN 6.A	PIUTANG TRANSFER
LAMPIRAN 7	PIUTANG LAINNYA
LAMPIRAN 8	PENYISIHAN PIUTANG PAD
LAMPIRAN 9	PENYISIHAN PIUTANG LAINNYA
LAMPIRAN 10	RINCIAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA
LAMPIRAN 11	PERSEDIAAN
LAMPIRAN 12	DANA BERGULIR
LAMPIRAN 13	PENYISIHAN DANA BERGULIR
LAMPIRAN 14	PENYERTAAN MODAL
LAMPIRAN 15.A	REKAPITULASI ASET TETAP TANAH
LAMPIRAN 15.B	REKAPITULASI ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
LAMPIRAN 15.C	REKAPITULASI ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN
LAMPIRAN 15.D	REKAPITULASI JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI
LAMPIRAN 15.E	REKAPITULASI ASET TETAP LAINNYA
LAMPIRAN 15.F	REKAPITULASI ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM PENGKERJAAN
LAMPIRAN 16	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP
LAMPIRAN 17	TUNTUTAN GANTI RUGI PIHAK KETIGA
LAMPIRAN 18	ASET TIDAK BERWUJUD DAN AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD
LAMPIRAN 19	ASET LAIN – LAIN
LAMPIRAN 19.A	ASET RUSAK BERAT
LAMPIRAN 19.B	ASET LAINNYA DISERAHKAN KE PROVINSI



LAMPIRAN 19.C	ASET LAINNYA (ASET DINAS PENDIDIKAN YANG AKAN DISERAHKAN KE SWASTA)
LAMPIRAN 19.D	ASET PINJAM PAKAI BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
LAMPIRAN 19.E	TREASURY DEPOSIT FACILITY
LAMPIRAN 20	UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)
LAMPIRAN 21	PENDAPATAN TERIMA DIMUKA
LAMPIRAN 22	REKAPITULASI HUTANG BELANJA
LAMPIRAN 23	DAFTAR KEGIATAN YANG TERMASUK DALAM HUTANG BELANJA
LAMPIRAN 24	KOREKSI EKUITAS
LAMPIRAN 25	LAPORAN REKAPITULASI REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
LAMPIRAN 26	LAPORAN REALISASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN UMUM PROVINSI KEPADA DESA
LAMPIRAN 27	LAPORAN REALISASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA
LAMPIRAN 28	RINCIAN REKLASIFIKASI DARI PERALATAN DAN MESIN KE GEDUNG BANGUNAN PADA SEKRETARIAT DAERAH
LAMPIRAN 29	SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB



DAFTAR SINGKATAN

A

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

B

BAS : Bagan Akun Standar
BKU : Buku Kas Umum
BL : Belanja Langsung
BPK : Bukti Pengeluaran Kas
BTL : Belanja Tidak Langsung
BOS : Bantuan Operasional Sekolah
BUD : Bendahara Umum Daerah

C

CALK : Catatan Atas Laporan Keuangan

D

DAK : Dana Alokasi Khusus
DAU : Dana Alokasi Umum
DBH : Dana Bagi Hasil
DP : Daftar Penguji
DPAL-SKPD : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD
DPA-SKPD : Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
DPPA-SKPD : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

J

JK : Jurnal Koreksi
JKN : Jaminan Kesehatan Nasional
JP : Jurnal Penyesuaian



K

KASDA	: Kas Umum Daerah
KDP	: Konstruksi Dalam Pengerjaan
KUA	: Kebijakan Umum APBD
Kuasa BUD	: Kuasa Bendahara Umum Daerah

L

LAK	: Laporan Arus Kas
LO	: Laporan Operasional
LPE	: Laporan Perubahan Ekuitas
LPSAL	: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran

M

Musrenbang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
------------	--------------------------------------

O

OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
-----	-------------------------------

P

PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PFK	: Perhitungan Pihak Ketiga
PPA	: Prioritas dan Plafon Anggaran
PPAS	: Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
PPKD	: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PPK-OPD	: Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD
PPK-SKPD	: Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
PPTK	: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PU	: Pekerjaan Umum

R

Renja SKPD	: Rencana Kerja SKPD
------------	----------------------



Renstra SKPD	: Rencana Strategis SKPD
RB	: Rusak Berat
RKA-SKPD	: Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKUD	: Rekening Kas Umum Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

S

SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SiLPA	: Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPKD	: Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
SKR-D	: Surat Ketetapan Retribusi Daerah
SKTJM	: Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
SOA	: Subsidi Ongkos Angkut
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SPD	: Surat Penyediaan Dana
SPJ	: Surat Pertanggung Jawaban
SPM	: Surat Perintah Membayar
SPM-GU	: Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan
SPM-LS	: Surat Perintah Membayar Langsung
SPM-TU	: Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan
SPM-UP	: Surat Perintah Membayar Uang Persediaan
SPP	: Surat Permintaan Pembayaran
SPP-GU	: SPP Ganti Uang Persediaan
SPP-LS	: SPP Langsung
SPP-TU	: SPP Tambahan Uang Persediaan
SPP-UP	: SPP Uang Persediaan
STS	: Surat Tanda Setoran



T

TAPD	: Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TBP	: Tanda Bukti Pembayaran
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
TP	: Tuntutan Perbendaharaan

T

TA	: Tahun Anggaran
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
TBP	: Tanda Bukti Pembayaran

W

WP	: Wajib Pajak
WR	: Wajib Retribusi



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024, yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi APBD; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; (g) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ujoh Bilang, 20 Mei 2025

BUPATI MAHAKAM ULU



Dr. BONIFASius BELAWAN GEH, S.H., M.E.



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

NO. URUT	URAIAN	REF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
4	PENDAPATAN DAERAH	4.1.1	1.877.265.573.225,00	2.045.265.571.153,91	108,95	2.226.146.688.913,58
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.1.1.1	16.853.273.323,00	91.555.695.176,22	543,25	47.720.635.931,58
4.1.1.1	Pajak Daerah	4.1.1.1.1	3.622.500.000,00	3.112.237.291,48	85,91	2.964.512.089,34
4.1.1.2	Retribusi Daerah	4.1.1.1.2	1.900.550.000,00	1.191.385.000,00	62,69	905.261.000,00
4.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.1.1.1.3	278.732.980,00	389.351.382,74	139,69	377.742.245,57
4.1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	4.1.1.1.4	11.051.490.343,00	86.862.721.502,00	785,98	43.473.120.596,67
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.1.1.2	1.779.307.285.180,31	1.884.997.792.133,00	105,94	2.173.410.578.138,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.1.1.2.1	1.587.008.366.180,31	1.709.076.158.623,00	107,69	1.962.861.330.965,00
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	4.1.1.2.1.1	929.277.846.734,31	1.134.688.119.446,00	122,10	1.370.928.837.554,00
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	4.1.1.2.1.1	510.592.141.446,00	434.344.822.000,00	85,07	458.913.738.421,00
4.2.1.1.1	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	4.1.1.2.1.1	69.006.517.000,00	66.605.764.716,00	96,52	52.387.489.710,00
4.2.1.1.1	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	4.1.1.2.1.1	26.445.833.000,00	21.189.646.525,00	80,12	21.771.118.268,00
4.2.1.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	4.1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	10.599.493.000,00
4.2.1.1.5	Dana Desa	4.1.1.2.1.5	51.686.028.000,00	52.247.805.936,00	101,09	48.260.654.012,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	4.1.1.2.2	192.298.919.000,00	175.921.633.510,00	91,48	210.549.247.173,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	4.1.1.2.2.1	163.219.225.000,00	146.841.939.510,00	89,97	172.129.247.173,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	4.1.1.2.2.2	29.079.694.000,00	29.079.694.000,00	100,00	38.420.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.1.1.3	81.105.014.721,69	68.712.083.844,69	84,72	5.015.474.844,00
4.3.3	Pendapatan Lainnya	4.1.1.3.3	81.105.014.721,69	68.712.083.844,69	84,72	5.015.474.844,00
5	BELANJA DAERAH	4.1.2	2.767.000.000.000,00	2.208.676.613.242,73	79,82	1.716.184.315.493,57
5.1	BELANJA OPERASI	4.1.2.1	1.428.337.880.095,99	1.138.435.336.546,73	79,70	986.223.235.217,57
5.1.1.1	Belanja Pegawai	4.1.2.1.1	288.315.280.554,00	243.806.314.317,00	84,56	215.070.000.383,00
5.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.1.2.1.2	1.071.368.793.848,89	848.315.300.662,73	79,18	724.792.105.103,57
5.1.1.4	Belanja Subsidi	4.1.2.1.4	3.250.000.000,00	19.225.102,00	0,59	189.840.000,00

NO. URUT	URAIAN	REF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
5.1.5	Belanja Hibah	4.1.2.1.4	59.607.119.693,10	43.300.192.284,00	72,64	43.843.744.008,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.1.2.1.5	5.796.686.000,00	2.994.304.181,00	51,66	2.327.545.723,00
5.2	BELANJA MODAL	4.1.2.2	1.097.104.383.641,59	863.671.053.927,00	78,72	564.265.297.564,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	4.1.2.2	1.500.000.000,00	746.620.000,00	49,77	2.455.361.692,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.1.2.2	167.552.928.347,00	145.457.685.363,00	86,81	53.837.498.492,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.1.2.2	145.723.650.737,36	77.472.457.897,00	53,16	140.819.291.410,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.1.2.2	729.339.369.297,23	594.833.786.926,00	81,56	337.386.866.136,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.1.2.2	409.728.600,00	390.541.000,00	95,32	28.209.356.534,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.1.2.2	52.578.706.660,00	44.769.962.741,00	85,15	1.556.923.300,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.1.2.3	25.739.153.962,42	3.632.910.056,00	14,11	10.800.000,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	4.1.2.3	25.739.153.962,42	3.632.910.056,00	14,11	10.800.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	4.1.2.4	215.818.582.300,00	202.937.312.713,00	94,03	165.684.982.712,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	4.1.2.4	215.818.582.300,00	202.937.312.713,00	94,03	165.684.982.712,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	4.1.3	(889.734.426.775,00)	(163.411.042.088,82)	18,37	509.962.373.420,01
6	PEMBIAYAAN DAERAH	4.1.4				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4.1.4.1	899.734.426.775,00	899.740.981.775,38	100,00	401.922.053.355,37
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.1.4.1	899.734.426.775,00	899.734.426.775,38	100,00	401.896.491.955,37
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	4.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.1.4.1	0,00	6.555.000,00	0,00	25.561.400,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.1.4.2	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	12.150.000.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	4.1.4.2	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	12.150.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	4.1.5	889.734.426.775,00	889.740.981.775,38	100,00	389.772.053.355,37
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	4.1.6	0,00	726.329.939.686,56	0,00	899.734.426.775,38

BUPATI MAHAKAM ULU



Dr. BONIFASTUS BELAWAN GEH, SH., M.E.



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2024	2023
Saldo Anggaran Lebih Awal	4.2.1	899.734.426.775,38	401.896.491.955,37
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	4.2.2	899.734.426.775,38	401.896.491.955,37
Sub Total		0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	4.2.3	726.329.939.686,56	899.734.426.775,38
Sub Total		726.329.939.686,56	899.734.426.775,38
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	4.2.4	0,00	0,00
Lain-lain	4.2.5	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	4.2.6	726.329.939.686,56	899.734.426.775,38





NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Kas Daerah	4.3.1.1.1	724.288.143.980,16	897.449.318.811,75
Kas di Bendahara Penerimaan	4.3.1.1.2	11.640.000,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	4.3.1.1.3	55.108.013,00	121.723.842,00
Kas di BLUD		0,00	0,00
Kas Dana BOS	4.3.1.1.4	114.551.782,60	200.558.767,61
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	4.3.1.1.5	246.668.383,42	681.932.644,15
Kas Lainnya	4.3.1.1.6	1.054.260.944,14	1.327.928.269,92
Setara Kas		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	4.3.1.1.7	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	4.3.1.1.8	8.745.149.347,42	8.496.686.862,30
Piutang Retribusi Daerah	4.3.1.1.9	660.662.790,00	660.662.790,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.3.1.1.10	88.481.452,05	88.481.452,05
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	4.3.1.1.11	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	4.3.1.1.12	21.385.124.935,00	15.344.251.935,00
Piutang Lainnya	4.3.1.1.13	504.411.000,00	50.028.216.987,87
Penyisihan Piutang	4.3.1.1.14	(9.191.263.632,42)	(9.245.082.527,73)
Beban Dibayar Dimuka	4.3.1.1.15	28.223.034.331,33	26.990.988.156,35
Persediaan	4.3.1.1.16	418.250.915.828,06	265.978.766.275,07
JUMLAH ASET LANCAR		1.194.436.889.154,76	1.258.124.434.266,34
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara		0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah		0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
Dana Bergulir	4.3.1.2.1	3.124.589.867,00	3.131.144.867,00
Penyisihan Dana Bergulir	4.3.1.2.1	(3.124.589.867,00)	(3.131.144.867,00)
Deposito Jangka Panjang		0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal	4.3.1.2.2	30.000.000.000,00	20.000.000.000,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen		30.000.000.000,00	20.000.000.000,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		30.000.000.000,00	20.000.000.000,00
ASET TETAP			
Tanah	4.3.1.3		
Peralatan dan Mesin	4.3.1.3.1	180.617.437.160,00	179.555.483.760,00
Gedung dan Bangunan	4.3.1.3.2	493.425.457.936,07	368.912.910.908,07
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.3.1.3.3	1.040.596.557.960,89	953.171.047.253,14
Aset Tetap Lainnya	4.3.1.3.4	2.468.325.299.996,41	1.895.497.952.148,48
Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.3.1.3.5	9.217.735.734,00	7.677.785.934,00
Akumulasi Penyusutan	4.3.1.3.6	368.379.137.557,20	317.705.457.718,08
	4.3.1.3.7	(1.283.199.838.927,08)	(1.081.803.140.610,08)
JUMLAH ASET TETAP		3.277.361.787.417,49	2.640.717.497.111,69
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang	4.3.1.4		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	4.3.1.4.1	15.996.508.303,11	2.821.723.047,12
Aset Tidak Berwujud	4.3.1.4.2	0,00	0,00
Aset Lain-lain	4.3.1.4.3	132.634.895.971,00	87.467.528.990,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	4.3.1.4.4	78.831.956.546,89	78.831.956.546,89
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(53.044.449.113,00)	(36.253.839.571,00)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		0,00	0,00
		995.632.342.554,00	914.399.986.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA		1.170.051.254.262,00	1.047.267.355.013,01
JUMLAH ASET		5.671.849.930.834,25	4.966.109.286.391,04

URAIAN	REF	2024	2023
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	4.3.2.1	38.706.126,00	1.607.006,13
Utang Bunga		0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	4.3.2.2	17.377.538,75	32.754.796,92
Utang Belanja	4.3.2.3	29.379.788.350,21	24.532.161.781,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		29.435.872.014,96	24.566.523.584,05
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		29.435.872.014,96	24.566.523.584,05
EKUITAS			
EKUITAS	4.3.3	5.642.414.058.819,29	4.941.542.762.806,99
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		5.671.849.930.834,25	4.966.109.286.391,04





PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

NO. URUT	URAIAN	REF	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN - LO					
	4.4.1		2.083.441.357.000,32	2.711.320.871.536,67	(627.879.514.536,35)	(23,16)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	4.4.1.1	90.034.614.726,63	38.718.120.907,67	51.316.493.818,96	132,54
7.1.1	Pajak Daerah-LO	4.4.1.1.1	3.347.818.934,77	3.216.710.068,41	131.108.866,36	4,08
7.1.2	Retribusi Daerah-LO	4.4.1.1.2	1.191.385.000,00	905.261.000,00	286.124.000,00	31,61
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	4.4.1.1.3	389.351.382,74	377.742.245,57	11.609.137,17	3,07
7.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	4.4.1.1.4	85.106.059.409,12	34.218.407.593,69	50.887.651.815,43	148,71
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	4.4.1.2	1.972.271.021.687,00	2.619.272.506.519,00	(647.001.484.832,00)	(24,70)
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	4.4.1.2.1	1.790.308.515.177,00	2.424.094.787.411,00	(633.786.272.234,00)	(26,15)
7.2.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	4.4.1.2.1	1.215.920.476.000,00	1.832.162.294.000,00	(616.241.818.000,00)	(33,63)
7.2.1	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	4.4.1.2.1	434.344.822.000,00	458.913.738.421,00	(24.568.916.421,00)	(5,35)
7.2.1	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	4.4.1.2.1	66.605.764.716,00	52.387.489.710,00	14.218.275.006,00	27,14
7.2.1	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	4.4.1.2.1	21.189.646.525,00	21.771.118.268,00	(581.471.743,00)	(2,67)
7.2.1	Dana Insentif Daerah-LO	4.4.1.2.1	0,00	10.599.493.000,00	(10.599.493.000,00)	(100,00)
7.2.2	Dana Desa - LO	4.4.1.2.1	52.247.805.936,00	48.260.654.012,00	3.987.151.924,00	8,26
7.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO	4.4.1.2.2	181.962.506.510,00	195.177.719.108,00	(13.215.212.598,00)	(6,77)
7.2.2	Pendapatan Bagi Hasil - LO	4.4.1.2.2	152.882.812.510,00	156.757.719.108,00	(3.874.906.598,00)	(2,47)
7.2.2	Bantuan Keuangan - LO	4.4.1.2.2	29.079.694.000,00	38.420.000.000,00	(9.340.306.000,00)	(24,31)
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	4.4.1.3	21.135.720.586,69	53.330.244.110,00	(32.194.523.523,31)	(60,37)
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	4.4.1.3	484.241.122,00	254.164.886,00	230.076.236,00	90,52
7.3.2	Dana Darurat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Pendapatan Hibah Dana BOS-LO		20.651.479.464,69	53.076.079.224,00	-32.424.599.759,31	-61,09
8	BEBAN	4.4.2	1.378.622.493.249,78	1.162.626.907.624,42	215.995.585.625,36	18,58
8.1.1	Beban Pegawai	4.4.2.1	243.556.028.846,00	215.330.795.999,00	28.225.232.847,00	13,11
8.1.2	Beban Persediaan	4.4.2.2	122.519.704.310,88	38.408.585.699,71	84.111.118.611,17	218,99
8.1.2	Beban Jasa	4.4.2.3	263.348.142.313,75	233.120.305.231,78	30.227.837.081,97	12,97
8.1.2	Beban Pemeliharaan	4.4.2.4	13.413.133.597,00	6.224.905.374,57	7.188.228.222,43	115,48
8.1.2	Beban Perjalanan Dinas	4.4.2.5	237.617.186.516,15	183.241.592.691,00	54.375.593.825,15	29,67
8.1.2	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.4.2.6	37.482.363.455,00	106.346.601.163,00	(68.864.237.708,00)	(64,75)
8.1.3	Beban Bunga	4.4.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	4.4.2.8	19.225.102,00	189.840.000,00	(170.614.898,00)	-89,87
8.1.5	Beban Hibah	4.4.2.9	37.414.665.734,00	31.030.485.208,00	6.384.180.526,00	20,57

NO. URUT	URAIAN	REF	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	4.4.2.10	2.994.304.181,00	2.754.115.723,00	240.188.458,00	8,72
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	4.4.2.11	50.000,00	1.764.935.547,36	(1.764.885.547,36)	(100,00)
8.1.8	Beban Lain-lain	4.4.2.12	0,00	-	-	-
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.4.2.13	44.288.679.864,00	33.025.567.711,00	11.263.112.153,00	34,10
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.4.2.14	19.255.493.033,00	17.581.239.940,00	1.674.253.093,00	9,52
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.4.2.15	138.443.079.678,00	119.592.042.053,00	18.851.037.625,00	15,76
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4.4.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	4.4.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	4.4.2.18	15.333.123.906,00	8.330.912.571,00	7.002.211.335,00	84,05
8.3.1	Beban Bagi Hasil	4.4.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan	4.4.2.20	202.937.312.713,00	165.684.982.712,00	37.252.330.001,00	22,48
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		4.4.3	704.818.863.750,54	1.548.693.963.912,25	(843.875.100.161,71)	(54,49)
KEGIATAN NON OPERASIONAL						
7.4.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	4.4.4	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	4.4.4	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	4.4.4	0,00	-	-	-
8.5.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	4.4.4	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4.4.4	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		4.4.4	-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		4.4.5	704.818.863.750,54	1.548.693.963.912,25	(843.875.100.161,71)	(54,49)
POS LUAR BIASA						
8.4.1	Beban Tak Terduga	4.4.6	0,00	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		4.4.6	-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT-LO		4.4.7	704.818.863.750,54	1.548.693.963.912,25	(843.875.100.161,71)	(54,49)

BUPATI MAHAKAM ULU



Dr. BONIFASIUS BELAWAN GEH, SH., M.E.

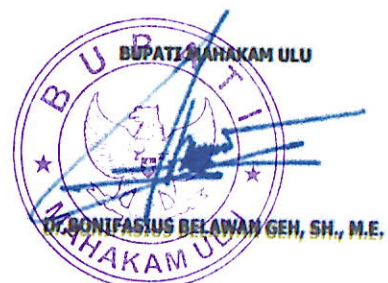


LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2024	2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	4.5.1		
<i>Arus Kas Masuk</i>	4.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah	4.5.1.1.1	3.112.237.291,48	2.964.512.089,34
Penerimaan Retribusi Daerah	4.5.1.1.2	1.191.385.000,00	905.261.000,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	4.5.1.1.3	389.351.382,74	377.742.245,57
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	4.5.1.1.4	86.862.721.502,00	43.040.135.596,67
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	4.5.1.1.5	40.317.295.000,00	40.409.150.660,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	4.5.1.1.6	1.094.370.824.446,00	1.330.519.686.894,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	4.5.1.1.7	434.344.822.000,00	458.913.738.421,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	4.5.1.1.8	87.795.411.241,00	74.158.607.978,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	4.5.1.1.9	0,00	10.599.493.000,00
Penerimaan Dana Desa	4.5.1.1.10	52.247.805.936,00	48.260.654.012,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	4.5.1.1.11	146.841.939.510,00	172.129.247.173,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	4.5.1.1.12	29.079.694.000,00	38.420.000.000,00
Penerimaan Lainnya	4.5.1.1.13	68.712.083.844,69	5.015.474.844,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		2.045.265.571.153,91	2.225.713.703.913,58
<i>Arus Kas Keluar</i>	4.5.1.2		
Pembayaran Pegawai	4.5.1.2.1	243.806.314.317,00	215.070.000.383,00
Pembayaran Barang	4.5.1.2.2	848.315.300.662,73	724.792.105.103,57
Pembayaran Subsidi		19.225.102,00	189.840.000,00
Pembayaran Hibah	4.5.1.2.3	43.300.192.284,00	43.843.744.008,00
Pembayaran Bantuan Sosial	4.5.1.2.4	2.994.304.181,00	2.327.545.723,00
Pembayaran Tak Terduga	4.5.1.2.5	3.632.910.056,00	10.800.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	4.5.1.2.6	202.937.312.713,00	165.684.982.712,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		1.345.005.559.315,73	1.151.919.017.929,57
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		700.260.011.838,18	1.073.794.685.984,01
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
<i>Arus Kas masuk</i>	4.5.2.1		
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	4.5.2.1	0,00	432.985.000,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap		0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	4.5.2.1	6.555.000,00	25.561.400,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		6.555.000,00	458.546.400,00
<i>Arus Kas Keluar</i>	4.5.2.2		
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Perolehan Tanah		746.620.000,00	2.455.361.692,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	4.5.2.2	145.457.685.363,00	53.837.498.492,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	4.5.2.2	77.472.457.897,00	140.819.291.410,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.5.2.2	594.833.786.926,00	337.386.866.136,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	4.5.2.2	390.541.000,00	28.209.356.534,00
Perolehan Aset Lainnya		44.769.962.741,00	1.556.923.300,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		10.000.000.000,00	12.150.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		873.671.053.927,00	576.415.297.564,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(873.664.498.927,00)	(575.956.751.164,00)

URAIAN	REF	2024	2023
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	4.5.3		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	4.5.3	0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		0,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	4.5.4		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	4.5.4.1		
Kas Lainnya pada BPBD	4.5.4.1	155.321.268.505,52	108.016.394.669,13
Kas Lainnya pada Kominfo		0,00	119.025.000,00
Kas Lainnya pada Dinsos	4.5.4.1	2.555.335,85	0,00
Koreksi Utang PFK BUD		4.972.786,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		0,00	96.643.553,92
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	4.5.4.2	155.328.796.627,37	108.232.063.223,05
Kas Lainnya 2023	4.5.4.2	155.284.169.385,65	108.014.787.663,00
Koreksi Kas BOSNAS	4.5.4.2	380.483.100,00	0,00
Reklas Kasda ke Piutang Lainnya	4.5.4.2	11.787.285,01	170.240.000,00
Koreksi Utang PFK	4.5.4.2	258.959.000,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		0,00	174.870.497,92
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(606.602.143,29)	(127.834.937,87)
Kenaiikan / (Penurunan) Kas	4.5.5	(174.011.089.232,11)	497.710.099.882,14
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan	4.5.6	899.781.462.335,43	402.071.362.453,29
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan		725.770.373.103,32	899.781.462.335,43
Kas di BLUD		0,00	0,00
Kas Dana BOS		0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		0,00	0,00
Kas Lainnya	4.5.7	0,00	0,00
Setara Kas		0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	4.5.8	725.770.373.103,32	899.781.462.335,43





PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2024	2023
EKUITAS AWAL	4.6.1	4.941.542.762.806,99	3.414.820.714.152,43
SURPLUS/DEFISIT-LO	4.6.2	704.818.863.750,54	1.548.693.963.912,25
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:			
Koreksi Ekuitas	4.6.3	(3.947.567.738,24)	(21.971.915.257,69)
EKUITAS AKHIR	4.6.4	5.642.414.058.819,29	4.941.542.762.806,99



Dr. DONIFASTIUS BELAWAN GEH, SH., M.E.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN ANGGARAN
2024**



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai keuangan, mengevaluasi kinerja suatu entitas dan oleh karena itu dibutuhkan Laporan Keuangan yang akuntabel. Selain itu, Laporan Keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Laporan Keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset, Kewajiban, dan Ekuitas (Neraca)
2. Anggaran dan Realisasi APBD (LRA)
3. Pendapatan dan Beban Operasional (LO)
4. Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
6. Arus kas (LAK)

Secara spesifik, tujuan peLaporan Keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;





4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan antara lain:

1. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta seluruh perubahannya terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah beserta seluruh perubahannya terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah beserta seluruh perubahannya terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Daerah beserta seluruh perubahannya terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kualitas Piutang, Piutang Daerah dan Penyisihan Piutang Dana Bergulir;
27. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
28. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

1. Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3. Kebijakan Akuntansi

3.1 Entitas Pelaporan

3.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP



- 3.4.1 Aset Lancar
 - 3.4.1.1 Akuntansi Kas dan Setara Kas
 - 3.4.1.2 Akuntansi Investasi Jangka Pendek
 - 3.4.1.3 Akuntansi Piutang
 - 3.4.1.4 Akuntansi Persediaan
- 3.4.2 Aset Non Lancar
 - 3.4.2.1 Akuntansi Investasi Jangka Panjang
 - 3.4.2.2 Akuntansi Aset Tetap
 - 3.4.2.3 Akuntansi Dana Cadangan
 - 3.4.2.4 Akuntansi Aset Lainnya
- 3.4.3 Akuntansi Kewajiban
- 3.4.4 Akuntansi Ekuitas Dana

4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 4.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 4.1.1 Pendapatan – LRA
 - 4.1.2 Belanja
 - 4.1.3 Surplus/(Defisit) LRA
 - 4.1.4 Pembiayaan
 - 4.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
- 4.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
 - 4.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 4.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan
 - 4.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
 - 4.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - 4.2.5 Lain-Lain
 - 4.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 4.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 4.3.1 Aset
 - 4.3.2 Kewajiban
 - 4.3.3 Ekuitas
- 4.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
 - 4.4.1 Pendapatan – LO
 - 4.4.2 Beban
 - 4.4.3 Surplus/Defisit Dari Operasi
 - 4.4.4 Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional – LO
 - 4.4.5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa



- 4.4.6 Pos Luar Biasa
- 4.4.7 Surplus/Defisit – LO
- 4.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)
 - 4.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 4.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 4.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 4.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
- 4.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 4.6.1 Ekuitas Awal
 - 4.6.2 Penambahan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)
 - 4.6.3 Koreksi Ekuitas Lainnya
 - 4.6.4 Ekuitas Akhir
- 5. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan**
- 6. Penutup**



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN

DAN

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat dalam memitigasi dampak rambatan global dan dengan kinerja yang diakui secara internasional. Pertama, kinerja ekonomi Indonesia termasuk salah satu yang terbaik di negara *Emerging Market Economies* (EMEs) dengan stabilitas makro ekonomi terjaga dan pertumbuhan yang cukup tinggi. Bahkan, Indonesia mampu mencegah terjadinya krisis akibat pandemi Covid-19 dan terus melanjutkan pemulihan ekonomi hingga kini. Kedua, kuatnya koordinasi kebijakan makro ekonomi, khususnya kebijakan fiskal Pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia, menjadi pilar penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional dengan keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan. Indonesia juga mempunyai komitmen yang tinggi dalam transformasi ekonomi, termasuk perbaikan iklim investasi, pembangunan infrastruktur, dan hilirisasi sumber daya alam. Ketiga, Indonesia menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam sejumlah kerja sama dan lembaga internasional. Keberhasilan kekuatan Indonesia dalam G20 pada tahun 2022 di tengah konflik dunia yang memanas diakui sebagai “*making the impossible possible*”. Bahkan, sejumlah agenda penting berhasil diperjuangkan, seperti perlunya koordinasi fiskal-moneter yang erat, kerja sama dalam mengatasi kesehatan, resolusi bagi masalah utang negara miskin, dan kerja sama digitalisasi sistem pembayaran antarnegara.

Perkembangan dalam lima tahun terakhir menunjukkan kinerja ekonomi Indonesia termasuk salah satu yang terbaik di EMEs dengan stabilitas yang terjaga dan pertumbuhan yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2018 dapat mencapai di atas 5%, kecuali pada periode pandemi Covid-19. Bahkan, kontraksi ekonomi sebagai dampak Covid-19 termasuk yang relatif kecil dibandingkan dengan kondisi negara-negara lain. Stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga. Inflasi tetap terkendali rendah, dengan rata-rata di bawah 3% selama periode 2018-2023, dan nilai tukar Rupiah terjaga stabil, didukung komitmen tinggi dari kebijakan moneter Bank Indonesia. Defisit fiskal terjaga rendah di bawah 3% dari PDB, kecuali pada periode puncak Covid-19 tahun 2020 dan 2021 yang kemudian secara cepat kembali *prudent* dengan konsolidasi fiskal Pemerintah. Defisit transaksi berjalan juga rendah dan menurun, bahkan mencatat surplus pada tahun 2021 dan 2022, sebagai buah dari hilirisasi sumber daya alam. Perkembangan ini menunjukkan ketahanan eksternal ekonomi Indonesia yang makin kuat. Demikian pula, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dengan kecukupan permodalan (*Capital eacy Ratio CAR*) perbankan yang tinggi di atas 20%. Kredit perbankan tumbuh tinggi dan berkontribusi penting dalam pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Berbagai perkembangan positif ini juga disertai dengan digitalisasi sistem pembayaran yang berkembang cepat, mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan makin tumbuhnya ekosistem ekonomi-keuangan digital nasional.

Kinerja positif perekonomian Indonesia pada 2018-2023 tersebut sebagai hasil sinergi yang erat antara Pemerintah dan Bank Indonesia. Kebijakan fiskal Pemerintah diarahkan pada stimulus bagi perekonomian melalui belanja modal untuk mendorong investasi dan program perlindungan sosial untuk mendorong konsumsi masyarakat. Bank Indonesia memprioritaskan kebijakan moneternya untuk menjaga stabilitas dari dampak rambatan global, sementara kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran difokuskan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada periode 2018-2023, sejumlah program transformasi sektoral terus dilakukan. Pembangunan infrastruktur terus ditingkatkan dalam berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk transportasi, perairan, perumahan, telekomunikasi, dan lainnya. Perbaikan iklim investasi ditempuh melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta



Kerja, sementara pengembangan dan penguatan stabilitas sistem keuangan ditempuh melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Ke depan, sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional tersebut perlu terus diperkuat dan diperluas untuk tetap menjaga stabilitas dan memperkuat transformasi ekonomi nasional. Berbagai capaian kemajuan selama ini menjadi landasan kuat untuk mencapai kinerja ekonomi nasional yang makin baik. Penguatan lebih lanjut sinergi bauran kebijakan perlu terus dilakukan guna mengatasi berbagai permasalahan yang ada serta mengantisipasi peluang dan tantangan perekonomian global yang penuh dinamika tinggi. Sinergi kebijakan juga penting untuk membawa kinerja ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045 bagi kesejahteraan rakyat.

Perkembangan ini tecermin pada sektor-sektor yang berorientasi ekspor dan sebagai hasil dari hilirisasi sumber daya alam seperti pertambangan dan penggalian, serta industri pengolahan yang tumbuh relatif tinggi. Sektor-sektor yang mencerminkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas seperti konstruksi, serta transportasi dan pergudangan juga mendukung kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Secara keseluruhan tahun, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2024 berada dalam kisaran 4,7-5,5%, tetap baik pada tahun 2025 dengan kisaran yang sama, dan akan meningkat lebih tinggi pada 2026 dalam kisaran 4,8-5,6%. Berbagai upaya perlu terus ditempuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Untuk itu, Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih tinggi, serta bersinergi erat dengan kebijakan stimulus fiskal Pemerintah. Dari sisi penawaran, kebijakan reformasi struktural perlu terus diperkuat untuk mendorong sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja. Upaya tersebut didukung dengan optimalisasi stimulus kebijakan makroprudensial dan akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran yang ditempuh Bank Indonesia.

Selain itu, sektor-sektor yang sejalan dengan kenaikan konsumsi masyarakat dan digitalisasi seperti Perdagangan Besar dan Eceran, Akomodasi dan Makanan-Minuman, serta Informasi dan Komunikasi, juga makin tumbuh tinggi. Demikian pula berbagai sektor jasa seperti Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Perusahaan, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang terus menunjukkan peningkatan. Perkembangan berbagai lapangan usaha ini menunjukkan pola pemulihan ekonomi Indonesia pasca-Covid-19 yang makin kuat, dari sektor-sektor yang makin pulih dari dampak memar (scarring effect) Covid-19 pada periode 2021-2022 ke sektor-sektor yang berorientasi ekspor pada periode 2022-2024, dan selanjutnya ke sektor-sektor untuk makin mendorong permintaan domestik ke depan. Ke depan, perkembangan sektor-sektor seperti Pertanian, Perdagangan khususnya eceran, Akomodasi dan Makanan-Minuman, Informasi dan Komunikasi khususnya digitalisasi, serta berbagai sektor jasa, perlu terus didorong karena tidak saja penting untuk pertumbuhan berkelanjutan, tetapi juga untuk penyerapan tenaga kerja yang lebih besar. Pola pertumbuhan dengan keseimbangan antara sektor padat modal dan padat tenaga kerja seperti inilah yang perlu ditingkatkan dan diperluas untuk memperkuat ketahanan dan transformasi ekonomi nasional yang lebih tinggi ke depan.

Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) diprakirakan membaik, yaitu menjadi sekitar 5,5% dari 4,0%, didorong oleh pariwisata dan ekspor pertambangan. Ekonomi wilayah Kalimantan juga tumbuh membaik dari 5,4% pada 2023 menjadi sekitar 5,5% pada 2024, karena pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan ekspor pertambangan. Demikian pula, pertumbuhan ekonomi wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) meningkat dari 6,5% pada 2023 menjadi sekitar 6,9% pada 2024, didukung oleh investasi industri dan pertambangan terkait dengan hilirisasi sumber daya alam. Ekonomi wilayah Jawa tumbuh sekitar 4,9% karena aktivitas industri dan perdagangan, sementara ekonomi wilayah Sumatera melambat dari 4,7% menjadi 4,5% karena aktivitas industri dan pertambangan ekonomi wilayah Jawa dan wilayah Sumatera diprakirakan akan kembali membaik dengan aktivitas perdagangan dan ekspor perkebunan.



2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan batas wilayah administrasi

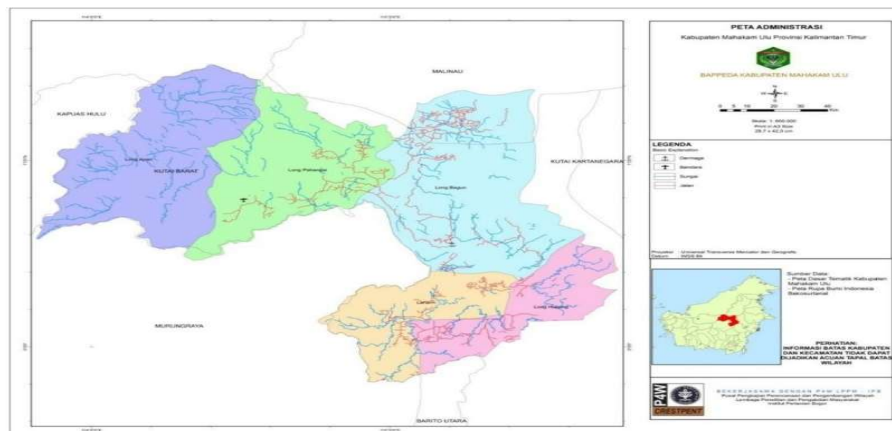
Kabupaten Mahakam Ulu dengan Ibu kota Ujoh Bilang merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten Kutai Barat yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013. Dengan luas sekitar 15.315 Km² atau kurang lebih 7,26% dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu merupakan salah satu kawasan perbatasan darat yang secara geostrategik merupakan pintu gerbang dari wilayah Indonesia ke wilayah Malaysia (Serawak).

Wilayah terluas adalah Kecamatan Long Apari sedangkan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Laham. Berdasarkan kondisi geografisnya, lokasi kecamatan terjauh dari ibu kota kabupaten adalah Kecamatan Long Apari dengan jarak 335 km. Daerah Kabupaten Mahakam Ulu didominasi Topografi bergelombang, dari kemiringan landai sampai curam dengan ketinggian berkisar antara 0-1.500 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan antara 0 – 60 persen. Daerah dataran rendah pada umumnya dijumpai di Kawasan sepanjang daerah aliran sungai (DAS). Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan memiliki ketinggian rata-rata lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 30 persen terdapat di bagian barat laut yang berbatasan dengan wilayah Malaysia.

Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Mahakam Ulu adalah:

1. Sebelah Utara: Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh dan Desa Long Sungai Barang Kecamatan Kayan Selatan di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, serta Sarawak (Malaysia Timur);
2. Sebelah Timur: Desa Muara Tuboq Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Sebelah Selatan: Desa Kelian Luar Kecamatan Long Iram dan Desa Tutung Kecamatan Linggang Bigung di Kabupaten Kutai Barat, serta Desa Tumbang Topus Kecamatan Uut Murung dan Desa Liang Nyering Kecamatan Sumber Barito di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Sebelah Barat: Desa Kariho Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Ulu Provinsi Kalimantan Barat.

Gambar 2.1
Peta Geografis Kabupaten Mahakam Ulu



Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu



2.1.1.2. Letak dan kondisi geografis

Secara geografis, Kabupaten Mahakam Ulu terletak antara 113°48'49'' - 115°45'49'' Bujur Timur, serta diantara 1°31'05'' Lintang Utara - 0°09'00'' Lintang Selatan. Batas wilayah Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.1.2
Letak Geografis dan Luas Kabupaten Mahakam Ulu

Kecamatan	Bujur Timur	Lintang	Luas (km ²)
1. Laham	114°46'05"-115°26'11"	0°24'LU-0°11'LU	901,80
2. Long Hubung	115°02'35"-115°45'49"	0°36'LU-0°09'LS	530,90
3. Long Bagun	114°53'35"-115°39'08"	1°23'LU-0°21'LU	4.971,20
4. Long Pahangai	114°22'54"-115°01'46"	1°26'LU-0°27'LU	3.420,40
5. Long Apari	113°48'49"-114°34'22"	1°31'LU-0°31'LU	5.490,70
Total			15.315,00

Sumber: RPJMD Mahakam Ulu Tahun 2021 – 2025

2.1.1.3. Topografi

Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu didominasi topografi bergelombang dari kemiringan landai hingga curam, dengan ketinggian berkisar 0–1.500 meter diatas permukaan laut (dpl) dengan kemiringan antara 0–25 persen. Kabupaten Mahakam Ulu mempunyai pegunungan yang membujur dari Utara ke Selatan di bagian Barat Laut berbatasan langsung dengan Malaysia, dengan ketinggian rata-rata lebih dari 1.000 meter dpl dengan kemiringan 30 persen. Pegunungan ini terjadi karena peristiwa geologi berupa lipatan dan sisipan sehingga bentuknya berjalur – jalur sejajar dengan garis pantai. Dengan kondisi fisiografi dan topografi yang demikian, maka pemukiman penduduk lebih banyak dijumpai di wilayah sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) sungai Mahakam dengan kondisi yang lebih datar. Kecamatan Long Bagun, Long Apari dan Long Pahangai berada pada ketinggian lebih dari 100 meter dpl, sedangkan wilayah kecamatan lainnya sebagian besar terletak di bawah ketinggian 100 meter dpl. Daerah – daerah yang terjal sebagian besar terletak di wilayah bagian Utara yang meliputi wilayah Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai. Dengan kondisi topografi yang demikian, diharapkan wilayah di bagian utara menjadi pelindung bagi kawasan di selatan yang kondisi pembangunannya lebih berkembang.

2.1.1.4. Hidrologi

Kabupaten Mahakam Ulu memiliki sepuluh sungai besar. Sungai-sungai tersebut terdapat di seluruh kecamatan, dimana masing-masing kecamatan dialiri oleh dua sungai. Selain untuk pertanian, sungai juga menjadi alat transportasi yang menghubungkan Kabupaten Mahakam Ulu dengan daerah lain seperti Kabupaten Kutai Barat. Selain sungai, secara geologis di Mahakam Ulu juga terdapat empat gunung: tiga diantaranya terdapat di Kecamatan Long Apari; dan satu di Kecamatan Long Hubung. Dari keempat gunung tersebut, gunung Tukon Pohan merupakan gunung tertinggi yaitu 1.417 meter dpl sedangkan Gunung Len yang



terdapat di Kecamatan Long Hubung merupakan gunung terendah dengan ketinggian 659 meter dpl.

Keberadaan sepuluh sungai besar tersebut berpotensi sebagai sumber air baku air bersih atau air minum. Potensi ini merupakan potensi besar untuk menyediakan sumber air baku untuk meningkatkan cakupan pelayanan air bersih maupun air minum.

2.1.1.5. Klimatologi

Karakteristik iklim Kabupaten Mahakam Ulu termasuk dalam kategori iklim tropika humida dengan rata-rata curah hujan tertinggi di bulan April dan terendah di bulan Agustus serta tidak menunjukkan adanya bulan kering atau sepanjang bulan dalam satu tahun selalu terdapat sekurang-kurangnya tujuh hari hujan. Karena terletak di daerah khatulistiwa, maka iklim Kabupaten Mahakam Ulu dipengaruhi oleh angin Muson Barat pada bulan November-April dan angin Muson Timur pada bulan Mei-Oktober. Daerah beriklim seperti ini tidak mempunyai perbedaan yang jelas antara musim hujan dan musim kemarau. Pada musim angin barat hujan turun sekitar bulan Agustus sampai bulan Maret, sedangkan pada musim timur hujan relatif kurang, hal ini terjadi pada sekitar bulan April sampai bulan September. Meskipun demikian, dalam tahun-tahun terakhir ini tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak ada hujan sama sekali, atau sebaliknya pada bulan-bulan yang seharusnya kemarau justru terjadi hujan yang jauh lebih panjang.

Temperatur rendah terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan Januari, sedangkan temperatur tinggi terjadi antara bulan Agustus sampai dengan bulan September. Secara umum Kabupaten Mahakam Ulu beriklim panas dengan suhu udara berkisar dari 25°C sampai dengan 35,8°C dengan rata-rata 28°C. Selain itu sebagai daerah beriklim tropis dengan habitat hutan yang luas, Kabupaten Mahakam Ulu mempunyai kelembaban udara relatif tinggi. Kelembaban udara paling rendah sebesar 49 persen yang dipantau melalui Stasiun Meteorologi Samarinda, sedangkan yang paling tinggi sebesar 97 persen dengan rata-rata 93 persen yang terpantau di Stasiun Meteorologi Balikpapan. Kedua stasiun tersebut merupakan stasiun klimatologi terdekat dari Kabupaten Mahakam Ulu.

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Kondisi penutupan lahan di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu secara umum merupakan penutupan vegetasi, hanya saja vegetasi hutannya sudah berkurang sangat banyak bila dibandingkan dengan kondisi tiga dekade sebelumnya. Sebagian besar hutannya sudah mengalami kegiatan pembalakan hutan dengan jumlah pohon yang semakin menurun. Sementara itu, hutan-hutan yang belum mengalami kegiatan pembalakan hutan terletak di wilayah pegunungan atau di wilayah sebelah Utara. Hutan yang masih hijau termasuk dalam status hutan lindung. Sementara itu, tutupan lahan yang berupa hutan sekunder dan semak belukar umumnya berada di hutan produksi. Hutan yang masih hijau termasuk hutan konservasi maupun hutan lindung ini kurang lebih berkisar 668.821 Ha dengan hutan tanaman sekitar 12.092 Ha, dari yang seharusnya berupa kawasan hutan $\pm$ 758.526 Ha. Hutan produksi memiliki luas $\pm$ 107.316 Ha. Lahan yang berupa hutan sekunder dan semak belukar seluas $\pm$ 1.020.529 Ha dan rawa-rawa seluas 152 Ha. Kawasan hutan produksi seharusnya menjadi



kawasan hutan produktif, namun kenyataan di lapangan hanyalah berupa hutan sekunder ataupun semak belukar.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu masih didominasi kawasan hutan, yang terdiri dari kawasan hutan lindung seluas 668.821 Ha, kawasan hutan produksi terbatas seluas 556.185 Ha dan kawasan hutan produksi seluas 107.316 Ha, sehingga luas total kawasan hutan adalah 86,99 persen dari luas Kabupaten.

Hutan lindung di Kabupaten Mahakam Ulu sebagian besar masih didominasi oleh vegetasi alami yang terdapat di daerah hulu sungai Mahakam dan merupakan daerah tangkapan air (*catchment area*). Hutan produksi terbatas masih didominasi oleh vegetasi alami yang keberadaannya tersebar di wilayah Utara, sedangkan hutan produksi yang keberadaan vegetasinya terdiri dari tanaman kayu dan semak belukar juga terletak di sebelah Utara.

2.1.1.7. Demografi

Dari segi demografi Pada Tahun 2024 Jumlah Penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2024 menurut data registrasi adalah 39.319 jiwa. Sedangkan menurut data proyeksi dari Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Mahakam Ulu tahun 2024 adalah 34.250 jiwa. Menurut data hasil registrasi, penduduk yang paling banyak berada pada Kecamatan Long Bagun. Hal ini berhubungan positif karena mengingat Kecamatan Long Bagun merupakan Kecamatan Ibu kota Kabupaten Mahakam Ulu. Kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya setelah Long Bagun adalah Kecamatan Long Hubung yang berjumlah 9.247 jiwa. Sedangkan penduduk yang paling kecil ada di Kecamatan Laham yaitu sebesar 3.189 jiwa.

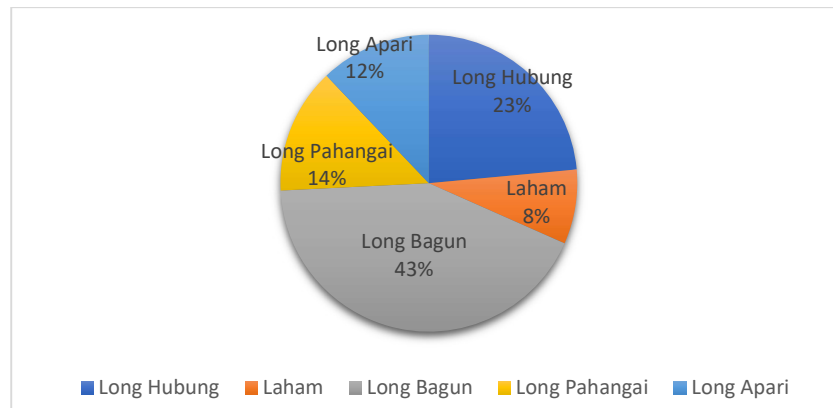
Tabel 2.1.1.7
Jumlah Penduduk Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 – 2024.

No	Tahun	Jumlah Penduduk
1	2018	28.833
2	2019	30.321
3	2020	35.010
4	2021	32.969
5	2022	33.535
6	2023	38.498
7	2024	39.319

Sumber: Badan Pusat Statistik Mahakam Ulu.



Gambar 2.2
Distribusi Penduduk Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu.

Meskipun Long Bagun merupakan Kecamatan yang berpenduduk terbanyak di Kabupaten Mahakam Ulu, belum tentu Kecamatan Long Bagun menjadi wilayah yang memiliki kepadatan penduduk per km terbesar. Kepadatan penduduk per km bisa dicari dengan membandingkan jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Diketahui bahwa daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi ada di Kecamatan Long Hubung yaitu sebesar 6. Yang artinya ada sekitar 6 orang per kilometernya.

Kemudian dilanjutkan dengan Kecamatan Long Bagun yang memiliki kepadatan penduduk yang terbanyak nomor dua yaitu sebesar 3. Kemudian, kepadatan penduduk paling kecil adalah Kecamatan Laham, Long Pahangai, dan Long Apari yaitu sebesar 1 orang per kilometernya.

2.1.2 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (*output*) dikurangi biaya antara (biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi termasuk didalamnya Biaya Upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan). Nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (Provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan dua pendekatan yaitu Lapangan Usaha dan Pengeluaran PDRB. Dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. Jumlah Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2024 adalah sebesar 3.773,97 miliar. Menurut lapangan usaha sektor yang paling besar PDRB-nya adalah sektor pertanian,



kehutanan, dan perikanan yang mencapai 2.794,10 miliar rupiah, kemudian dilanjutkan dengan sektor konstruksi yang merupakan sektor kedua terbesar yaitu sebesar 264,72 miliar rupiah.

Jika kita lihat dari sudut pandang pengeluaran, diketahui bahwa peran pembentukan modal tetap bruto menjadi peran yang penting dalam menyumbangkan PDRB. PDRB dari Pembentukan modal tetap bruto sebesar 1.1124,71 miliar rupiah, kemudian dilanjutkan dengan pengeluaran net ekspor barang dan jasa sebesar 1.012,99 miliar rupiah. Hal ini dinilai positif karena jika ditinjau dari laju pertumbuhannya, laju pertumbuhan Mahakam Ulu tahun 2024 adalah sebesar 3,6 persen, meningkat 1,2 persen dari tahun sebelumnya, Pertumbuhan tersebut didukung oleh pertumbuhan di banyak lapangan usaha, Pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi. Jika ditinjau dari struktur distribusi PDRB, diketahui bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor yang paling banyak menyumbangkan perannya pada PDRB, yaitu sebesar 74,03 persen.

Tabel 2.1.2.1
PDRB Kabupaten Mahakam Ulu ADHB 2020-2024 (Juta Rp)

No.	Kategori/Lapangan Usaha	2020	2021*	2022**	2023***	2024***
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.079,15	2.221,07	2.362,15	2.507,64	2.794,10
B	Pertambangan dan Penggalian	186,81	197,14	199,48	213,71	238,45
C	Industri Pengolahan	14,67	14,98	15,78	16,38	17,73
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,7	0,81	0,94	1,18	1,41
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,92	1,02	1,13	1,29	1,45
F	Konstruksi	179,10	203,28	213,22	251,09	264,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	138,69	148,22	159,93	174,66	185,61
H	Transportasi dan Pergudangan	98,15	112,41	135,80	156,59	171,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,55	3,76	4,14	4,59	5,05
J	Informasi dan Komunikasi	5,89	6,71	7,83	8,63	9,48
K	Jasa Keuangan	2,90	3,19	3,80	4,50	5,65
L	Real Estate	4,69	5,11	5,35	5,48	5,78
M	Jasa Perusahaan	0,85	0,89	0,94	1,01	1,10
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	39,39	42,47	46,11	48,72	57,25
O	Jasa Pendidikan	5,37	5,83	6,34	6,81	7,09
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,54	4,30	4,55	4,88	5,17
Q	Jasa Lainnya	1,61	1,67	1,80	2,01	2,19
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	2.765,99	2.972,87	3.169,29	3.409,17	3.773,97

Catatan/Note. *=Angka Sementara; **= Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Kabupaten Mahakam Ulu.



2.1.2.2 Laju Inflasi

Inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus-menerus (*continue*). Dalam aplikasinya, inflasi dapat menjadi indikator langsung untuk melihat tingkat perubahan atau proses kenaikan/penurunan harga yang berlangsung secara terus-menerus dan saling memengaruhi.

Berkaitan dengan mekanisme pasar, inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Bila inflasi dihitung menggunakan pendekatan deflator PDRB, maka sepanjang 2020-2024 inflasi tertinggi terjadi di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang pada tahun 2024 mencapai 73,56% dan yang terkecil adalah di sektor pengadaan listrik dan gas serta sektor jasa perusahaan yang masing-masing memiliki nilai sama di tahun 2023 yaitu 0,03%. Secara keseluruhan nilai inflasi di Mahakam Ulu tahun 2023 dengan deflator PDRB adalah 99,59%, turun dibandingkan tahun 2018 yang besarnya 99,67%. Pendekatan PDRB deflator ini menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa sementara untuk Indeks Harga Konsumen menunjukkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. PDRB deflator juga dipergunakan sebagai *proxy* dalam hal informasi Indeks Harga Konsumen belum tersedia.

Tabel 2.1.2.2
Perkembangan Inflasi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

No.	Kategori/Lapangan Usaha	2020	2021*	2022**	2023***	2024***
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.357,67	1.347,99	1.348,64	1.367,48	1.406,67
B	Pertambangan dan Penggalian	115,96	120,48	119,37	124,17	131,36
C	Industri Pengolahan	10,66	10,61	10,64	10,74	11,24
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,51	0,59	0,67	0,81	0,97
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,68	0,72	0,77	0,81	0,88
F	Konstruksi	103,45	117,39	117,07	132,63	137,52
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	75,38	80,52	86,21	90,69	95,05
H	Transportasi dan Pergudangan	61,56	66,58	74,18	77,94	82,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,08	2,18	2,34	2,50	2,68
J	Informasi dan Komunikasi	5,25	5,93	6,71	7,30	7,92
K	Jasa Keuangan	1,17	1,27	1,49	1,82	2,30
L	Real Estate	3,40	3,63	3,71	3,74	3,88
M	Jasa Perusahaan	0,58	0,59	0,59	0,61	0,64
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	19,76	21,27	23,06	24,31	28,77
O	Jasa Pendidikan	2,82	3,06	3,32	3,51	3,62
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,11	2,55	2,68	2,82	2,92
Q	Jasa Lainnya	0,89	0,92	0,99	1,06	1,13
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	1.763,93	1.786,29	1.802,46	1.852,96	1.919,65



2.1.2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut dirangkum kedalam satu indikator tunggal, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dinamika indikator IPM tersebut memberikan gambaran mengenai perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Penyajian IPM menurut daerah memungkinkan setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, maupun disparitas antar daerah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur tahun 2024 mengalami peningkatan di semua dimensi, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. IPM Kalimantan Timur tahun 2024 tercatat sebesar 78,79, naik 0,59 poin atau 0,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 78,20. Selama 2020–2024, IPM Kalimantan Timur rata-rata meningkat sebesar 0,93 persen per tahun. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,94 tahun, meningkat 0,22 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 14,02 menjadi 14,03 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,03 tahun, dari 9,99 tahun menjadi 10,02 tahun pada tahun 2024. Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Susenas Maret. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat Rp591 ribu (4,48 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret. lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 4,03 persen per tahun. Pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur cukup bervariasi. Sejak tahun 2023, status pembangunan manusia di seluruh kabupaten telah berstatus “Tinggi” dan seluruh kota berstatus “Sangat Tinggi”.

Pembangunan manusia dengan status “Tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) dicapai oleh tujuh kabupaten, yaitu Kabupaten Berau (77,17), Kabupaten Kutai Kartanegara (76,57), Kabupaten Kutai Timur (75,90), Kabupaten Paser (75,13), Kabupaten Penajam Paser Utara (74,94), Kabupaten Kutai Barat (74,76) dan Kabupaten Mahakam Ulu (70,79). Sementara itu, pembangunan manusia dengan status “Sangat Tinggi” ($\text{IPM} \geq 80$) dicapai oleh tiga kota, yaitu Kota Samarinda dengan nilai IPM yang tertinggi sebesar 83,11, kemudian diikuti oleh Kota Balikpapan (82,62) dan Kota Bontang (82,49).

Dengan demikian, maka diharapkan setiap daerah dapat terpacu untuk berupaya meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan kualitas SDM-nya. Selain angka IPM, publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 juga menyajikan data yang relevan dengan indikator IPM, yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Penyajian data-data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi dan capaian pembangunan manusia di Kabupaten Mahakam Ulu.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Mahakam Ulu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) maupun horizontal (kehidupan lebih baik di segala



bidang). Pembangunan daerah akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketerampilan serta mampu mencukupi kebutuhan, baik primer, sekunder maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia salah satunya dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia.

Pada tahun 2024 Indeks Pembangunan Manusia di Kota Samarinda menduduki peringkat pertama dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebesar 82,81 dan Kabupaten Mahakam Ulu merupakan Kabupaten dengan IPM terendah, yaitu 70,35.

Berdasarkan metode penghitungan terbaru, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup angka harapan hidup (kesehatan), harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (pendidikan) serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi). IPM Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2024 mencapai 70,79 meningkat dibandingkan tahun 2023 yang besarnya 69,59.

Tabel 2.1.2.3.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Mahakam Ulu 2018-2024

No	Tahun	IPM
1	2018	66.67
2	2019	67.58
3	2020	67.09
4	2021	67.95
5	2022	68.75
6	2023	69,59
7	2024	70.79

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.1.2.3.2
Rincian Indikator IPM Kabupaten Mahakam Ulu 2018 – 2024

Tahun	Pengeluaran Perkapita (Ribuan/kapita/tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Umur Harapan Hidup (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
2018	7653	12.48	71.56	7.69
2019	8008	12.5	71.9	7.89
2020	7534	12,51	72,1	7,97
2021	7802	12,61	72,33	8,18
2022	8215	12,62	72,35	8,36
2023	8696	12,63	72,46	8,49
2024	9126	12,78	72,65	8,50

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024, diolah.

Dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur nilai IPM Mahakam Ulu ini masih yang terkecil. Hal ini sangat wajar terjadi mengingat Mahakam Ulu merupakan daerah yang belum lama terbentuk sehingga memiliki kondisi yang sangat berbeda dengan daerah lain dalam berbagai hal, khususnya infrastruktur. Penurunan IPM Kabupaten Mahakam Ulu di tahun 2023 dipicu oleh faktor Kenaikan pengeluaran perkapita per bulan dari Rp8.696.000 menjadi 9.126.000 di Tahun 2024 atau naik 4,95%. Hal ini disebabkan oleh lemahnya daya beli



masyarakat akibat pandemi Covid-19 yang terjadi sehingga penghasilan masyarakat sangat tertekan. Selain itu masih rendahnya IPM Kabupaten Mahakam Ulu juga dipengaruhi komponen Harapan Lama Sekolah serta Rata-rata Lama Sekolah yang menempati urutan terakhir diantara daerah lain di Kalimantan Timur.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP, indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

1. Rendah (< 60)
2. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
3. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
4. Sangat Tinggi (> 80).

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 adalah sebesar 70,79 poin, dibandingkan Tahun 2023 sebesar 69,59 poin mengalami peningkatan sebesar 1,2 poin. Peningkatan/penurunan IPM tersebut disebabkan meningkatnya/ menurunnya umur harapan hidup saat lahir (AHH) dan/atau harapan lama sekolah (HLS) dan/atau Rata – rata Lama Sekolah (RLS), dan/atau standar hidup, berkaitan dengan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 72,65 tahun pada Tahun 2023, lebih lama 0,19 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun 2023 sebesar 72,46 tahun. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama tahun 2024 sebesar 8,50 tahun dan tahun 2023 sebesar 8,49 tahun lebih lama 0,1. Sementara, Pengeluaran per Kapita Disesuaikan sebesar Rp8,696,00 tahun 2023 dan naik menjadi Rp9.126,00 pada tahun 2024 atau naik 4,95% IPM di Kabupaten Mahakam Ulu pada saat ini berada pada urutan 10 dari Kab/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

2.1.2.4 Tingkat Kemiskinan

Problem kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang kerap dihadapi negara berkembang, tidak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia, pemerintah Badan Pusat Statistik menghitung kemiskinan berdasarkan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk 2020-2035 Kalimantan Timur di Provinsi menurut kabupaten/ kota, Kota Samarinda merupakan kota yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak di tahun 2025, yaitu sebanyak 865.31 ribu jiwa (20,28%), sedangkan jumlah terkecil berada di penduduk Kabupaten Mahakam Ulu, yaitu sebesar 34.74 ribu jiwa (0,81%). Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu, sebesar 4,21%. Penduduk miskin terbanyak terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebanyak 59 ribu orang. Sedangkan penduduk miskin di Kabupaten Mahakam Ulu paling sedikit, yaitu sebanyak 2,9 ribu orang.

Pada tahun 2024 Indeks Pembangunan Manusia di Kota Samarinda menduduki peringkat pertama dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebesar 82,81 dan Kabupaten Mahakam Ulu merupakan Kabupaten



dengan IPM terendah, yaitu 70,35. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita setiap bulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu.

Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan, semakin tinggi angkanya, semakin parah kemiskinannya.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Mahakam Ulu, data pada Mahulu dalam angka 2025 tercatat 10,75%. Jumlah ini turun 5,86% dibandingkan tahun sebelumnya yang dilaporkan 11,38%, Perkembangan persentase penduduk miskin dalam sembilan tahun di kabupaten Mahakam Ulu dalam tren turun, bergerak dari kemiskinan sebesar 11,38% menuju ke 10,75%. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), total penduduk pada 2024 lalu di kabupaten ini berjumlah 39.319 jiwa.

Tabel 2.1.2.4
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Mahakam Ulu

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/(Turun) (%)
1	Tingkat Kemiskinan Kab/Kota (%)	11,38	10.75	5,86

Sumber Dokumen: kaltim.bps.go.id

Dibandingkan dengan wilayah lain di Kalimantan Timur, persentase penduduk miskin pada tiga kabupaten ini masuk dalam daftar urutan satu besar. Wilayah lain dengan persentase penduduk miskin di urutan teratas di provinsi Kalimantan Timur adalah Kota Samarinda 82,81%, Kota Bontang 82,42% dan Balikpapan 82,24%. Persentase penduduk miskin di Kalimantan Timur pada 2024 yakni:

- Kab. Mahakam Hulu 70,35 %
- Kab. Kutai Barat 74,5 %
- Kab. Paser 74,7 %
- Kab. Kutai Timur 75,53 %
- Kab. Kutai Kartanegara 75,91 %
- Kab. Penajam Paser Utara 73,9 %
- Kab. Berau 76,66 %
- Kota Samarinda 82,81 %
- Kota Bontang 82,42 %
- Kota Balikpapan 82,24 %



2.1.2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 adalah sebesar 2,51% sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.2.5
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Mahakam Ulu

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/(Turun) (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	2,09	2,51	0.42

Sumber Dokumen: kaltim.bps.go.id

Jumlah penduduk angkatan kerja di Kalimantan Timur pada tahun 2023 tercatat sebanyak 1,95 juta penduduk. Sementara jumlah penduduk bukan angkatan kerja ada sebanyak 1,02 juta penduduk.

Dari jumlah tersebut, dapat diperoleh bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kalimantan Timur pada tahun 2023 adalah 65,57 persen. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan TPAK pada tahun 2022 yang mencapai 64,73 persen. Selain TPAK, indikator lain yang sering digunakan dalam penyajian data ketenagakerjaan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT menghitung banyaknya jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Adapun TPT Kalimantan Timur pada Agustus 2023 adalah 5,31 persen. Nilai ini turun bila dibandingkan dengan Agustus 2022 yang mencapai 5,71 persen. Bila ditinjau menurut wilayah, Kota Bontang menjadi wilayah dengan TPT terbesar, yakni 7,74 persen pada 2023. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2024 yaitu 5,31%, mengalami penurunan signifikan sebesar 0,40 persen poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dalam komposisi angkatan kerja Provinsi Kalimantan Timur pada Agustus 2023, terdapat 1.847.295 orang penduduk yang bekerja, sementara 103.565 orang lainnya merupakan pengangguran. Jika dibandingkan dengan data Agustus 2022, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 98.058 orang. Jumlah penduduk yang bekerja meningkat sebanyak 100.375 orang, sementara pengangguran mengalami penurunan sebanyak 2.317 orang. Perbandingan dengan kondisi pada Agustus 2021 juga menunjukkan peningkatan signifikan, dengan jumlah angkatan kerja yang meningkat sebanyak 104.313 orang, penduduk yang bekerja naik sebanyak 126.934 orang, dan pengangguran turun sebanyak 22.621 orang.

Bontang menjadi kontributor tertinggi terhadap TPT di Kalimantan Timur dengan angka mencapai 7,74%, diikuti oleh Kubar dengan 6,16%, dan PPU yang mencatatkan tingkat terendah sebesar 2,07%. Tingkat Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur pada periode Agustus 2023 adalah Bontang 7,74%, Kutai barat 6,16% , Balikpapan 6,09%, Kutai Timur 5,93%, Samarinda 5,92%, Berau 4,95%, Paser 4,72%, Kutai Kartanegara 4,05%, Mahakam Ulu 2,09%, dan Penajam Paser Utara: 2,07%



2.1.2.6 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indek Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

1. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
2. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Realisasi pencapaian *Gini Ratio* Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah sebesar 0,322 poin sementara di tahun 2024 sebesar 0,321 turun 0,001 poin sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.2.6.1
Gini Ratio Provinsi Kalimantan Timur

No	Gini Ratio	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun
1	Tingkat Kab/Kota	-	-	-
2	Tingkat Provinsi	0,322	0,321	0,001

Sumber Dokumen: kaltim.bps.go.id

Selain itu sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur oleh gini ratio di Kalimantan Timur Pada Maret 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kalimantan Timur yang diukur dengan Gini Ratio adalah sebesar 0,321. Angka ini turun 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,322. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,325, turun dibanding Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,328. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,289, turun dibanding Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,292.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah pada Maret 2024 sebesar 21,24. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 21,16 persen dan untuk daerah perdesaan, angkanya sebesar 22,46 persen. Hal ini mengindikasikan distribusi pengeluaran pada Maret 2024 berada pada kategori ketimpangan rendah.

Tabel 2.1.2.6.2
Gini Ratio Kabupaten Mahakam Ulu

No	Gini Ratio	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun
1	Mahakam Ulu	0,288	0,330	0,042

2.1.2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Lajunya Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp858,43 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp570,82 triliun, serta PDRB per kapita sebesar Rp212,18 juta. Ekonomi Provinsi



Kalimantan Timur tahun 2024 tumbuh sebesar 6,17 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 16,46 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 11,78 persen. Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Triwulan IV-2024 terhadap Triwulan IV- 2023 tumbuh sebesar 6,12 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,46 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,63 persen. Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Triwulan IV-2024 terhadap Triwulan III-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 2,89 persen (q-to-q).

Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,85 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 66,14 persen. Ekonomi pada semua provinsi di Pulau Kalimantan pada tahun 2024 tumbuh positif. Provinsi Kalimantan Timur menyumbang kontribusi tertinggi pada pembentukan nilai tambah regional Kalimantan sebesar 47,29 persen.

Secara kumulatif (c-to-c), ekonomi Kalimantan Timur tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 6,17 persen. Kinerja perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2024 ini sedikit melambat dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 yang tumbuh sebesar 6,22 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 didorong oleh capaian kinerja yang positif di seluruh lapangan usaha di Kalimantan Timur. Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 16,46 persen; lalu diikuti oleh Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 16,41 persen; dan Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 13,60 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan sebagai lapangan usaha utama perekonomian Provinsi Kalimantan Timur juga tumbuh sebesar 6,76 persen. Berdasarkan PDRB Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, struktur perekonomian Kalimantan Timur belum mengalami perubahan yang berarti. Lima lapangan usaha yang mendominasi perekonomian Kalimantan Timur adalah Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan dengan peranan sebesar 38,38 persen; lalu diikuti oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 18,26 persen; Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 11,87 persen; Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 8,66 persen; dan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,90 persen. Jika dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan menjadi lapangan usaha yang memberikan andil positif terbesar, yaitu sebesar 3,12 persen. Kemudian diikuti oleh Lapangan Usaha Konstruksi dengan andil positif sebesar 1,17 persen; Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran dengan andil positif sebesar 0,51 persen; dan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan andil positif sebesar 0,29 persen.

Tabel 2.1.2.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024

No	Uraian	Kabupaten/Kota				
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,52	-0,22	1,27	0,91	1,23

Sumber Dokumen: kaltim.bps.go.id



2.2 Kebijakan Keuangan

2.2.1 Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.

Pendapatan daerah diperoleh melalui sumber – sumber meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah. Adapun komponen Pendapatan Daerah yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah berasal dari Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer berasal Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar daerah.
3. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk:
 - a. Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Infrastruktur yang menopang kemajuan perekonomian rakyat Kabupaten Mahakam Ulu.
 - b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Mahakam Ulu dengan melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Mahakam Ulu, terutama pendidikan dasar gratis bagi seluruh penduduk usia sekolah, akses kesehatan yang terjangkau, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh penduduk Mahakam Ulu, terutama jaminan hidup bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar.
2. Alokasi belanja diarahkan pada kegiatan-kegiatan penyediaan / penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan, terutama melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM, BUMD, dan dukungan terhadap berbagai bentuk lembaga keswadayaan ekonomi rakyat desa lainnya di Kabupaten Mahakam Ulu, serta kegiatan-kegiatan yang mendukung penanganan dampak inflasi.
3. Belanja penyelenggaraan untuk urusan pilihan lebih diutamakan dalam pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian rakyat dalam arti luas, terutama melalui pengembangan agroindustri, olahan pangan lokal, dan pemberdayaan kelembagaan usaha tani rakyat dalam menumbuhkan kembangkan ekonomi rakyat untuk kesejahteraan masyarakat Mahakam Ulu.



Alokasi belanja daerah didasarkan pada prinsip efisiensi, efektifitas, responsif, transparansi, akuntabilitas, adil dan wajar/patut dalam pengelolaannya.

2.2.3 *Mandatory Spending*

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. *Mandatory spending* ini bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Belanja mandatori harus mendapat alokasi besaran tertentu dalam APBD tersebut meliputi, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dana transfer umum (DTU), dan alokasi dana desa (ADD). APBD sebagai instrumen kebijakan keuangan daerah harus dapat melaksanakan mandat perundang-undangan secara konsisten.

Mandatory spending dalam tata keuangan Pemerintah Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
2. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah (UU APBN).
3. Pendanaan pelaksanaan pengawasan bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota. Pengawasan ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi proses reviu usulan anggaran, audit pelaksanaan kegiatan dan pemantauan tindak lanjut. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024)
4. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Tabel 2.2.3
***Mandatory Spending* Kabupaten Mahakam Ulu TA 2024**

No	Uraian	Alokasi (Rp)	APBD TA 2024 (Rp)	% Alokasi	Realisasi (Rp)	Realisasi %
1	Belanja Fungsi Bidang Pendidikan	280.004.888.897,00	2.767.000.000.000,00	10,12%	223.837.103.323,00	79,94%
2	Belanja Infrastruktur	875.063.020.034,59	2.767.000.000.000,00	31,62%	672.306.244.823,00	76,83%
3	Pengawasan	20.070.731.346,00	2.767.000.000.000,00	0,73%	14.197.238.288,00	70,74%
4	Dana Desa (ADD)	215.818.582.300,00	2.767.000.000.000,00	7,80%	202.937.312.713,00	94,03%



Mandatory Spending pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024 yang dituangkan dalam APBD TA 2024 adalah sebagai berikut:

1. Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan sebesar Rp280.004.888.897,00 dari total Belanja Daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.767.000.000.000,00 atau sebesar 10,12%. Tahun anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu belum dapat memaksimalkan APBD untuk dapat memenuhi *mandatory spending* bidang Pendidikan yaitu minimal sebesar 20% karena tahun anggaran 2024 Pemerintah Daerah berfokus pada pelaksanaan kembali atas Pembangunan infrastruktur yang ditunda pada tahun 2023 karena harus membayar kewajiban daerah kepada pihak ketiga.
2. Alokasi Belanja Infrastruktur Rp875.063.020.034,59 dari total belanja dalam APBD TA 2024 Rp2.767.000.000.000,00 atau sebesar 31,62%.
3. Alokasi Belanja Pengawasan Rp 20.070.731.346,00 dari total belanja dalam APBD TA 2024 Rp 14.197.238.288,00 atau sebesar 0,73%.
4. Alokasi dana Desa (ADD) dalam APBD TA 2024 adalah sebesar Rp215.818.582.300,00 dari total belanja daerah sebesar Rp2.767.000.000.000,00 atau sebesar 7,80% dan belum mencapai 10% karena TAPD mengalokasikan anggaran ADD dalam APBD mengacu pada realisasi tahun sebelumnya dan dalam hasil evaluasi APBD TA 2024 perhitungan persentase alokasi ADD dibandingkan alokasi ADD terhadap total keseluruhan Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah.

Realisasi *Mandatory Spending* Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Fungsi Pendidikan dari total alokasi anggaran sebesar Rp280.004.888.897,00 mencapai realisasi sebesar Rp223.837.103.323,00 atau 79,94%, belanja fungsi Pendidikan ini ditujukan untuk semua program dengan fungsi Pendidikan.
2. Belanja Infrastruktur TA 2024 dari total alokasi anggaran sebesar Rp875.063.020.034,59 mencapai realisasi sebesar Rp672.306.244.823,00 atau sebesar 76,83%.
3. Belanja Pengawasan TA 2024 dari total Rp20.070.731.346,00 mencapai realisasi sebesar Rp14.197.238.288,00 atau sebesar 70,74%.
4. Dana Desa merupakan belanja pemerintah kampung yang dilaksanakan Pemerintah Kampung berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan pemerintah kampung dalam Peraturan Kampung yang disetujui oleh Badan Pemusyawaratan Kampung. Pada Tahun 2024 Alokasi Dana Desa sebesar Rp215.818.582.300,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp202.937.312.713,00 atau sebesar 94,03%.



2.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Kinerja APBD yang dicapai Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Laporan Realisasi Anggaran

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
4	PENDAPATAN – LRA	1.877.265.573.225,00	2.045.265.571.153,91	108,95	2.226.146.688.913,58
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.853.273.323,00	91.555.695.176,22	543,25	47.720.635.931,58
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	3.622.500.000,00	3.112.237.291,48	85,91	2.964.512.089,34
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	1.900.550.000,00	1.191.385.000,00	62,69	905.261.000,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	278.732.980,00	389.351.382,74	139,69	377.742.245,57
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	11.051.490.343,00	86.862.721.502,00	785,98	43.473.120.596,67
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.779.307.285.180,31	1.884.997.792.133,00	105,94	2.173.410.578.138,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.587.008.366.180,31	1.709.076.158.623,00	107,69	1.962.861.330.965,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	929.277.846.734,31	1.134.688.119.446,00	122,10	1.370.928.837.554,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	510.592.141.446,00	434.344.822.000,00	85,07	458.913.738.421,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	69.006.517.000,00	66.605.764.716,00	96,52	52.387.489.710,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	26.445.833.000,00	21.189.646.525,00	80,12	21.771.118.268,00
4.2.01.02.01	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	10.599.493.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	51.686.028.000,00	52.247.805.936,00	101,09	48.260.654.012,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	192.298.919.000,00	175.921.633.510,00	91,48	210.549.247.173,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	163.219.225.000,00	146.841.939.510,00	89,97	172.129.247.173,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	29.079.694.000,00	29.079.694.000,00	100,00	38.420.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	81.105.014.721,69	68.712.083.844,69	84,72	5.015.474.844,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	81.105.014.721,69	68.712.083.844,69	84,72	5.015.474.844,00
5	BELANJA	2.767.000.000.000,00	2.208.676.613.242,73	79,82	1.716.184.315.493,57
5.1	BELANJA OPERASI	1.428.337.880.095,99	1.138.435.336.546,73	79,70	986.223.235.217,57
5.1.01	Belanja Pegawai	288.315.280.554,00	243.806.314.317,00	84,56	215.070.000.383,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.071.368.793.848,89	848.315.300.662,73	79,18	724.792.105.103,57
5.1.04	Belanja Subsidi	3.250.000.000,00	19.225.102,00	0,59	189.840.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	59.607.119.693,10	43.300.192.284,00	72,64	43.843.744.008,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.796.686.000,00	2.994.304.181,00	51,66	2.327.545.723,00
5.2	BELANJA MODAL	1.097.104.383.641,59	863.671.053.927,00	78,72	564.265.297.564,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.500.000.000,00	746.620.000,00	49,77	2.455.361.692,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	167.552.928.347,00	145.457.685.363,00	86,81	53.837.498.492,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	145.723.650.737,36	77.472.457.897,00	53,16	140.819.291.410,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	729.339.369.297,23	594.833.786.926,00	81,56	337.386.866.136,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	409.728.600,00	390.541.000,00	95,32	28.209.356.534,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	52.578.706.660,00	44.769.962.741,00	85,15	1.556.923.300,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	25.739.153.962,42	3.632.910.056,00	14,11	10.800.000,00
5.3.01	Belanja Tak Terduga	25.739.153.962,42	3.632.910.056,00	14,11	10.800.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	215.818.582.300,00	202.937.312.713,00	94,03	165.684.982.712,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	215.818.582.300,00	202.937.312.713,00	94,03	165.684.982.712,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(889.734.426.775,00)	(163.411.042.088,82)	18,37	509.962.373.420,01
6	PEMBIAYAAN	889.734.426.775,00	889.740.981.775,38	100	389.797.614.755,37
6.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	889.734.426.775,00	889.740.981.775,38	100	401.947.614.755,37
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	889.734.426.775,00	889.734.426.775,38	100	401.896.491.955,37



Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	25.561.400,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	6.555.000,00	0,00	25.561.400,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100	12.150.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100	12.150.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	889.734.426.775,00	889.740.981.775,38	100	389.797.614.755,37
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	726.329.939.686,56	0,00	899.734.426.775,38

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Realisasi Pendapatan yang diperoleh selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai Rp2.045.265.571.153,91 atau 108,95% dari anggaran sebesar Rp1.877.265.573.225,00.

Realisasi pendapatan tahun 2024 sebesar Rp2.045.265.571.153,91 mengalami penurunan sebesar Rp180.881.117.759,67 atau 0,08% dibanding dengan realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp2.226.146.688.913,58. Kenaikan pendapatan terjadi pada kelompok Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp43.835.059.244,64 atau sebesar 0,92% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp47.720.635.931,58. Pendapatan Transfer mengalami penurunan sebesar Rp288.412.786.005,00 atau sebesar 0,13% dari realisasi tahun 2023 Rp2.173.410.578.138,00, sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp63.696.609.000,69 atau sebesar 12,70% dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp5.015.474.844,00.

Realisasi Pendapatan Transfer Pusat sebesar Rp1.709.076.158.623,00 dari target sebesar Rp1.587.008.366.180,31 merupakan sumber dana terbesar untuk membiayai belanja daerah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Realisasi Pendapatan transfer pusat dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.3.1
Penggunaan Pendapatan Transfer Pusat

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	929.277.846.734,31	1.134.688.119.446,00	122,10	Untuk membiayai belanja daerah yang tidak ditentukan sumber dana atas program dan kegiatan yang dilaksanakan seluruh SKPD lingkup Kabupaten Mahakam Ulu
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	510.592.141.446,00	434.344.822.000,00	85,07	Dau yang tidak ditentukan penggunaannya dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang tidak ditentukan sumber dana atas program dan kegiatan yang dilaksanakan seluruh SKPD lingkup Kabupaten Mahakam Ulu, dan Dau yang ditentukan penggunaannya di gunakan untuk Dinas Pekerjaan Umum , Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan sesuai dengan rencana penggunaan
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	69.006.517.000,00	66.605.764.716,00	96,52	Untuk membiayai Kegiatan pada bidang: 1. Pendidikan: Pembangunan fasilitas pendidikan SD dan SMP



No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
					2. Kesehatan dan Keluarga Berencana: Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi, Kefarmasian, Penguatan Sistem Kesehatan, Keluarga Berencana, dan pengendalian Penyakit
					3. Jalan
					4. Sanitasi
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	26.445.833.000,00	21,189.646.525,00	80,12	Untuk membiayai Kegiatan pada bidang: 1. Pendidikan: Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, dan Dana Bos 2. Kesehatan dan Keluarga Berencana: Bantuan Operasional Kesehatan, dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana 3. Penanaman Modal: Dana Fasilitas Penanaman Modal
5	Dana Desa	51.686.028.000,00	52.247.805.936,00	101,09	Untuk membiayai Anggaran Belanja Desa

Jumlah keseluruhan anggaran belanja tahun 2024 sebesar Rp2.767.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.208.676.613.242,73 atau 79,82%. Realisasi belanja tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp492.492.297.749,16 atau 28,70% dibanding realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.716.184.315.493,57

Dalam melaksanakan APBD pemerintah kabupaten Mahakam Ulu berpedoman terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Adapaun program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.2
Program Prioritas RKPD Kabupaten Mahakam Ulu TA 2024

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KODE/PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Meningkatnya konektivitas antar wilayah kecamatan	Program Penyelenggaraan Jalan	688.734.870.429,00	592.105.927.109,00
Dinas Perhubungan	Meningkatnya konektivitas antar wilayah kecamatan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9.854.610.718,00	8.492.230.007,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Meningkatnya cakupan rumah tangga yang teraliri air bersih	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	59.840.288.107,00	30.690.805.332,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Meningkatnya cakupan rumah tangga pengguna listrik	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	23.916.149.428,00	19.887.834.162,00
Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian	Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Program Aplikasi Informatika	20.633.009.500,00	16.403.644.913,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Meningkatnya jumlah rumah yang memenuhi persyaratan rumah layak huni	Program Pengembangan Perumahan	552.176.540,00	522.472.300,00



PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KODE/PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Meningkatnya jumlah rumah yang memenuhi persyaratan rumah layak huni	Program Kawasan Pemukiman	4.525.618.285,00	4.466.251.973,00
Dinas Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	912.052.900,00	851.711.967,00
Dinas Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	638.766.600,00	628.348.917,00
Dinas Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Program Pengelolaan Persampahan	3.192.693.200,00	3.164.702.894,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	409.742.000,00	381.421.800,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan		
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.738.647.200,00	1.492.024.541,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	282.310.800,00	214.394.626,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	564.906.600,00	361.166.800,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	702.484.500,00	175.713.068,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	21.102.507.500,00	6.689.101.871,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Program Penyuluhan Pertanian	4.633.298.331,00	3.876.972.056,00



PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KODE/PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024
	pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Meningkatnya peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	5.648.887.800,00	5.086.303.392,00
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	16.419.602.260,00	142.000.700,00
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam	Program Pemasaran Pariwisata	6.690.520.800,00	6.262.129.200,00
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.635.362.700,00	1.464.851.529,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya investasi daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	837.250.300,00	822.038.736,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya investasi daerah	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.984.558.700,00	1.780.058.321,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya investasi daerah	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.051.707.000,00	692.123.929,00
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Berkurangnya angka kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	647.330.315,00	183.489.940,00
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Berkurangnya angka kemiskinan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	4.904.150.500,00	2.818.222.734,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Berkurangnya angka kemiskinan	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.364.268.150,00	1.349.074.820,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	165.869.901.663,00	133.430.046.892,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1.062.516.400,00	867.361.012,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	107.664.710.158,00	88.755.022.554,73
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.777.368.500,00	1.138.722.797,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	307.061.900,00	100.283.400,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.549.672.000,00	804.308.500,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	45.511.116.366,00	12.258.122.135,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Program Kepegawaian Daerah	7.087.916.325,00	6.747.264.713,00



PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KODE/PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.020.418.640,00	1.807.125.800,00
Kecamatan Long Bagun	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	102.060.000,00	101.740.000,00
Kecamatan Apari	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	148.384.300,00	142.783.800,00
Kecamatan Laham	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	78.990.383,00	78.650.000,00
Kecamatan Long hubung	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	38.120.300,00	38.093.700,00
Kecamatan Long Pahangai	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	178.782.400,00	160.485.600,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	11.548.123.283,00	6.930.915.593,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	9.180.852.400,00	6.872.429.793,00
Badan Pendapatan Daerah	Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	446.198.000,00	342.823.355,00
Badan Pendapatan Daerah	Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.515.113.700,00	3.809.091.767,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	50.553.430.914,00	19.932.737.687,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	37.603.087.937,00	32.130.065.453,00
Inspektorat	Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.191.662.500,00	1.929.718.532,00
Inspektorat	Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	2.046.636.800,00	1.226.238.480,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	Program Administrasi Pemerintahan Desa	234.547.276.500,00	218.511.406.440,00
Kecamatan Long Bagun	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	238.020.000,00	98.100.000,00
Kecamatan Apari	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	50.522.500,00	50.402.500,00



PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KODE/PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024
Kecamatan Laham	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	62.413.000,00	61.770.000,00
Kecamatan Long hubung	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	35.000.600,00	34.040.600,00
Kecamatan Long Pahangai	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	118.428.400,00	98.308.400,00
Kecamatan Long Bagun	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	408.684.000,00	340.983.600,00
Kecamatan Apari	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	622.532.900,00	616.050.980,00
Kecamatan Laham	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	284.066.000,00	283.564.000,00
Kecamatan Long hubung	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	132.424.000,00	132.255.300,00
Kecamatan Long Pahangai	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	472.087.300,00	269.992.300,00

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi dalam Pencapaian Kinerja dipengaruhi masalah internal dan eksternal. Permasalahan internal tersebut antara lain:

1. Kurangnya Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM); dan
2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan permasalahan eksternal antara lain:

1. Sulitnya aksesibilitas infrastruktur menuju wilayah serta aksesibilitas informasi dan komunikasi;
2. Sulitnya aksesibilitas infrastruktur menuju wilayah, berdampak pada kenaikan bahan-bahan pokok dan bahan-bahan material untuk pembangunan; dan
3. Dampak ekonomi dan sosial dari inflasi akibat dari kenaikan harga.



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang terdiri dari 28 SKPD selaku entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu pada Tahun 2024 tidak mengalami perubahan jumlah SKPD.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan untuk penyajian laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

3.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Akuntansi pendapatan-LRA menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA dari suatu entitas akuntansi/pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi; dan
2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas perolehan pendapatan-LRA.

Akuntansi pendapatan-LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode berkenaan. Akuntansi pendapatan-LRA dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan sumber daya ekonomi:

1. telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
2. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;



2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

1. Kebijakan akuntansi berkenaan dengan pendapatan-LRA;
2. Penjelasan mengenai pendapatan-LRA yang pada tahun pelaporan sampai dengan rincian objek pendapatan-LRA yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; dan
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.

3.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pendapatan dari Dana Transfer diakui sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil diakui berdasarkan realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah dan/atau berdasarkan surat dari Pemerintah Pusat yang menyatakan kekurangan dana bagi hasil;
2. Dana Alokasi Umum diakui berdasarkan Peraturan Presiden yang mengatur tentang dana transfer dan diakui pada tahun yang berkenaan; dan
3. Dana Alokasi Khusus diakui pada saat klaim pembayaran oleh Pemerintah Daerah telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya.

Pendapatan-LO yang diperoleh:

1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.



2. Sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundangan-undangan, diakui pada saat pelayanan telah diberikan dan timbulnya hak untuk menagih imbalan dalam bentuk surat tagihan/faktur atau sejenisnya.

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan Laporan Keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

1. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
2. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
3. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro; dan
4. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assement* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan).

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

1. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
2. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
3. informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.4.3. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban
2. Terjadinya konsumsi aset; dan
3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.



Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah, saat diterimanya barang/jasa pihak ketiga dengan dokumen yang sah dan lengkap.

Terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban yang terjadi bersamaan dengan realisasi kas dan bersumber dari kas bendahara pengeluaran (uang persediaan), diakui pada saat pengeluaran tersebut dipertanggungjawabkan dan disahkan PPK-SKPD. Beban dana transfer, bantuan keuangan, bantuan sosial, subsidi, hibah kepada kelompok masyarakat atau pihak lain diakui pada saat realisasi, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati, NPHD, atau dokumen lainnya karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyalurannya. Dalam hal tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara tanggal pengakuan beban berupa timbulnya kewajiban dan direalisasinya beban dalam bentuk kas, beban dapat diakui pada saat realisasi.

Dalam rangka pengakuan beban atas konsumsi aset, digunakan metode pendekatan beban yaitu setiap pembelian barang habis pakai dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin dan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Penyusutan aset tetap dan aset berwujud yang nilainya sama atau di atas batas kapitalisasi dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*).

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap yang dihitung tiap bulan tanpa nilai sisa. Atas aset lain berupa aset tidak berwujud diamortisasi secara garis lurus selama 5 tahun.

Koreksi atas beban yang berpengaruh pada kas, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Pengukuran

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau terjadinya timbulnya kewajiban, atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan.

Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

1. Beban Operasional, terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Transfer dan Beban Lain-lain.
2. Beban Non Operasional.
3. Beban Luar Biasa.



Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

1. Pengeluaran beban tahun berkenaan.
2. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.4.4. Kebijakan Akuntansi Belanja dan Transfer

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dan aset lainnya dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran setelah diverifikasi oleh PPK SKPD.

Khusus pengeluaran yang tidak dilakukan melalui RKUD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pengakuan belanja diakui setelah mendapat pengesahan oleh BUD. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam lain-lain PAD yang sah.

1. Belanja Barang dan Jasa
 - a. Biaya perolehan barang dan jasa menggambarkan biaya perolehan untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut.
 - b. Dalam perolehan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga, biaya yang diatribusikan secara langsung kedalam barang tersebut adalah biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*), biaya pemasangan (*installation cost*), biaya profesional seperti arsitek, konsultansi, dan insinyur dan/atau biaya konstruksi.



2. Perlakuan Belanja Modal Aset Berwujud

Suatu pengeluaran belanja aset berwujud akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Perolehan barang tersebut dimanfaatkan untuk pelayanan Pemerintah Daerah, serta tidak untuk dijual; dan
- c. Nilai rupiah pengeluaran untuk pembelian per-unit aset/barang tersebut sama atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi perolehan aset tetap yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas
- b. Bangunan gedung Rp10.000.000,00 ke atas
- c. Konstruksi jalan/jaringan sebesar Rp20.000.000,00 ke atas.
- d. Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapa pun nilai perolehannya dikapitalisasi.

Belanja modal perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung kedalam aset tetap adalah biaya sertifikat, pematangan, pengukuran, biaya pembongkaran bangunan, biaya pengurusan IMB, dan pajak-pajak.

3. Perlakuan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

Suatu pengeluaran belanja aset tidak berwujud akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset lainnya) jika aset tidak berwujud tersebut memberikan manfaat lebih dari 1 tahun (jangka panjang). Nilai perolehan aset tidak berwujud, adalah seluruh biaya pengadaan aset tidak berwujud tersebut, sampai aset tersebut dapat digunakan.

4. Perlakuan Akuntansi Belanja Yang Terjadi Setelah Perolehan

Suatu pengeluaran yang terjadi setelah perolehan aset tetap baik berupa rehabilitasi/pemeliharaan/penambahan/renovasi dan sejenisnya akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Pengeluaran belanja setelah perolehan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa datang dalam bentuk:
 - 1) meningkatkan efisiensi, dan/atau
 - 2) menambah kinerja, dan/atau



- 3) menambah kapasitas produksi/volume, dan/atau
- 4) menambah fungsi.
- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja tersebut sama atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi atas pengeluaran belanja setelah perolehan aset tetap (pemeliharaan) yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) aset gedung dan bangunan Rp10.000.000,00 ke atas,
- 2) aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp20.000.000,00 ke atas,
- 3) aset Peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.

Tidak termasuk dalam pengertian pengeluaran belanja modal yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pengeluaran:

- 1) pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal, atau
- 2) yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau
- 3) hanya sekedar untuk memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

5. Belanja Hibah

Belanja hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan.

6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat yang tidak bersifat terus menerus dan selektif untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam.

Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan dan direalisasikan pada belanja bantuan sosial, sedangkan bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan dan direalisasikan dalam belanja barang SKPD.

7. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Apabila pada akhir tahun belum direalisasi, maka akan menjadi utang sebesar nilai yang harus dibayar.

8. Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan. Bantuan keuangan, baik



bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Daerah lainnya atau dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa, dan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan dapat diberikan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

9. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja Tak Terduga sebesar nilai yang dikeluarkan. Kriteria untuk belanja Tak Terduga ialah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pengukuran

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran dicatat sebesar nilai kas yang dibelanjakan.

Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, Belanja Bantuan Keuangan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.4.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pengakuan

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

1. Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; dan
2. Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah

Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah



dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

Penyajian dan Pengungkapan

Secara umum Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

1. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan; dan
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah.

3.4.6. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah/dalam penguasaan Pemerintah Daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan, saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Kas antara lain terdiri dari:

1. Kas di Kas Daerah adalah jumlah uang yang berada di rekening kas Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang ditujukan untuk menampung semua penerimaan kas dan membayarkan belanja atau utang daerah serta pengeluaran untuk operasional kegiatan dilingkup Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Kas di Bendahara Penerimaan adalah jumlah uang yang berada di brankas atau rekening bank Bendahara Penerimaan. Termasuk dalam definisi kas di Bendahara Penerimaan adalah uang dari jasa pelayanan yang berada di rekening atas nama Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal pelaporan;
3. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah jumlah uang yang berada di brankas atau di rekening bank Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang telah dianggarkan dalam APBD yang bersumber dari SP2D UP/GU/TU/LS;
4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah adalah uang yang berada di brankas atau di rekening bank Bendahara BLUD yang dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas seperti korporasi dan penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan yang diperoleh BLUD dapat digunakan secara langsung untuk membiayai operasional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
5. Kas di Bendahara FKTP adalah uang yang berada di brankas atau di rekening bank Bendahara FKTP yang bersumber dari penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan syarat pencatatan dan pengesahan pendapatan dan belanjanya dilakukan oleh BUD; dan
6. Kas di Bendahara BOS adalah uang yang berada di brankas atau di rekening bank Bendahara BOS yang bersumber dari penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan syarat pencatatan dan pengesahan pendapatan dan belanjanya dilakukan oleh BUD.



Setara kas terdiri dari simpanan di bank dalam bentuk deposito dengan masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dan Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid dan bebas risiko yang signifikan dengan masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang.

Pengukuran Kas

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam Laporan Keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris pada Laporan Arus Kas. Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

3.4.7. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka pendek antara lain terdiri dari:

1. Deposito berjangka waktu lebih dari tiga bulan sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang otomatis;
2. Surat Utang Negara (SUN) yang jatuh tempo sampai dengan 12 bulan; dan
3. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Pengakuan Investasi Jangka Pendek

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :

1. kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
2. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.

Pengakuan Hasil Investasi Jangka Pendek

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Pengukuran

1. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.



2. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
3. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Penilaian

Penilaian investasi jangka pendek Pemerintah Daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi Jangka Pendek

Pelepasan investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan Pemerintah Daerah dan lain sebagainya. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.

Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki Pemerintah Daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi jangka pendek Pemerintah Daerah, antara lain:

1. jenis-jenis investasi;
2. perubahan harga pasar investasi jangka pendek;
3. penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
4. investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
5. perubahan pos investasi.

3.4.8. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debeturnya. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS). Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

1. Pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: (1) Piutang Pajak Daerah; (2) Piutang Retribusi; dan (3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
2. Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: (1) Pemberian Pinjaman; (2) Penjualan; (3) Kemitraan ; dan (4) Pemberian fasilitas.



3. Transfer antar Pemerintahan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: (1) Piutang Dana Bagi Hasil; (2) Piutang Dana Alokasi Umum; (3) Piutang Dana Alokasi Khusus; (4) Piutang Dana Otonomi Khusus; (5) Piutang Transfer Lainnya; (6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi; (7) Piutang Transfer Antar Daerah; (8) Piutang Kelebihan Transfer.
4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: (1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; (2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui **pada saat penyusunan Laporan Keuangan** ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

1. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan
2. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
2. jumlah piutang dapat diukur.

Pengakuan piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang:

1. **Piutang pajak dan retribusi daerah** diakui berdasarkan surat ketetapan/ dokumen yang sah yang belum dilunasi oleh wajib pajak/wajib retribusi.
2. **Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)** diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
3. **Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)** Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Jika alokasi tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak diakui.
4. **Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)** diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
5. **Piutang transfer lainnya diakui apabila:**
 - a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
6. **Piutang Bagi Hasil dari provinsi** dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum



dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

7. **Piutang TP/TGR.** Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran

Pada prinsipnya piutang disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai nominal piutang dikurangi dengan penyisihan piutang. Nilai nominal piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan:

1. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan atau surat tagihan yang diterbitkan atau koreksinya;
2. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terhutang oleh Pengadilan untuk WP yang mengajukan banding;
3. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Pengadilan;

Nilai nominal piutang yang berasal dari perikatan, disajikan sebagai berikut:

1. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terhutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima



Nilai nominal piutang yang berasal dari transfer disajikan sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
2. Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat;
3. Dana Alokasi Khusus disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat yang belum diterima.

Penyisihan Piutang

1. Penyisihan piutang yang bersumber dari Penghasilan Asli Daerah seperti pajak dan retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya diatur sebagai berikut:

a. Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Tabel 3.4.8.1
Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	0 - 1 tahun	Lancar	0,5%
2.	Di atas 1 - 2 tahun	Kurang Lancar	10%
3.	Di atas 2 - 5 tahun	Diragukan	50%
4.	5 tahun keatas	Macet	100%

b. Penyisihan Piutang Retribusi Daerah.

Tabel 3.4.8.2
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	0 - 1 bulan	Lancar	0,5%
2.	Di atas 1 - 3 bulan	Kurang Lancar	10%
3.	Di atas 3-12 bulan	Diragukan	50%
4.	12 bulan keatas	Macet	100%

2. Penyisihan piutang yang berasal dari perikatan, pemberian pinjaman, penjualan dan pemberian fasilitas jasa, karena ganti rugi, dan piutang lainnya disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.4.8.3
Penyisihan Piutang Lainnya

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50%
2.	5 Tahun keatas	Macet	100%

3. Dalam hal terdapat fakta/bukti yang menunjukkan bahwa piutang benar tidak dapat ditagih, atas piutang tersebut dilakukan penyisihan 100% sesuai dengan fakta bukti yang dimaksud.
4. Penyisihan piutang BLUD diatur dengan ketentuan yang mengatur tentang BLUD.



Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di Pemerintah Daerah atau sudah diserahkan penagihannya kepada pihak lain; dan
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

3.4.9. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berupa:

1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

1. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
2. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sedangkan pencatatan pembelian barang persediaan pada transaksi tahun berjalan diklasifikasikan pada beban persediaan.

Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan Laporan Keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Persediaan disajikan sebesar:

1. **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.



2. **Harga pokok produksi** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan seperti barang yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

3.4.10. Kebijakan Akuntansi Aset Non Lancar

Mencakup aset yang sifatnya jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset Non lancar meliputi Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya.

Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara tidak berkelanjutan

Pengakuan Investasi Jangka Panjang

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria :

1. Kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*); dan
3. Dimaksudkan untuk dimiliki untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen antara lain dapat berupa:

1. Pembelian Surat Utang Negara;
2. Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah;
3. Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
4. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
5. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja bergulir; dan



6. Investasi non permanen lainnya.

Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen terdiri dari:

1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara; dan
2. Investasi permanen lainnya.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Investasi jangka panjang dicatat dan dinilai sebesar harga perolehannya. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Pengukuran Investasi Non Permanen

1. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
2. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
3. Investasi non permanen lainnya dalam bentuk piutang dana bergulir atau dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Pengukuran Investasi Permanen

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Penilaian Investasi Jangka Panjang

Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

1. Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2. Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas Pemerintah Daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam



bentuk saham yang diterima Pemerintah Daerah akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- d. Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

1. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
3. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
4. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Apabila pencatatannya menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi Pemerintah Daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi

Pelepasan investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan Pemerintah Daerah dan lain sebagainya. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.

Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki Pemerintah Daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.



Pengungkapan

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi jangka panjang Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Perubahan harga pasar investasi jangka panjang;
2. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
3. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
4. Perubahan pos investasi.

3.4.11. Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

1. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor; dan
2. Hak atas tanah.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah;
2. Peralatan dan Mesin;
3. Gedung dan Bangunan;
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
5. Aset Tetap Lainnya; dan
6. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengakuan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
5. Memiliki nilai minimal sebesar batas kapitalisasi.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah.



Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

1. Peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas;
2. Bangunan gedung Rp10.000.000,00 ke atas;
3. Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapapun nilai perolehannya dikapitalisasi; dan
4. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi jalan dan jaringan sebesar Rp20.000.000,00 ke atas.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain adalah :

1. Biaya persiapan tempat;
2. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
3. Biaya pemasangan (*installation cost*);
4. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
5. Biaya konstruksi.



Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Biaya-biaya lain yang diatribusikan secara langsung kedalam aset tetap adalah biaya sertifikat, pematangan, pengukuran, biaya pembongkaran bangunan, biaya pengurusan IMB, biaya notaris dan pajak-pajak.

Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dapat dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membagi secara pro rata dengan jumlah aset yang diadakan, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material. Atribusi biaya umum dan administratif yang terkait langsung dengan aset tetap mempertimbangkan biaya dan manfaat laporan.

Pencatatan nilai perolehan masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

2. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3. Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

4. Jalan, jaringan dan instalasi

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

5. Aset tetap lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan mulai karena menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Kebijakan perolehan konstruksi dalam pengerjaan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.



Aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam pengerjaan jika:

- a) Besar kemungkinan manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria yaitu konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi, biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan, biaya penyewaan sarana dan prasarana, biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:

- a) Asuransi;
- b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang



bersangkutan. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi :

- Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- Jumlah biaya yang telah dikeluarkan; dan
- Uang muka kerja yang diberikan.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.

7. Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh pemakai atau pengurang nilai karena keusangan, Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dan dilakukan secara periodik yaitu dengan melakukan perhitungan penyusutan secara bulanan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi penyusutan Aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.11.1
Masa Manfaat Aset Tetap

No.	Kelompok Aset	Masa Manfaat (Tahun)
1	Alat-Alat Besar Darat	10
2	Alat-Alat Besar Apung	8
3	Alat-Alat Bantu	7
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
6	Alat Angkut Apung Bermotor	10
7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
8	Alat Angkut Bermotor Udara	20
9	Alat Bengkel Bermesin	10



No.	Kelompok Aset	Masa Manfaat (Tahun)
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
11	Alat Ukur	5
12	Alat Pengelolaan Pertanian	4
13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan Pertanian	4
14	Alat Kantor	5
15	Alat Rumah Tangga	5
16	Peralatan Komputer	4
17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
18	Alat Studio	5
19	Alat Komunikasi	5
20	Peralatan Pemancar	10
21	Alat Kedokteran	5
22	Alat Kesehatan	5
23	Unit-Unit Laboratorium	8
24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
25	Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	15
26	Ala Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
28	Radiation Application and Nondestructive Testing Laboratory (BATAM)	10
29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
31	Senjata Api	10
32	Persenjataan Non Senjata Api	3
33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
34	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
35	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
36	Bangunan Menara	50
37	Bangunan Bersejarah	50
38	Tugu Peringatan	50
39	Candi	50
40	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
41	Tugu Peringatan Lain	50
42	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
43	Rambu-Rambu	50
44	Rambu-Rambu lalu Lintas Udara	50
45	Jalan	10
46	Jembatan	50
47	Bangunan Air Irigasi	50
48	Bangunan Air Pasang Surut	50
49	Bangunan Air Rawa	25
50	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
51	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
52	Bangunan Air Bersih/Baku	40
53	Bangunan Air Kotor	40
54	Bangunan Air	40
55	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
56	Instalasi Air Kotor	30
57	Instalasi Pengolahan Sampah	10
58	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
59	Instalasi Pembangkit Listrik	40
60	Instalasi Gardu Listrik	40



No.	Kelompok Aset	Masa Manfaat (Tahun)
61	Instalasi Pertahanan	30
62	Instalasi Gas	30
63	Instalasi Pengaman	20
64	Jaringan Air Minum	30
65	Jaringan Listrik	40
66	Jaringan Telepon	20
67	Jaringan Gas	30

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk hal tersebut, aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

1. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

2. Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.



3. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

4. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*). Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*).

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Kriteria seperti pada paragraf di atas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Berikut ini adalah batasan jumlah biaya untuk penentuan kapitalisasi

Tabel 3.4.11.2
Nilai Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin	1.000.000
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	10.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:	20.000.000
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	1
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan dalam tabel berikut.



Tabel 3.4.11.3
Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap

Kode Aset				Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2		PERALATAN DAN MESIN			
1	3	2	01	Alat Besar Darat	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
						>30% s.d 45%	3
						>45% s.d 65%	5
						>65%	7
1	3	2	02	Alat Besar Apung	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
						>30% s.d 45%	2
						>45% s.d 65%	4
						>65%	6
1	3	2	03	Alat Bantu	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
						>30% s.d 45%	2
						>45% s.d 65%	4
						>65%	5
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	3
						>75% s.d. 100%	4
1	3	2	05	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	1
						>75% s.d. 100%	1
1	3	2	06	Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d. 100%	6



Kode Aset				Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	07	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	1
						>75% s.d. 100%	2
1	3	2	08	Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
						>25% s.d 50%	6
						>50% s.d 75%	9
						>75% s.d. 100%	12
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	3
						>75% s.d. 100%	4
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
						>25% s.d 50%	0
						>50% s.d 75%	1
						>75% s.d. 100%	1
1	3	2	11	Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d. 100%	3
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	Overhaul	>0% s.d. 20%	1
						>21% s.d 40%	2
						>51% s.d 75%	4
						>75%	4



Kode Aset				Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	Overhaul	>0% s.d. 20%	1
						>21% s.d 40%	2
						>51% s.d 75%	4
						>75%	4
1	3	2	14	Alat Kantor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d. 100%	3
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d. 100%	3
1	3	2	16	Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d. 100%	2
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d. 100%	3
1	3	2	18	Alat Studio	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d. 100%	3
1	3	2	19	Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	1



Kode Aset				Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d. 100%	3
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d. 100%	5
1	3	2	21	Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d. 100%	3
1	3	2	22	Alat Kesehatan	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d. 100%	3
1	3	2	23	Unit Alat laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d. 100%	4
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d. 100%	4
1	3	2	25	Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
						>25% s.d 50%	5
						>50% s.d 75%	7



Kode Aset				Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
						>75% s.d. 100%	8
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
						>25% s.d 50%	5
						>50% s.d 75%	7
						>75% s.d. 100%	8
1	3	2	27	Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	4
						>50% s.d 75%	5
						>75% s.d. 100%	5
1	3	2	28	Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory (BATAM)	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	4
						>50% s.d 75%	5
						>75% s.d. 100%	5
1	3	2	29	Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	3
						>75% s.d. 100%	4
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
						>25% s.d 50%	5
						>50% s.d 75%	7
						>75% s.d. 100%	8
1	3	2	31	Alat laboratorium Standarisasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2



Kode Aset				Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
				Kalibrasi & Instrumentasi			
						>25% s.d 50%	4
						>50% s.d 75%	5
						>75% s.d. 100%	5
1	3	2	31	Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	3
						>75% s.d. 100%	4
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
						>25% s.d 50%	0
						>50% s.d 75%	1
						>75% s.d. 100%	1
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
						>25% s.d 50%	0
						>50% s.d 75%	1
						>75% s.d. 100%	1
1	3	3		GEDUNG DAN BANGUNAN			
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
						>25% s.d 50%	10
						>50% s.d 75%	15
						>75% s.d. 100%	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
						>65%	20



Kode Aset				Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	3	3	03	Bangunan Menara	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
						>65%	20
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
						>65%	20
1	3	3	05	Tugu Peringatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
						>65%	20
1	3	3	06	Candi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
						>65%	20
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
						>65%	20
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
						>65%	20



Kode Aset				Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
						>65%	20
1	3	3	10	Rambu-Rambu	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
						>65%	20
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
						>65%	20
1	3	4		JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI			
1	3	4	01	Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
						>30% s.d 60%	5
						>60% s.d 100%	10
1	3	4	02	Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
						>65%	20
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
						>5% s.d 10%	5
						>10% s.d 20%	10
						>20%	15
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2



Kode Aset				Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
						>5% s.d 10%	5
						>10% s.d 20%	10
						>20%	15
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
						>5% s.d 10%	3
						>10% s.d 20%	5
						>20%	10
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
						>5% s.d 10%	2
						>10% s.d 20%	3
						>20%	4
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber air dan Air Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
						>5% s.d 10%	2
						>10% s.d 20%	3
						>20%	5
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
						>65%	20
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
						>65%	20
1	3	4	10	Bangunan Air	Renovasi	>0% s.d. 30%	5



Kode Aset				Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
						>65%	20
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
						>30% s.d 45%	7
						>45% s.d 65%	10
						>65%	15
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
						>30% s.d 45%	7
						>45% s.d 65%	10
						>65%	15
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
						>30% s.d 45%	3
						>45% s.d 65%	5
						>65%	7
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
						>30% s.d 45%	3
						>45% s.d 65%	5
						>65%	7
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
						>65%	20
1	3	4	16	Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
						>30% s.d 45%	10



Kode Aset				Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
						>45% s.d 65%	15
						>65%	20
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
						>30% s.d 45%	3
						>45% s.d 65%	5
						>65%	7
1	3	4	18	Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
						>65%	20
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
						>30% s.d 45%	1
						>45% s.d 65%	3
						>65%	5
1	3	4	20	Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
						>30% s.d 45%	7
						>45% s.d 65%	10
						>65%	15
1	3	4	21	Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
						>65%	20
1	3	4	22	Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
						>30% s.d 45%	5
						>45% s.d 65%	10
						>65%	15



Kode Aset				Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	23	Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
						>30% s.d 45%	7
						>45% s.d 65%	10
						>65%	15

Keterangan:

Overhaul merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dan jaringan dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.

Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian aset tetap gedung bangunan, jalan, dan irigasi dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Pemeliharaan konstruksi untuk gedung dan bangunan sebesar Rp10.000.000,00 ke atas;
- Pemeliharaan konstruksi untuk jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp20.000.000,00 ke atas; dan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.

3.4.12 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:

- Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:

- Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain :



1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
3. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

1. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
2. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
3. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Penyajian dan Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi :

1. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
2. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan; dan
4. Uang muka kerja yang diberikan.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.



3.4.13 Akuntansi Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pada umumnya aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas pemerintah memiliki aset properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai.

Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

Contoh properti investasi adalah:

- a. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
- b. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
- c. bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- d. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/ atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- e. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi;

Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup kebijakan ini:

- a. Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
- b. Properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
- c. Properti yang digunakan sendiri, termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
- d. Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;



- e. Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
- f. Properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan kebijakan yang mengatur Aset Tetap.
- g. Properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan (a) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan (b) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

Pengakuan Properti Investasi

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.

Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.

Berdasarkan prinsip pengakuan dalam paragraf 15, entitas tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Sebaliknya, biaya-biaya tersebut diakui sebagai surplus atau defisit pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan. Tujuan dari pengeluaran biaya tersebut sering digambarkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti.

Pengukuran saat pengakuan awal Properti Investasi

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga



pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.

Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:

- a. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
- b. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
- c. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.

Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.

Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi nonpertukaran. Misalnya, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.

Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan.

Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.

Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan non moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.

Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika: (a) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau (b) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.



Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:

- a) Variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
- b) Probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.

Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Pengukuran setelah pengakuan awal Properti Investasi

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan yang mengatur Aset Tetap. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam Laporan Keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam Laporan Keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

Alih guna Properti Investasi

Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

- (a) Dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
- (b) Dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
- (c) Berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;



- (d) Dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

Pelepasan Properti Investasi

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

Penyajian Properti Investasi

Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar, terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

Pengungkapan Properti Investasi

Entitas mengungkapkan:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*)
- b) Metode penyusutan yang digunakan;
- c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- e) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan :
 - 1) Penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - 2) Penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - 3) Pelepasan;
 - 4) Penyusutan;
 - 5) Alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - 6) Perubahan lain.
- f) Apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - 2) Dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;



- 3) Tanggal efektif penilaian kembali;
- 4) Nilai tercatat sebelum revaluasi
- 5) Jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
- 6) Nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi
- g) Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- h) Apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- i) Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari Properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
- j) Apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
- k) Jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
 - 1) Penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - 2) Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - 3) Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- l) Kewajiban kontraktual untuk membeli, mengembangkan properti investasi atau pemeliharaan atau peningkatan;
- m) Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

3.4.14 Akuntansi Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.

Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.



3.4.15 Akuntansi Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari :

1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
4. Aset Tidak Berwujud; dan
5. Aset Lain-lain.

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Penilaian Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. Piutang penjualan angsuran disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai nominal piutang dikurangi dengan penyisihan piutang.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Penilaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah. Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai nominal piutang dikurangi dengan penyisihan piutang.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :



1. Bangun, Kelola, Serah (BKS)

Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah Daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh Pemerintah Daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

Pengukuran BKS

Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap. Aset yang diserahkan dalam rangka Bangun Kelola Serah disusutkan sesuai dengan kebijakan penyusutan aset tetap. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut:

- a. Untuk aset yang berasal dari Pemerintah Daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
- b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.

2. Bangun, Serah, Kelola (BSK)

Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Pengukuran BSK

Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Aset Bangun Serah Kelola disusutkan sesuai dengan kebijakan penyusutan aset tetap.

3.4.16 Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan



pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Daerah. Aset tidak berwujud meliputi:

1. Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.
2. Lisensi dan *franchise*. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
3. Hak cipta (*Copyright*), paten, dan hak lainnya. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
4. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang diidentifikasi memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang, termasuk dalam hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi, antara lain: dokumen master plan, dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah, atau dokumen sejenisnya. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud. Termasuk dalam kelompok ini adalah *feasibility study*, *Detail Engineer Design* (DED) yang tidak diikuti pembangunan fisik, kegiatan penelitian dan pengembangan yang belum memberikan hasil nyata atau sejenisnya.
5. Aset tidak berwujud lainnya, termasuk aset tidak berwujud dalam pengerjaan

Pengakuan Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud diakui jika:

1. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
2. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal

Pengukuran Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Nilai aset tidak berwujud yang dikerjakan secara swakelola antara lain :

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan aset tidak berwujud;
2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke aset tidak berwujud tersebut; dan
3. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan dengan pengadaan aset tidak berwujud yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang dikapitalisasi kedalam aset tidak berwujud yang dilaksanakan secara swakelola antara lain meliputi :



1. Biaya bahan yang digunakan dalam aset tidak berwujud;
2. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
3. Biaya penyewaan sarana dan prasarana; dan
4. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak berwujud, seperti biaya konsultan perencanaan, tenaga ahli/ narasumber.

Penilaian Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Aset tidak berwujud diamortisasi secara garis lurus selama 5 tahun.

Penyajian Aset Tidak Berwujud

ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut:

1. Masa manfaat dan metode amortisasi;
2. Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud; dan
3. Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.

3.4.17 Aset Lain-Lain

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan kedalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena hilang dan rusak berat dihentikan penyusutannya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena dipinjam pakai atau dikerjasamakan tetap dilakukan penyusutan.

3.4.18 Akuntansi Kewajiban

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional.

Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.



Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang. Klasifikasi Kewajiban:

1. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum Laporan Keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh Pemerintah Daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.



Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

2. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*),

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke Pemerintah Daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

3. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

4. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada.

Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut:

- a. Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan; dan



- b. Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Penerapan pengakuan pada pos-pos neraca terkait dengan kewajiban sebagai berikut:

1. **Utang perhitungan pihak ketiga**, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa. Pada akhir periode pelaporan saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada Laporan Keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Daerah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada Laporan Keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
2. **Utang bunga** sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan. Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang Pemerintah Daerah baik dari dalam maupun luar negeri maupun utang lainnya. Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Pengukuran dan penyajian utang bunga di atas juga berlaku untuk sekuritas Pemerintah Daerah yang diterbitkan pemerintah pusat dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) dan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten, Kota dan Provinsi) dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.
3. **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar Urang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Urang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
4. **Pendapatan Diterima Dimuka**, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah Daerah.
5. **Utang Beban**, diakui pada saat:
 - a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada Pemerintah Daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Daerah.
 - c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
6. **Utang jangka pendek** lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada Pemerintah Daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
7. **Utang kepada pihak ketiga** diakui pada saat penyusunan Laporan Keuangan apabila:
 - a. Barang yang dibeli sudah diterima, atau
 - b. Jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau



- c. Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
8. **Utang Transfer DBH** yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan Laporan Keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.
9. **Kewajiban Jangka Panjang** diakui pada saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara Pemerintah Daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi Pemerintah Daerah.

Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

1. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
2. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
3. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya.
4. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan kedalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan. Penerapan nilai nominal dalam pos-pos kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Utang PFK. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada Laporan Keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
2. Utang kepada pihak ketiga. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
3. Utang transfer dicatat sebesar nilai kekurangan transfer.
4. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar



harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

5. Bagian lancar Urang jangka panjang. Nilai yang dicantumkan dalam Laporan Keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Pendapatan diterima dimuka, merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
7. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
8. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat Laporan Keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; dan
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.

3.4.19 Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas, dimana dalam prosesnya juga ditentukan oleh Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO pada periode yang bersangkutan serta koreksi kesalahan atas pembukuan tahun sebelumnya.



BAB IV

PENJELASAN ATAS

POS~POS LAPORAN KEUANGAN



BAB IV

PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

Urusan pemerintahan dan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dilaksanakan oleh 28 (dua puluh delapan) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD BPKAD selain sebagai SKPD juga berperan sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) sehingga terdapat 1 (satu) entitas akuntansi yang harus menyajikan Laporan Keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) Kabupaten Mahakam Ulu, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Penjelasan masing-masing pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, sebagai berikut:

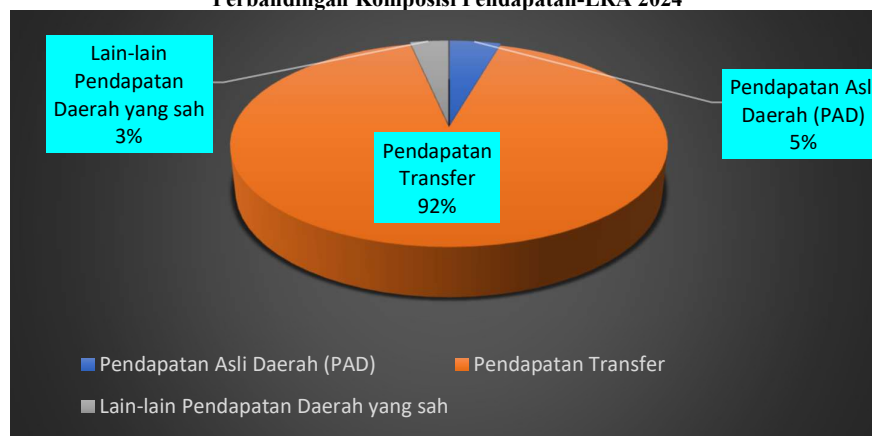
4.1.1 Pendapatan – LRA

Jumlah anggaran pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp1.877.265.573.225,00 tertuang dalam Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024. Pendapatan ini dapat dicapai sebesar Rp2.045.265.571.153,91 atau 108,95% dari anggaran yang ditetapkan. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1.1
Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan

Pendapatan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA	16.853.273.323,00	91.555.695.176,22	543,25	47.720.635.931,58
Pendapatan Transfer-LRA	1.779.307.285.180,31	1.884.997.792.133,00	105,94	2.173.410.578.138,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LRA	81.105.014.721,69	68.712.083.844,69	84,72	5.015.474.844,00
Jumlah	1.877.265.573.225,00	2.045.265.571.153,91	108,95	2.226.146.688.913,58

Gambar 4.1
Perbandingan Komposisi Pendapatan-LRA 2024





Dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun lalu sebesar Rp2.226.146.688.913,58, realisasi pencapaian target pendapatan tahun ini sebesar Rp2.045.265.571.153,91 mengalami penurunan sebesar Rp180.881.117.759,67 atau 8,13%, hal ini disebabkan adanya penurunan pada Pendapatan Transfer-LRA sebesar Rp288.412.786.005,00 atau sebesar 13,27%.

4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD TA 2024 adalah sebesar Rp91.555.695.176,22 atau 543,25% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp16.853.273.323,00.

Tabel 4.1.1.1.A
Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pajak Daerah	3.622.500.000,00	3.112.237.291,48	(510.262.708,52)	85,91	2.964.512.089,34
Retribusi Daerah	1.900.550.000,00	1.191.385.000,00	(709.165.000,00)	62,69	905.261.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	278.732.980,00	389.351.382,74	110.618.402,74	139,69	377.742.245,57
Lain-lain PAD yang Sah	11.051.490.343,00	86.862.721.502,00	75.811.231.159,00	785,98	43.473.120.596,67
Jumlah	16.853.273.323,00	91.555.695.176,22	74.702.421.853,22	543,25	47.720.635.931,58

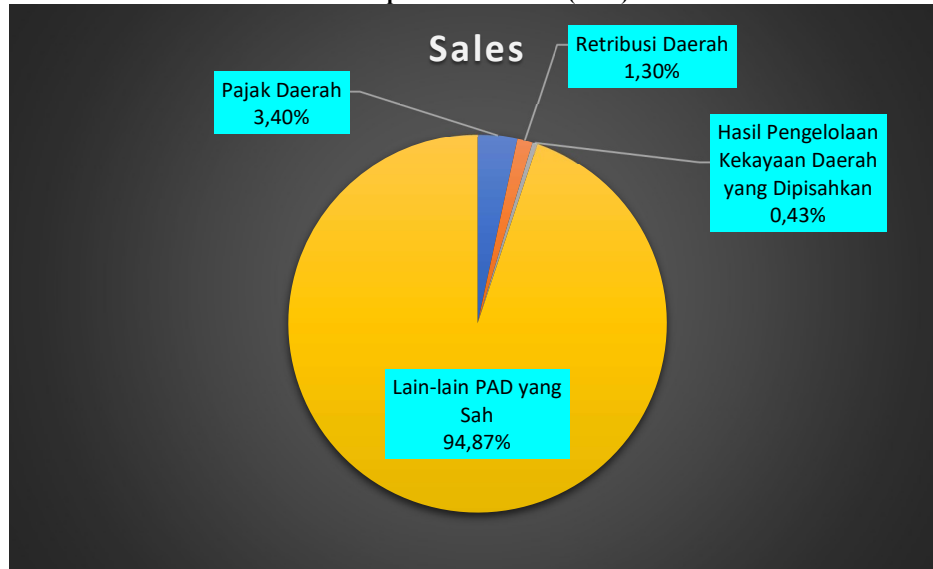
Adapun Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 per SKPD sebagai berikut:

Tabel 4.1.1.1.B
Realisasi Pendapatan Asli Daerah per SKPD

SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	808.000.000,00	842.476.000,00	34.476.000,00	104,27	3.069.084.328,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	1.426,50	1.426,50	0,00	28.124.100,00
Dinas Perhubungan	0,00	62.200.000,00	62.200.000,00	0,00	38.850.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
Badan Pendapatan Daerah	4.715.050.000,00	3.404.535.114,48	(1.310.514.885,52)	72,21	2.936.838.342,34
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sebagai SKPKD	11.330.223.323,00	87.246.482.635,24	75.916.259.312,24	770,03	41.647.605.161,24
Jumlah	16.853.273.323,00	91.544.053.749,72	74.690.780.426,72	543,18	47.720.635.931,58



Gambar 4.2
Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 adalah sebesar Rp3.112.237.291,48 atau 85,91% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp3.622.500.000,00. Besarnya realisasi Pendapatan Pajak Daerah dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.1.1.1.1
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pajak Hotel	25.000.000,00	19.225.000,00	76,90	14.635.300,00
Pajak Restoran	800.000.000,00	1.408.302.820,00	176,04	1.091.840.266,00
Pajak Reklame	50.000.000,00	77.584.294,00	155,17	67.553.219,00
Pajak Penerangan Jalan	400.000.000,00	1.407.541.659,00	351,89	1.190.185.182,00
Pajak Sarang Burung Walet	22.500.000,00	7.000.000,00	31,11	6.000.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	175.000.000,00	90.093.695,48	51,48	336.656.571,70
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	150.000.000,00	98.222.923,00	65,48	257.641.550,64
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.000.000.000,00	4.266.900,00	0,21	0,00
Jumlah	3.622.500.000,00	3.112.237.291,48	85,91	2.964.512.089,34

Bila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 sebesar Rp2.964.512.089,34 maka secara garis besar realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA



2024 mengalami kenaikan sebesar Rp147.725.202,14 atau 4,98%. Selain peningkatan, terjadi Penurunan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2024 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp246.562.876,22 atau 73,24% dan penurunan realisasi pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) TA 2024 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp159.418.627,64 atau 61,88%. Besarnya Pendapatan Pajak Daerah sebagai berikut:

- a. Target Pajak Hotel TA 2024 adalah Rp25.000.000,00, capaian realisasi penerimaan sebesar 76,90% dari target atau Rp19.225.000,00 dibawah target. Namun angka ini menunjukkan kenaikan penerimaan senilai Rp4.589.700,00 atau sekitar 31,36% dari penerimaan TA sebelumnya.
- b. Target Pajak Restoran TA 2024 adalah Rp800.000.000,00, capaian realisasi mencapai Rp1.091.840.266,00 atau 176,04% dari target. Kenaikan penerimaan senilai Rp316.462.554,00 atau sekitar 28,98% dari penerimaan TA sebelumnya.
- c. Target Pajak Reklame TA 2024 adalah Rp50.000.000,00, capaian realisasi mencapai nilai Rp77.584.294,00 atau 155,17% dari target. Surplus realisasi TA 2024 senilai Rp27.584.294,00 diatas target menunjukkan kenaikan penerimaan senilai Rp10.031.075,00 atau sekitar 14,85% dari penerimaan TA sebelumnya.
- d. Target Pajak Penerangan Jalan TA 2024 adalah Rp400.000.000,00, capaian realisasi mencapai Rp1.407.541.659,00 atau 351,89% dari target. Surplus senilai Rp1.007.541.659,00 diatas target mendorong kenaikan penerimaan senilai Rp217.356.477,00 atau sekitar 18,26% dari penerimaan TA sebelumnya.
- e. Target Pajak Sarang Burung Walet TA 2024 adalah Rp22.500.000,00, capaian realisasi penerimaan hanya berada di angka Rp7.000.000,00 atau sekitar 31,11% dari target. Meskipun demikian, terjadi kenaikan penerimaan senilai Rp1.000.000,00 atau sekitar 16,67% dari penerimaan pada TA sebelumnya.
- f. Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2024 adalah Rp175.000.000,00, capaian realisasi senilai Rp90.093.695,48 atau mencapai 51,48%. Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2024 mengalami penurunan penerimaan senilai Rp246.562.876,22 atau sekitar 73,24% dari penerimaan TA sebelumnya.
- g. Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) TA 2024 adalah Rp150.000.000,00, capaian realisasi senilai Rp98.222.923,00 atau sekitar 65,48% dari target. Defisit penerimaan sebesar Rp51.777.077,00 tersebut menyebabkan penurunan penerimaan senilai Rp159.418.627,64 atau sekitar 61,88% dari penerimaan TA sebelumnya.
- h. Target Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2024 adalah Rp2.000.000.000,00, capaian realisasi senilai Rp 4.266.900,00 atau mencapai 0,21% dari target. Penerimaan TA 2024 mengalami kenaikan dimana adanya realisasi senilai Rp4.266.900,00 jika dibandingkan dengan TA 2023 dimana tidak terdapat realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Namun rendahnya realisasi BPHTB TA 2024 ini dapat dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar BPHTB dan kurangnya informasi terkait prosedur dan layanan BPHTB yang menyebabkan masyarakat kurang menyadari pentingnya membayar BPHTB.

Realisasi pendapatan pajak TA 2024 tidak lepas dari upaya Pemerintah Daerah untuk mengingatkan wajib pajak untuk tertib dan taat membayar pajak daerah dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sesuai kewajibannya semakin menunjukkan peningkatan baik.



Peningkatan pendapatan pajak daerah juga merupakan upaya aktif SKPD terkait dengan memaksimalkan koordinasi dengan SKPD teknis pemungut Retribusi Daerah dan melakukan pelaksanaan kegiatan rutin seperti sosialisasi Pajak dan Retribusi dengan pembatasan peserta, menjalin kerja sama dengan Bank Kaltimara untuk mempermudah proses pembayaran dari Wajib Pajak ataupun penyetoran dari Bendahara – bendahara Penerima.

4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 adalah sebesar Rp1.191.385.000,00 atau 62,69% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp1.900.550.000,00.

Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1.1.1.2
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.858.000.000,00	842.476.000,00	45,34	866.411.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	42.550.000,00	62.200.000,00	146,18	38.850.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	286.709.000,00	0,00	0,00
Jumlah	1.900.550.000,00	1.191.385.000,00	62,69	905.261.000,00

Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.191.385.000,00 maka realisasi Pendapatan Retribusi mengalami kenaikan sebesar Rp286.124.000,00 atau 31,61% dimana adanya realisasi pada Retribusi Pelayanan Kesehatan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp905.261.000,00.

4.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA TA 2024 adalah sebesar Rp389.351.382,74 dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp278.732.980,00. Realisasi pendapatan ini merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA. Pendapatan tersebut merupakan hasil pembagian dividen atas Penyertaan Modal kepada Bank Kaltimara pada Tahun 2024 yang berdasarkan surat Bank Kaltimara dengan nomor 0296/A-1/BPD-AKT&KEU/IV/2024, perihal Pembagian Dividen Tahun Buku 2023 dimana disampaikan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2023 tanggal 03 April 2024 telah menyetorkan dividen tahun buku 2023 sebesar Rp389.351.382,74.

Tabel 4.1.1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	278.732.980,00	389.351.382,74	139,69	377.742.245,57
Jumlah	278.732.980,00	389.351.382,74	139,69	377.742.245,57



4.1.1.1.4 Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 adalah sebesar Rp86.862.721.502,00 atau 785,98% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp11.051.490.343,00. Besarnya realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.1.1.1.4
Realisasi Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.191.054.200,00	0,00	0,00	432.985.000,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	12.000.000,00	0,00	60.000.000,00
Hasil Kerja Sama Daerah	510.285.000,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Giro	3.123.387.311,00	20.062.087.238,89	642,32	15.564.745.203,16
Pendapatan Bunga	0,00	40.339.302.316,00	0,00	11.205.905.090,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.452.577.795,00	21.388.680.567,52	1.472,46	11.828.553.485,40
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	236.482.102,00	3.125.206.126,14	1.321,54	898.617.923,32
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.248.514.695,00	1.186.728.602,45	27,93	995.651.013,79
Pendapatan Denda Pajak Daerah	916.180,00	5.588.823,00	610,01	584.353,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00	0,00	283.405.200,00
Pendapatan dari Pengembalian	288.273.060,00	743.127.828,00	257,79	0,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	2.202.673.328,00
Jumlah	11.051.490.343,00	86.862.721.502,00	785,93	43.473.120.596,67

Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 maka realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp43.389.600.905,33 atau sebesar 99,81%.

Kenaikan signifikan terdapat pada realisasi Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah pada BI dalam bentuk *Treasury Depocit Facility* (TDF) yaitu mengalami kenaikan sebesar Rp29.133.397.226,00 dari tahun 2023 sebesar Rp11.205.905.090,00.

Pada tahun anggaran 2024 terdapat target atas Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp1.191.054.200,00, namun tidak terdapat realisasi. Hal tersebut dikarenakan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan dari APBD, dan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu belum melakukan inventarisasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi BMD yang Tidak Dipisahkan yang dapat dijual untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hasil Kerja Sama Daerah pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp510.285.000,00 namun tidak terdapat realisasi. Hal ini dikarenakan Hasil Kerja Sama Daerah yang merupakan pendapatan atas kerja sama pemerintah daerah dengan pihak lain belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Hal ini dapat disebabkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu belum secara optimal melakukan riset dan identifikasi potensi daerah yang dapat menghasilkan



kerja sama daerah seperti dalam bidang promosi wisata, dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu.

Realisasi Penerimaan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun 2024 sebesar Rp12.000.000,00 merupakan pendapatan atas Hasil Sewa BMD, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1.1.1.4.1
Rincian Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	URAIAN	NILAI (Rp)
1	24-Des-2024	64.11/41.0/000801/STBP/ 5.02.4.01.0.00.23.0000/2/2024	KU- PT TELEKOMUNIKASI SELULAR	12.000.000,00
Jumlah				12.000.000,00

Jasa Giro merupakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang merupakan pendapatan jasa perbankan atas rekening giro pemerintah pada Bankaltimtara. Rincian Jasa Giro sebagai berikut:

Tabel 4.1.1.1.4.2
Rincian Jasa Giro

No	TANGGAL	NO. BUKTI	URAIAN	NILAI
1	01-Jan-2024	64.11/41.0/000001/STBP/5.02.4.01.0.00 .23.0000/3/2024	PENDAPATAN JASA GIRO BULAN JANUARI 2024	1.514.922.648,43
2	01-Feb-2024	64.11/41.0/000135/STBP/5.02.4.01.0.00 .23.0000/3/2024	PENDAPATAN JASA GIRO BULAN FEBRUARI 2024	1.518.833.353,30
3	01-Mar-2024	64.11/41.0/000157/STBP/5.02.4.01.0.00.23.00 00/4/2024	PENDAPATAN JASA GIRO BULAN MARET 2024	1.712.374.418,75
4	01-Apr-2024	64.11/41.0/000200/STBP/5.02.4.01.0.00 .23.0000/5/2024	PENDAPATAN JASA GIRO BULAN APRIL 2024	1.874.111.407,39
5	01-Mei-2024	64.11/41.0/000350/STBP/5.02.4.01.0.00 .23.0000/6/2024	PENDAPATAN JASA GIRO BULAN MEI 2024	1.669.738.467,90
6	01-Jun-2024	64.11/41.0/000392/STBP/5.02.4.01.0.00 .23.0000/6/2024	PENDAPATAN JASA GIRO BULAN JUNI 2024	2.085.082.056,50
7	01-Jul-2024	64.11/41.0/000447/STBP/5.02.4.01.0.00 .23.0000/7/2024	PENDAPATAN JASA GIRO BULAN JULI 2024	1.860.244.760,10
8	01-Aug-2024	64.11/41.0/000483/STBP/5.02.4.01.0.00 .23.0000/8/2024	PENDAPATAN JASA GIRO BULAN AGUSTUS 2024	1.836.384.244,95
9	01-Sep-2024	64.11/41.0/000508/STBP/5.02.4.01.0.00 .23.0000/9/2024	PENDAPATAN JASA GIRO BULAN SEPTEMBER 2024	1.578.946.409,65
10	01-Oct-2024	64.11/41.0/000547/STBP/5.02.4.01.0.00 .23.0000/11/2024	PENDAPATAN JASA GIRO BULAN OKTOBER 2024	1.501.623.801,00
11	01-Nov-2024	64.11/41.0/000571/STBP/5.02.4.01.0.00 .23.0000/12/2024	PENDAPATAN JASA GIRO BULAN NOVEMBER 2024	1.512.785.393,42
12	01-Des-2024	64.11/41.0/000590/STBP/5.02.4.01.0.00 .23.0000/12/2024	PENDAPATAN JASA GIRO BULAN DESEMBER 2024	1.397.038.851,00
13	31-Des-2024	64.11/09.0/000012/JU/JURNAL- UMUM/1.01.2.22.5.04.01.0000/03/2025	JURNAL PENYESUAIAN JASA GIRO PADA REKENING SDN 004 NYARIBUNGAN (REKENING BOSDA)	1.426,50
JUMLAH				20.062.087.238,89

Penerimaan atas Pendapatan Bunga merupakan Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah yang merupakan pendapatan bunga atas penempatan kas daerah pada rekening TDF oleh pemerintah pusat, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 4.1.1.1.4.3
Rincian Pendapatan Bunga

No	TANGGAL	NO. BUKTI	URAIAN	NILAI
1	25 Juni 2024	64.11/41.0/000804/STBP/5.02 .4.01.0.00.23.0000/2/2024	Remunerasi TDF pada Rekening TDF-DBH Triwulan 1 TA 2024	11.090.006.948,00
2	23-Sep-24	64.11/41.0/000805/STBP/5.02 .4.01.0.00.23.0000/2/2024	Remunerasi TDF pada Rekening TDF-DBH Periode TRIWULAN II TA 2024	11.082.077.407,00
3	20 Desember 2024	64.11/41.0/000806/STBP/5.02 .4.01.0.00.23.0000/2/2024	Remunerasi TDF pada Rekening TDF-DBH Periode TRIWULAN IV TA 2024	7.090.591.068,00
4	20 Desember 2024	64.11/41.0/000803/STBP/5.02 .4.01.0.00.23.0000/2/2024	Remunerasi TDF pada Rekening TDF-DBH Periode TRIWULAN III TA 2024	11.076.626.893,00
JUMLAH				40.339.302.316,00

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah merupakan pendapatan atas setoran pihak ketiga dan bendahara yang merupakan tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1.1.1.4.4
Rincian Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

NO	URAIAN	NILAI
1	Pengembalian atas Temuan BPK dan Inspektorat	12.383.969.965,52
2	Pengembalian atas Temuan Honor	3.648.964.323,00
3	Pengembalian atas Temuan Kekurangan Volume	5.355.746.279,00
JUMLAH		21.388.680.567,52

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain merupakan kelompok penerimaan bentuk lain yang tidak termasuk dalam kategori rincian Lain-lain PAD yang Sah lainnya. Realisasi Pendapatan atas Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain tahun 2024 adalah sebesar Rp3.125.206.126,14 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1.1.1.4.5
Rincian Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

NO	URAIAN	NILAI
1	KU- BPJS KESEHATAN	617.401.800,00
2	KU- SIMSEM GIRO INTERNAL KEMEN	3.179.800,00
3	KU- WHOLESALE TRANSACTION PROD	4.966.260,00
4	STS BOSDA DAN BOS	9.575.706,37
5	Setoran Lain-lain	2.490.082.559,77
JUMLAH		3.125.206.126,14

Adapun rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan adalah sebagai berikut:



Tabel 4.1.1.1.4.6
Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

No	TANGGAL	U R A I A N	NILAI
1	11-Jan-2024	PEMBAYARAN PERTAMA JAMINAN PELAKSANAAN ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN PELABUHAN DAN SUNGAI DANAU (PEMBANGUNAN DERMAGA TRANSIT/ESTAFET MUARA RATAH)	41.700.000,00
2	7-Feb-24	SETORAN ATAS KEKURANGAN VOLUME PEKERJAAN SEMENISASI JALAN DAN JEMBATAN S. PAYANG MENUJU SDN 008 MAMAHAK TEOQ CV. JALBER MARITIM (STS DPUPR/KKRG VOL PEK SEMENIS)	179.092.969,00
3	26-Feb-24	SETORAN ATAS KEKURANGAN VOLUME DAN DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAAN SEMENISASI BADAN JALAN SIMPANG RTC KE SMPN 04 MAMAHAK TEOQ CV.BENUA KARYA	150.000.000,00
4	25-Apr-24	STS DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAAN REHABILITASI SISI DERMAGA BATU DINDING TA 2023 (0002/STS/DISHUB-I)	841.731,45
5	06-Mei-2024	STS DENDA KETERLAMBATAN CV.SURYAMITRA MANDIRI PEMBANGUNAN AIR BERSIH PERKOTAAN (STR JOKO/KETRLAMBATAN CV SURYA)	13.918.920,00
6	4-Jul-24	SETORAN DENDA KETERLAMBATAN KEGIATAN PEMBANGUNAN HENGKUNG KALUNG PUTRA DAERAH 18(DELAPAN BELAS) HARI KALENDER. (640/426/FISIK-TDR/SPK-156/CK-APBD/PUPR-MU/V/2023)	12.308.109,00
7	11-Okt-2024	PEKERJAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN SEI BULUQ UJOH BILANG BELUM DIKENAKAN DENDA KETERLAMBATAN SENILAI RP144.009.349	144.009.349,00
8	26-Dec-2024	SETORAN PENGEMBALIAN DENDA KETERLAMBATAN CV. SWAKARYA ATAS KEGIATAN PENGADAAN MOBIL ANGKUTAN PELAJAR DARI LONG BAGUN DAN LONG MELAHAM (DAK TRANSPORTASI)	28.629.800,00
9	27-Dec-2024	SETORAN PENGEMBALIAN DENDA KETERLAMBATAN CV. DHARMAN JAYA SEJAHTERA ATAS KEGIATAN REHABILITAS/PENINGKATAN FASILITAS SISI PERAIRAN DERMAGA INDUK BATU DINDING KAB. MAHAKAM ULU (DANA ALOKASI KHUSUS) BIDANG TRANSPORTASI PERAIRAN	164.988.281,00
10	30-Dec-2024	STS DENDA KETERLAMBATAN PEMBANGUNAN GEREJA NAZARET LONG BAGUN TAHAP II	223.609.315,00
11	31-Dec-2024	SETORAN PENGEMBALIAN DENDA KETERLAMBATAN CV. SARI MURNI ATAS KEGIATAN REHABILITAS FASILITAS DERMAGA BATU DINDING SISI DARAT (DANA ALOKASI KHUSUS) BIDANG TRANSPORTASI PERAIRAN	88.577.371,00
12	31-Dec-2024	SETORAN DENDA KETERLAMBATAN KEGIATAN SEMENISASI JALAN PEMUKIMAN BARU RT.02 LONG MELAHAM 30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER.	76.143.102,00
13	31-Dec-2024	SETORAN DENDA KETERLAMBATAN KEGIATAN PEMBANGUNAN BPU KECAMATAN LONG PAHANGAI 30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER.	62.909.655,00
JUMLAH			1.186.728.602,45

Rincian Pendapatan dari Pengembalian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.1.1.4.7
Rincian Pendapatan dari Pengembalian

NO	URAIAN	NILAI
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	664.579.690,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	78.548.138,00
JUMLAH		743.127.828,00



4.1.1.2 Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 adalah sebesar Rp1.884.997.792.133,00 atau 105,94% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp1.779.307.285.180,31. Realisasi Pendapatan Transfer tersebut berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi.

Tabel 4.1.1.2
Realisasi Pendapatan Transfer

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.587.008.366.180,31	1.709.076.158.623,00	107,69	1.962.861.330.965,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	192.298.919.000,00	175.921.633.510,00	91,48	210.549.247.173,00
Jumlah	1.779.307.285.180,31	1.884.997.792.133,00	105,94	2.173.410.578.138,00

Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp2.173.410.578.138,00 maka realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp288.412.786.005,00 atau sebesar 13,27%. Penurunan ini terjadi signifikan pada akun Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp253.785.172.342,00 atau 12,93%.

4.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA tahun 2024 adalah sebesar Rp1.709.076.158.623,00 atau 107,69% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp1.587.008.366.180,31. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA tersebut berasal dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa.

Tabel 4.1.1.2.1.A
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	929.277.846.734,31	1.134.688.119.446,00	122,10	1.370.928.837.554,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	510.592.141.446,00	434.344.822.000,00	85,07	458.913.738.421,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	69.006.517.000,00	66.605.764.716,00	96,52	52.387.489.710,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	26.445.833.000,00	21.189.646.525,00	80,12	21.771.118.268,00
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	10.599.493.000,00
Dana Desa	51.686.028.000,00	52.247.805.936,00	101,09	48.260.654.012,00
Jumlah	1.587.008.366.180,31	1.709.076.158.623,00	107,69	1.962.861.330.965,00



Penurunan pendapatan transfer pusat TA 2024 terjadi pada akun Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp236.240.718.108,00 atau 17,23%.

Tabel 4.1.1.2.1.B
Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	KETERANGAN	NILAI (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	25.208.454.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	14.777.506.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	331.314.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	21.000,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	18.639.235.000,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	52.407.741.000,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00
8	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.003.484.882.446,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	7.251.270.000,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	3.704.617.000,00
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.167.186.000,00
12	DBH Sawit	7.715.893.000,00
Jumlah		1.134.688.119.446,00

Adapun rincian Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.1.1.2.1.C
Rincian Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU)

NO	KETERANGAN	NILAI (Rp)
1	DAU	324.626.711.000,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	1.598.400.000,00
3	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	34.206.380.000,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	6.426.893.000,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	67.486.438.000,00
Jumlah		434.344.822.000,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada tahun 2024 adalah sebesar Rp66.605.764.716,00 atau sebesar 96,52% dari anggaran sebesar Rp69.006.517.000,00. Adapun rincian realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada tahun 2024 sebagai berikut:



Tabel 4.1.1.2.1.D
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.141.511.000,00	1.889.010.700,00	88,21	1.826.012.415,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.425.747.000,00	3.196.287.300,00	93,30	1.491.380.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	26.386.000,00	25.900.000,00	98,16	5.639.411.898,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	617.485.000,00	616.700.000,00	99,87	303.995.000,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	12.989.893.000,00	12.117.667.878,00	93,29	0,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	13.351.921.000,00	13.339.121.249,00	99,90	31.165.848.053,00
DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	6.654.907.000,00	6.654.842.880,00	100,00	7.358.399.289,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	2.353.788.419,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	213.577.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	18.968.667.000,00	18.156.554.920,00	95,72	0,00
DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan	10.830.000.000,00	10.609.679.789,00	97,97	2.035.077.636,00
Jumlah	69.006.517.000,00	66.605.764.716,00	96,52	52.387.489.710,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pada tahun 2024 adalah sebesar Rp21.189.646.525,00 atau sebesar 80,12% dari anggaran sebesar Rp26.445.833.000,00. Adapun rincian realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.1.1.2.1.E
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00	9.516.555.000,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	595.000.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	4.496.771.000,00	3.778.479.000,00	84,03	3.808.690.880,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	567.000.000,00	674.249.000,00	118,92	524.614.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.274.134.000,00	700.773.700,00	55,00	246.565.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	54.880.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	5.363.822.888,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	1.472.113.500,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	571.245.000,00	0,00	0,00	188.877.000,00
DAK Non Fisik-BOKB-KB	1.725.310.000,00	1.445.422.000,00	83,78	0,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000,00	260.000.000,00	50,00	0,00



Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	10.079.980.000,00	9.712.760.000,00	96,36	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	462.500.000,00	462.500.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	1.148.560.000,00	38.220.000,00	3,33	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	10.250.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	2.304.514.000,00	2.024.654.948,00	87,86	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	250.401.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	2.990.168.000,00	2.092.587.877,00	69,98	0,00
Jumlah	26.445.833.000,00	21.189.646.525,00	80,12	21.771.118.268,00

Tidak ada Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) pada tahun 2024.

Realisasi Dana Desa pada tahun 2024 adalah sebesar Rp52.247.805.936,00 atau 101,09% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp51.686.028.000,00 Transfer Dana Desa dilakukan langsung ke Rekening Kas Kampung masing-masing oleh KPPN tetapi dicatat sebagai Pendapatan Transfer sesuai SE Mendagri No 910/4350/SJ Tanggal 16 Agustus 2021. Rincian Realisasi Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke Rekening Kas Kampung per kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.1.2.1.F
Rekapitulasi Dana Desa Per Kecamatan TA 2024

No	Kecamatan	Nilai	Keterangan
1	Kecamatan Long Bagun	14.768.280.009,00	11 Kampung
2	Kecamatan Long Hubung	9.568.402.574,00	11 Kampung
3	Kecamatan Laham	4.766.562.000,00	5 Kampung
4	Kecamatan Long Pahangai	11.440.748.353,00	13 Kampung
5	Kecamatan Long Apari	11.703.813.000,00	10 Kampung
Jumlah		52.247.805.936,00	50 Kampung

4.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2024 adalah sebesar Rp175.921.633.510,00 atau 91,48% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp192.298.919.000,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi tersebut berasal dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1.1.2.2
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil	163.219.225.000,00	146.841.939.510,00	89,97	172.129.247.173,00
Bantuan Keuangan	29.079.694.000,00	29.079.694.000,00	100,00	38.420.000.000,00
Jumlah	192.298.919.000,00	175.921.633.510,00	91,48	210.549.247.173,00



Terdapat Realisasi Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp146.841.939.510,00 yang merupakan Bagi Hasil Pajak Provinsi yang terdiri atas Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB), Bagi Hasil Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok. Adapun rincian Pendapatan Bagi Hasil dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.1.1.2.2.A
Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Uraian	Realisasi TA. 2024 (Rp)	Realisasi TA. 2023 (Rp)
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	16.586.674.000,00	15.198.454.000,00
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	18.737.308.000,00	26.420.136.000,00
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	103.552.841.000,00	122.885.597.065,00
Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	191.406.000,00	183.752.000,00
Bagi Hasil Pajak Rokok	7.773.710.510,00	7.441.308.108,00
Jumlah	146.841.939.510,00	172.129.247.173,00

Terdapat Realisasi Bantuan Keuangan TA 2024 sebesar Rp29.079.694.000,00 atau 100,00% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp29.079.694.000,00. Rincian Realisasi Kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.1.1.2.2.B
Rincian Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00	100,00	36.042.500.000,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	6.079.694.000,00	6.079.694.000,00	100,00	2.377.500.000,00
Jumlah	29.079.694.000,00	29.079.694.000,00	100,00	38.420.000.000,00

4.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2024 adalah sebesar Rp68.712.083.844,69 atau 84,72% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp81.105.014.721,69. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tersebut berasal dari Pendapatan sebagai berikut :

Tabel 4.1.1.3
Rincian Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Results Based Payment	11.090.006.948,00	0,00	0,00	5.015.474.844,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD	3.322.660.000,00	2.446.026.915,00	73,62	0,00



Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi	66.692.347.773,69	66.266.056.929,69	99,36	0,00
Jumlah	81.105.014.721,69	68.712.083.844,69	84,72	5.015.474.844,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batubara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi sebesar Rp66.266.056.929,69 merupakan PNPB dari beberapa perusahaan yaitu PT. Kaltim Prima Coal sebesar Rp55.258.700.615,69, PT. Kideco Jaya Agung sebesar Rp9.767.213.171,00, dan PT. Multi Harapan Utama sebesar Rp1.240.143.143,00.

4.1.2 Belanja

Pada Tahun 2024 realisasi Belanja Daerah mencapai sebesar Rp2.208.676.613.242,73 atau 79,82% yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat, serta terdapat sisa anggaran sebesar Rp558.323.386.757,27 dari anggaran sebesar Rp2.767.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1.2
Realisasi Belanja Seluruh SKPD

No	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	268.234.526.117,00	219.015.547.846,00	(49.218.978.271,00)	81,65
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	202.475.981.720,00	172.637.944.597,73	(29.838.037.122,27)	85,26
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.130.123.478.211,53	874.720.451.920,00	(255.403.026.291,53)	77,4
4	Satuan Polisi Pamong Praja	19.885.967.675,00	18.191.453.087,00	(1.694.514.588,00)	91,48
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30.276.299.040,00	23.617.338.683,00	(6.658.960.357,00)	78,01
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	23.622.005.101,00	16.700.259.979,00	(6.921.745.122,00)	70,7
7	Dinas Lingkungan Hidup	17.637.726.925,00	16.186.942.691,00	(1.450.784.234,00)	91,77
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.375.326.072,00	12.583.608.922,00	(1.791.717.150,00)	87,54
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	250.098.896.572,00	232.093.378.762,00	(18.005.517.810,00)	92,8
10	Dinas Perhubungan	51.177.967.894,00	43.537.396.274,00	(7.640.571.620,00)	85,07
11	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	37.788.467.669,00	30.587.136.750,00	(7.201.330.919,00)	80,94
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	11.454.160.383,00	9.156.272.666,00	(2.297.887.717,00)	79,94
13	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	43.033.641.802,95	27.898.540.880,00	(15.135.100.922,95)	64,83
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	56.025.109.095,00	31.868.039.694,00	(24.157.069.401,00)	56,88
15	Sekretariat Daerah	212.757.569.548,00	180.184.922.664,00	(32.572.646.884,00)	84,69
16	Inspektorat	20.070.731.346,00	14.197.238.288,00	(5.873.493.058,00)	70,74
17	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	52.599.358.154,00	38.363.237.878,00	(14.236.120.276,00)	72,93
18	Badan Pendapatan Daerah	16.222.043.248,00	13.982.681.385,00	(2.239.361.863,00)	86,2



No	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%
19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD dan SKPKD)	123.068.586.293,42	78.394.265.639,00	(44.674.320.654,42)	63,7
20	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	21.330.633.049,00	19.262.952.954,00	(2.067.680.095,00)	90,31
21	Sekretariat DPRD	72.302.574.473,00	50.939.016.887,00	(21.363.557.586,00)	70,45
22	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	8.789.383.536,00	8.042.691.039,00	(746.692.497,00)	91,5
23	Kecamatan Long Apari	7.529.330.474,00	6.521.876.546,00	(1.007.453.928,00)	86,62
24	Kecamatan Long Pahangai	8.350.715.471,00	7.583.538.523,00	(767.176.948,00)	90,81
25	Kecamatan Long Bagun	7.151.271.042,00	5.494.836.868,00	(1.656.434.174,00)	76,84
26	Kecamatan Laham	6.434.752.564,00	5.682.869.367,00	(751.883.197,00)	88,32
27	Kecamatan Long Hubung	6.195.396.252,00	5.847.603.113,00	(347.793.139,00)	94,39
28	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	47.988.100.272,10	45.384.569.340,00	(2.603.530.932,10)	94,57
Jumlah		2.767.000.000.000,00	2.208.676.613.242,73	(558.323.386.757,27)	79,82

Adapun rincian atas Realisasi per Kelompok Belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.2.A
Realisasi Per Kelompok Belanja

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Operasi	1.428.337.880.095,99	1.138.435.336.546,73	79,70	986.223.235.217,57
2	Belanja Modal	1.097.104.383.641,59	863.671.053.927,00	78,72	564.265.297.564,00
3	Belanja Tak Terduga	25.739.153.962,42	3.632.910.056,00	14,11	10.800.000,00
4	Belanja Transfer	215.818.582.300,00	202.937.312.713,00	94,03	165.684.982.712,00
Jumlah		2.767.000.000.000,00	2.208.676.613.242,73	79,82	1.716.184.315.493,57

Adapun rincian atas Realisasi Belanja menurut Fungsi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.2.B
Realisasi Belanja Menurut Fungsi

No	Fungsi Pemerintah Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendidikan	262.231.123.317,00	214.669.103.935,00
2	Kesehatan	198.648.330.770,00	169.110.909.934,73
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.101.390.636.498,53	850.079.325.785,00
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	28.732.841.713,00	24.641.126.135,00
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	50.162.266.715,00	41.808.791.770,00
6	Sosial	20.033.528.414,00	13.846.526.250,00
7	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.588.476.687,00	2.853.733.729,00
8	Pangan	2.256.292.400,00	1.936.705.267,00
9	Lingkungan Hidup	17.637.726.925,00	16.186.942.691,00
10	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.375.326.072,00	12.583.608.922,00
11	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	250.098.896.572,00	232.093.378.762,00
12	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.827.650.950,00	3.527.034.663,00



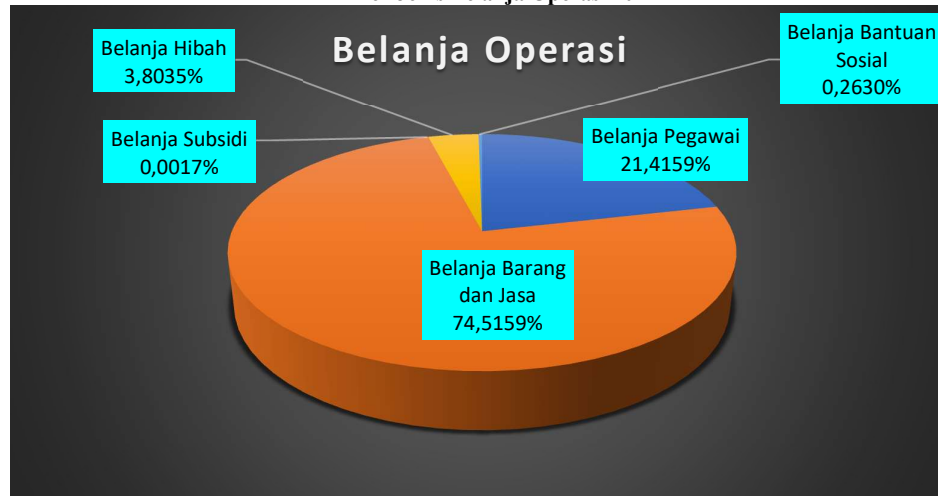
No	Fungsi Pemerintah Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
13	Perhubungan	51.177.967.894,00	43.537.396.274,00
14	Komunikasi dan Informatika	35.103.028.669,00	28.585.171.854,00
15	Penanaman Modal	11.454.160.383,00	9.156.272.666,00
16	Kepemudaan dan Olahraga	9.749.117.500,95	2.907.689.677,00
17	Statistik	1.415.803.000,00	995.695.146,00
18	Persandian	1.269.636.000,00	1.006.269.750,00
19	Kebudayaan	6.003.402.800,00	4.346.443.911,00
20	Kelautan dan Perikanan	1.502.460.400,00	768.045.868,00
21	Pariwisata	33.284.524.302,00	24.990.851.203,00
22	Pertanian	52.266.356.295,00	29.163.288.559,00
23	Sekretariat Daerah	212.757.569.548,00	180.184.922.664,00
24	Sekretariat DPRD	72.302.574.473,00	50.939.016.887,00
25	Perencanaan	37.324.703.254,00	27.074.483.372,00
26	Keuangan	139.290.629.541,42	92.376.947.024,00
27	Kepegawaian	19.310.214.409,00	17.455.827.154,00
28	Pendidikan dan Pelatihan	2.020.418.640,00	1.807.125.800,00
29	Penelitian dan Pengembangan	15.274.654.900,00	11.288.754.506,00
30	Pengelolaan Perbatasan	8.789.383.536,00	8.042.691.039,00
31	Inspektorat Daerah	20.070.731.346,00	14.197.238.288,00
32	Kecamatan	35.661.465.803,00	31.130.724.417,00
33	Kesatuan Bangsa dan Politik	47.988.100.272,10	45.384.569.340,00
Jumlah		2.767.000.000.000,00	2.208.676.613.242,73

4.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Daerah TA 2024 adalah sebesar Rp1.138.435.336.546,73 atau 79,70% dari jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp1.428.337.880.095,99. Belanja Operasi Pemerintah Daerah terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.



Gambar 4.3
Perbandingan Komposisi
Per Jenis Belanja Operasi 2024



Adapun rincian atas Realisasi per Jenis Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.2.1
Realisasi Per Jenis Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pegawai	288.315.280.554,00	243.806.314.317,00	84,56	215.070.000.383,00
2	Belanja Barang dan Jasa	1.071.368.793.848,89	848.315.300.662,73	79,18	724.792.105.103,57
3	Belanja Subsidi	3.250.000.000,00	19.225.102,00	0,59	189.840.000,00
4	Belanja Hibah	59.607.119.693,10	43.300.192.284,00	72,64	43.843.744.008,00
5	Belanja Bantuan Sosial	5.796.686.000,00	2.994.304.181,00	51,66	2.327.545.723,00
Jumlah		1.428.337.880.095,99	1.138.542.076.555,73	79,70	986.223.235.217,57

4.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 adalah sebesar Rp243.806.314.317,00 atau 84,56% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp288.315.280.554,00. Rincian Belanja Pegawai disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1.2.1.1
Realisasi Per Rincian Objek Belanja Pegawai

Uraian		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	119.861.567.399,00	96.185.432.631,00	80,25	77.867.986.379,00
1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	74.990.697.775,00	64.801.040.096,00	86,41	55.266.985.699,00
1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	7.756.767.774,00	6.174.843.284,00	79,61	5.202.709.682,00
1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	12.430.068.262,00	10.028.883.822,00	80,68	3.052.924.872,00
1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	3.071.914.790,00	2.465.915.186,00	80,27	1.508.873.455,00
1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.212.665.346,00	1.800.688.677,00	56,05	1.463.477.806,00
1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	5.499.173.087,00	4.002.576.454,00	72,79	3.497.261.150,00
1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	995.620.861,00	107.825.080,00	10,83	60.847.534,00



	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	178.532.348,00	1.005.080,00	0,56	18.021.524,00
1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	10.527.408.386,00	6.293.542.641,00	59,78	7.394.223.171,00
1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN (JKK)	691.935.288,00	127.278.078,00	18,39	100.665.369,00
1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN (JKM)	506.783.482,00	381.834.233,00	75,34	301.996.117,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	138.747.786.343,00	122.071.149.778,00	87,98	112.340.303.111,00
2.1	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	137.398.556.419,00	120.732.386.250,00	87,87	111.487.028.956,00
2.2	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.227.219.028,00	1.216.752.632,00	99,15	853.274.155,00
2.3	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	122.010.896,00	122.010.896,00	100,00	0,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	13.453.596.840,00	12.325.552.500,00	91,62	11.110.883.000,00
3.1	Belanja Honorarium	13.453.596.840,00	12.325.552.500,00	91,62	11.110.883.000,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	15.275.800.872,00	12.596.126.608,00	82,46	13.070.384.943,00
4.1	Belanja Uang Representasi DPRD	551.793.900,00	513.109.900,00	92,99	550.071.900,00
4.2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.321.600,00	32.075.800,00	40,95	34.441.400,00
4.3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	81.110.400,00	44.827.980,00	55,27	48.231.720,00
4.4	Belanja Uang Paket DPRD	45.129.000,00	34.923.000,00	77,38	38.682.000,00
4.5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00	506.383.500,00	77,38	560.889.000,00
4.6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	71.765.100,00	45.066.000,00	62,80	65.711.100,00
4.7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	16.515.600,00	9.135.000,00	55,31	13.565.475,00
4.8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.528.000.000,00	3.204.600.000,00	90,83	3.528.000.000,00
4.9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	882.000.000,00	294.000.000,00	33,33	882.000.000,00
4.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	170.940.000,00	142.805.635,00	83,54	156.214.944,00
4.11	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.763.099.772,00	4.012.940.332,00	84,25	4.405.284.754,00
4.12	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.271.580.000,00	3.610.834.461,00	84,53	2.762.092.650,00
4.13	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	161.175.000,00	145.425.000,00	90,23	25.200.000,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH	182.770.000,00	166.933.700,00	91,34	167.962.950,00
5.1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	100,00	54.600.000,00
5.2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	11.200.000,00	7.140.000,00	63,75	7.140.000,00
5.3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	100,00	98.280.000,00
5.4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	11.620.000,00	6.083.280,00	52,35	7.097.160,00
5.5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	7.000.000,00	828.500,00	11,84	843.750,00
5.6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	70.000,00	1.920,00	2,74	2.040,00
6	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	793.759.100,00	461.119.100,00	58,09	512.480.000,00
6.1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	540.960.000,00	208.320.000,00	38,51	312.480.000,00
6.2	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	252.799.100,00	252.799.100,00	100,00	200.000.000,00
	Jumlah	288.315.280.554,00	243.806.314.317,00	84,56	215.070.000.383,00



Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan TA 2024 adalah sebesar Rp96.185.432.631,00 atau 80,25% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp119.861.567.399,00. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN adalah sebesar Rp122.071.149.778,00 atau 87,98% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp138.747.786.343,00. Terjadi kenaikan pada belanja gaji dan tunjangan serta Belanja Tambahan Penghasilan ASN disebabkan adanya penambahan CPNS dan PPPK di tahun 2024.

Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2024 sebesar Rp12.325.552.500,00 atau 91,62% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp13.453.596.840,00 yang merupakan Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, dan Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2024 sebesar Rp12.596.126.608,00 atau 82,46% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp15.275.800.872,00.

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH TA 2023 sebesar Rp166.933.700,00 atau 91,34% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp182.770.000,00.

Realisasi Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH adalah sebesar Rp461.119.100,00 atau 58,09% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp3.793.759.100,00.

4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 adalah sebesar Rp848.315.300.662,73 atau 79,18% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp1.071.368.793.848,89 Rincian Belanja barang dan jasa disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1.2.1.2
Realisasi Per Objek Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	386.592.482.379,89	294.688.062.733,00	76,23	127.402.226.299,80
2	Belanja Barang Tak Pakai Habis	444.405.500,00	437.000.000,00	98,33	582.511.050,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	58.258.700,00	18.422.000,00	31,62	0,00
4	Belanja Jasa Kantor	247.605.945.813,00	198.431.126.275,58	80,14	188.000.263.434,77
5	Belanja Iuran dan Jaminan/Asuransi	15.963.500.797,00	13.657.509.780,00	85,55	9.223.171.181,00
6	Belanja Sewa Tanah	626.591.000,00	399.921.000,00	63,82	504.990.000,00
7	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	19.393.172.000,00	16.892.279.600,00	87,10	9.534.747.000,00
8	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.272.308.950,00	4.634.464.928,00	73,89	7.316.038.306,00
9	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	317.400.000,00	240.250.456,00	75,69	152.940.000,00
10	Belanja Jasa Konsultasi Kontruksi	713.056.000,00	624.456.155,00	87,57	5.122.441.887,00
11	Belanja Jasa Konsultasi Non Kontruksi	11.128.632.400,00	9.494.823.107,00	85,32	11.707.095.463,00
12	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00	0,00	101.010.000,00
13	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	20.333.452.000,00	15.864.890.121,00	78,02	7.933.659.846,00
14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	21.000.000,00	8.582.000,00	40,87	19.439.000,00
15	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	1.400.000.000,00	1.235.879.040,00	88,28	699.814.500,00
16	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	580.437.700,00	142.382.387,00	24,53	0,00
17	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
18	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.203.249.810,00	8.674.610.583,00	77,43	5.367.202.590,00
19	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.555.467.600,00	3.706.155.639,00	66,71	917.994.125,00



No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
20	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	690.198.564,00	121.768.000,00	17,64	872.111.299,00
21	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
22	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	895.305.268,00	758.958.000,00	84,77	45.000.000,00
23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	291.566.611.406,00	236.210.750.478,15	81,01	182.147.819.691,00
24	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	610.101.800,00	531.570.825,00	87,13	0,00
25	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.834.290.000,00	21.937.541.000,00	84,92	25.575.589.000,00
26	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.106.932.361,00	15.222.022.455,00	79,67	141.534.640.431,00
27	Belanja Barang dan Jasa BOS	4.455.993.800,00	4.381.874.100,00	98,34	0,00
Jumlah		1.071.368.793.848,89	848.315.300.662,73	79,18	724.792.105.103,57

Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp724.792.105.103,57 maka Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp123.523.195.559,16.

Pada tahun 2024 Belanja Barang Pakai Habis dianggarkan sebesar Rp386.592.482.379,89 dan mencapai realisasi sebesar Rp294.688.062.733,00 atau sebesar 76,23%, jika dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp127.402.226.299,80 maka terjadi kenaikan sebesar Rp167.285.836.433,20 atau 131,31 %. Belanja barang pakai habis digunakan untuk membeli barang yang habis untuk keperluan atau aktivitas SKPD dalam memenuhi tugas dan fungsi SKPD tersebut, realisasi pada tahun 2024 yang mengalami kenaikan juga menunjukkan bahwa kenaikan kebutuhan barang pakai habis SKPD dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu untuk memenuhi tugas dan fungsi SKPD.

Pada tahun 2024 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan dianggarkan sebesar Rp20.333.452.000,00 dan mencapai realisasi sebesar Rp15.864.890.121,00 atau sebesar 78,02%, jika dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp7.933.659.846,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp7.931.230.275,00 atau sebesar 99,97%. Kenaikan realisasi belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan ini karena pemerintah daerah Kabupaten Mahakam Ulu mendukung upaya pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas aparatur negara.

Pada tahun 2024 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp5.555.467.600,00 dan mencapai realisasi sebesar Rp3.706.155.639,00 atau sebesar 66,71%, jika disbanding dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp917.994.125,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.788.161.514,00 atau sebesar 303,72%. Kenaikan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ini merupakan belanja pemerintah daerah guna menjaga kondisi gedung dan bangunan tetap layak digunakan seperti gedung kantor, rumah sakit dan puskesmas, serta rehabilitasi dermaga yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu.

Pada tahun 2024 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud dianggarkan sebesar Rp895.305.268,00 dan mencapai realisasi sebesar Rp758.958.000,00 atau sebesar 84,77%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp45.000.000,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp713.958.000,00 atau sebesar 1.586,57%. Kenaikan realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud ini dikarenakan pada tahun 2024 beberapa SKPD melakukan pemeliharaan terhadap software yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD terkait yaitu pada Sekretariat daerah sebesar Rp667.758.000 dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp91.200.000,00.



4.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Terdapat Realisasi Belanja Subsidi per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.225.102,00 atau 0,59% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp3.250.000.000,00. Belanja Subsidi ini merupakan kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah. Realisasi Belanja Subsidi dapat diuraikan sebagai berikut ini:

Tabel 4.1.2.1.3
Realisasi Belanja Subsidi

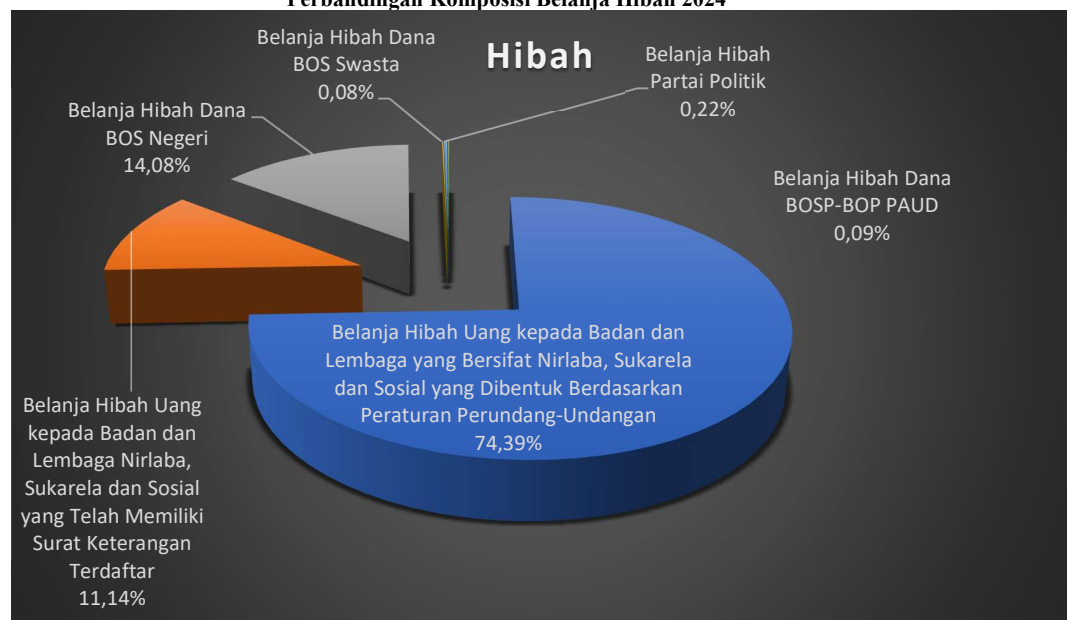
Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	3.250.000.000,00	19.225.102,00	0,59	189.840.000,00
Jumlah	3.250.000.000,00	19.225.102,00	0,59	189.840.000,00

Rendahnya realisasi belanja subsidi pada tahun 2024 ini dikarenakan kurangnya perencanaan yang detail dan akurat mengenai kebutuhan subsidi, jumlah penerima subsidi, dan besaran nya, serta kurang koordinasi dalam penanganan penyaluran subsidi yaitu dalam hal ini adalah Subsidi Ongkos Angkut.

4.1.2.1.4 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp43.300.192.284,00 atau 72,64% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp59.607.119.693,10. Realisasi Belanja Hibah terdiri atas Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp37.034.487.620,00. Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp6.130.546.550,00. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp96.938.114,00. Belanja Hibah Dana BOSP sebesar Rp38.220.000,00, yang dapat digambarkan seperti berikut :

Gambar 4.4
Perbandingan Komposisi Belanja Hibah 2024





Tabel 4.1.2.1.4
Realisasi Per Objek Belanja Hibah

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	36.889.752.400,00	32.211.752.400,00	87,32	17.902.501.600,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	13.798.715.420,00	4.822.735.220,00	34,95	13.119.159.800,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	6.259.684.000,00	6.097.906.550,00	97,42	12.464.068.800,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	817.020.000,00	32.640.000,00	4,00	0,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	405.848.873,10	96.938.114,00	23,89	358.013.808,00
Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.436.099.000,00	38.220.000,00	2,66	0,00
Jumlah	59.607.119.693,10	43.300.192.284,00	72,64	43.843.744.008,00

Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 4.1.2.1.4.A
Rincian Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

NO	URAIAN	NILAI
1	PENGAJUAN PENYALURAN DANA HIBAH UNTUK KEVIKEPAN MAHAKAM ULU KEGIATAN NATAL OIKUMENE TAHUN 2023 DAN TAHUN BARU 2024	474.083.800,00
2	SP2D PEMBAYARAN DANA HIBAH PENGAMANAN PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024 (POLRES MAHAKAM ULU)	1.500.000.000,00
3	SP2D PEMBAYARAN BELANJA DANA HIBAH PENGAWASAN PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHAP II TAHUN 2024	5.283.823.200,00
4	PEMBAYARAN BELANJA DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHAP II TAHUN 2024	21.569.929.200,00
5	PEMBAYARAN BELANJA DANA HIBAH PENGAMANAN PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024 (KODIM 0912 KUTAI BARAT)	1.000.000.000,00
6	PENGAJUAN PENYALURAN BANTUAN DANA HIBAH UNTUK WANITA KATOLIK REPUBLIK INDONESIA (WKRI) CABANG PAROKI SANTO YOSEPH LONG PAHANGAI TAHUN ANGGARAN 2024	185.000.000,00
7	PENGAJUAN PENYALURAN BANTUAN DANA HIBAH UNTUK BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2024	300.000.000,00
8	PENGAJUAN PENYALURAN DANA HIBAH UNTUK PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN IBADAH MASJID JAMI BAITUL MUTTAQIN UJOH BILANG TAHUN ANGGARAN 2024	125.000.000,00
9	PENGAJUAN PENYALURAN BANTUAN DANA HIBAH UNTUK MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2024	300.000.000,00
10	SP2D PENGAJUAN PENYALURAN DANA HIBAH UNTUK PENGADAAN BANGKU DAN SARANA GEREJA KATOLIK SANTA MARIA RATU PENCINTA DAMAI BATOQ KELO TAHUN ANGGARAN 2024	350.000.000,00



NO	URAIAN	NILAI
11	SP2D PENGAJUAN PENYALURAN BANTUAN DANA HIBAH UNTUK PENGADAAN PEREDAM SUARA DAN PANAS DALAM RUANGAN GEREJA KEMAH INJIL INDONESIA (GKII) JEMAAT BETHEL DATAH BILANG ILIR TAHUN ANGGARAN 2024	196.800.000,00
12	SP2D PENGAJUAN PENYALURAN BANTUAN DANA HIBAH UNTUK PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN IBADAH GEREJA KEMAH INJIL INDONESIA (GKII) RUKUN DAMAI TAHUN ANGGARAN 2024	110.000.000,00
13	SP2D PENGAJUAN BANTUAN DANA HIBAH UNTUK PENGADAAN SARANA GEREJA KATHOLIK KELUARGA KUDUS NAZARETH LONG BAGUN TAHUN ANGGARAN 2024	350.000.000,00
14	SP2D PEMBAYARAN BELANJA HIBAH PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024 (KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN MAHAKAM ULU)	1.000.000.000,00
15	SP2D PENGAJUAN PENYALURAN BANTUAN DANA HIBAH UNTUK OMK STASI SANTO YOHANES PEMBAPTIS LONG LUNUK TAHUN ANGGARAN 2024	100.000.000,00
16	SP2D PENGAJUAN BANTUAN DANA HIBAH UNTUK PAROKI SANTO PAULUS TIONG OHANG KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2024	250.000.000,00
17	PENGAJUAN BANTUAN DANA HIBAH UNTUK LEMBAGA PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2024	650.000.000,00
18	SP2D PENGAJUAN BANTUAN DANA HIBAH UNTUK WKRI STASI SANTO ANTONIUS DARI PADUA MAMAHAK BESAR TAHUN ANGGARAN 2024	122.700.000,00
19	SP2D PEMBAYARAN BANTUAN DANA HIBAH UNTUK LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ) KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2024	400.000.000,00
20	SP2D DANA HIBAH UNTUK PENGADAAN BANGKU GEREJA PAROKI SANTO PETRUS UJOH BILANG TAHUN ANGGARAN 2024	300.000.000,00
21	SP2D PENGAJUAN BANTUAN DANA HIBAH UNTUK GEREJA GKII BATU MAJANG TAHUN ANGGARAN 2024	109.215.420,00
22	SP2D PEMBAYARAN BANTUAN HIBAH UNTUK LP3KD KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2024	499.936.000,00
23	SP2D PEMBERIAN UANG HIBAH KEPADA KWARCAB PRAMUKA KABUPATEN MAHAKAM ULU	170.000.000,00
24	SP2D PEMBERIAN UANG HIBAH KEPADA KWARCAB PRAMUKA KABUPATEN MAHAKAM ULU	330.000.000,00
25	SP2D-LS BELANJA HIBAH BARANG (KENDARAAN RODA EMPAT)	1.358.000.000,00
JUMLAH		37.034.487.620,000

Belanja Hibah Dana Bosnas merupakan belanja atas dana bosnas yang diterima langsung oleh 53 sekolah yang tersebar di 5 kecamatan lingkup Kabupaten Mahakam Ulu, yang berdasarkan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan bahwa dana bosnas langsung disalurkan ke rekening satuan Pendidikan dan dapat langsung digunakan sesuai tata cara yang diatur dalam petunjuk teknis. Belanja Hibah Dana BOS terdiri atas Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri sebesar Rp6.097.906.550,00 dan Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar Rp32.640.000,00.

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah senilai Rp96.938.114,00, dengan rincian penerima sebagai berikut:



Tabel 4.1.2.1.4.B
Rincian Belanja Hibah kepada Partai Politik

URAIAN	NILAI (Rp)
SP2D PEMBAYARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KEPADA PARTAI GOLONGAN KARYA PERIODE 2019 - 2024	21.351.155,00
SP2D PEMBAYARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KEPADA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PERIODE 2019 - 2024	29.981.924,00
SP2D PEMBAYARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KEPADA PARTAI DEMOKRAT INDONESIA PERJUANGAN PERIODE 2019 - 2024	45.605.035,00
JUMLAH	96.938.114,00

4.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.994.304.181,00 atau 51,66% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp5.796.686.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial dapat diuraikan sebagai berikut ini:

Tabel 4.1.2.1.5
Rincian Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.300.000.000,00	1.505.290.000,00	65,45	1.603.282.600,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	65.913.123,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	3.496.686.000,00	1.489.014.181,00	42,58	231.780.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	426.570.000,00
Jumlah	5.796.686.000,00	2.994.304.181,00	51,66	2.327.545.723,00

Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu merupakan belanja atas Bantuan Santunan Bagi Keluarga Miskin (Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Wanita Rawan Sosial Ekonomi Dan Duda Tidak Produktif) Tahun Anggaran 2024 yang diterima oleh Duda Miskin, Janda Miskin, Lansia dan Penyandang Disabilitas yang tersebar di 5 kecamatan lingkup Kabupaten Mahakam Ulu.

Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor : 400.9/K.112/2024 Tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Santunan Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 dengan Jumlah Penerima Bantuan sebanyak 1.502 Orang yang terbagi dari di 5 kecamatan lingkup Kabupaten Mahakam Ulu.

Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu dapat dirincikan sebagai berikut:



Tabel 4.1.2.1.5.A
Rincian Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu

No	TANGGAL	NO. BUKTI	URAIAN	NILAI
1	09-Sep-2024	16.16/06.0/000416/UP/1.0 6.2.08.0.00.05.0000/P.02/ 12/2023	Belanja Bantuan Santunan Bagi Keluarga Miskin (Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Wanita Rawan Sosial Ekonomi Dan Duda Tidak Produktif) Tahun Anggaran 2024.	1.505.290.000,00
JUMLAH				1.505.290.000,00

Jumlah penerima bantuan sosial uang yang direncanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.2.1.5.B
Jumlah Penerima Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PENERIMA (ORANG)				
		LANSIA	DISABILITAS	WRSE	DUDA	JUMLAH
1	LONG APARI	105	30	13	7	155
2	LONG PAHANGAI	262	146	17	12	437
3	LONG BAGUN	211	142	59	17	429
5	LAHAM	5	18	0	2	25
4	LONG HUBUNG	308	58	69	21	456
TOTAL		891	394	158	59	1502

Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga dapat dirincikan sebagai berikut ini:

Tabel 4.1.2.1.5.C
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga

No	TANGGAL	URAIAN	NILAI
1	27-Sep-2024	Sp2d Bantuan Santunan Bagi Korban Bencana di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024 dengan Nomor SK 460.466/K.277/2023	25.000.000,00
2	27-Sep-2024	Sp2d Bantuan Santunan Bagi Korban Bencana di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024 dengan Nomor SK 400.9/K43/2024	186.000.000,00
3	28-Nov-2024	SP2D Belanja Sembako Logistik Bagi Korban Bencana Kebakaran Di Kampung Long Pakaq Baru	12.128.730,00
4	28-Nov-2024	SP2D Belanja Sembako Bantuan Logistik Bagi Korban Bencana Kebakaran	1.885.451,00
5	20-Des-2024	SP2D Pembayaran Santunan dan Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024 sesuai Surat Keputusan Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024	238.000.000,00
6	28-Des-2024	SP2D-LS Pencairan Santunan dan Bantuan Sosial Program Ketahanan Keluarga di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024	1.026.000.000,00
JUMLAH			1.489.014.181,00



Dalam pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga SKPD Teknis yang membidangi adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pemberian Santunan dan Bantuan Melalui Program Ketahanan Keluarga dan berdasarkan Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor: 400.9.9.1/K.167/2024 Tentang Penetapan dan Besaran Bantuan Program Ketahanan Keluarga Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024. Jumlah penerima bantuan sosial uang yang direncanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.2.1.5.D
Jumlah Penerima Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga

No	Kecamatan	Jumlah KPM	Jumlah Santunan	Keterangan
1	Long Apari	20	60.000.000,00	@3.000.000,00
2	Long Pahangai	52	156.000.000,00	
3	Long Bagun	207	621.000.000,00	
4	Laham	28	84.000.000,00	
5	Long Hubung	35	105.000.000,00	
Jumlah		342	1.026.000.000,00	

4.1.2.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp863.671.053.927,00 atau 78,72% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp1.097.104.383.641,59 yang dapat dijelaskan kedalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.1.2.2
Belanja Modal

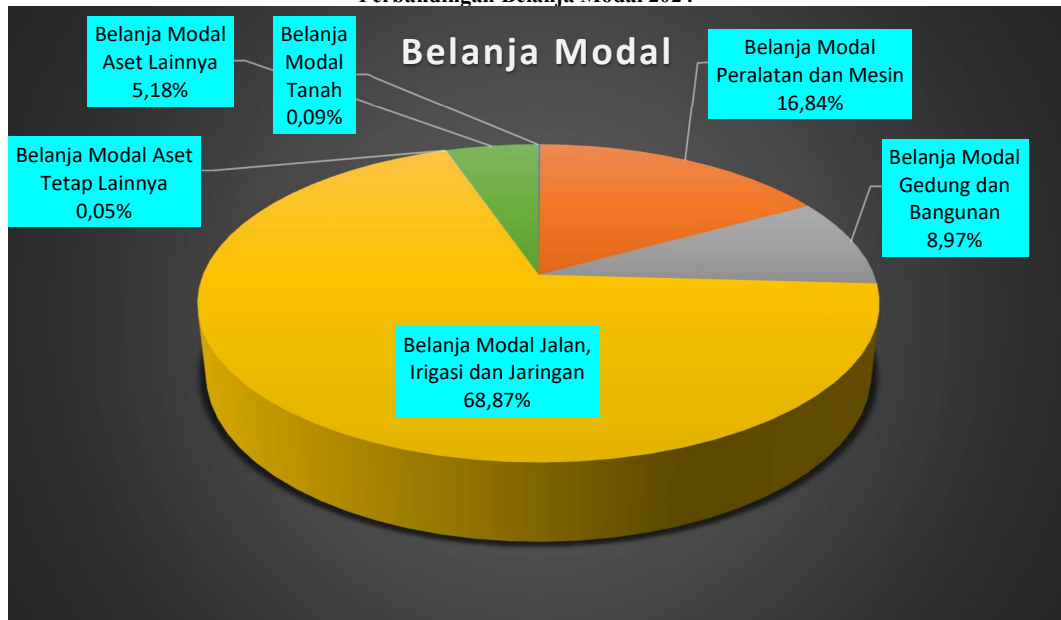
No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	1.500.000.000,00	746.620.000,00	49,77	2.455.361.692,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	167.552.928.347,00	145.457.685.363,00	86,81	53.837.498.492,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	145.723.650.737,36	77.472.457.897,00	53,16	140.819.291.410,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	729.339.369.297,23	594.833.786.926,00	81,56	337.386.866.136,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	409.728.600,00	390.541.000,00	95,32	28.209.356.534,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	52.578.706.660,00	44.769.962.741,00	85,15	1.556.923.300,00
Jumlah		1.097.104.383.641,59	863.671.053.927,00	78,72	564.265.297.564,00

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 1**.



Adapun Persentase Belanja Modal per jenis Belanja Modal adalah sebagai berikut :

Gambar 4.5
Perbandingan Belanja Modal 2024



4.1.2.2.A Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah merupakan pengeluaran untuk pengadaan /pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp746.620.000,00 atau 49,77% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp1.500.000.000,00 yang dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1.2.2.A
Belanja Modal Tanah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah Persil	1.500.000.000,00	746.620.000,00	49,77	0,00
2	Belanja Modal Lapangan	0,00	0,00	0,00	2.455.361.692,00
Jumlah		1.500.000.000,00	746.620.000,00	49,77	2.455.361.692,00

4.1.2.2.B Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.



Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp145.457.685.363,00 atau 86,81% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp167.552.928.347,00 yang dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1.2.2.B
Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	5.789.496.037,00	5.115.292.516,00	88,35	5.149.350.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	34.618.520.890,00	31.894.548.740,00	92,13	15.899.705.001,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	32.736.300,00	19.870.800,00	60,70	283.045.610,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	163.831.700,00	98.382.200,00	60,05	0,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	61.563.402.014,00	54.793.795.695,00	89,00	13.196.364.815,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.960.522.537,00	4.725.807.521,00	79,29	3.458.657.192,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	18.190.025.964,00	17.015.763.711,00	93,54	5.287.604.859,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.181.616.900,00	2.062.201.096,00	94,53	0,00
9	Belanja Modal Komputer	35.304.913.837,00	26.557.846.084,00	75,22	9.712.116.475,00
10	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	34.280.540,00
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	469.500.768,00	69.607.500,00	14,83	201.500.000,00
12	Belanja Modal Alat Peraga	5.698.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Modal Rambu-Rambu	210.000.000,00	210.000.000,00	100,00	614.874.000,00
14	Belanja Modal Peralatan Olahraga	478.031.200,00	376.732.000,00	78,81	0,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	295.814.600,00	293.611.400,00	99,26	0,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	2.288.817.600,00	2.224.226.100,00	97,18	0,00
Jumlah		167.552.928.347,00	145.457.685.363,00	86,81	53.837.498.492,00

4.1.2.2.C Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp77.472.457.897,00 atau 53,16% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp145.723.650.737,36 yang dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:



Tabel 4.1.2.2.C
Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	132.584.284.397,36	67.249.350.030,00	50,72	140.043.511.410,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	6.928.261.300,00	5.591.023.387,00	80,70	0,00
3	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	64.000.000,00	47.952.000,00	74,93	0,00
4	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	6.147.105.040,00	4.584.132.480,00	74,57	775.780.000,00
Jumlah		145.723.650.737,36	77.472.457.897,00	53,16	140.819.291.410,00

4.1.2.2.D Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi merupakan pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp594.833.786.926,00 atau 81,56% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp729.339.369.297,23 yang dapat dijelaskan kedalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.1.2.2.D
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	616.637.463.053,40	545.043.712.686,00	88,39	330.126.428.790,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	105.401.526.252,83	42.512.487.097,00	40,33	4.078.948.123,00
3	Belanja Modal Instalasi	3.885.679.991,00	3.866.467.143,00	99,51	3.105.539.223,00
4	Belanja Modal Jaringan	3.414.700.000,00	3.411.120.000,00	99,90	75.950.000,00
Jumlah		729.339.369.297,23	594.833.786.926,00	81,56	337.386.866.136,00

4.1.2.2.E Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya merupakan Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam



belanja modal ini adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp390.541.000,00 atau 95,32% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp409.728.600,00 yang dapat dijelaskan kedalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.1.2.2.E
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	108.450.000,00	108.400.000,00	99,95	729.073.524,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	102.000.000,00	90.000.000,00	88,24	0,00
3	Belanja Modal Tanaman	199.278.600,00	192.141.000,00	96,42	0,00
4	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	27.480.283.010,00
Jumlah		409.728.600,00	390.541.000,00	95,32	28.209.356.534,00

4.1.2.2.F Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya merupakan pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya namun tidak termasuk dalam kategori tanah, gedung, bangunan, peralatan, dan mesin. Aset ini dapat berupa aset tak berwujud, aset yang digunakan dalam operasional, atau aset khusus lainnya yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran.

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp44.769.962.741,00 atau 85,15% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp 52.578.706.660,00 yang dapat dijelaskan kedalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.1.2.2.F
Belanja Modal Aset Lainnya

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	2.643.327.400,00	1.985.053.393,00	75,10	158.150.000,00
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	49.935.379.260,00	42.784.909.348,00	85,68	1.198.940.000,00
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00	199.833.300,00
Jumlah		52.578.706.660,00	44.769.962.741,00	85,15	1.556.923.300,00

4.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.632.910.056,00 atau 14,11% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp25.739.153.962,42 Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2024 terjadi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.



Tabel 4.1.2.3
Belanja Tak Terduga

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Tidak Terduga	25.739.153.962,42	3.632.910.056,00	14,11	10.800.000,00
Jumlah		25.739.153.962,42	3.632.910.056,00	14,11	10.800.000,00

SKPD pelaksana Belanja Tak Terduga adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.2.3.A
Rincian Belanja Tak Terduga

No	SKPD	DASAR HUKUM	Alokasi BTT DALAM SK (Rp)	NILAI SP2D	PERTANGGUNG JAWABAN BTT (Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	SK Bupati Nomor 300.2/K.63/2024 Tentang Penetapan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Longsor Di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024	1.391.145.900,00	1.298.958.100,00	1.035.414.500,00
2	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SK Bupati Nomor 400.2/K.116/2024 Tentang Penetapan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Longsor Di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024	2.450.000.000,00	2.450.000.000,00	2.403.872.056,00
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SK Bupati Nomor 400.7/K.148/2024 Tentang Penetapan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Longsor Di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024	0,00	640.326.620,00	193.623.500,00
Jumlah			3.841.145.900,00	4.389.284.720,00	3.632.910.056,00

4.1.2.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain. Realisasi Transfer TA 2024 adalah sebesar Rp202.937.312.713,00 atau 94,03% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp215.818.582.300,00.



Tabel 4.1.2.4
Belanja Transfer

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	50.760.654.012,00
Belanja Bantuan Keuangan Umum Provinsi kepada Desa	3.750.000.000,00	3.450.000.000,00	92,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	114.624.328.700,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	160.382.554.300,00	147.239.506.777,00	91,81	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	51.686.028.000,00	52.247.805.936,00	101,09	0,00
Jumlah	215.818.582.300,00	202.937.312.713,00	94,03	165.684.982.712,00

Belanja Transfer Belanja Bantuan Keuangan Umum Provinsi kepada Desa merupakan Belanja Transfer kepada Desa merupakan Bantuan Keuangan yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Desa dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dimana setiap kampung mendapat alokasi sebesar Rp75.000.000,00.

Belanja Transfer Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa merupakan Bantuan Keuangan yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu kepada 50 (lima puluh) Desa, dan pencatatan atas Realisasi Dana Desa yang disalurkan langsung ke rekening kas kampung. Pada tahun anggaran 2024 pemberian bantuan keuangan kepada kampung ini didasarkan pada Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2024.

Rincian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.2.4.A
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa

SKPD	URAIAN	NILAI (Rp)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	Realisasi Belanja Dana Desa TA 2024	52.247.805.936,00
JUMLAH		52.247.805.936,00

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung bahwa realisasi pendapatan Pemerintah Kampung sebesar Rp52.247.805.936,00 dari anggaran sebesar Rp51.686.028.000,00 atau 101,09% dan realisasi belanja



Pemerintah Kampung sebesar Rp199.487.312.713,00 dari anggaran sebesar Rp212.068.582.300,00 atau sebesar 94,07%.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 25**.

4.1.3 Surplus/(Defisit) LRA

Surplus/(Defisit) LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Realisasi defisit LRA per 31 Desember 2024 sebesar Rp163.411.042.361,82 atau 18,37% dari anggaran Defisit LRA sebesar Rp889.734.426.775,00.

4.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran, yang terdiri dari:

4.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah sebesar Rp889.740.981.775,38 atau 100,00% dari anggaran Rp899.740.981.775,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1.4.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	899.734.426.775,00	899.734.426.775,38	100,00	401.896.491.955,37
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	6.555.000,00	0,00	25.561.400,00
Jumlah	899.734.426.775,00	899.740.981.775,38	100,00	401.922.053.355,37

Realisasi Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat pada tahun 2024 sebesar Rp6.555.000,00 merupakan setoran pengembalian Dana Bergulir atas nama Nanang Puji Utomo yang disetor ke Rekening Dana Bergulir Kab. Mahulu.



4.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran Rp10.000.000.000,00 yang merupakan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada tahun 2024.

4.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp726.329.939.686,56 merupakan jumlah antara defisit LRA sebesar Rp163.411.042.088,82 dan pembiayaan netto sebesar Rp889.740.981.775,38.

4.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, Koreksi SAL Akhir, dari Laporan Perubahan SAL.

Penjelasan masing-masing pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, sebagai berikut:

Tabel 4.2
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

URAIAN	2024	2023
Saldo Anggaran Lebih Awal	899.734.426.775,38	401.896.491.955,37
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	899.734.426.775,38	401.896.491.955,37
Sub Total	0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	726.329.939.686,56	899.734.426.775,38
Sub Total	726.329.939.686,56	899.734.426.775,38
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	726.329.939.686,56	899.734.426.775,38

4.2.1.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran lebih awal per 31 Desember 2024 sebesar Rp899.734.426.775,38 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) per 31 Desember 2023.

4.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp899.734.426.775,38 merupakan Realisasi penggunaan SiLPA per 31 Desember 2023 yang dianggarkan pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp899.734.426.775,38.

4.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) per 31 Desember 2024 sebesar Rp726.329.939.686,56 merupakan jumlah antara:



Tabel 4.2.3
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)
Surplus / Defisit Anggaran	(163.411.042.088,82)
Pembiayaan Netto	889.740.981.775,38
SILPA Tahun berjalan	726.329.939.686,56

4.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Tidak terdapat koreksi pembukuan tahun sebelumnya pada tahun 2024

4.2.5 Lain-Lain

Tidak terdapat Transaksi Lain-Lain yang mempengaruhi Saldo Anggaran Lebih (SAL).

4.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp726.329.939.686,56 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) per 31 Desember 2024.



4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan. Dalam penjelasan pos-pos neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Neraca Daerah

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
ASET	5.671.849.930.834,25	4.966.109.286.391,04	705.740.644.443,21
KEWAJIBAN	29.435.872.014,96	24.566.523.584,05	4.869.348.430,91
EKUITAS	5.642.414.058.819,29	4.941.542.762.806,99	700.871.296.012,30

Berdasarkan rincian pada Tabel 4.3 diatas, terlihat bahwa terdapat kenaikan akun Kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu pada Tahun 2024 dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp4.869.348.430,91 atau 19,82%. Hal ini terjadi karena kegiatan - kegiatan yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2023 yang dibayarkan pada tahun 2024.

Pada akun Aset terdapat kenaikan yang signifikan sebesar Rp705.740.644.443,21 atau sebesar 14,30%, hal ini terjadi karena pada tahun 2024 terdapat kenaikan signifikan pada aset lain-lain yang berasal dari *treasury deposit facility* (TDF) yang merupakan transfer bagi hasil Pemerintah Daerah yang ditempatkan oleh pemerintah pusat pada rekening Bank Indonesia, dan peningkatan signifikan pada Kas daerah tahun 2024 serta Persediaan untuk Dijual/Diserahkan memiliki kenaikan yang mempengaruhi kenaikan akun Aset dikarenakan adanya Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat dan Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya yang belum diserahkan kepada pihak penerima sebesar Rp402.432.576.166,85

4.3.1 Aset

Saldo Aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.671.849.930.834,25 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.966.109.286.391,04 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

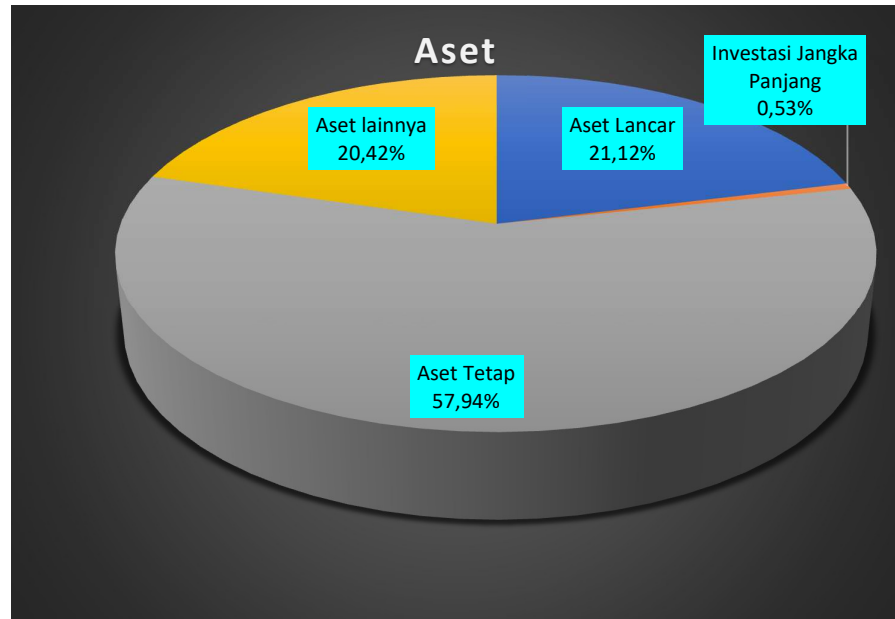
Tabel 4.3.1
Rincian Aset Neraca

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Aset Lancar	1.194.436.889.154,76	1.258.124.434.266,34	(63.687.545.111,58)
Investasi Jangka Panjang	30.000.000.000,00	20.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Aset Tetap	3.277.361.787.417,49	2.640.717.497.111,69	636.644.290.305,80



Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Aset lainnya	1.170.051.254.262,00	1.047.267.355.013,01	122.783.899.248,99
Jumlah	5.671.849.930.834,25	4.966.109.286.391,04	705.740.644.443,21

Gambar 4.6
Perbandingan Komposisi Aset Tahun 2024



4.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas serta aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.194.436.889.154,76 dan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.258.124.434.266,34 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.1.1
Rincian Aset Lancar

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Kas di Kas Daerah	724.288.143.980,16	897.449.318.811,75	(173.161.174.831,59)
Kas di Bendahara Penerimaan	11.640.000,00	0,00	11.640.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	55.108.013,00	121.723.842,00	(66.615.829,00)
Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	114.551.782,60	200.558.767,61	(86.006.985,01)
Kas di Bendahara FKTP	246.668.383,42	681.932.644,15	(435.264.260,73)



Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Kas Lainnya	181.488.715,14	1.327.928.269,92	(1.146.439.554,78)
Kas Dana BOK Puskesmas	872.772.229,00	0,00	872.772.229,00
Setara Kas	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	8.745.149.347,42	8.496.686.862,30	248.462.485,12
Piutang Retribusi Daerah	660.662.790,00	660.662.790,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	88.481.452,05	88.481.452,05	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	21.385.124.935,00	15.344.251.935,00	6.040.873.000,00
Piutang Lainnya	504.411.000,00	50.028.216.987,87	(49.523.805.987,87)
Penyisihan Piutang	(9.191.263.632,42)	(9.245.082.527,73)	53.818.895,31
Beban Dibayar Di muka	28.223.034.331,33	26.990.988.156,35	1.232.046.174,98
Persediaan	418.250.915.828,06	265.978.766.275,07	152.272.149.552,99
Jumlah	1.194.436.889.154,76	1.258.124.434.266,34	(63.687.545.111,58)

Terjadi penurunan atas Aset Lancar sebesar Rp63.687.545.111,58 atau 5,06% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan yang signifikan ini terjadi pada akun Piutang Lainnya yaitu sebesar Rp49.523.805.987,87 atau sebesar 98,99%.

4.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp724.288.143.980,16 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp897.449.318.811,75. Terjadi penurunan atas Kas di Kas Daerah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp173.161.174.831,59 atau 19,29%. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 terdiri dari:

Tabel 4.3.1.1.1
Rekening Kas Umum Daerah

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kas Umum Daerah No. Rek. 1661300007	723.914.463.298,16	897.082.193.129,75
DAK-DBH REBOISASI No. Rek.16613000031	186.533.488,00	186.533.488,00
Dana Bergulir No. Rek.1661300040	187.147.194,00	180.592.194,00
Jumlah	724.288.143.980,16	897.449.318.811,75

Rincian lebih lanjut pada **Lampiran 2.A**.

4.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.640.000,00 dan per 31 Desember 2023 tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan tersebut merupakan Saldo Penerimaan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB yang belum disetorkan pada Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2024.



4.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp55.108.013,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp121.723.842,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut diatas merupakan Saldo Uang Persediaan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp53.415.040,00 dan terdapat Saldo Bank di Rekening Koran pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebesar Rp940.000,00 dan pada Bagian Pemerintahan Setdakab sebesar Rp752.700,00 yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2024. Serta terdapat penambahan Kas Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp273,00 yang merupakan sisa kas bendahara pengeluaran yang disebabkan terjadinya kelebihan mencatat realisasi belanja tidak terduga yang menyebabkan terdapatnya sisa kas yang belum disetor per 31 Desember 2024.

Tabel 4.3.1.1.3

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

KODE	URAIAN	NILAI (Rp)
3.27.2.09.3.25.13.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	53.415.040,00
5.06.0.00.0.00.26.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	940.000,00
4.01.0.00.0.00.14.0000	Bagian Pemerintahan Setdakab	752.700,00
5.02.4.01.0.00.23.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	273,00
JUMLAH		55.108.013,00

4.3.1.1.4 Kas di Bendahara BOS

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp114.551.782,60 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp200.558.767,61 yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.3.1.1.4

Mutasi Kas di Bendahara BOS

No.	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Saldo Awal	200.558.767,61	368.247.567,61
2	Koreksi Saldo Awal	0,00	0,00
3	Pendapatan BOS	10.213.480.000,00	10.166.435.000
4	Belanja BOS	10.287.699.700,00	10.163.883.800
5	Koreksi Tahun Berjalan	(11.787.285,01)	(170.240.000,00)
6	Saldo Akhir	114,551,782,60	200.558.767,61

Pada tahun 2024 terdapat koreksi kurang Kas di Bendahara BOS sebesar Rp11.787.285,01 yang merupakan Kas di Bendahara BOS yang disetorkan kembali ke Kas Daerah oleh Sekolah.

Rincian lebih lanjut tentang Kas di Bendahara BOS dapat dilihat pada **Lampiran 3**.



4.3.1.1.5 Kas di Bendahara FKTP

Saldo Kas di Bendahara FKTP-JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) per 31 Desember 2024 sebesar Rp246.668.383,42 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp681.932.644,15 yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.3.1.1.5
Saldo Kas FKTP JKN

No.	Nama Unit Kerja FKTP/JKN	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1.	Puskesmas Long Apari	76.901.155,36	35.249.200,01	41.651.955,35
2.	Puskesmas Long Pahangai	37.039.910,83	112.519.182,41	(75.479.271,58)
3.	Puskesmas Long Bagun	58.964.023,76	475.383.062,06	(416.419.038,30)
4.	Puskesmas Laham	46.364.073,17	41.655.064,17	4.709.009,00
5.	Puskesmas Long Hubung	32.318,30	17.126.135,50	(17.093.817,2)
6.	Puskesmas Mamahak Besar	27.366.902,00	00,00	27.366.902,00
Jumlah		246.668.383,42	681.932.644,15	(435.264.260,73)

Berdasarkan tabel diatas terdapat penurunan pada Kas JKN TA 2024 sebesar Rp435.264.260,73 atau 63,83%. Rincian lebih lanjut tentang Kas di Bendahara FKTP-JKN dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

4.3.1.1.6 Kas Lainnya

Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.054.260.944,14 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.327.928.269,92. Terjadi penurunan atas Kas Lainnya dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp273.667.325,77 atau 20,61%.

a. Kas Lainnya – Bendahara BOSDA

Kas Lainnya – Bendahara BOSDA TA 2024 sebesar Rp135.254.467,29 yang diuraikan sebagai berikut:

Rincian lebih lanjut tentang Kas Lainnya – Bendahara BOSDA dapat dilihat pada **Lampiran 5.A**.

Tabel 4.3.1.1.6
Saldo Kas Lainnya-Bendahara BOSDA

No.	Uraian	TA 2024
1	Saldo Awal	28.513.040,79
2	Koreksi Saldo Awal	0,00
3	Pendapatan Bosda	2.841.720.000,00
4	Belanja BOSDA	2.730.738.450,00
5	Koreksi 2024	(4.240.123,50)
6	Saldo Akhir	135.254.467,29

Kas Lainnya – Bendahara BOSDA TA 2023 sebesar Rp135.254.467,29 mengalami kenaikan sebesar Rp106.741.426,50 atau 374,36%, hal ini karena sekolah belum melakukan penyetoran atas saldo awal 2023 dan sisa saldo kas 2024 ke Kas Daerah. Koreksi sebesar Rp4.240.123,50 merupakan koreksi



tambah atas Pendapatan Jasa Giro yang belum disetorkan ke kasda per 31 Desember 2024 pada SDN 004 Nyaribungan sebesar Rp1.426,50 dan koreksi belanja pada TK Pembina atas kelebihan salur sebesar Rp4.241.550,00 Bosda 2024.

b. Kas Lainnya – Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian

Kas Lainnya – Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp2.555.335,85 yang merupakan Belanja Honorarium pada Diskominfo Tahun 2024 yang sampai tanggal 31 Desember 2024 belum disalurkan kepada penerimanya.

c. Kas Lainnya – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Kas Lainnya – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak sebesar Rp4.972.786,00 yang merupakan Belanja Kekurangan Tambahan Penghasilan PPPK Dinsos, yang sampai tanggal 31 Desember 2024 belum disalurkan kepada penerimanya dan masih terdapat pada Rekening Koran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak TA 2024.

d. Kas Lainnya – Atas Utang PFK

Kas Lainnya – Atas Utang PFK ada Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp38.210.631,00 dan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp495.495,00 yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2024.

e. Kas Lainnya – Bendahara BOK

Kas Lainnya – Bendahara BOK TA 2024 sebesar Rp872.772.229,00 menjadi salah satu transaksi non RKUD yang mana Dana BOK langsung di terima oleh rekening puskesmas.

Rincian lebih lanjut tentang Kas Lainnya – Bendahara BOSDA dapat dilihat pada **Lampiran 5.B**.

Rincian lebih lanjut tentang Kas Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

4.3.1.1.7 Investasi Jangka Pendek

Pada Tahun 2024 dan 2023 tidak terdapat Investasi Jangka Pendek.

4.3.1.1.8 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.745.149.347,42 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.496.686.862,30 terdapat kenaikan sebesar Rp248.462.485,12 atau sebesar 2,92%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3.1.1.8
Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(Kenaikan/ Penurunan) (Rp)
Piutang Pajak Hotel	95.754.700,00	83.504.700,00	12.250.000,00
Piutang Pajak Restoran	280.018.846,20	232.827.046,20	47.191.800,00



Piutang Pajak	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(Kenaikan/ Penurunan) (Rp)
Piutang Pajak Reklame	243.374.021,50	217.354.761,50	26.019.260,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan	339.064.693,67	339.064.693,67	0,00
Piutang Pajak Sarang Burung Walet	4.329.950.000,00	4.319.950.000,00	10.000.000,00
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.336.054.429,02	1.292.486.105,90	43.568.323,12
Piutang PBB-P2	2.120.932.657,03	2.011.499.555,03	109.433.102,00
Jumlah	8.745.149.347,42	8.496.686.862,30	248.462.485,12

Pada tabel diatas terdapat peningkatan saldo akhir Piutang Pajak yang terjadi pada seluruh akun piutang pajak daerah. Rincian lebih lanjut mengenai mutasi Piutang Pendapatan terdapat pada **Lampiran 6**.

4.3.1.1.9 Piutang Retribusi Daerah

Jumlah Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp660.662.790,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp660.662.790,00, tidak terdapat peningkatan ataupun penurunan atas saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024.

Tabel 4.3.1.1.9
Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023

Piutang Retribusi	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(Kenaikan/ Penurunan)
Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan	568.100.000,00	568.100.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	4.935.000,00	4.935.000,00	0,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	42.398.640,00	42.398.640,00	0,00
Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	45.229.150,00	45.229.150,00	0,00
Jumlah	660.662.790,00	660.662.790,00	0,00

4.3.1.1.10 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tidak terdapat piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2024 dan tahun 2023.

4.3.1.1.11 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp88.481.452,05 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp88.481.452,05. Tidak terdapat peningkatan ataupun penurunan atas saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024.



Tabel 4.3.1.1.10
Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023

NO	URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Pendapatan Denda Pajak	83.168.052,05	83.168.052,05
2	Pendapatan Denda Retribusi	86.400,00	86.400,00
3	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	5.227.000,00	5.227.000,00
Jumlah		88.481.452,05	88.481.452,05

Per 31 Desember 2024 masih terdapat piutang lain-lain PAD yang sah lainnya sebesar Rp5.227.000,00 yang merupakan piutang atas Retribusi Usaha Perdagangan dan Ijin Industri dan Retribusi Pendaftaran Perusahaan.

4.3.1.1.12 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Tidak terdapat saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat pada tahun 2024 dan 2023.

4.3.1.1.13 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer tahun 2024 sebesar Rp21.385.124.935,00 dan tahun 2023 sebesar Rp15.344.251.935,00. Piutang Transfer ini berasal dari Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya yaitu Bagi Hasil Pajak Provinsi yang belum disalurkan sampai dengan 31 Desember tahun 2024. Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi mengalami penurunan sebesar Rp6.040.873.000,00 atau 39,37% dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.3.1.1.12
Piutang Bagi Hasil Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023

Piutang Bagi Hasil Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(Kenaikan/ Penurunan)
Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.734.847.000,00	1.672.825.000,00	62.022.000,00
Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.885.365.000,00	2.161.877.000,00	(276.512.000,00)
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	17.748.571.935,00	11.491.793.935,00	6.256.778.000,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	16.341.000,00	17.756.000,00	(1.415.000,00)
Jumlah	21.385.124.935,00	15.344.251.935,00	6.040.873.000,00

Rincian mutasi Piutang Transfer dapat dilihat pada **Lampiran 6.A**.

4.3.1.1.14 Piutang Lainnya

Saldo Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp504.411.000,00 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp50.028.216.987,87 dijelaskan sebagai berikut:



Tabel 4.3.1.1.13
Rincian Piutang lainnya

No	Keterangan	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan
1.	TGR Bendahara	189.400.000,00	189.400.000,00	0,00
2.	TGR Non Bendahara	56.052.000,00	63.952.000,00	(7.900.000,00)
3.	Piutang Taspen	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Lainnya	258.959.000,00	49.774.864.987,87	(49.515.905.987,87)
JUMLAH		504.411.000,00	50.028.216.987,87	(49.523.805.987,87)

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp49.523.805.987,87 atau 98,99% jika dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp50.028.216.987,87, hal ini terjadi karena pada tahun 2024 piutang lainnya atas PNPB telah dibayarkan atau disetorkan ke Kas Daerah. Pada tahun 2024 terdapat koreksi saldo awal sebesar Rp7.900.000,00, hal ini terjadi karena terdapat pengembalian pertanggungjawaban belanja honorarium PNS dan Non PNS yang dikembalikan pada tahun 2023 belum dicatat sebagai pengurang piutang lainnya.

Pada tahun 2024 juga terdapat penyetoran piutang lainnya atas piutang Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi dari PT. Prima Coal sebesar Rp48.060.604.380,00, dan pembayaran piutang lainnya atas kelebihan pembayaran SP2D atau double SP2D beberapa pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada tahun 2024 sebesar Rp1.711.260.607,87, serta pembayaran piutang lainnya atas pertanggungjawaban belanja tahun 2023 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp3.000.000,00. Pada tahun 2024 juga terdapat koreksi penambahan piutang lainnya atas kejadian double posting SP2D senilai Rp258.959.000,00.

Rincian mutasi Piutang Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

4.3.1.1.15 Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.191.263.632,42 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp9.245.082.527,73. Saldo Penyisihan Piutang mengalami kenaikan sebesar Rp53.818.895,30 atau sebesar 0,58%.

Atas Rincian Penyisihan Piutang PAD dan Piutang Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 8 dan 9**.

4.3.1.1.16 Beban Dibayar Dimuka

Akun beban dibayar dimuka merupakan belanja tahun 2024 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode Tahun anggaran 2024 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berupa sewa gedung kantor/gudang/kendaraan/aset lainnya oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan Beban dibayarkan dimuka atas pekerjaan. Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp28.223.034.331,33 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp26.990.988.156,35 sebagai berikut:



Tabel 4.3.1.1.15
Rincian Beban Dibayar Dimuka

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	153.117.749,99	148.333.333,33
2	Sekretariat Daerah	83.333.333,33	585.333.333,33
3	Dinas Lingkungan Hidup	42.333.333,33	41.666.666,67
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	39.930.000,00
5	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	20.000.000
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	22.038.941.490,02	22.161.858.156,69
7	Sekretariat DPRD	0,00	208.333.333,33
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.000.000,00	57.500.000,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja	20.833.333,00	20.833.333,00
10	Dinas Perhubungan	9.065.925,00	8.325.000,00
11	Inspektorat	138.645.833,33	113.225.000,00
12	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	5.704.680.000,00	3.466.900.000,00
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27.083.333,33	75.000.000,00
14	Badan Pendapatan Daerah	0,00	43.750.000,00
Jumlah		28.223.034.331,33	26.990.988.156,35

Rincian sewa dan perhitungan beban terdapat pada **Lampiran 10**.

4.3.1.1.17 Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp418.250.915.828,06 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp265.978.766.275,07. Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 tersebut diatas berdasarkan hasil *stock opname* oleh masing-masing SKPD. Adapun rincian Persediaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.1.1.16
Rincian Persediaan

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.119.068.520,00	91.167.936,00	1.027.900.584,00
2	Bahan Kimia	1.398.600,00	0,00	1.398.600,00
2	Bahan Bakar dan Pelumas	1.579.704.950,00	1.084.139.200,90	495.565.749,10
3	Isi Tabung Gas	0,00	38.350.000,00	(38.350.000,00)
4	Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	182.648.990,00	(182.648.990,00)
5	Suku Cadang Alat Besar	38.430.700,00	0,00	38.430.700,00
6	Alat Tulis Kantor	135.809.529,00	14.142.575,00	121.666.954,00
7	Kertas dan Cover	76.063.370,00	77.224.620,00	(1.161.250,00)
8	Bahan Cetak	6.140.000,00	11.605.800,00	(5.465.800,00)
9	Benda Pos	3.615.000,00	660.000,00	2.955.000,00
10	Perabot Kantor	10.438.840,00	10.845.740,00	(406.900,00)
11	Alat Listrik	3.346.000,00	0,00	3.346.000,00
12	Souvenir/Cendera Mata	238.090.000,00	207.300.000,00	30.790.000,00



No	Jenis Persediaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
13	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	26.840.770,00	52.800.854,50	(25.960.084,50)
14	Obat	6.236.306.034,77	5.862.725.203,70	373.580.831,07
15	Obat-obatan Lainnya	6.343.087.347,44	7.041.992.249,99	(698.904.902,55)
16	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	402.250.761.466,85	250.113.663.104,98	151.129.413.061,87
17	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	181.814.700,00	1.189.500.000,00	(1.007.685.300,00)
Jumlah		418.250.915.828,06	265.978.766.275,07	152.272.149.552,99

Persediaan untuk Dijual/Diserahkan mengalami kenaikan dikarenakan Persediaan yang belum diserahkan kepada pihak penerima sebesar Rp402.432.576.166,85 merupakan Persediaan untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp17.987.786.435,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang belum diserahkan, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp383.513.783.531,85, pada Sekretariat Daerah sebesar Rp749.191.500,00 dan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp181.814.700,00. Pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman terdapat koreksi atas saldo persediaan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa, dimana koreksi tersebut merupakan pelaksanaan pekerjaan atas belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan total koreksi sebesar Rp6.980.104.318,92. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa terdapat sisa bahan bangunan dan konstruksi dari pekerjaan Pembangunan jembatan belly Sungai Tingang dan Jembatan Belly Tikah Polsek sebesar Rp1.119.068.520,00. Pada Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman juga dilakukan koreksi kurang saldo awal sebesar Rp3.778.492.016,15 dan koreksi kurang sebesar Rp52.500.000,00 yang merupakan kesalahan pencatatan utang persediaan.

Pencatatan persediaan untuk mengukur nilai persediaan dilakukan dengan metode periodik. Pada akhir periode akuntansi dilakukan inventarisasi persediaan untuk menentukan jumlah persediaan yang dicatat dengan menggunakan metode periodik. Persediaan disajikan sebesar:

1. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
2. biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
3. nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Rincian saldo persediaan masing-masing SKPD terdapat pada **Lampiran 11**.



4.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

4.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka panjang non permanen yang tersaji di Neraca merupakan saldo Dana Bergulir yang berasal dari hibah Kabupaten Kutai Barat. Saldo dana bergulir per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.124.589.867,00 dikurangi Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir sebesar Rp3.124.589.867,00 sehingga Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) Dana Bergulir per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

Pada 31 Desember 2024 terdapat saldo Dana bergulir sebesar Rp3.124.589.867,00, dimana terjadi penurunan saldo dana bergulir sebesar Rp6.555.000,00 dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp3.131.144.867,00 yang merupakan setoran debitor pada Tahun 2024.

Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir sebesar Rp3.124.589.867,00 didapatkan setelah seluruh debitor mencapai waktu jatuh tempo lebih dari 6 (enam) Tahun.

Dasar perhitungan penyisihan dana bergulir dengan menggunakan Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 38 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu serta Perubahan atas Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang tertuang dalam Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen dapat dilihat pada **Lampiran 12** dan **Lampiran 13**.

4.3.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Pengelolaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh PT BPD Kaltim Kaltara yang telah dianggarkan dalam APBD.

Nilai dari Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 2023 sebesar Rp20.000.000.000,00 yang menjadi saldo awal di tahun 2024 dan Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2024 sebesar Rp30.000.000.000,00 yang merupakan jumlah saldo awal 2024 dan nilai LS Penyertaan Modal Pada Bankaltimta TA 2024 sebesar Rp10.000.000.000 berdasarkan Nomor SP2D 64.11/04.0/000001/Pembiayaan/5.02.4.01.0.00.23.0000/M/3/2024 yang dilaksanakan tanggal 01 Maret 2024. Porsi nilai penyertaan modal Tahun 2024 sebesar 50% dari jumlah total modal sebesar Rp30.000.000.000,00.

Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen dapat dilihat pada **Lampiran 14**.



4.3.1.3 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.722.520.637.721,77. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.560.561.626.344,57 dimana mengalami peningkatan sebesar Rp838.040.988.622,80 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.1.3
Rincian Aset Tetap

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)
1	Tanah	179.555.483.760,00	180.617.437.160,00	1.061.953.400,00
2	Peralatan dan Mesin	368.912.910.908,07	493.425.457.936,07	124.512.547.028,00
3	Gedung dan Bangunan	953.171.047.253,14	1.040.596.557.960,89	87.425.510.707,75
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.895.497.952.148,48	2.468.325.299.996,41	572.827.347.847,93
5	Aset Tetap Lainnya	7.677.785.934,00	9.217.735.734,00	1.539.949.800,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	317.705.457.718,08	368.379.137.557,20	50.673.679.839,12
Jumlah		3.722.520.637.721,77	4.560.561.626.344,57	838.040.988.622,80

Saldo akhir aset tetap per 31 Desember 2024 diperoleh dari penjumlahan saldo awal aset tetap per 31 Desember 2023 sebagai hasil daripada diselenggarakannya rekonsiliasi aset tetap sebagai bagian dari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

4.3.1.3.1 Tanah

Aset Tetap tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp179.555.483.760,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp180.617.437.160,00 mutasi aset tetap tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.3.1.3.1
Mutasi Aset Tetap Tanah

No	Uraian	Saldo (Rp)
I	Saldo per 31 Desember 2023	179.555.483.760,00
	Koreksi saldo Aset Tetap Tanah	0,00
	Saldo per 1 Januari 2024	179.555.483.760,00
II	Mutasi Tambah	
	1. Belanja Modal TA 2024	746.620.000,00
	Reklasifikasi (+)	98.723.400,00
	Hibah (+)	216.610.000,00
	Jumlah Mutasi Tambah	1.061.953.400,00
III	Mutasi Kurang	
	1. Reklasifikasi	0,00
	Jumlah Mutasi Kurang	0,00
IV	Saldo per 31 Desember 2024	180.617.437.160,00

Terdapat Penambahan Belanja Modal Pada Aset tetap tanah yang diperoleh pada tahun 2024 sebesar Rp746.620.000,00 dan Penambahan Reklasifikasi Masuk Rp98.723.400 dan terdapat Hibah Aset Tetap Tanah sebesar Rp216.610.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 4.3.1.3.1.A
Mutasi Aset Tetap Tanah Per SKPD

SKPD	Koreksi Saldo Awal	Mutasi	Saldo (Rp)
Dinas Perhubungan	0,00	845.343.400,00	845.343.400,00
Puskesmas Long Bagun	0,00	8.370.000,00	8.370.000,00
Puskesmas Laham	0,00	3.890.000,00	3.890.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	113.700.000,00	113.700.000,00
SMPN 2 Long Hubung	0,00	26.150.000,00	26.150.000,00
SMPN 2 Long Pahangai	0,00	64.500.000,00	64.500.000,00
Jumlah	0,00	1.061.953.400,00	1.061.953.400,00

Terdapat Hibah Aset Tetap Tanah sebesar Rp216.610.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3.1.3.1.B
Aset Tetap Tanah dari Hibah Per SKPD

SKPD	Koreksi Saldo Awal	Mutasi	Saldo (Rp)
Puskesmas Long Bagun	0,00	8.370.000,00	8.370.000,00
Puskesmas Laham	0,00	3.890.000,00	3.890.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	113.700.000,00	113.700.000,00
SMPN 2 Long Hubung	0,00	26.150.000,00	26.150.000,00
SMPN 2 Long Pahangai	0,00	64.500.000,00	64.500.000,00
Jumlah	0,00	216.610.000,00	216.610.000,00

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 15.A**.

4.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp368.912.910.908,07 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp493.425.457.936,07. Mutasi aset tetap peralatan dan mesin tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.3.1.3.2
Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Nilai (Rp)
I	Saldo per 31 Desember 2023	368.912.910.908,07
	Koreksi tahun lalu 1 Januari 2023 (-)	0,00
	Saldo per 1 Januari 2024	368.912.910.908,07
II	Mutasi Tambah	
1	Belanja Modal TA 2024 (+)	142.729.357.713,00
2	Belanja JKN (+)	210.490.150,00
3.	Belanja BOSNAS (+)	2.470.448.600,00
4	Belanja Barang Jasa dan belanja lain yang menjadi Aset Tetap (+)	1.406.634.110,00
5	Mutasi antar SKPD (+)	42.229.721.072,00
6	Belanja Tak Terduga	9.208.085,00
7	Utang yang menjadi Aset Tetap (+)	381.668.000,00
8	Reklasifikasi (+)	589.759.450,00
9	Hibah (+)	484.241.122,00



No	Uraian		Nilai (Rp)
	Jumlah Mutasi Tambah		190.502.320.217,00
III	Mutasi Kurang		
	1	Belanja Modal Yang Tidak Menjadi Aset Tetap/ (Kesalahan penganggaran) (-)	480.972.224,00
	2	Pembayaran utang N-1 (-)	922.476.540,00
	3	Barang Habis Pakai (-)	57.260.000,00
	4	Mutasi Antar SKPD (-)	42.229.721.072,00
	5	Dibawah kapitalisasi (-)	3.259.299.524,00
	6	Reklasifikasi (-)	19.049.251.914,00
	Jumlah Mutasi Kurang		65.992.627.189,00
IV	Saldo per 31 Desember 2024		493.425.457.936,07

Pada Rekonsiliasi Aset Tetap Tahun 2024 pada Peralatan dan Mesin terdapat mutasi tambah aset tetap peralatan mesin dari belanja modal sebesar Rp142.729.357.713,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.1.3.2.A
Belanja Modal Peralatan dan Mesin

NO	NAMA SKPD	NILAI (Rp)
1	Sekretariat DPRD	2.268.805.800,00
2	Bagian Pemerintahan	430.000,00
3	Bagian Hukum	167.680.000,00
4	Bagian Ekonomi	179.045.350,00
5	Bagian Kesejahteraan Rakyat	44.750.000,00
6	Bagian Umum	40.894.139.000,00
7	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	207.005.000,00
8	Bagian Organisasi Dan Tata Laksana	27.165.176,00
9	Kantor Pengelola Perbatasan	40.940.000,00
10	Dinas Pekerjaan Umum	4.138.205.966,00
11	Dinas Perhubungan	12.161.335.869,00
12	Dinas Kesehatan	29.180.389.480,00
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.352.348.400,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	174.319.600,00
15	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.158.636.000,00
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.905.348.240,00
17	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.365.587.189,00
18	Badan Pendapatan Daerah	1.590.415.690,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	1.046.237.000,00
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12.978.726.142,00
21	Inspektorat	504.006.496,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	1.432.890.437,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	102.610.620,00
24	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	688.797.700,00
25	Kantor Kesbangpol	156.500.000,00
26	Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.261.253.280,00
27	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	613.287.124,00
28	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	2.054.891.154,00
29	Kecamatan Long Apari	249.588.600,00
30	Kecamatan Long Pahangai	365.404.200,00



NO	NAMA SKPD	NILAI (Rp)
31	Kecamatan Long Bagun	366.753.000,00
32	Kecamatan Laham	131.800.000,00
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	920.065.200,00
Jumlah		142.729.357.713,00

Pada Rekonsiliasi Belanja Modal Tahun 2024 di Peralatan dan Mesin terdapat mutasi tambah dari belanja JKN yang menjadi aset tetap dengan total nilai Rp210.490.150,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.1.3.2.B
Mutasi Tambah dari Belanja JKN yang realisasinya Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Kesehatan	110.951.900,00
2	Puskesmas Long Apari	21.000.000,00
3	Puskesmas Long Pahangai	19.700.000,00
4	Puskesmas Long Bagun	1.831.250,00
5	Puskesmas Laham	57.007.000,00
Jumlah		210.490.150,00

Pada Rekonsiliasi Belanja Modal Tahun 2024 terdapat mutasi tambah dari belanja BOSNAS yang realisasinya Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Rp2.470.448.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.1.3.2.C
Mutasi Tambah Belanja Bosnas yang Menjadi Aset Tetap peralatan dan Mesin

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan + SD	1.526.290.500,00
2	SMP Negeri 2 Long Hubung	121.500.000,00
3	SMP Negeri 1 Long Hubung	33.900.000,00
4	SMP Negeri 1 Laham	28.380.000,00
5	SMP Negeri 1 Long Bagun	180.955.900,00
6	SMP Negeri 1 Long Pahangai	8.500.000,00
7	SMP Negeri 1 Long Apari	256.890.000,00
8	SMP Negeri 2 Long Bagun	8.900.000,00
9	SMP Negeri 3 Long Hubung	15.000.000,00
10	SMP Negeri 3 Long Bagun	18.550.000,00
11	SMP Negeri 2 Long Pahangai	9.559.000,00
12	SMP Negeri 4 Long Bagun	108.600.000,00
13	SMP Negeri 2 Laham	10.301.600,00
14	SMP Negeri 5 Long Bagun	78.550.000,00
15	SMP Negeri 4 Long Hubung	39.700.000,00
16	SMP Negeri 3 Long Pahangai	14.981.600,00



No	SKPD	Nilai
17	SMP Negeri 2 Long Apari	9.890.000,00
Jumlah		2.470.448.600,00

Pada Rekonsiliasi Belanja Modal Tahun 2024 terdapat mutasi tambah dari belanja barang dan jasa yang realisasinya Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Rp1.406.634.110,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3.1.3.2.D
Mutasi Tambah Belanja Barang dan Jasa yang Menjadi Aset Tetap peralatan dan Mesin

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Perhubungan	437.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	659.913.100,00
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	36.586.100,00
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	160.216.000,00
5	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	64.032.310,00
6	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	22.125.600,00
7	Kecamatan Long Bagun	26.761.000,00
Jumlah		1.406.634.110,00

Pada Rekonsiliasi Belanja Modal Tahun 2024 di Peralatan dan Mesin terdapat Mutasi Tambah akibat Mutasi antar SKPD dari belanja modal peralatan dan mesin senilai Rp42.229.721.072,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3.1.3.2.E
Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin dari Mutasi antar SKPD

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Sekretariat DPRD	10.115.440.500,00
2	Bagian Pemerintahan	397.365.350,00
3	Bagian Hukum	74.500.000,00
4	Bagian Ekonomi	67.230.000,00
5	Bagian Umum	781.600.000,00
6	Bagian Pembangunan	212.746.050,00
7	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	59.302.204,00
8	Bagian Humas dan Protokol	145.520.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum	393.500.000,00
10	Dinas Perhubungan	250.601.400,00
11	Dinas Kesehatan	446.300.000,00
12	Puskesmas Long Apari	892.210.000,00
13	Puskesmas Long Pahangai	5.700.000,00
14	Puskesmas Long Bagun	635.280.000,00
15	Puskesmas Laham	128.013.000,00
16	Puskesmas Long Hubung	207.840.600,00
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.774.200.400,00
18	SMP Negeri 2 Long Hubung	777.060.000,00



No	SKPD	Nilai (Rp)
19	SMP Negeri 1 Long Hubung	265.810.000,00
20	SMP Negeri 1 Laham	676.270.000,00
21	SMP Negeri 1 Long Bagun	1.216.510.000,00
22	SMP Negeri 1 Long Pahangai	66.610.000,00
23	SMP Negeri 1 Long Apari	61.170.000,00
24	SMP Negeri 2 Long Bagun	12.610.000,00
25	SMP Negeri 3 Long Hubung	55.190.000,00
26	SMP Negeri 3 Long Bagun	12.610.000,00
27	SMP Negeri 2 Long Pahangai	257.064.900,00
28	SMP Negeri 4 Long Bagun	109.169.600,00
29	SMP Negeri 2 Laham	67.800.000,00
30	SMP Negeri 5 Long Bagun	485.546.600,00
31	SMP Negeri 4 Long Hubung	401.750.000,00
32	SMP Negeri 3 Long Pahangai	211.510.000,00
33	SMP Negeri 2 Long Apari	61.170.000,00
34	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	524.089.758,00
35	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	32.990.000,00
36	Badan Pendapatan Daerah	57.825.350,00
37	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	714.749.500,00
38	Inspektorat	229.061.400,00
39	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.474.434.408,00
40	Dinas Lingkungan Hidup	1.652.790.000,00
41	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	69.710.700,00
42	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	578.266.612,00
43	Kecamatan Long Apari	588.675.108,00
44	Kecamatan Long Pahangai	518.964.408,00
45	Kecamatan Long Bagun	2.871.334.408,00
46	Kecamatan Laham	72.664.408,00
47	Kecamatan Long Hubung	518.964.408,00
Jumlah		42.229.721.072,00

Pada Rekonsiliasi Belanja Modal Tahun 2024 terdapat mutasi tambah Peralatan dan Mesin terdapat dari utang senilai Rp381.668.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3.1.3.2.F
Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin dari Utang

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	131.850.000,00
2	Puskesmas Long Apari	20.480.000,00
3	Puskesmas Long Bagun	124.620.000,00
4	Puskesmas Laham	26.518.000,00
5	Puskesmas Long Hubung	78.200.000,00
Jumlah		381.668.000,00



Pada Rekonsiliasi Belanja Modal Tahun 2024 di Peralatan dan Mesin terdapat Reklasifikasi tambah dengan total nilai Rp589.759.450,00 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 4.3.1.3.2.G
Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Tambah Belanja Modal

No	SKPD	Nilai
1	Bagian Umum	192.141.000,00
2	Dinas Perhubungan	72.810.450,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	59.022.000,00
4	SMP Negeri 1 Long Bagun	40.590.000,00
5	SMP Negeri 1 Long Apari	4.196.000,00
6	SMP Negeri 2 Long Bagun	12.850.000,00
7	SMP Negeri 3 Long Bagun	11.000.000,00
8	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	197.150.000,00
Jumlah		589.759.450,00

Rincian mutasi tambah peralatan dan mesin dari Reklasifikasi tambah belanja modal sebagai berikut :

1. Terdapat reklasifikasi tambah Bagian Umum dari Aset Tetap Lainnya ke peralatan dan mesin senilai Rp192.141.000,00;
2. Terdapat reklasifikasi tambah dari Gedung dan bangunan ke peralatan dan mesin pada dinas perhubungan senilai Rp52.947.000,00 dan reklasifikasi tambah dari gedung dan bangunan ke peralatan mesin senilai Rp19.863.450,00;
3. Terdapat reklasifikasi tambah peralatan dan mesin dari Jalan Jaringan dan Irigasi SDN 001 Tiong Bu'u senilai Rp1.500.000,00, reklasifikasi tambah dari Aset Tetap Lainnya dari SDN 007 Mamahak Besar senilai Rp1.320.000,00, reklasifikasi tambah dari aset tetap lainnya SDN 010 Rukun Damai Senilai Rp25.000.000,00, reklasifikasi tambah dari Jalan Jaringan dan Irigasi SDN 011 Long Hurai senilai Rp8.000.000,00, reklasifikasi tambah dari Jalan Jaringan dan Irigasi SDN 002 Muara Ratah senilai Rp20.000.000,00, reklasifikasi tambah dari Jalan Jaringan dan Irigasi SDN 002 Datah Bilang senilai Rp1.200.000,00, reklasifikasi tambah dari Aset Tetap Lainnya SDN 006 Matalibaq senilai Rp2.002.000,00;
4. Terdapat reklasifikasi tambah peralatan dan mesin pada SMPN 1 Long Bagun dari Jalan Jaringan dan Irigasi senilai Rp1.200.000,00 dan reklasifikasi tambah dari Aset Tetap Lainnya senilai Rp39.390.000,00;
5. Terdapat reklasifikasi tambah Peralatan dan Mesin pada SMPN 1 Long Apari dari Aset Tetap Lainnya senilai Rp4.196.000,00;
6. Terdapat reklasifikasi tambah Peralatan dan Mesin pada SMPN 2 Long Bagun dari Aset Tetap Lainnya senilai Rp1.350.000,00 dan Jalan Jaringan dan Irigasi senilai Rp11.500.000,00;
7. Terdapat reklasifikasi tambah Peralatan dan Mesin pada SMPN 3 Long Bagun dari Jalan Jaringan dan Irigasi senilai Rp11.000.000,00;



8. Terdapat reklasifikasi tambah Peralatan dan Mesin pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dari Jalan Jaringan dan Irigasi senilai Rp197.150.000,00.

Pada Rekonsiliasi Belanja Modal Tahun 2024 di Peralatan dan Mesin terdapat hibah tambah dengan total nilai Rp484.241.122,00 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : KN.01.08/H.I/10088/2023.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan tahun 2024 terhadap belanja tidak terduga ditemukan bahwa terdapat realisasi belanja tidak terduga yang menjadi aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak sebesar Rp2.854.000,00, dan aset dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp6.354.085,00.

Pada Rekonsiliasi Belanja Modal Tahun 2024 di Peralatan dan Mesin terdapat Mutasi Kurang Aset tetap Peralatan Dan Mesin Rp65.992.627.189,00. Mutasi Kurang karena Belanja modal yang diserahkan ke masyarakat/kesalahan penganggaran Rp480.972.224,00 serta Mutasi Kurang dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak menjadi Aset tetap karena Dibawah kapitalisasi Rp3.252.945.439,00.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak Menjadi Aset tetap yang realisasinya barang habis pakai Rp57.260.000,00, Mutasi kurang Antar SKPD Rp42.229.721.072,00, Reklasifikasi kurang Belanja Modal Aset tetap Peralatan dan Mesin Rp19.049.251.914,00 dan pembayaran utang senilai Rp922.476.540,00 Rincian mutasi kurang per SKPD sebagai berikut:

Tabel 4.3.1.3.2.H
Mutasi Kurang Aset Tetap peralatan dan Mesin

No.	Nama SKPD	Nilai (Rp)
Belanja Modal Yang Tidak Menjadi Aset Tetap/ (Kesalahan penganggaran) (-)		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	189.120.000,00
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	211.806.000,00
3	Inspektorat	294.200,00
4	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	79.752.024,00
Jumlah		480.972.224,00
Barang yang nilai di bawah Kapitalisasi		
1	Sekretariat DPRD	2.400.000,00
2	Bagian Umum	85.500.000,00
3	Dinas Perhubungan	83.194.500,00
4	Dinas Kesehatan	315.728.048,00
5	Puskesmas Long Apari	12.630.000,00
6	Puskesmas Long Bagun	14.250.000,00
7	Puskesmas Laham	10.338.000,00
8	Puskesmas Long Hubung	14.170.000,00
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.611.277.148,00
10	SMP Negeri 2 Long Hubung	66.400.000,00
11	SMP Negeri 1 Long Hubung	4.360.000,00
13	SMP Negeri 1 Laham	68.837.000,00
14	SMP Negeri 1 Long Bagun	272.570.000,00
15	SMP Negeri 1 Long Pahangai	46.664.000,00
16	SMP Negeri 1 Long Apari	15.260.000,00
17	SMP Negeri 2 Long Bagun	960.000,00
18	SMP Negeri 3 Long Bagun	11.010.000,00
19	SMP Negeri 2 Long Pahangai	65.153.400,00
20	SMP Negeri 4 Long Bagun	25.760.000,00
21	SMP Negeri 2 Laham	960.000,00
22	SMP Negeri 5 Long Bagun	63.450.000,00
23	SMP Negeri 4 Long Hubung	47.210.000,00
24	SMP Negeri 3 Long Pahangai	960.000,00
25	SMP Negeri 2 Long Apari	960.000,00
26	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	59.545.450,00
27	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	39.755.000,00
28	Badan Pendapatan Daerah	110.180.400,00
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	37.545.000,00



No.	Nama SKPD	Nilai (Rp)
30	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	33.255.478,00
31	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	89.563.700,00
32	Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	5.280.000,00
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26.084.400,00
34	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	11.338.000,00
35	Kecamatan Long Bagun	6.750.000,00
Jumlah		3.259.299.524,00
Barang Habis Pakai		
1	Bagian Pemerintahan	430.000,00
2	Bagian Umum	56.830.000,00
Jumlah		57.260.000,00
Mutasi Keluar Antar SKPD		
1	Bagian Umum	18.195.700.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.869.043.600,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.512.051.500,00
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.652.925.972,00
Jumlah		42.229.721.072,00
Reklasifikasi keluar (-)		
1	Bagian Umum	11.060.760.000,00
2	Dinas Perhubungan	7.962.477.914,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	340.000,00
4	SMP Negeri 1 Long Bagun	21.824.000,00
5	SMP Negeri 1 Long Apari	3.850.000,00
Jumlah		19.049.251.914,00
Pembayaran Utang (-)		
1	Dinas Pekerjaan Umum	756.900.000,00
2	Dinas Kesehatan	165.576.540,00
Jumlah		922.476.540,00
Jumlah Total		65.992.627.189,00

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 15.B**.

Rincian reklasifikasi keluar Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut :

1. Terdapat reklasifikasi keluar dari Peralatan dan Mesin Pada Bagian Umum dari Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan senilai Rp11.060.760.000,00;
2. Terdapat reklasifikasi keluar dari Peralatan dan Mesin pada Dinas Perhubungan dari peralatan dan mesin ke Gedung dan Bangunan senilai Rp7.962.477.914,00;
3. Terdapat reklasifikasi keluar dari Peralatan dan Mesin Pada Dinas Pendidikan dari Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya senilai Rp340.000,00;
4. Terdapat reklasifikasi keluar dari Peralatan dan Mesin pada SMPN 1 Long Bagun dari Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan senilai Rp10.500.000,00 dan Peralatan dan Mesin ke Jalan Jaringan dan Irigasi senilai Rp11.324.000,00;
5. Terdapat reklasifikasi keluar dari peralatan dan mesin pada SMPN 1 Long Apari dari Peralatan dan Mesin ke Jalan Jaringan dan Irigasi senilai Rp3.850.000,00.

Pada tahun 2024 terjadi bencana banjir di Kabupaten Mahakam Ulu yang berdampak pada aset tetap peralatan dan mesin pada 15 unit pemakai barang (UPB) di 12 SKPD. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2024 dan penelusuran dokumen serta konfirmasi kepada Kepala Bidang Aset BPKAD , bahwa bendahara barang telah melaporkan aset peralatan dan mesin yang rusak akibat banjir senilai Rp17.286.258.990,00. Aset tetap peralatan dan mesin yang dilaporkan rusak tersebut ada yang telah dimusnahkan dengan dibuang



ke tempat pembuangan sampah karena telah lapuk dan menimbulkan bau. Aset tetap peralatan dan mesin yang telah dilaporkan tersebut belum diuji validitasnya sehingga belum dilakukan pemutakhiran pada KIB dan belum diklasifikasikan sebagai aset dengan kondisi rusak berat.

4.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp953.171.047.253,14. Saldo akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.040.596.557.960,89. Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.3.1.3.3
Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Nilai (Rp)
I	Saldo per 31 Desember 2023	953.171.047.253,14
	Koreksi tahun lalu 1 Januari 2023	-
	Saldo per 1 Januari 2024	953.171.047.253,14
II	Mutasi Tambah	
1	Belanja Modal 2024	77.472.457.897,00
2	Belanja Barang dan Jasa	2.354.773.000,00
3	Mutasi Masuk Antar OPD	50.204.414.839,00
4	Reklasifikasi	20.245.087.914,00
	Jumlah Mutasi Tambah	150.276.733.650,00
III	Mutasi Kurang	
1.	Belanja Modal Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (diserahkan Kemasyarakatan/Kesalahan Penganggaran)	423.317.000,00
3.	Pembayaran Utang	1.071.758.000,00
4.	Barang Habis Pakai	52.780.500,00
5.	Mutasi Keluar Antar OPD	50.204.414.839,00
6	Belanja Modal Yang Bernilai Dibawah Kapitalisasi	47.952.000,00
7.	Reklasifikasi	10.662.158.070,00
8.	Koreksi BPK	388.842.533,25
	Jumlah Mutasi Kurang	62.902.408.282,33
IV	Saldo per 31 Desember 2024	1.040.596.557.960,89

Selama Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu telah merealisasikan Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp77.472.457.897,00. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.1.3.3.A
Belanja Modal Gedung dan Bangunan

NO	Nama SKPD	NILAI (Rp)
1	Bagian Pemerintahan	47.952.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum	21.452.448.658,00
3	Dinas Perhubungan	3.920.227.296,00
4	Dinas Kesehatan	10.372.419.009,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	41.538.380.759,00
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	104.965.175,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	36.065.000,00
	Jumlah	77.472.457.897,00



Selama proses rekonsiliasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu ditemukan kondisi bahwa terdapat belanja barang dan jasa menjadi aset tetap senilai Rp2.354.773.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada Rekonsiliasi Belanja Modal Tahun 2024 di Aset Tetap Gedung dan Bangunan ditemukan reklasifikasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp20.245.087.914,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3.1.3.3.B
Reklasifikasi Tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan

NO	NAMA SKPD	NILAI (Rp)
1	Bagian Umum	11.060.760.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum	41.397.000,00
3	Dinas Perhubungan	7.962.477.914,00
4	Dinas Kesehatan	455.032.000,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	714.921.000,00
6	SMP Negeri 1 Long Bagun	10.500.000,00
Jumlah		20.245.087.914,00

Penjelasan terhadap Reklasifikasi Tambah Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

1. Terdapat reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Gedung Bangunan dari Sekretariat Daerah pada Kantor Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah dan Kantor Bupati senilai Rp11.060.760.000,00;
2. Terdapat reklasifikasi dari Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Gedung Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum pada Perencanaan Pembangunan Gudang Kimia UPTD Air dan Perencanaan Pembangunan Gudang dan Rumah Jaga SPAM Laham senilai Rp41.397.000,00;
3. Terdapat reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Gedung Bangunan pada Dinas Perhubungan pada Rehabilitas Peningkatan Fasilitas Sisi Perairan Dermaga Induk Batu Dinding senilai Rp7.962.477.914,00;
4. Terdapat reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung dan Bangunan Pada Dinas Kesehatan pada Penyelesaian Administrasi Perencanaan Pembangunan Gedung Perkantoran Rumah Sakit Gerbang Sehat (GSM), Perencanaan Gedung sederhana (Relokasi Pustu Plus Mess Nakes Long Pakaq, Penyelesaian Administrasi Perencanaan Pembangunan UGD RS GSM, Perencanaan Pembangunan Gedung Sederhana Pembangunan Mess Nakes Noha Silat dan Perencanaan Pembangunan Gedung Sederhana Pembangunan Mess Puskesmas Mamahak Besar senilai Rp455.032.000,00;
5. Terdapat reklasifikasi masuk dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung Bangunan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pada Perencanaan Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 3 Long Pahangai, Perencanaan Rehab Aula SMPN 1 Long Pahangai, Perencanaan Pembangunan Gedung Baru sekolah SDN 001 Long Hubung, Perencanaan Pembangunan Gedung Baru sekolah SDN 003 Long Tuyuq, Perencanaan Pembangunan WC SDN 005 Long



- Lunuk, Perencanaan Rehabilitasi Mess Guru SDN 006 Long Melaham, Perencanaan Pembangunan atau Pemasangan pagar SMP Negeri 1 Long Pahangai, Perencanaan Pembangunan Kantor SDN 004 Noha Silat dan Perencanaan Pembangunan Kantor SMPN 1 Long Apari senilai Rp714.921.000,00;
6. Terdapat reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan Pada SMP Negeri 1 Long Bagun senilai Rp10.500.000,00.

Pada Rekonsiliasi Belanja Modal Tahun 2024 di Aset Tetap Gedung dan Bangunan ditemukan mutasi tambah yang merupakan mutasi antar SKPD dengan nilai Rp50.204.414.839,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.1.3.3.C
Mutasi Tambah antar SKPD Aset Tetap Gedung dan Bangunan

NO	NAMA SKPD	NILAI (RP)
1	Dinas Pekerjaan Umum	11.060.760.000,00
2	Puskesmas Long Bagun	178.239.500,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.077.988.487,00
4	SMP Negeri 2 Long Hubung	379.541.394,00
5	SMP Negeri 1 Laham	252.200.000,00
6	SMP Negeri 1 Long Bagun	3.575.624.000,00
7	SMP Negeri 1 Long Pahangai	2.964.988.330,00
8	SMP Negeri 1 Long Apari	812.911.300,00
9	SMP Negeri 2 Long Pahangai	507.973.000,00
10	SMP Negeri 4 Long Bagun	2.785.401.000,00
11	SMP Negeri 2 Laham	1.591.000.000,00
12	SMP Negeri 5 Long Bagun	1.484.743.000,00
13	SMP Negeri 3 Long Pahangai	1.382.855.273,00
14	SMP Negeri 6 Long Bagun	2.524.444.555,00
15	SMP Negeri 2 Long Apari	625.745.000,00
Jumlah		50.204.414.839,00

Pada Rekonsiliasi Belanja Modal Tahun 2024 di Gedung dan Bangunan terdapat Mutasi Kurang Aset tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp50.204.414.839,00 Mutasi Kurang karena Belanja modal yang diserahkan ke masyarakat senilai Rp423.317.000,00 dan Pembayaran Utang senilai Rp1.071.758.000,00.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak Menjadi Aset tetap yang realisasinya barang habis pakai Rp47.952.000,00. Belanja Barang Habis pakai kurang Rp52.780.500,00. Mutasi kurang Antar SKPD Rp50.204.414.839,00 Reklasifikasi kurang Belanja Modal Aset tetap Gedung dan Bangunan Rp10.662.158.070,00 Rincian mutasi kurang per SKPD sebagai berikut:



Tabel 4.3.1.3.3.D
Mutasi Kurang Aset Gedung dan Bangunan

No.	Nama SKPD	Nilai (Rp)
Belanja Modal Yang Diserahkan ke Masyarakat (-)		
1	Dinas Pekerjaan Umum	240.457.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	182.860.000,00
Jumlah		423.317.000,00
Pembayaran Utang (-)		
1	Dinas Kesehatan	1.071.758.000,00
Jumlah		1.071.758.000,00
Barang Habis Pakai (-)		
1	Dinas Perhubungan	52.780.500,00
Jumlah		52.780.500,00
Mutasi Keluar Antar SKPD (-)		
1	Bagian Umum	11.060.760.000,00
2	Dinas Kesehatan	178.239.500,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	38.965.415.339,00
Jumlah		50.204.414.839,00
Belanja Modal Yang Tidak Menjadi Aset Tetap		
1	Bagian Pemerintahan	47.952.000,00
Jumlah		47.952.000,00
Reklasifikasi keluar (-)		
1	Dinas Pekerjaan Umum	4.294.470.000,00
2	Dinas Perhubungan	377.856.900,00
3	Dinas Kesehatan	1.580.751.750,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.373.014.420,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	36.065.000,00
Jumlah		10.662.158.070,00
Koreksi BPK (-)		62.902.408.282,33
Jumlah Total		62.902.408.282,33

Pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2024 dilakukan koreksi terhadap nilai aset tetap Gedung dan Bangunan yang merupakan koreksi karena terdapat temuan pelaksanaan pekerjaan atas belanja modal gedung dan bangunan dan jasa konsultasi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp388.842.533,25 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3.1.3.3.E
Koreksi Kurang BPK Gedung dan Bangunan

NO	Nama SKPD	Nilai Sebelum Koreksi	Koreksi BPK	Nilai Setelah Koreksi
1	Dinas Kesehatan	5.498.247.059,00	8.153.745,83	5.490.093.313,17
2	SDN 001 Ujoh Bilang	460.945.000,00	15.647.700,00	445.297.300,00
3	SDN 002 Ujoh Bilang	133.073.000,00	5.637.350,00	127.435.650,00
4	SDN 008 Mamahak Teboq	1.181.222.302,00	20.711.200,00	1.160.511.102,00
5	SDN 010 Rukun Damai	238.950.000,00	10.667.700,00	228.282.300,00
6	SDN 011 Long Hurai	280.614.000,00	9.298.000,00	271.316.000,00
7	SMPN 1 Long Bagun	3.326.453.000,00	62.688.502,65	3.263.764.497,35
8	SMPN 1 Long Pahangai	1.813.851.650,00	106.627.709,35	1.707.223.940,65
9	SMPN 06 Long Bagun	2.094.435.555,00	29.145.700,00	2.065.289.855,00
10	SMPN 3 Long Pahangai	1.184.995.273,00	53.265.642,34	1.131.729.630,66



NO	Nama SKPD	Nilai Sebelum Koreksi	Koreksi BPK	Nilai Setelah Koreksi
11	SMPN 4 Long Bagun	1.784.165.000,00	40.192.761,05	1.743.972.238,95
12	Dinas Perhubungan	8.334.281.674,00	26.806.522,03	8.307.475.151,97
Jumlah		26.331.233.513,00	388.842.533,25	25.942.390.979,75

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 15.C**.

4.3.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.895.497.952.148,48 dan Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.468.325.299.996,41. Mutasi aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.3.1.3.4
Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

No	Uraian	Nilai (Rp)
I	Saldo per 31 Desember 2023	1.895.497.952.148,48
	Koreksi saldo Awal	-
	Saldo awal 1 Januari 2024	1.895.497.952.148,48
II	Mutasi Tambah	
1.	Belanja Modal TA 2024	594.833.786.926,00
2.	Belanja JKN	-
3.	Belanja Modal BOSNAS	89.600.000,00
4.	Belanja Barang dan Jasa	32.662.286.840,00
5.	Belanja Tak Terduga	-
6.	Mutasi Antar SKPD (+)	6.035.206.970,00
7.	Utang (+)	1.542.842.990,87
8.	Reklasifikasi	2.709.859.870,00
9.	Hibah	-
10.	Koreksi Tambah	-
	Jumlah Mutasi Tambah	637.873.583.596,87
III	Mutasi Kurang	
1.	Belanja Modal yang tidak menjadi Aset Tetap (diserahkan ke masyarakat/ kesalahan penganggaran)	9.960.060.646,00
2.	Diserahkan Ke Masyarakat	-
3.	Pembayaran Utang	4.884.394.882,00
4.	Barang Habis Pakai	-
5.	Mutasi Keluar antar SKPD (-)	6.035.206.970,00
6.	Belanja Modal yang tidak menjadi Aset Tetap (Aset yang bernilai di bawah Kapitalisasi)	275.990.000,00
7.	Reklasifikasi (-)	39.379.244.871,00
8.	Koreksi BPK (-)	4.511.338.379,94
	Jumlah Mutasi Kurang	65.046.235.748,94
IV	Saldo per 31 Desember 2024	2.468.325.299.996,41



Sepanjang tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu merealisasikan Belanja Modal Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp594.833.786.926,00 dengan rincian belanja modal per SKPD sebagai berikut:

Tabel 4.3.1.3.4.A
Belanja Modal Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

NO	Nama SKPD	NILAI (Rp)
1	Dinas Perhubungan	3.753.492.600,00
2	Dinas Pekerjaan Umum	580.933.512.813,00
3	Dinas Kesehatan	5.559.449.143,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.190.414.370,00
5	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	197.150.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	199.768.000,00
Jumlah		594.833.786.926,00

Belanja Modal Tahun 2024 terdapat penambahan aset tetap yang berasal dari pelunasan utang Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp1.542.842.990,87 berupa lanjutan peningkatan jalan poros PU Datah Bilang dan pembukaan dan peningkatan jalan menuju arah batu dinding Sebenaq.

Pada Rekonsiliasi Belanja Modal Tahun 2024 terdapat Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset Tetap senilai Rp32.662.286.840,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.1.3.4.B
Belanja Barang dan Jasa Jalan, Jaringan dan Irigasi

NO	Nama SKPD	NILAI (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum	32.559.428.840,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	102.858.000,00
Jumlah		32.662.286.840,00

Pada Rekonsiliasi Belanja Modal Tahun 2024 terdapat Belanja Reklasifikasi masuk menjadi Aset Tetap senilai Rp2.709.859.870,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.1.3.4.C
Rincian Reklasifikasi masuk Jalan, Jaringan dan Irigasi

NO	Nama SKPD	NILAI (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum	568.485.000,00
2	Dinas Perhubungan	197.404.200,00
3	Dinas Kesehatan	579.861.750,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.312.869.920,00
5	SMP Negeri 1 Long Bagun	11.324.000,00
6	SMP Negeri 1 Long Apari	3.850.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	36.065.000,00
Jumlah		2.709.859.870,00



Rincian reklasifikasi tambah pada Jalan Jaringan dan Irigasi adalah sebagai berikut :

1. Terdapat reklasifikasi tambah pada Dinas Pekerjaan Umum dari Gedung dan Bangunan ke Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp568.485.000,00;
2. Terdapat reklasifikasi tambah pada Dinas Perhubungan dari Gedung dan Bangunan ke Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp197.404.200,00;
3. Terdapat reklasifikasi Tambah Jalan Jaringan dan Irigasi pada Dinas Kesehatan dari Gedung dan Bangunan senilai Rp504.492.750,00 dan dari Konstruksi dalam Pengerjaan senilai Rp75.369.000,00;
4. Terdapat reklasifikasi tambah Jalan Jaringan dan Irigasi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Gedung Bangunan senilai Rp1.312.869.920;
5. Terdapat reklasifikasi tambah Jalan Jaringan dan Irigasi pada SMPN 1 Long Bagun dari Peralatan dan Mesin senilai Rp11.324.000,00;
6. Terdapat reklasifikasi tambah Jalan Jaringan dan Irigasi pada SMPN 1 Long Apari dari Peralatan dan Mesin senilai Rp3.850.000,00;
7. Terdapat reklasifikasi tambah Jalan Jaringan dan Irigasi pada Dinas Lingkungan Hidup dari Gedung dan Bangunan senilai Rp36.065.000,00;

Pada Rekonsiliasi Belanja Modal pada Tahun 2024 Mutasi tambah di Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi yang menjadi Aset Tetap Senilai Rp6.035.206.970,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3.1.3.4.D
Mutasi Antar SKPD Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

NO	Nama SKPD	NILAI (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.105.992.000,00
2	SMP Negeri 1 Laham	250.500.000,00
3	SMP Negeri 1 Long Bagun	703.033.680,00
4	SMP Negeri 3 Long Hubung	492.000.000,00
5	SMP Negeri 2 Long Pahangai	254.161.000,00
6	SMP Negeri 4 Long Bagun	252.183.000,00
7	SMP Negeri 5 Long Bagun	977.337.290,00
Jumlah		6.035.206.970,00

Pada Rekonsiliasi Belanja Modal Tahun 2024 di Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi terdapat mutasi tambah Belanja Bosnas dari Belanja Modal senilai Rp89.600.000,00. Rincian belanja modal Bosnas yang menjadi Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi sebagai berikut :

1. Terdapat belanja Modal Bosnas pada SMPN 1 Long Bagun yang menjadi aset tetap Jalan Jaringan dan Irigasi dari Peralatan dan Mesin senilai Rp1.200.000,00;
2. Terdapat belanja Modal Bosnas pada SMPN 2 Long Bagun yang menjadi aset tetap Jalan Jaringan dan Irigasi dari Peralatan dan Mesin senilai Rp11.500.000,00;



3. Terdapat belanja Modal Bosnas pada SMPN 3 Long Bagun yang menjadi aset tetap Jalan Jaringan dan Irigasi dari Peralatan dan Mesin senilai Rp11.000.000,00;
4. Terdapat belanja Modal Bosnas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi aset tetap Jalan Jaringan dan Irigasi dari Peralatan dan Mesin dari SDN 001 Tiong Bu'u senilai Rp1.500.000,00, SDN 004 Long Isun senilai Rp4.000.000,00, SDN 010 Rukun Damai senilai Rp16.200.000,00, SDN 011 Long Hurai senilai Rp8.000.000,00, SDN 002 Muara Ratah senilai Rp20.000.000,00 dan SDN 002 Datah Bilang senilai Rp1.200.000,00, SDN 006 Long Pakaq 006 senilai Rp15.000.000,00.

Pada Rekonsiliasi Belanja Modal yang tidak menjadi aset tetap (diserahkan ke masyarakat/kesalahan penganggaran) pada Tahun 2024 di Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi ditemukan Belanja yang diserahkan kepada masyarakat senilai Rp9.960.060.646,00 pada Dinas Pekerjaan Umum.

Tabel 4.3.1.3.4.E
Belanja Modal yang tidak menjadi aset tetap (diserahkan ke masyarakat/kesalahan penganggaran) Jalan Jaringan dan Irigasi

NO	Nama SKPD	NILAI (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum	9.960.060.646,00
Jumlah		9.960.060.646,00

Pada Rekonsiliasi Belanja Modal Tahun 2024 di Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi ditemukan Belanja mutasi keluar senilai Rp6.035.206.970,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.1.3.4.F
Mutasi Keluar antar SKPD Jalan, Jaringan dan Irigasi

NO	Nama SKPD	NILAI (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum	454.416.680,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.580.790.290,00
Jumlah		6.035.206.970,00

Pada Rekonsiliasi Belanja Modal Tahun 2024 di Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi ditemukan Belanja yang tidak menjadi aset tetap (Aset yang bernilai dibawah kapitalisasi) senilai Rp275.990.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.1.3.4.G
Belanja yang tidak menjadi aset tetap (Aset yang bernilai dibawah kapitalisasi)

NO	Nama SKPD	NILAI (Rp)
1	Dinas Perhubungan	5.983.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.000.000,00
3	SMP Negeri 1 Long Bagun	11.324.000,00
4	SMP Negeri 1 Long Apari	3.850.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	235.833.000,00
Jumlah		275.990.000,00

Belanja Modal Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 terdapat pembayaran utang senilai Rp4.884.394.882,00 pada Dinas Pekerjaan Umum yaitu pekerjaan Rigid Beton Jalan Kampung Mamahak Teboq - Jalan Poros yang telah dicatat aset Tetap Jalan Jaringan



dan Irigasi pada tahun 2023 sehingga pembayaran utang ini menjadi salah pembentuk mutasi kurang Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi Tahun 2024.

Pada Rekonsiliasi Belanja Modal Tahun 2024 di Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi ditemukan Belanja Reklasifikasi Kurang senilai Rp39.379.244.871,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.1.3.4.H
Reklafikasi Kurang

NO	Nama SKPD	NILAI (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum	39.086.142.871,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	72.252.000,00
3	SMP Negeri 1 Long Bagun	1.200.000,00
4	SMP Negeri 2 Long Bagun	11.500.000,00
5	SMP Negeri 3 Long Bagun	11.000.000,00
6	Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah	197.150.000,00
Jumlah		39.379.244.871,00

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 15.D**.

Rincian reklasifikasi kurang pada Jalan Jaringan dan Irigasi sebagai berikut :

1. Terdapat reklasifikasi kurang Jalan Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum ke Gedung dan Bangunan senilai Rp41.397.000,00 dan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp39.044.745.871,00;
2. Terdapat reklasifikasi kurang Jalan Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke Peralatan dan Mesin senilai Rp72.252.000,00;
3. Terdapat reklasifikasi kurang Jalan Jaringan dan Irigasi pada SMPN 1 Long Bagun ke Peralatan dan Mesin senilai Rp1.200.000,00;
4. Terdapat reklasifikasi kurang Jalan Jaringan dan Irigasi pada SMPN 2 Long Bagun ke Peralatan dan Mesin senilai Rp11.500.000,00;
5. Tedapat reklasifikasi kurang Jalan Jaringan dan Irigasi pada SMPN 3 Long Bagun ke Peralatan dan Mesin senilai Rp11.000.000,00;
6. Terdapat reklasifikasi kurang Jalan Jaringan dan Irigasi pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah ke Peralatan dan Mesin senilai Rp197.150.000,00.

Pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2024 dilakukan koreksi terhadap nilai aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang merupakan koreksi karena terdapat temuan pelaksanaan pekerjaan atas belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan jasa konsultasi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp4.511.338.379,94 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 4.3.1.3.4.I
Koreksi BPK

NO	Nama SKPD	Nilai Sebelum Koreksi	Koreksi	Nilai Setelah Koreksi
1	SDN 002 Ujoh Bilang	248.965.000,00	8.740.000,00	240.225.000,00
2	SDN 001 Long Pahangai	248.508.000,00	12.431.400,00	236.076.600,00
3	SMPN 1 Long Bagun	248.617.000,00	9.680.000,00	238.937.000,00
4	SMPN 4 Long Bagun	252.183.000,00	19.532.876,44	232.650.123,56
5	SMPN 3 Long Hubung	239.800.000,00	8.000.000,00	231.800.000,00
6	Dinas Kesehatan	2.865.853.248,00	643.894.175,12	2.221.959.072,88
7	Dinas Pekerjaan Umum	405.840.720.131,00	3.809.059.928,38	402.031.660.202,62
Jumlah		409.944.646.379,00	4.511.338.379,94	405.433.307.999,06

4.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.677.785.934,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.217.735.734,00. Rincian mutasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.3.1.3.5
Mutasi Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai (Rp)
I	Saldo per 1 Januari 2024	7.677.785.934,00
II	Mutasi Tambah	
1	Belanja Modal TA 2024	390.541.000,00
2	Belanja modal BOSNAS	1.519.267.800,00
3	Mutasi Antar SKPD (+)	77.400.000,00
4	Reklasifikasi (+)	340.000,00
	Jumlah Mutasi Tambah	1.987.548.800,00
III	Mutasi Kurang	
1	Diserahkan ke masyarakat (-)	121.000.000,00
2	Mutasi Keluar Antar SKPD(-)	77.400.000,00
3	Reklasifikasi (-)	249.199.000,00
	Jumlah Mutasi Kurang	447.599.000,00
IV	Saldo per 31 Desember 2024	9.217.735.734,00

Selama Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu telah merealisasikan belanja modal aset tetap lainnya senilai Rp390.541.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.1.3.5.A
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Bagian Kesejahteraan Rakyat	192.141.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	77.400.000,00
3	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	90.000.000,00
4	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistika dan Persandian	31.000.000,00
Jumlah		390.541.000,00



Pada Rekonsiliasi Belanja Modal Tahun 2024 di aset tetap lainnya terdapat Mutasi Tambah dari belanja modal BOSNAS berupa Aset Tetap Lainnya dengan total nilai Rp1.519.267.800,00 Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.3.1.3.5.B
Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya Dari Belanja Bosnas

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas pendidikan+SD	1.148.323.700,00
2	SMP Negeri 1 Long Hubung	28.954.900,00
3	SMP Negeri 1 Laham	24.588.000,00
4	SMP Negeri 1 Long Bagun	117.912.500,00
5	SMP Negeri 1 Long Pahangai	15.943.300,00
6	SMP Negeri 1 Long Apari	15.196.000,00
7	SMP Negeri 2 Long Bagun	13.596.800,00
8	SMP Negeri 3 Long Hubung	8.600.000,00
9	SMP Negeri 4 Long Bagun	65.000.000,00
10	SMP Negeri 2 Laham	20.571.400,00
11	SMP Negeri 5 Long Bagun	24.972.600,00
12	SMP Negeri 3 Long Pahangai	5.352.600,00
13	SMP Negeri 3 Long Bagun	30.256.000,00
Jumlah		1.519.267.800,00

Pada Rekonsiliasi Belanja Modal Tahun 2024 di aset tetap lainnya terdapat Mutasi Tambah dari belanja mutasi antar SKPD berupa Aset Tetap Lainnya dengan total nilai Rp77.400.000,00 Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.3.1.3.5.C
Aset Tetap Lainnya Dari Mutasi antar SKPD

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	52.500.000,00
2	SMP Negeri 4 Long Bagun	24.900.000,00
Jumlah		77.400.000,00

Pada Rekonsiliasi Belanja Modal Tahun 2024 terdapat aset tetap lainnya yang merupakan Reklasifikasi Tambah dari peralatan dan mesin senilai Rp340.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada Rekonsiliasi Belanja Modal Tahun 2024 di aset tetap lainnya terdapat mutasi aset kurang berupa aset diserahkan ke Masyarakat dengan total nilai Rp121.000.000,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.1.3.5.D
Mutasi Aset Kurang Berupa Aset Diserahkan ke Masyarakat

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	90.000.000,00
2	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistika dan Persandian	31.000.000,00
Jumlah		121.000.000,00



Pada Rekonsiliasi Belanja Modal Tahun 2024 di aset tetap lainnya terdapat Mutasi Keluar dari belanja mutasi antar SKPD berupa Aset Tetap Lainnya dengan total nilai Rp77.400.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada Rekonsiliasi Belanja Modal Tahun 2024 di aset tetap lainnya terdapat reklasifikasi kurang menjadi aset tetap Peralatan dan Mesin dengan total nilai Rp249.199.000,00. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.3.1.3.5.E
Reklasifikasi kurang Aset Tetap Lainnya

No	Nama SKPD	Nilai
1	Bagian Umum	192.141.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.122.000,00
3	SMP Negeri 1 Long Bagun	39.390.000,00
4	SMP Negeri 1 Long Apari	4.196.000,00
5	SMP Negeri 2 Long Bagun	1.350.000,00
JUMLAH		249.199.000,00

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 15.E**.

Pada tahun 2024 terjadi bencana banjir yang melanda Kabupaten Mahakam Ulu yang juga mengakibatkan aset tetap lainnya terdampak dan rusak. Berdasarkan identifikasi dan rekonsiliasi bendahara barang dengan Bidang Aset BPKAD terhadap aset tetap lainnya yang terdampak banjir, diketahui senilai Rp996.797.983,00 dengan kondisi rusak /hilang berupa buku pada sekolah terdampak banjir.

4.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp317.705.457.718,08 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp368.379.137.557,20 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.3.1.3.6
Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan

No	Uraian	Nilai (Rp)
I	Saldo per 1 Januari 2024	317.705.457.718,00
II	Mutasi Tambah	
1	Belanja Barang dan Jasa (+)	6.647.478.351,00
2	Utang (+)	198.670.000,00
3	Reklasifikasi Masuk	46.941.405.221,00
	Jumlah Mutasi Tambah	53.787.553.572,00
III	Mutasi Kurang	
1	Reklasifikasi menjadi Aset Tetap	2.364.390.520,00
2	Koreksi BPK (-)	749.483.212,88
	Jumlah Mutasi Kurang	3.113.873.732,88
IV	Saldo per 31 Desember 2024	368.379.137.557,12

Pada Proses Rekonsiliasi Belanja Modal Tahun 2024 pada aset tetap konstruksi dalam pengerjaan yang berasal dari belanja barang dan jasa sebesar Rp6.647.478.351,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:



Tabel 4.3.1.3.6.A
Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Belanja Barang dan Jasa

NO	NAMA SKPD	NILAI (Rp)
1	Dinas Pekerjaan umum	6.583.498.851,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	63.979.500,00
Jumlah		6.647.478.351,00

Pada proses rekonsiliasi Belanja Modal Tahun 2024 terdapat Utang yang menjadi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp198.670.000,00 dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada proses rekonsiliasi Belanja Modal Tahun 2024 terdapat reklasifikasi masuk KDP dari Dinas Kesehatan sebesar Rp46.941.405.221,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.3.1.3.6.B
Reklasifikasi Masuk ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan

NO	NAMA SKPD	Reklas Masuk Berasal dari	NILAI (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan umum	Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi	42.770.730.871,00
2	Dinas Perhubungan	Gedung dan Bangunan	8.918.850,00
3	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan, Jalan Jaringan dan Irigasi	1.076.259.000,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Gedung dan Bangunan	3.085.496.500,00
Jumlah			46.941.405.221,00

Pada proses rekonsiliasi Belanja Modal Tahun 2024 dengan aset tetap diketahui terjadi mutasi kurang pada Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp2.364.390.520,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- Terdapat Reklasifikasi Konstruksi dalam Pengerjaan ke Jalan, Jaringan dan Irigasi, Gedung dan Bangunan Pada Dinas Kesehatan Senilai Rp530.401.000,00.
- Terdapat Reklasifikasi Konstruksi dalam Pengerjaan ke gedung dan bangunan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp714.921.000,00.
- Terdapat mutasi kurang dari Konstruksi dalam Pengerjaan ke Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat yang merupakan persediaan bahan bangunan dan konstruksi dari pekerjaan Pembangunan Jembatan Belly Sungai Tika Polsek dan Pembangunan Jembatan Belly Sungai Tingang 2 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp1.119.068.520,00.

Pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2024 dilakukan koreksi terhadap nilai aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang merupakan koreksi karena terdapat temuan pelaksanaan pekerjaan atas belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan jasa konsultasi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp749.483.212,88 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 4.3.1.3.6.C
Koreksi BPK ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan

NO	Nama SKPD	Nilai Sebelum Koreksi	Koreksi	Nilai Setelah Koreksi
1	Dinas Pekerjaan Umum	14.501.007.010,00	749.483.212,88	13.751.523.797,12
Jumlah		14.501.007.010,00	749.483.212,88	13.751.523.797,12

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 15.F**.

4.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain Aset Tetap Tanah. Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca. Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.081.803.140.610,08 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.283.199.838.927,08. Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 terdiri dari:

Tabel 4.3.1.3.7
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Uraian	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024
1	Peralatan Mesin	243.065.775.430,08	286.766.959.791,08
2	Gedung Bangunan	72.844.409.355,00	92.099.902.388,00
3	Jalan. Irigasi dan Jaringan	765.892.955.825,00	904.332.976.748,00
Jumlah		1.081.803.140.610,08	1.283.199.838.927,08

Terdapat koreksi atas saldo awal sebesar Rp590.554.258,00 pada SKPD Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah karena terdapat koreksi pencatatan mutasi aset perolehan tahun 2022 pada SKPD terkait dan beban penyusutan sebesar Rp201.987.252.575,00 sehingga saldo akhir akumulasi penyusutan Barang Milik Daerah senilai Rp1.283.199.838.927,08 sebagai akibat dari beban penyusutan tahun berjalan. Adapun koreksi saldo awal, Beban dan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3.1.3.7.A
Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan

No	Uraian	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	Koreksi Saldo Awal 01 Januari 2024	Beban Penyusutan 31 Desember 2024	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024
1	Peralatan Mesin	243.068.834.185,08	(590.554.258,00)	44.288.679.864,00	286.766.959.791,08
2	Gedung Bangunan	72.844.409.355,00	0,00	19.255.493.033,00	92.099.902.388,00
3	Jalan. Irigasi dan Jaringan	765.889.897.070,00	0,00	138.443.079.678,00	904.332.976.748,00
JUMLAH		1.081.803.140.610,08	(590.554.258,00)	201.987.252.575,00	1.283.199.838.927,08



Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

4.3.1.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.047.267.355.013,01 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.170.051.254.262,00. Terdapat peningkatan saldo Aset Lainnya sebesar Rp122.783.899.248,99 atau 11,72% dibandingkan Tahun sebelumnya. Adapun rincian Aset Lainnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3.1.4
Rekap Aset Lainnya

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1	Tagihan Jangka Panjang	15.996.508.303,11	2.821.723.047,12	13.174.785.255,99
2	Aset Tidak Berwujud	132.634.895.971,00	87.467.528.990,00	45.167.366.981,00
3	Aset Lain-lain	78.831.956.546,89	78.831.956.546,89	0
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(53.044.449.113,00)	(36.253.839.571,00)	(16.790.609.542,00)
5	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	995.632.342.554,00	914.399.986.000,00	81.232.356.554,00
	Jumlah	1.170.051.254.262,00	1.047.267.355.013,01	122.783.899.248,99

4.3.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.353.269.124,18 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.821.723.047,12. Terdapat kenaikan sebesar Rp17.531.546.077,06 atau 621,31% dibandingkan TA 2023 yang merupakan pengembalian oleh Pihak Ketiga.

Rincian Tagihan Jangka Panjang dapat dilihat pada **Lampiran 17**.

Tabel 4.3.1.4.1
Rincian Tagihan Jangka Panjang

No	Keterangan	2024	2023	Kenaikan / Penurunan
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah :			
a	CV.KM. SK Pembebanan No: 700.030/K.195g/2015. Tanggal 2 Januari 2018	109.718.550,36	109.718.550,36	0,00
b	PT.PBE. SKTJM No: 700/MP- TPTGR/TGR/III/2016	215.489.786,90	215.489.786,90	0,00
c	PT. PGS. SKTJM No: 700/15/MP- TPTGR/TGR/VI/2016	136.500.000,00	136.500.000,00	0,00
e	CV.MJK. SKTJM No: 700/22/MP- TPTGR/TGR/VIII/2017	90.375.066,94	90.375.066,94	0,00
g	Review Atas LKPD 2021	1.611.999.756,78	1.611.999.756,78	0,00
h	Koreksi BPK 2022	404.953.698,86	417.067.898,86	(12.114.200,00)



No	Keterangan	2024	2023	Kenaikan / Penurunan
i	Koreksi BPK 2023	222.071.987,28	240.571.987,28	(18.500.000,00)
j	Koreksi BPK 2024	13.205.399.455,99	0,00	13.205.399.455,99
JUMLAH		15.996.508.303,11	2.821.723.047,12	13.174.785.255,99

Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.996.508.303,11 yang merupakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain mengalami kenaikan sebesar Rp17.031.702.870,28 terjadi karena terdapat penyetoran ke kas daerah tahun 2024 sebesar Rp30.614.200,00, dan terdapat penambahan sebesar Rp13.205.399.455,99 yang merupakan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2024 atas temuan belanja perjalanan dinas pada lima SKPD tidak sesuai ketentuan, temuan pelaksanaan pekerjaan atas 12 paket belanja barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tidak Sesuai Ketentuan, temuan pelaksanaan pekerjaan atas belanja modal gedung dan bangunan pada Tiga SKPD Tidak Sesuai Ketentuan, temuan pelaksanaan pekerjaan atas belanja modal jalan, jaringan, irigasi pada DPUPRPKP Tidak Sesuai Ketentuan, dan temuan pembayaran jasa konsultansi belanja modal gedung dan bangunan pada Disdikbud Tidak Sesuai Ketentuan.

4.3.1.4.2 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp132.634.895.971,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp87.467.528.990,00. Terjadi Peningkatan Aset Tidak berwujud sebesar Rp45.167.366.981,00 atau 51,64% sebagaimana dijelaskan pada mutasi Aset tidak berwujud sebagai berikut:

Tabel 4.3.1.4.2
Rincian Aset Tidak Berwujud

SKPD	NILAI (Rp)
Sekretariat DPRD	1.676.475.000,00
Bagian pemerintahan	864.608.000,00
Bagian hukum	739.500.000,00
Bagian Pembangunan	198.000.000,00
Bagian pengadaan barang dan jasa	299.000.000,00
Bagian organisasi dan tata laksana	2.130.870.000,00
Kantor pengelola perbatasan	596.878.200,00
Dinas pekerjaan umum	53.165.456.625,00
Dinas perhubungan	12.396.048.300,00
Dinas Kesehatan	4.165.928.000,00
Dinas pendidikan dan kebudayaan	8.560.264.000,00
Dinas sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	445.000.000,00
Dinas kependudukan dan catatan sipil	260.171.405,00
Dinas ketahanan pangan dan pertanian	3.385.938.688,00
Badan pendapatan daerah	1.434.385.593,00
Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu	1.099.100.000,00
Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah	576.321.800,00



SKPD	NILAI (Rp)
Inspektorat	197.049.000,00
Badan perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah	28.407.362.750,00
Dinas lingkungan hidup	6.344.909.210,00
Dinas pariwisata, pemuda dan olah raga	1.599.880.000,00
Badan penanggulangan bencana daerah	1.079.019.900,00
Badan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan	1.274.936.500,00
Dinas komunikasi dan informatika, statistik dan persandian	1.639.891.000,00
Kecamatan long bagun	97.902.000,00
Jumlah	132.634.895.971,00

Rincian lebih lanjut pada **Lampiran 18**.

4.3.1.4.3 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain Pemkab Mahakam Ulu TA 2024 sebesar Rp78.831.956.546,89 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp78.831.956.546,89 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3.1.4.3
Rincian Aset Lain-Lain

No	Keterangan	2024
1	Aset Rusak Berat (Nilai Realisasi Bersih)	63.590.500.147,00
2	Aset Lainnya (aset SMA/SMK yang akan diserahkan ke Provinsi)	13.430.396.668,00
3	Aset Lainnya (aset Dinas Pendidikan yang akan diserahkan ke Swasta yaitu SD WR Soepratman)	197.769.167,00
4	Aset Pinjam Pakai Bagian Umum Sekretariat Daerah	1.613.290.564,89
Jumlah		78.831.956.546,89

Rincian lebih lanjut pada **Lampiran 19**.

4.3.1.4.3.1 Aset Rusak Berat

Aset Rusak Berat per 31 Desember 2024 sebesar Rp63.590.500.147,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat di **Lampiran 19.A**.

4.3.1.4.3.2 Aset SMA/SMK yang akan diserahkan ke Provinsi

Nilai perolehan Aset SMA/SMK yang akan diserahkan ke provinsi per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.430.396.668,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat di **Lampiran 19.B**.

4.3.1.4.3.3 Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang akan diserahkan ke Sekolah Swasta (SD. WR. Soepratman)

Nilai buku Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang akan diserahkan ke sekolah swasta (SD WR. Soepratman) per 31 Desember 2023 sebesar Rp197.769.167,00. Selama tahun 2022 tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang sehingga



saldo akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp197.769.167.00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat di **Lampiran 19.C.**

4.3.1.4.3.4 Aset pinjam pakai Bagian Umum Sekretariat Daerah

Bagian Umum Sekretariat Daerah memiliki aset yang dipinjam pakaikan kepada instansi di luar Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp1.613.290.564.89 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3.1.4.3.4
Aset Lainnya Pinjam Pakai Bagian Umum

No.	Uraian	Bruto	Penyusutan	Netto
1	Ketua Dharma Wanita	16.597.910,00	13.041.215,00	3.556.695,00
2	Ketua PKK	16.597.910,00	13.041.215,00	3.556.695,00
3	Perwira Penghubung Kodim 0912	28.400.000,00	18.595.238,10	9.804.761,90
4	Untuk LO Polres	28.400.000,00	18.595.238,10	9.804.761,90
5	Untuk Polsek L. Bagun	56.800.000,00	37.190.476,19	19.609.523,81
6	Koramil Long Bagun	274.000.000,00	118.733.333,33	155.266.666,67
7	Polsek Long Bagun	274.000.000,00	118.733.333,33	155.266.666,67
8	Sekretariat KPU	1.330.466.030,00	929.359.417,65	401.106.612,35
9	Sekretariat PKK	379.800.000,00	198.942.857,14	180.857.142,86
10	Paroki 'ST Petrus' Ujoh Bilang	379.800.000,00	198.942.856,14	180.857.143,86
11	Kantor Koramil Long Bagun	379.800.000,00	198.942.856,14	180.857.143,86
12	Kantor Polsek Long Bagun	379.800.000,00	198.942.857,14	180.857.142,86
13	PRAMUKA	237.619.000,00	158.412.666,67	79.206.333,33
14	KEJARI	30.000.000,00	16.071.428,57	13.928.571,43
15	Ajudan Khusus Bupati	18.485.000,00	12.103.273,80	6.381.726,20
16	Koramil 0912-03 L. Bagun	56.800.000,00	37.190.476,19	19.609.523,81
17	Sekretariat ULP	105.970.000,00	93.206.546,62	12.763.453,38
JUMLAH		3.993.335.850,00	2.380.045.285,11	1.613.290.564,89

Terhadap aset pinjam pakai tersebut memiliki nilai akumulasi penyusutan lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.380.045.285,11 sehingga saldo akhir Neto aset yang dipinjam pakaikan tersebut adalah sebesar Rp1.613.290.564,89.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat di **Lampiran 19.D.**

4.3.1.4.3.5 *Treasury Deposit Facility*

Pada tahun anggaran 2024 terdapat *Treasury Deposit Facility* sebesar Rp995.632.342.554,00 sesuai dengan amanat Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil. Dana Alokasi Umum. dan Dana Otonomi Khusus dan ditegaskan dalam Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur nomor S-343/WPB.20/2023 tentang Kebijakan Akuntansi atas Penyaluran Dana Bagi



Hasil melalui Rekening *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD). Rincian lebih lanjut dapat dilihat di **Lampiran 19.E**.

4.3.1.4.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp53.044.449.113,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp36.253.839.571,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.1.4.4
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No	Uraian	Akumulasi Amortisasi Per 31 Desember 2023	Koreksi Saldo Awal	Beban Amortisasi Tahun 2024	Akumulasi Amortisasi Per 31 Desember 2024
1	Kajian	27.865.349.312,00	1.349.338.741,00	10.959.943.093,00	40.174.631.146,00
2	Kajian Lainnya	3.999.756.445,00	0,00	3.017.306.681,00	7.017.063.126,00
3	Software	3.993.038.880,00	108.146.895,00	960.978.132,00	5.062.163.907,00
4	Sotware Lainnya	395.694.934,00	0,00	394.896.000,00	790.590.934,00
Jumlah		36.253.839.571,00	1.457.485.636,00	15.333.123.906,00	53.044.449.113,00

4.3.2 Kewajiban

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp29.435.872.014,96 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.566.523.584,05 merupakan saldo Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri dari:

Tabel 4.3.2
Rincian Kewajiban

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	(Kenaikan/ Penurunan)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	38.706.126,00	1.607.006,13	37.099.119,87
Pendapatan Diterima Dimuka	17.377.538,75	32.754.796,92	(15.377.258,17)
Utang Belanja	29.379.788.350,21	24.532.161.781,00	4.847.626.569,21
Jumlah	29.435.872.014,96	24.566.523.584,05	4.869.348.430,91

Terdapat kenaikan kewajiban sebesar Rp4.869.348.430,91 atau sebesar 19,82%. Pada tahun 2024 pembayaran utang belanja belum dapat dipenuhi oleh SKPD yang memiliki kewajiban.

Berdasarkan kebijakan akuntansi kewajiban yang mengatur pengakuan utang Pemerintah Daerah, dijabarkan bahwa atas penyerahan barang/jasa atau hak yang telah diterima Pemerintah Daerah sampai pada saat tanggal pelaporan berakhir dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga maka pemerintah memiliki kewajiban atau utang.

Mengacu pada kebijakan akuntansi kewajiban tersebut. Pemerintah Daerah dalam mencatat utang melakukan mekanisme verifikasi terhadap dokumen pendukung atas penyerahan barang/jasa yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah namun sampai berakhirnya tahun anggaran belum dibayarkan.



Mekanisme verifikasi ini dilakukan oleh BPKAD selaku pengelola keuangan daerah. dimana SKPD yang memiliki kewajiban atau utang kepada pihak ketiga tersebut mengajukan usulan utang SKPD beserta dokumen pendukung atas penyerahan barang/jasa kepada Pemerintah Daerah.

Dalam hal terdapat SKPD yang belum memberikan usulan utang dan dokumen pendukung sampai penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah. maka utang tersebut belum dapat dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah.

4.3.2.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 sebesar Rp38.706.126,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.607.006,13. Utang PFK merupakan utang pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

4.3.2.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.377.538,75 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp32.754.796,92, merupakan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah yang diterima dimuka sehingga menjadi kewajiban lancar bagi pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 21**.

4.3.2.3 Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp29.379.788.350,21 sedangkan Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.532.161.781,00. Terjadi kenaikan pada Utang Belanja sebesar Rp4.847.626.569,21 atau 19,76%.

Utang Belanja tersebut diatas merupakan Utang atas Belanja yang tidak sempat terbayarkan sampai dengan akhir tahun 2023. Adapun rincian mutasi utang belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.2.3
Rincian Utang Belanja

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	(Kenaikan/ Penurunan)
Utang Belanja Pegawai	16.790.799,00	260.795.616,00	(244.004.817,00)
Utang Belanja Barang	10.716.400.946,79	3.849.327.479,00	6.867.073.467,79
Utang Belanja Jasa	3.624.665.011,55	482.504.697,00	3.142.160.314,55
Utang Belanja Pemeliharaan	33.200.000,00	0,00	33.200.000,00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	194.688.573,00	77.200.000,00	117.488.573,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	487.040.000,00	1.048.683.118,00	(561.643.118,00)



Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	(Kenaikan/ Penurunan)
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	795.572.000,00	1.569.730.000,00	(774.158.000,00)
Utang Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi	4.089.664.855,87	7.530.146.747,00	(3.440.481.891,13)
Utang Belanja Aset Tetap Lainnya	202.320.000,00	202.320.000,00	0,00
Utang Belanja Tak Terduga	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Keuangan	9.214.686.164,00	9.214.686.164,00	0,00
Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	292.007.960,00	(292.007.960,00)
Jumlah	29.379.788.350,21	24.532.161.781,00	4.847.626.569,21

Terdapat mutasi Utang Belanja pada Tahun Anggaran 2024 yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.3.2.3.A
Mutasi Utang Belanja

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	(Kenaikan/ Penurunan)
Saldo Awal	24.532.161.781,00	32.679.668.086,00	(8.147.506.305,00)
Koreksi Saldo Awal	220,00	-	220,00
Penambahan	15.917.759.136,21	10.314.760.914,00	5.602.998.222,21
Pengurangan	11.070.132.787,00	18.462.267.219,00	(7.392.134.432,00)
Jumlah	29.379.788.350,21	24.532.161.781,00	4.847.626.569,21

Pada tahun anggaran 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mahakam Ulu menginstruksikan rekanan penyedia PT. Dwi Tunggal Putra (DTP) sebagai penyedia layanan internet Broadband VSAT Network dari bulan Januari sampai dengan Maret 2021 dengan surat nomor 072/724/DISKOMINFOSTANDI/TU.P/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020. Selama layanan internet selama 3 (tiga) bulan tersebut tidak didasari dengan perjanjian/kontrak antara Pengguna dengan pihak penyedia. Berdasarkan kondisi tersebut pada PT. DTP mengajukan berkas tagihan layanan internet dari bulan Januari s/d Maret 2021 sebesar Rp3.798.000.000,00 dengan invoice nomor 0678-0621/DTP-SA/IDNet/KW/21. Berdasarkan permasalahan tersebut maka Inspektorat melakukan audit dengan tujuan tertentu untuk menghitung nilai invoice yang sebenarnya menjadi kewajiban Pemerintah untuk dibayarkan kepada PT.DTP, dan diperoleh nilai jasa pelayanan akses internet terintegrasi yang dapat ditagihkan sebesar Rp3.153.773.814,55. Terhadap koreksi penambahan utang PT.DTP telah dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Bupati Mahakam Ulu yang menyatakan bahwa bertanggungjawab penuh atas kebenaran pelaksanaan Layanan Internet Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan pembayaran akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu kepada penyedia yaitu PT.DTP.



Pada tahun 2024 juga dilakukan koreksi penambahan utang berdasarkan hasil reviu utang kegiatan tahun anggaran 2023 dan 2024 oleh Inspektorat dengan surat nomor 700/24/Inspektorat/Reviu.Utang-2024/V/2025. Hasil reviu menyatakan bahwa terdapat utang belanja senilai Rp4.835.050.689,79 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Mahakam Ulu.

Rincian Utang Belanja per masing-masing SKPD adalah dapat dilihat pada **Lampiran 22 dan Lampiran 23**.

4.3.3 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.642.414.058.819,29 per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.941.542.762.806,99. Ekuitas yang tersaji merupakan saldo akhir ekuitas dari Laporan Perubahan Ekuitas yang akan dijelaskan lebih lanjut.

4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Penjelasan masing-masing pos Laporan Operasional (LO) sebagai berikut:

4.4.1 Pendapatan - LO

Pendapatan-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.083.441.357.000,32 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.711.320.871.536,67. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang diakui sebagai penambah Ekuitas dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan-LO diakui pada saat pendapatan diterima atau pada saat timbulnya hak atas pendapatan.

Menurut jenisnya pendapatan-LO diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO. Pendapatan-LO untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.083.441.357.000,32 mengalami penurunan Rp627.879.514.536,35 atau 23,16% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp2.711.320.871.536,67. Rincian pendapatan-LO Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4.1
Realisasi Pendapatan-LO

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah – LO	90.034.614.726,63	38.718.120.907,67	51.316.493.818,96
2.	Pendapatan Transfer – LO	1.972.271.021.687,00	2.619.272.506.519,00	(647.001.484.832,00)
3.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah - LO	21.135.720.586,69	53.330.244.110,00	(32.194.523.523,31)



No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Jumlah		2.083.441.357.000,32	2.711.320.871.536,67	(627.879.514.536,35)

4.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp90.034.614.726,63 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp38.718.120.907,67. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2024 ini memiliki proporsi sebesar 4,32% dari keseluruhan Pendapatan-LO.

Kelompok Pendapatan Asli Daerah terdiri dari 4 (empat) jenis pendapatan yaitu Pendapatan Pajak Daerah. Retribusi Daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. dan Lain-lain PAD yang sah. Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.4.1.1

Pendapatan Asli Daerah-LO

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	3.347.818.934,77	3.216.710.068,41	131.108.866,36
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	1.191.385.000,00	905.261.000,00	286.124.000,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	389.351.382,74	377.742.245,57	11.609.137,17
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	85.106.059.409,12	34.218.407.593,69	50.887.651.815,43
Jumlah		90.034.614.726,63	38.718.120.907,67	51.316.493.818,96

Pendapatan Asli Daerah-LO diakui saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah (SKPD/SKRD) dan/atau pada saat diterimanya setoran atas pendapatan tanpa penetapan terlebih dahulu yang seluruhnya terjadi pada tahun berjalan dan telah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

Hal ini berbeda dengan Pendapatan Asli Daerah – LRA yang diakui pada saat kas telah diterima baik di rekening Kas Daerah maupun pada Bendahara Penerimaan.

4.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Pendapatan Pajak pada Laporan Operasional disajikan secara akrual. Pendapatan Pajak Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024 sebesar Rp3.347.818.934,77 mengalami kenaikan sebesar Rp131.108.866,36 atau (4,08)% dibanding dengan tahun 2023 sebesar Rp 3.216.710.068,41.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp3.347.818.934,77 terdiri atas Pendapatan Pajak tahun 2024 yang sudah masuk ke rekening Kas Daerah sebesar Rp3.112.237.291,48 dan yang masih berupa hak (piutang) Pemerintah Daerah sebesar



Rp248.462.485,12 ditambah selisih Penyesuaian Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp15.377.258,17, dan dikurangi koreksi pendapatan pajak daerah-LO sebesar Rp28.258.100,00 yang merupakan pembayaran pajak restoran BOS yang merupakan tindak lanjut penyelesaian temuan kekurangan pembayaran pajak restoran tahun 2023 dimana pada tahun 2023 telah dilakukan pencatatan atas pajak daerah-LO. Adapun rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4.1.1.1
Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pajak Hotel-LO	31.475.000,00	24.780.000,00	6.695.000,00
Pajak Restoran-LO	1.427.236.520,00	1.120.110.250,53	307.126.269,47
Pajak Reklame-LO	118.980.812,17	103.910.427,29	15.070.384,88
Pajak Penerangan Jalan-LO	1.407.541.659,00	1.190.185.182,00	217.356.477,00
Pajak Sarang Burung Walet-LO	17.000.000,00	25.600.000,00	(8.600.000,00)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	133.662.018,60	406.269.636,59	(272.607.617,99)
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB)-LO	207.656.025,00	345.854.572,00	(138.198.547,00)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	4.266.900,00	0,00	4.266.900,00
Jumlah	3.347.818.934,77	3.216.710.068,41	131.108.866,36

4.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2023 dipungut dan dikelola oleh beberapa SKPD penghasil antara lain Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu serta Badan Pendapatan Daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 sebesar Rp1.191.385.000,00 mengalami kenaikan Rp286.124.000,00 atau 31,61% dibanding dengan tahun 2023 sebesar 905.261.000.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2024 terdiri atas Pendapatan Retribusi 2024 yang seluruhnya telah diterima rekening Kas Daerah sebesar Rp 1.191.385.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.4.1.1.2
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	842.476.000,00	866.411.000,00	(23.935.000,00)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	62.200.000,00	38.850.000,00	23.350.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	286.709.000,00	0,00	286.709.000,00
Jumlah	1.191.385.000,00	905.261.000,00	286.124.000,00

4.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO merupakan PAD dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO dalam hal ini penyertaan modal pada Bank Kaltimara. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2024 sebesar Rp389.351.382,74 merupakan hasil pembagian deviden atas Penyertaan



Modal kepada Bank Kaltimara pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp11.609.137,17 atau 3,07% dibanding dengan Tahun 2023 sebesar Rp377.742.245,57.

4.4.1.1.4 Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

Lain-lain PAD Yang Sah-LO merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak. retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah-LO tahun 2024 sebesar Rp85.106.059.409,12 mengalami kenaikan sebesar Rp50.887.651.815,43 atau 148,71% dibanding dengan Tahun 2023 sebesar Rp34.218.407.593,69 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.4.1.1.4
Realisasi Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	432.985.000,00	(432.985.000,00)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	12.000.000,00	60.000.000,00	(48.000.000,00)
Hasil Kerja Sama Daerah-LO	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Jasa Giro	20.062.087.238,89	15.564.745.203,16	4.497.342.035,73
Pendapatan Bunga	40.339.302.316,00	11.071.847.125,48	29.267.455.190,52
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	19.650.610.759,65	2.708.882.799,94	16.941.727.959,71
Penerimaan Komisi. Potongan. atau Bentuk Lain-LO	3.113.418.841,13	898.217.923,32	2.215.200.917,81
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.186.728.602,45	995.651.013,79	191.077.588,66
Pendapatan Denda Pajak-LO	5.588.823,00	0,00	5.588.823,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	0,00	283.405.200,00	(283.405.200,00)
Pendapatan dari Pengembalian-LO	736.322.828,00	0,00	736.322.828,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	2.202.673.328,00	(2.202.673.328,00)
Jumlah	85.106.059.409,12	34.218.407.593,69	50.887.651.815,43

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO tahun 2024 sebesar Rp12.000.000,00 menurun sebesar Rp48.000.000,00 atau 80,00% dibanding tahun 2023 sebesar Rp60.000.000,00 merupakan Hasil Sewa lahan Tower untuk telekomunikasi.

Penerimaan Jasa Giro tahun 2024 sebesar Rp20.062.087.238,89 naik sebesar Rp4.497.342.035,73 atau 28,89% dibanding dengan tahun 2023 sebesar Rp15.564.745.203,16 merupakan jasa giro atas penempatan rekening giro pemerintah pada Bank Kaltimara.

Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp40.339.302.316,00 naik sebesar Rp29.267.455.190,52 atau 264,34% dibanding tahun 2023 sebesar Rp11.071.847.125,48 merupakan Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah pada TDF di Bank Indonesia.

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO sebesar Rp19.650.610.759,65 naik sebesar Rp16.941.727.959,71 atas sebesar 625,41% dari tahun 2023 sebesar Rp2.708.882.799,94, hal ini karena pemerintah berupaya



melakukan penyelesaian atas tuntutan Ganti kerugian keuangan daerah yang ditemukan dalam pemeriksaan.

Pendapatan dari Pengembalian-LO tahun 2024 sebesar Rp736.322.828,00 merupakan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa dan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS.

4.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.972.271.021.687,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.619.272.506.519,0 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 4.4.1.2
Pendapatan Transfer-LO

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.790.308.515.177,00	2.424.094.787.411,00	(633.786.272.234,00)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO	181.962.506.510,00	195.177.719.108,00	(13.215.212.598,00)
TOTAL		1.972.271.021.687,00	2.619.272.506.519,00	(647.001.484.832,00)

Pendapatan Transfer-LO diakui saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas kurang bayar dan/atau pada saat diterimanya Kas di Kas Daerah. Hal ini berbeda dengan Pendapatan Transfer-LRA yang diakui hanya pada saat kas telah diterima di rekening Kas Daerah.

4.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO tahun 2024 adalah sebesar Rp1.790.308.515.177,00 mengalami penurunan sebesar Rp633.786.272.234,00 atau 26,15% dibandingkan tahun 2023 adalah sebesar Rp2.424.094.787.411,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO tersebut berasal dari Dana Perimbangan-LO dan Dana Insentif Daerah – LO adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4.1.2.1
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	1.215.920.476.000,00	1.832.162.294.000,00	(616.241.818.000,00)
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	434.344.822.000,00	458.913.738.421,00	(24.568.916.421,00)
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	66.605.764.716,00	52.387.489.710,00	14.218.275.006,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	21.189.646.525,00	21.771.118.268,00	(581.471.743,00)
5	Dana Insentif Daerah-LO	0,00	10.599.493.000,00	(10.599.493.000,00)



No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
6	Dana Desa-LO	52.247.805.936,00	48.260.654.012,00	3.987.151.924,00
Jumlah		1.790.308.515.177,00	2.424.094.787.411,00	(633.786.272.234,00)

4.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO tahun 2024 senilai Rp181.962.506.510,00 dan tahun 2023 senilai Rp 195.177.719.108,00 mengalami penurunan sebesar Rp13.215.212.598,00 atau 6,77%. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO tahun 2024 berasal dari Pendapatan Bagi Hasil-LO senilai Rp152.882.812.510,00 dan Bantuan Keuangan senilai Rp29.079.694.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.4.1.2.2
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil-LO	152.882.812.510,00	156.757.719.108,00	(3.874.906.598,00)
2	Bantuan Keuangan	29.079.694.000,00	38.420.000.000,00	(9.340.306.000,00)
Jumlah		181.962.506.510,00	195.177.719.108,00	(13.215.212.598,00)

Pendapatan Bagi Hasil-LO sebesar Rp152.882.812.510,00 terdiri atas:

Tabel 4.4.1.2.2.A
Realisasi Pendapatan Bagi Hasil - LO

NO	URAIAN	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	16.648.696.000,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	18.460.796.000,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	109.809.619.000,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	189.991.000,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	7.773.710.510,00
Total		152.882.812.510,00

4.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.135.720.586,69 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp53.330.244.110,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 4.4.1.3
Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO

No	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Hibah - LO	484.241.122,00	254.164.886,00	230.076.236,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	20.651.479.464,69	53.076.079.224,00	(32.424.599.759,31)
Jumlah		21.135.720.586,69	53.330.244.110,00	(32.194.523.523,31)

Lain-lain Pendapatan-LO sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO merupakan Pendapatan atas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD-LO, Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batubara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi-LO Pendapatan Hibah – LO dan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO.

4.4.2 Beban

Saldo Beban per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.378.622.493.249,78 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.162.626.907.624,42. Beban mengalami Kenaikan sebesar Rp215.995.585.625,36 atau 18,58% dibandingkan tahun 2023. Rincian Beban TA 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4.2
Rincian Beban 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan Penurunan (Rp)
1	Beban Pegawai	243.556.028.846,00	215.330.795.999,00	28.225.232.847,00
2	Beban Persediaan	122.519.704.310,88	38.408.585.699,71	84.111.118.611,17
3	Beban Jasa	263.348.142.313,75	233.120.305.231,78	30.227.837.081,97
4	Beban Pemeliharaan	13.413.133.597,00	6.224.905.374,57	7.188.228.222,43
5	Beban Perjalanan Dinas	237.617.186.516,15	183.241.592.691,00	54.375.593.825,15
6	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	37.482.363.455,00	106.346.601.163,00	(68.864.237.708,00)
7	Beban Subsidi	19.225.102,00	189.840.000,00	(170.614.898,00)
8	Beban Hibah	37.414.665.734,00	31.030.485.208,00	6.384.180.526,00
9	Beban Bantuan Sosial	2.994.304.181,00	2.754.115.723,00	240.188.458,00
10	Beban Penyisihan Piutang	50.000,00	1.764.935.547,36	(1.764.885.547,36)
12	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	44.288.679.864,00	33.025.567.711,00	11.263.112.153,00
13	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	19.255.493.033,00	17.581.239.940,00	1.674.253.093,00
14	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	138.443.079.678,00	119.592.042.053,00	18.851.037.625,00
15	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	15.333.123.906,00	8.330.912.571,00	7.002.211.335,00
16	Beban Bantuan Keuangan	202.937.312.713,00	165.684.982.712,00	37.252.330.001,00
Jumlah		1.378.622.493.249,78	1.162.626.907.624,42	215.995.585.625,36

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah serta saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset



sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Hal ini berbeda dengan belanja dimana hanya diakui pada saat terjadi pengeluaran atas kas.

4.4.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah Beban atas Kompensasi baik dalam bentuk Uang ataupun Barang yang ditetapkan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai Imbalan atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali Pekerjaan yang berkaitan dengan Pembentukan Modal.

Beban pegawai disajikan sebesar pembayaran atau kewajiban pembayaran untuk pegawai berupa gaji, tunjangan, tambahan penghasilan lainnya bagi PNS dan anggota DPRD.

Saldo Beban Pegawai per 31 Desember 2024 sebesar Rp243.556.028.846,00 sedangkan saldo Beban Pegawai Per 31 Desember 2023 sebesar Rp215.330.795.999,00 sehingga mengalami kenaikan Beban Pegawai sebesar Rp28.225.232.847,00 atau kenaikan sebesar 13,11%.

Tabel 4.4.2.1
Rincian Beban Pegawai

NO	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/Penurunan
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	96.185.432.631,00	77.867.986.379,00	18.317.446.252,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	121.820.864.307,00	112.601.098.727,00	9.219.765.580,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.325.552.500,00	11.110.883.000,00	1.214.669.500,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	12.596.126.608,00	13.070.384.943,00	(474.258.335,00)
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	166.933.700,00	167.962.950,00	(1.029.250,00)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	461.119.100,00	512.480.000,00	(51.360.900,00)
JUMLAH		243.556.028.846,00	215.330.795.999,00	28.225.232.847,00

4.4.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp122.519.704.310,88 sedangkan Beban Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp38.408.585.699,71 sehingga terjadi Kenaikan sebesar Rp84.111.118.611,17 atau 218,99%. Terdapat perbedaan antara belanja yang menjadi beban persediaan dengan beban persediaan yang disajikan, dimana hal tersebut berasal dari penyesuaian akhir tahun terhadap persediaan seluruh SKPD.

Tabel 4.4.2.2
Rincian Beban Persediaan

NO	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/Penurunan
1	Beban Barang Pakai Habis	118.904.323.286,88	36.692.800.047,71	82.211.523.239,17
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	3.596.959.024,00	1.715.785.652,00	1.881.173.372,00
3	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	18.422.000,00	0,00	18.422.000,00
JUMLAH		122.519.704.310,88	38.408.585.699,71	84.111.118.611,17



Pada tahun 2024 terdapat koreksi pada beban persediaan yang merupakan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh tim pemeriksa dengan rincian sebagai berikut :

1. Koreksi terhadap Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial sebesar Rp273,00 yang merupakan Kesalahan input nilai realisasi Belanja tidak terduga yang telah didistribusikan ke masing-masing beban sehingga menyebabkan kelebihan pencatatan pada Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial.
2. Koreksi terhadap Beban Komponen-Komponen Lainnya sebesar Rp6.354.085,00 yang merupakan temuan bahwa terdapat realisasi belanja tidak terduga yang telah didistribusikan ke Beban Bahan-Isi Tabung Gas sebesar Rp9.208.085,00 namun beban tersebut merupakan aset dibawah nilai kapitalisasi sehingga menyebabkan perlu dikoreksi ke Beban Komponen-Komponen Lainnya.
3. Koreksi terhadap Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp3.778.492.016,15 yang merupakan kesalahan rekapitulasi saldo awal Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan pada DPUPR.

4.4.2.3 Beban Jasa

Beban Jasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp263.348.142.313,75 sedangkan Beban Jasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp233.120.305.231,78 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp30.227.837.081,97 atau sebesar 12,97%. Adapun rincian Beban Jasa adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4.2.3
Rincian Beban Jasa

NO	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
1	Beban Jasa Kantor	203.069.874.489,73	191.094.267.851,77	11.975.606.637,96
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	13.657.509.780,00	8.862.585.312,00	4.794.924.468,00
3	Beban Sewa Tanah	246.803.250,01	349.156.666,67	(102.353.416,66)
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	15.361.169.600,00	6.493.347.000,00	8.867.822.600,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	5.967.882.428,01	7.732.708.305,34	(1.764.825.877,33)
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	240.250.456,00	152.940.000,00	87.310.456,00
7	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	97.632.387,00	49.950.000,00	47.682.387,00
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	624.456.155,00	3.302.161.287,00	(2.677.705.132,00)
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	6.973.212.607,00	6.399.770.463,00	573.442.144,00
10	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	50.505.000,00	(50.505.000,00)
11	Beban Kursus/Pelatihan. Sosialisasi. Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	15.864.890.121,00	7.913.659.846,00	7.951.230.275,00
12	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	8.582.000,00	19.439.000,00	(10.857.000,00)
13	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	1.235.879.040,00	699.814.500,00	536.064.540,00
JUMLAH		263.348.142.313,75	233.120.305.231,78	30.227.837.081,97

Pada tahun 2024 setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan perlu dilakukan koreksi terhadap beban lembur atas temuan Tumpang Tindih Pembayaran Uang Lelah dan Perjalanan Dinas atas Pelaksanaan Belanja Tak Terduga pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp19.040.000,00.

4.4.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.413.133.597,00 sedangkan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.224.905.374,57 sehingga



mengalami kenaikan sebesar Rp7.188.228.222,43 atau sebesar 115,48%. Adapun rincian Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4.2.4
Rincian Pemeliharaan

NO	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/Penurunan
1	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.799.817.883,00	5.012.166.870,00	3.787.651.013,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.730.689.714,00	973.480.135,00	2.757.209.579,00
4	Beban Pemeliharaan Jalan. Jaringan. Dan Irigasi	123.668.000,00	162.858.369,57	(39.190.369,57)
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	1.400.000,00	(1.400.000,00)
6	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	758.958.000,00	45.000.000,00	713.958.000,00
Jumlah		13.413.133.597,00	6.224.905.374,57	7.188.228.222,43

4.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 sebesar sebesar Rp237.617.186.516,15 sedangkan Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 sebesar Rp183.241.592.691,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp54.375.593.825,15 atau sebesar 29,67%. Adapun rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4.2.5
Rincian Beban Perjalanan Dinas Per SKPD

NO	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/Penurunan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.589.848.243,00	12.731.918.333,00	3.857.929.910,00
2	Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19.622.126.311,15	15.691.369.056,00	3.930.757.255,15
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	20.056.492.486,00	15.466.340.482,00	4.590.152.004,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	5.941.309.538,00	4.051.495.111,00	1.889.814.427,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.595.623.034,00	3.794.641.595,00	1.800.981.439,00
6	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	5.795.176.546,00	3.166.853.878,00	2.628.322.668,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	3.388.410.643,00	2.648.163.452,00	740.247.191,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.520.586.120,00	3.293.102.778,00	1.227.483.342,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	14.680.945.511,00	8.965.029.160,00	5.715.916.351,00
10	Dinas Perhubungan	6.763.133.604,00	5.173.989.937,00	1.589.143.667,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika. Statistik. Dan Persandian	5.483.655.084,00	3.882.174.738,00	1.601.480.346,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	3.181.088.579,00	2.625.962.961,00	555.125.618,00
13	Dinas Pariwisata. Pemuda dan Olahraga	3.388.193.354,00	2.890.074.094,00	498.119.260,00
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.506.938.230,00	8.314.195.547,00	192.742.683,00
15	Sekretariat Daerah	33.220.132.063,00	25.356.076.317,00	7.864.055.746,00
16	Inspektorat	4.770.623.105,00	3.249.598.515,00	1.521.024.590,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan Daerah	13.234.993.467,00	11.102.653.331,00	2.132.340.136,00



NO	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/Penurunan
18	Badan Pendapatan Daerah	4.885.325.943,00	3.345.128.996,00	1.540.196.947,00
19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	15.621.050.091,00	12.132.217.641,00	3.488.832.450,00
21	Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan	7.781.877.596,00	6.087.081.136,00	1.694.796.460,00
22	Sekretariat DPRD	18.111.864.141,00	17.026.320.105,00	1.085.544.036,00
23	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2.761.840.334,00	3.061.264.086,00	(299.423.752,00)
24	Kecamatan Long Apari	2.160.682.622,00	1.319.711.131,00	840.971.491,00
25	Kecamatan Long Pahangai	1.459.892.600,00	1.103.516.025,00	356.376.575,00
26	Kecamatan Long Bagun	1.365.619.670,00	1.007.274.655,00	358.345.015,00
27	Kecamatan Laham	1.115.273.000,00	625.914.000,00	489.359.000,00
28	Kecamatan Long Hubung	937.425.530,00	837.402.187,00	100.023.343,00
29	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	6.677.059.071,00	4.292.123.444,00	2.384.935.627,00
Jumlah		237.617.186.516,15	183.241.592.691,00	54.375.593.825,15

Pada pemeriksaan tahun 2024 ditemukan bahwa terdapat Belanja Perjalanan Dinas pada Lima SKPD Tidak Sesuai Ketentuan, Bukti pertanggungjawaban hotel pelaksanaan perjalanan dinas tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp553.871.011,00 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat DPRD, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serta ditemukan Tumpang Tindih Pembayaran Uang Lelah dan Perjalanan Dinas atas Pelaksanaan Belanja Tak Terduga pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp2.720.000,00, dimana kondisi tersebut menyebabkan koreksi kurang dari beban perjalanan dinas.

4.4.2.6 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2024 sebesar Rp37.482.363.455,00 sedangkan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2023 sebesar Rp106.346.601.163,00. Adapun rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4.2.6
Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

No	URAIAN	NILAI Rp
1	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22.260.341.000,00
2	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.222.022.455,00
Jumlah		37.482.363.455,00



4.4.2.7 Beban Bunga

Beban Bunga per 31 Desember 2024 sebesar Rp0.00 sedangkan Beban Bunga per 31 Desember 2023 sebesar Rp0.00. Beban Bunga tidak terjadi karena tidak terdapat pengeluaran atau kewajiban untuk pembayaran bunga atas pinjaman daerah.

4.4.2.8 Beban Subsidi

Beban Subsidi per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.225.102,00 sedangkan Beban Subsidi per 31 Desember 2023 sebesar Rp189.840.000.00.

4.4.2.9 Beban Hibah

Beban Hibah per 31 Desember 2024 sebesar Rp37.414.665.734,00 sedangkan Beban Hibah per 31 Desember 2023 sebesar Rp31.030.485.208,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp6.384.180.526,00 atau 20,57%.

Tabel 4.4.2.9
Rincian Beban Hibah

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/Penurunan
1	Beban Hibah kepada Badan. Lembaga. Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	37.267.687.620,00	31.021.661.400,00	6.246.026.220,00
2	Beban Hibah Dana BOS	50.040.000,00	(349.190.000,00)	399.230.000,00
3	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	96.938.114,00	358.013.808,00	(261.075.694,00)
Jumlah		37.414.665.734,00	31.030.485.208,00	6.384.180.526,00

4.4.2.10 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.994.304.181,00 sedangkan beban bantuan sosial per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.754.115.723,00 sehingga terjadi Kenaikan sebesar Rp240.188.458,00 atau 8,72%.

Tabel 4.4.2.10
Rincian Beban Bantuan Sosial 2024

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/Penurunan
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	1.505.290.000,00	1.669.195.723,00	(163.905.723,00)
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	1.489.014.181,00	231.780.000,00	1.257.234.181,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan. Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	853.140.000,00	(853.140.000,00)
Jumlah		2.994.304.181,00	2.754.115.723,00	240.188.458,00

4.4.2.11 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp50.000,00 sedangkan beban Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.764.935.547,36 sehingga terjadi Penurunan sebesar Rp1.764.885.547,36 atau 100,00%.



Tabel 4.4.2.11
Rincian Beban Penyisihan Piutang 2024

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/Penurunan
1	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Asli Daerah	50.000,00	1.611.254.989,30	(1.611.204.989,30)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	0,00	35.004.558,06	(35.004.558,06)
3	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	118.676.000,00	(118.676.000,00)
Jumlah		50.000,00	1.764.935.547,36	(1.764.885.547,36)

4.4.2.12 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp44.288.679.864,00 sedangkan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp33.025.567.711,00 mengalami Kenaikan sebesar Rp11.263.112.153,00 atau sebesar 34,10%.

Tabel 4.4.2.12
Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

NO	URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.233.895.505,00	5.141.983.959,00	1.091.911.546,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.139.184.193,00	8.220.440.334,00	1.918.743.859,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	5.655.967.693,00	2.472.342.961,00	3.183.624.732,00
4	Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (SATPOL PP)	687.103.828,00	420.531.598,00	266.572.230,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.515.527.893,00	196.986.125,00	1.318.541.768,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	391.529.303,00	233.163.767,00	158.365.536,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	2.177.418.043,00	2.069.620.332,00	107.797.711,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	352.653.474,00	253.219.067,00	99.434.407,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	482.441.143,00	440.667.455,00	41.773.688,00
10	Dinas Perhubungan	893.846.058,00	571.628.084,00	322.217.974,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	1.118.595.045,00	830.605.069,00	287.989.976,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	183.697.618,00	134.300.874,00	49.396.744,00
13	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	109.664.075,00	94.418.633,00	15.245.442,00
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	600.380.331,00	501.588.765,00	98.791.566,00
15	Sekretariat Daerah	6.576.730.599,00	5.716.437.717,00	860.292.882,00
16	Inspektorat	180.196.092,00	114.249.618,00	65.946.474,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	973.175.765,00	406.273.058,00	566.902.707,00
18	Badan Pendapatan Daerah	190.603.606,00	115.532.310,00	75.071.296,00
19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.800.750.486,00	2.525.218.693,00	275.531.793,00
20	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	208.712.250,00	113.301.035,00	95.411.215,00
21	Sekretariat DPRD	1.418.068.445,00	1.224.651.618,00	193.416.827,00
22	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	50.850.812,00	49.815.604,00	1.035.208,00
23	Kecamatan Long Apari	160.157.846,00	112.439.307,00	47.718.539,00
24	Kecamatan Long Pahangai	174.373.680,00	176.387.364,00	(2.013.684,00)
25	Kecamatan Long Bagun	698.446.353,00	618.167.988,00	80.278.365,00
26	Kecamatan Laham	119.746.736,00	75.247.331,00	44.499.405,00
27	Kecamatan Long Hubung	100.535.927,00	125.476.810,00	(24.940.883,00)
28	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	94.427.065,00	70.872.235,00	23.554.830,00
Jumlah		44.288.679.864,00	33.025.567.711,00	11.263.112.153,00



4.4.2.13 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 31 Desember 2024 sebesar Rp19.255.493.033,00 sedangkan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.581.239.940,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.674.253.093,00 atau sebesar 9,52%.

Tabel 4.4.2.13
Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

NO	URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.570.062.819,00	4.023.237.418,00	546.825.401,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.164.210.859,00	3.012.371.188,00	151.839.671,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	9.222.514.640,00	8.461.318.560,00	761.196.080,00
4	Dinas Perhubungan	1.276.699.892,00	1.079.083.183,00	197.616.709,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	689.659.983,00	685.258.823,00	4.401.160,00
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	22.008.204,00	21.658.320,00	349.884,00
7	Sekretariat Daerah	37.323.204,00	33.693.204,00	3.630.000,00
8	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	47.267.611,00	47.267.611,00	0
9	Badan Pendapatan Daerah	280.000,00	280.000,00	0
10	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.555.260,00	929.605,00	3.625.655,00
11	Kecamatan Long Apari	7.363.320,00	7.363.320,00	0
12	Kecamatan Long Pahangai	7.762.000,00	7.762.000,00	0
13	Kecamatan Long Bagun	110.914.043,00	109.478.843,00	1.435.200,00
14	Kecamatan Laham	40.983.380,00	40.983.380,00	0
15	Kecamatan Long Hubung	49.887.818,00	49.887.818,00	0
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.000.000,00	666.667,00	3.333.333,00
Jumlah		19.255.493.033,00	17.581.239.940,00	1.674.253.093,00

Setelah dilakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu maka ditemukan Pelaksanaan Pekerjaan atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Dinas Perhubungan Tidak Sesuai Ketentuan sehingga mengakibatkan terjadinya koreksi kurang atas asset tetap Gedung dan bangunan serta beban penyusutannya sebesar Rp2.854.972,00.

4.4.2.14 Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi

Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 31 Desember 2024 sebesar Rp138.443.079.678,00 sedangkan Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp119.592.042.053,00 mengalami kenaikan sebesar Rp18.851.037.625,00 atau sebesar 15,76%.



Tabel 4.4.2.14
Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

NO	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/Penurunan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	553.408.188,00	199.022.588,00	354.385.600,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	431.424.979,00	342.525.891,00	88.899.088,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	136.995.460.046,00	118.810.162.682,00	18.185.297.364,00
4	Dinas Perhubungan	180.020.613,00	18.155.150,00	161.865.463,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	157.321.750,00	150.099.354,00	7.222.396,00
6	Sekretariat Daerah	8.377.262,00	6.835.595,00	1.541.667,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	943.334,00	943.334,00	0,00
8	Kecamatan Long Apari	116.123.506,00	64.297.459,00	51.826.047,00
Jumlah		138.443.079.678,00	119.592.042.053,00	18.851.037.625,00

Setelah dilakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu maka ditemukan Pelaksanaan Pekerjaan atas Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tidak Sesuai Ketentuan sehingga mengakibatkan terjadinya koreksi kurang atas aset tetap Jalan Jaringan dan Irigasi serta beban penyusutannya sebesar Rp38.600.629,00.

4.4.2.15 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Pada tahun 2024 dan 2023 tidak terdapat beban penyusutan Aset Tetap Lainnya.

4.4.2.16 Beban Penyusutan Aset Lainnya

Pada tahun 2024 dan 2023 tidak terdapat beban penyusutan Aset Lainnya.

4.4.2.17 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.333.123.906,00 sedangkan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.330.912.571,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.002.211.335,00 atau sebesar 84,05 %.

Tabel 4.4.2.17
Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud

NO	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/Penurunan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.614.356.666,00	1.019.945.000,00	594.411.666,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	758.185.600,00	645.870.134,00	112.315.466,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	6.214.615.357,00	3.872.517.732,00	2.342.097.625,00
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	89.000.000,00	66.250.000,00	22.750.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	834.868.321,00	309.959.645,00	524.908.676,00



NO	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/Penurunan
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	52.034.282,00	23.316.047,00	28.718.235,00
7	Dinas Perhubungan	2.107.710.493,00	1.358.691.622,00	749.018.871,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika. Statistik. dan Persandian	295.638.200,00	83.837.002,00	211.801.198,00
9	Dinas Pariwisata. Pemuda dan Olahraga	274.976.000,00	264.976.000,00	10.000.000,00
10	Sekretariat Daerah	485.355.601,00	241.387.470,00	243.968.131,00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	179.820.000,00	37.886.667,00	141.933.333,00
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	204.212.760,00	3.333.334,00	200.879.426,00
13	Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.447.394.758,00	226.511.919,00	1.220.882.839,00
14	Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan	186.314.900,00	92.886.900,00	93.428.000,00
15	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	27.877.970,00	11.410.000,00	16.467.970,00
16	Inspektorat	32.860.467,00	3.293.634,00	29.566.833,00
17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	52.440.060,00	13.291.734,00	39.148.326,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	215.803.980,00	35.967.331,00	179.836.649,00
19	Kecamatan Long Bagun	19.580.400,00	19.580.400,00	0,00
20	Badan Pendapatan Daerah	11.788.510,00	0,00	11.788.510,00
21	Sekretariat DPRD	228.289.581,00	0,00	228.289.581,00
Jumlah		15.333.123.906,00	8.330.912.571,00	7.002.211.335,00

4.4.2.18 Beban Bagi Hasil

Pada tahun 2024 dan 2023 tidak terdapat Beban Bagi Hasil.

4.4.2.19 Beban Bantuan Keuangan

Beban Transfer per 31 Desember 2024 sebesar Rp202.937.312.713,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp165.684.982.712,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 37.252.330.001,00 atau 22,48%. Beban transfer merupakan beban yang terjadi karena pemberian bantuan keuangan kepada Entitas Pelaporan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 4.4.2.19

Rincian Beban Bantuan Keuangan

No	Kecamatan	Nilai (Rp)
1	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	52.247.805.936,00
2	Beban Bantuan Keuangan Umum Provinsi kepada Desa	3.450.000.000,00
3	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	147.239.506.777,00
Jumlah		202.937.312.713,00

4.4.2.20 Beban Tak Terduga

Beban Tak Terduga per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Hal ini karena semua beban tak terduga yang berasal dari belanja tak terduga direklasifikasikan ke beban yang sebenarnya terealisasi.

4.4.3 Surplus/Defisit Dari Operasi

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan. Surplus dari Kegiatan Operasional per 31 Desember 2024 sebesar Rp704.818.863.750,54 dan



Surplus per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.548.693.963.912,25 dimana terjadi penurunan sebesar Rp843.875.100.161,71 atau 54,49%.

4.4.4 Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional – LO

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional merupakan Pendapatan dan Beban yang sifatnya tidak rutin sehingga perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Pada tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan pada tahun 2023 tidak terdapat surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

4.4.5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa adalah selisih lebih/kurang antara Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional dan Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional selama satu periode pelaporan.

Pada tahun 2024 terdapat surplus sebelum pos luar biasa sebesar Rp704.818.863.750,54 dan pada tahun 2023 sebesar Rp1.548.693.963.912,25.

4.4.6 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut.

- a. kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- b. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- c. kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Defisit dari Pos Luar Biasa tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan tahun 2023 sebesar Rp0,00.

4.4.7 Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan. setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Surplus - LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp704.818.863.750,54 dan Surplus per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.548.693.963.912,25 dimana mengalami penurunan sebesar Rp843.875.100.161,71 atau 54,49%.



4.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tahun 2024 yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Investasi Aset Non Keuangan, Pendanaan, dan Transitoris. Tujuan Pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber penggunaan perubahan kas serta setara kas selama TA 2023 dan saldo Akhir Kas pada tanggal 31 Desember 2024. Arus kas bersih Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu TA 2024 dan 2023 terinci dalam tabel berikut.

Tabel 4.5
Saldo Akhir Kas TA 2024 dan 2023

Arus Kas	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Kenaikan / (Penurunan) Kas	(174.011.089.232,11)	497.710.099.882,14
Saldo Awal Kas di BUD. Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan	899.781.462.335,43	402.071.362.453,29
Saldo Akhir Kas	725.770.373.103,32	899.781.462.335,43

Data tabel pada realisasi Saldo Akhir Kas TA 2024 sebesar Rp725.770.373.103,32 mengalami penurunan sebesar Rp174.011.089.232,11 atau 19,34% jika dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp899.781.462.335,43. Saldo Akhir Kas dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.5.A
Rincian Kas TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Kas di Kas Daerah	724.288.143.980,16	897.449.318.811,75	(173.161.174.831,59)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	11.640.000,00	0,00	11.640.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	55.108.013,00	121.723.842,00	(66.615.829,00)
4	Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00
5	Kas Dana BOS	114.551.782,60	200.558.767,61	(86.006.985,01)
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	246.668.383,42	681.932.644,15	(435.264.260,73)
7	Kas Lainnya	181.488.715,14	1.327.928.269,92	(1.146.439.554,78)
8	Kas Dana BOK Puskesmas	872.772.229,00	0,00	872.772.229,00
JUMLAH		725.770.373.103,32	899.781.462.335,43	(174.011.089.232,11)

4.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp700.260.011.838,18 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.5.1
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Arus Masuk Kas	2.045.265.571.153,91	2.225.713.703.913,58
Arus Keluar Kas	1.345.005.559.315,73	1.151.919.017.929,57
Arus Kas Bersih	700.260.011.838,18	1.073.794.685.984,01



4.5.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi selama TA 2024 dan 2023 sebesar Rp2.045.265.571.153,91 dan Rp2.225.713.703.913,58 atau mengalami penurunan sebesar Rp180.448.132.759,67 atau 8,11%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang terdiri dari:

Tabel 4.5.1.1
Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Peningkatan/ Penurunan
1	Penerimaan Pajak Daerah	3.112.237.291,48	2.964.512.089,34	147.725.202,14
2	Penerimaan Retribusi Daerah	1.191.385.000,00	905.261.000,00	286.124.000,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	389.351.382,74	377.742.245,57	11.609.137,17
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	86.862.721.502,00	43.040.135.596,67	43.822.585.905,33
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	40.317.295.000,00	40.409.150.660,00	(91.855.660,00)
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.094.370.824.446,00	1.330.519.686.894,00	(236.148.862.448,00)
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	434.344.822.000,00	458.913.738.421,00	(24.568.916.421,00)
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	87.795.411.241,00	74.158.607.978,00	13.636.803.263,00
9	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	10.599.493.000,00	(10.599.493.000,00)
10	Penerimaan Dana Insentif Daerah	52.247.805.936,00	48.260.654.012,00	3.987.151.924,00
11	Penerimaan Dana Desa	146.841.939.510,00	172.129.247.173,00	(25.287.307.663,00)
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	29.079.694.000,00	38.420.000.000,00	(9.340.306.000,00)
13	Penerimaan Lainnya	68.712.083.844,69	5.015.474.844,00	63.696.609.000,69
14	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00
Jumlah		2.045.265.571.153,91	2.225.713.703.913,58	(180.448.132.759,67)

4.5.1.1.1 Penerimaan Pajak Daerah

Saldo realisasi Penerimaan Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp3.112.237.291,48 dan TA 2023 sebesar Rp2.964.512.089,34. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp147.725.202,14 atau 4,98%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.5.1.1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah TA 2024 dan 2023

Arus Kas	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Pajak Hotel - LRA	19.225.000,00	14.635.300,00
Pajak Restoran - LRA	1.408.302.820,00	1.091.840.266,00
Pajak Reklame - LRA	77.584.294,00	67.553.219,00
Pajak Penerangan Jalan - LRA	1.407.541.659,00	1.190.185.182,00
Pajak Sarang Burung Walet - LRA	7.000.000,00	6.000.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	90.093.695,48	336.656.571,70
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	98.222.923,00	257.641.550,64
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	4.266.900,00	0,00
Jumlah	3.112.237.291,48	2.964.512.089,34



4.5.1.1.2 Penerimaan Retribusi Daerah

Saldo realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2024 sebesar Rp1.191.385.000,00 dan TA Tahun 2023 sebesar Rp905.261.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp286.124.000,00 atau 31,61% jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.5.1.1.2
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	842.476.000,00	866.411.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA	62.200.000,00	38.850.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	286.709.000,00	0,00
Jumlah	1.191.385.000,00	905.261.000,00

4.5.1.1.3 Penerimaan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan

Saldo realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan TA 2024 sebesar Rp389.351.382,74 dan TA 2023 sebesar Rp377.742.245,57 atau mengalami kenaikan sebesar Rp11.609.137,17 atau 3,07% jika dibandingkan tahun sebelumnya.

4.5.1.1.4 Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

Saldo realisasi penerimaan Lain-lain Yang Sah TA 2024 sebesar Rp86.862.721.502,00 dan TA 2023 sebesar Rp43.040.135.596,67 dimana mengalami kenaikan sebesar Rp43.822.585.905,33 atau 101,82% jika dibandingkan tahun sebelumnya. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.5.1.1.4
Realisasi Penerimaan lain-lain PAD yang Sah TA 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi 2024 Rp	Realisasi 2023 Rp
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	12.000.000,00	60.000.000,00
Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Jasa Giro - LRA	20.062.087.238,89	15.564.745.203,16
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah - LRA	40.339.302.316,00	11.205.905.090,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	21.388.680.567,52	11.828.553.485,40
Penerimaan Komisi. Potongan. atau Bentuk Lain	3.125.206.126,14	898.617.923,32
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	1.186.728.602,45	995.651.013,79
Pendapatan Denda Pajak Daerah - LRA	5.588.823,00	584.353,00
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa - LRA	0,00	283.405.200,00
Pendapatan dari Pengembalian - LRA	743.127.828,00	0,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	2.202.673.328,00
Jumlah	86.862.721.502,00	43.040.135.596,67

4.5.1.1.5 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Saldo realisasi penerimaan Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk periode TA 2024 sebesar Rp40.317.295.000,00 dan 2023 sebesar Rp40.409.150.660,00. dimana mengalami penurunan sebesar Rp91.855.660,00 atau 0,23% dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 4.5.1.1.5
Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi 2024 Rp	Realisasi 2023 Rp
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	25.208.454.000,00	24.917.662.596,00
DBH PPh Pasal 21	14.777.506.000,00	14.923.192.008,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPSKPDN	331.314.000,00	568.242.771,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	21.000,00	53.285,00
Jumlah	40.317.295.000,00	40.409.150.660,00

4.5.1.1.6 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk periode TA 2024 sebesar Rp1.094.370.824.446,00 dan TA 2023 sebesar Rp1.330.519.686.894,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp236.148.862.448,00 atau 17,75% jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 4.5.1.1.6
Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi 2024 Rp	Realisasi 2023 Rp
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	18.639.235.000,00	40.021.436.697,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	52.407.741.000,00	59.618.773.338,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	440.988.597.780,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.003.484.882.446,00	766.621.677.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	7.251.270.000,00	12.776.043.807,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	3.704.617.000,00	8.941.041.061,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.167.186.000,00	1.552.117.211,00
DBH Sawit	7.715.893.000,00	0,00
Jumlah	1.094.370.824.446,00	1.330.519.686.894,00

4.5.1.1.7 Penerimaan Dana Alokasi Umum

Saldo realisasi Penerimaan Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk periode TA 2024 sebesar Rp434.344.822.000,00 dan 2023 sebesar Rp458.913.738.421,00 mengalami penurunan sebesar Rp24.568.916.421,00 atau 5,35% jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 4.5.1.1.7
Rincian Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Umum

NO	KETERANGAN	NILAI (Rp)
1	DAU tidak ditentukan penggunaannya	324.626.711.000,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	1.598.400.000,00
3	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	34.206.380.000,00
4	Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan	6.426.893.000,00
5	Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum	67.486.438.000,00
Jumlah		434.344.822.000,00



4.5.1.1.8 Penerimaan Dana Alokasi Khusus

Saldo realisasi Penerimaan Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk periode TA 2024 sebesar Rp87.795.411.241,00 dan TA 2023 sebesar Rp74.158.607.978,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp13.636.803.263,00 atau 18,39% jika dibandingkan tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.5.1.1.8
Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Khusus Pemerintah TA 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi 2024 Rp	Realisasi 2023 Rp
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	66.605.764.716,00	52.387.489.710,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	21.189.646.525,00	21.771.118.268,00
Jumlah	87.795.411.241,00	74.158.607.978,00

4.5.1.1.9 Penerimaan Dana Insentif Daerah

Saldo realisasi Penerimaan Dana Insentif Daerah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk periode TA 2024 sebesar Rp0,00 dan TA 2023 sebesar Rp10.599.493.000.

4.5.1.1.10 Penerimaan Dana Desa

Saldo realisasi Penerimaan Dana Desa Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk periode 2024 adalah sebesar Rp52.247.805.936,00 dan 2023 adalah sebesar Rp48.260.654.012,00 atau mengalami Kenaikan sebesar Rp3.987.151.924,00 atau 8,26% jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 4.5.1.10
Realisasi Penerimaan Dana Desa

No	Kecamatan	Nilai
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	52.247.805.936,00
Jumlah		52.247.805.936,00

4.5.1.1.11 Penerimaan Bagi Hasil Pajak

Saldo realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk periode 2024 adalah sebesar Rp146.841.939.510,00 dan 2023 adalah sebesar Rp172.129.247.173,00 mengalami penurunan sebesar Rp25.287.307.663,00 atau 14,69% jika dibandingkan tahun sebelumnya. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.5.1.11
Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak TA 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi 2024 Rp	Realisasi 2023 Rp
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	16.586.674.000,00	15.198.454.000,00
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	18.737.308.000,00	26.420.136.000,00
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	103.552.841.000,00	122.885.597.065,00
Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	191.406.000,00	183.752.000,00
Bagi Hasil Pajak Rokok	7.773.710.510,00	7.441.308.108,00
Jumlah	146.841.939.510,00	172.129.247.173,00



4.5.1.1.12 Penerimaan Bantuan Keuangan

Saldo realisasi Penerimaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk periode 2024 adalah sebesar Rp29.079.694.000,00 dan 2023 adalah sebesar Rp38.420.000.000,00 dimana mengalami penurunan sebesar Rp9.340.306.000,00 atau 24,31% jika dibandingkan tahun sebelumnya.

4.5.1.1.13 Penerimaan Lainnya

Saldo realisasi Penerimaan Lainnya Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk periode 2024 adalah Rp68.712.083.844,69 dan 2023 adalah Rp5.015.474.844,00 dimana merupakan Penerimaan Bagi Hasil Pemegang IUPK Atas Pertambangan Mineral Logam dan Batubara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi, dan penerimaan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD.

4.5.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Arus keluar dari aktivitas operasi selama TA 2024 sebesar Rp1.345.005.559.315,73 dan TA 2023 sebesar Rp1.151.919.017.929,57. Jika dibandingkan TA sebelumnya mengalami kenaikan sebesar Rp193.086.541.386,16 atau 16,76%. Adapun rincian dari arus kas keluar aktivitas operasi dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 4.5.1.2
Arus Keluar dari Aktivitas Operasi TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Peningkatan/ Penurunan	%
1	Pembayaran Pegawai	243.806.314.317,00	215.070.000.383,00	28.736.313.934,00	13,26
2	Pembayaran Barang dan Jasa	848.315.300.662,73	724.792.105.103,57	123.523.195.559,16	17,04
3	Belanja Subsidi	19.225.102,00	189.840.000,00	(170.614.898,00)	89,87
4	Pembayaran Hibah	43.300.192.284,00	43.843.744.008,00	(543.551.724,00)	1,24
5	Pembayaran Bantuan Sosial	2.994.304.181,00	2.327.545.723,00	666.758.458,00	28,65
6	Pembayaran Tak Terduga	3.632.910.056,00	10.800.000,00	3.622.110.056,00	33.538,06
7	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	202.937.312.713,00	165.684.982.712,00	37.252.330.001,00	22,48
Jumlah		1.345.005.559.315,73	1.151.919.017.929,57	193.086.541.386,16	16,76

4.5.1.2.1 Pembayaran Pegawai

Saldo realisasi Pembayaran Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp243.806.314.317,00 dan TA 2023 sebesar Rp215.070.000.383,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Pembayaran Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp28.736.313.934,00 atau 13,36%.

Tabel 4.5.1.2.1
Rincian Pembayaran Pegawai

No	Uraian	Nilai
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	96.185.432.631,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	122.071.149.778,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.325.552.500,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.596.126.608,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	166.933.700,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	461.119.100,00
Jumlah		243.806.314.317,00



4.5.1.2.2 Pembayaran Barang

Saldo realisasi Pembayaran Belanja Barang Rp848.315.300.662,73 dan TA 2023 sebesar Rp724.792.105.103,57. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Pembayaran Belanja Barang mengalami kenaikan sebesar Rp123.523.195.559,16 atau 17,04%.

Tabel 4.5.1.2.2
Rincian Pembayaran Barang

No	Uraian	Nilai
1	Belanja Barang	295.143.484.733,00
2	Belanja Jasa	261.626.564.849,58
3	Belanja Pemeliharaan	13.261.492.222,00
4	Belana Perjalanan Dinas	236.742.321.303,15
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	37.159.563.455,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	4.381.874.100,00
Jumlah		848.315.300.662,73

4.5.1.2.3 Pembayaran Subsidi

Saldo realisasi Pembayaran Subsidi TA 2024 sebesar Rp19.225.102,00 dan TA 2023 sebesar Rp189.840.000,00.

4.5.1.2.4 Pembayaran Hibah

Saldo realisasi Pembayaran Hibah 2024 sebesar Rp43.300.192.284,00 dan TA 2023 sebesar Rp43.843.744.008,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Pembayaran Hibah mengalami penurunan sebesar Rp543.551.724,00 atau 1,24%.

Tabel 4.5.1.2.4
Rincian Pembayaran Hibah

No	Uraian	Nilai
1	Belanja Hibah kepada Badan. Lembaga. Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	37.034.487.620,00
2	Belanja Hibah Dana BOS	6.130.546.550,00
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	96.938.114,00
4	Belanja Hibah Dana BOSP	38.220.000,00
Jumlah		43.300.192.284,00

4.5.1.2.5 Pembayaran Bantuan Sosial

Saldo realisasi Pembayaran Bantuan Sosial TA 2024 sebesar Rp2.994.304.181,00 dan TA 2023 sebesar Rp2.327.545.723,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Pembayaran Bantuan Sosial mengalami penurunan sebesar Rp666.758.458,00 atau 28,65%

Tabel 4.5.1.2.5
Rincian Pembayaran Bantuan Sosial

No	Uraian	Nilai
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.505.290.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.489.014.181,00
Jumlah		2.994.304.181,00



4.5.1.2.7 Pembayaran Tak Terduga

Saldo realisasi Pembayaran Tak Terduga TA 2024 sebesar Rp3.632.910.056,00 dan TA 2023 sebesar Rp10.800.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Pembayaran Belanja Tak Terduga mengalami kenaikan sebesar Rp3.622.110.056,00 atau 33.538,06%.

4.5.1.2.8 Pembayaran Bagi Hasil Pajak

Saldo realisasi Pembayaran Bagi Hasil Pajak TA 2024 sebesar Rp202.937.312.713,00 dan TA 2023 sebesar Rp165.684.982.712,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Pembayaran Bagi Hasil Pajak mengalami kenaikan sebesar Rp37.252.330.001,00 atau 22,48%.

Tabel 4.5.1.2.8

Rincian Pembayaran Bagi Hasil Pajak

No	Uraian	Nilai
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	3.450.000.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	199.487.312.713,00
Jumlah		202.937.312.713,00

4.5.1.3 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi berupa arus kas keluar yang direalisasikan pada belanja modal yaitu per 31 Desember 2024 sebesar Rp873.664.498.927,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp575.956.751.164,00.

Tabel 4.5.1.3

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Peningkatan/ Penurunan
1	Arus Kas Masuk	6.555.000,00	458.546.400,00	(451.991.400,00)
2	Arus Kas Keluar	873.671.053.927,00	576.415.297.564,00	297.255.756.363,00
Jumlah Arus Kas Bersih		(873.664.498.927,00)	(575.982.312.564,00)	(297.707.747.763,0)

4.5.1.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Masuk dari aktivitas investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp 6.555.000,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp458.546.400,00.

Tabel 4.5.1.3.1

Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Peningkatan/ Penurunan
1	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	432.985.000,00	(432.985.000,00)
2	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	6.555.000,00	25.561.400,00	(19.006.400,00)
Jumlah Arus Kas Bersih		6.555.000,00	458.546.400,00	(451.991.400,00)

4.5.1.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Keluar dari aktivitas investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp873.671.053.927,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp576.415.297.564,00.



Jika dibandingkan dengan realisasi TA sebelumnya Arus Kas Keluar mengalami kenaikan sebesar Rp297.255.756.363,00.

Tabel 4.5.1.3.2
Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Peningkatan/ Penurunan
1	Perolehan Tanah	746.620.000,00	2.455.361.692,00	(1.708.741.692,00)
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	145.457.685.363,00	53.837.498.492,00	91.620.186.871,00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	77.472.457.897,00	140.819.291.410,00	(63.346.833.513,00)
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	594.833.786.926,00	337.386.866.136,00	257.446.920.790,00
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	390.541.000,00	28.209.356.534,00	(27.818.815.534,00)
6	Perolehan Aset Lainnya	44.769.962.741,00	1.556.923.300,00	43.213.039.441,00
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	12.150.000.000,00	(2.150.000.000,00)
8	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00
Jumlah		873.671.053.927,00	576.415.297.564,00	297.255.756.363,00

4.5.1.4 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Saldo arus kas bersih aktivitas pendanaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0.00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0.00.

4.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Saldo Arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2024 sebesar Rp606.602.143,29 mencerminkan saldo penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga. misalnya potongan Taspen dan Askes.

Tabel 4.5.2
Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Peningkatan/ Penurunan
1	Arus Kas Masuk	155.328.796.627,37	108.232.063.223,05	47.096.733.404,32
2	Arus Kas Keluar	155.935.398.770,66	108.359.898.160,92	47.575.500.609,74
Jumlah Arus Kas Bersih		(606.602.143,29)	(127.834.937,87)	(478.767.205,42)

4.5.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus kas masuk per 31 Desember 2024 sebesar Rp155.328.796.627,37 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp108.232.063.223,05. Terdapat penerimaan PFK sebesar Rp155.321.268.505,52, Kas Lainnya pada Diskominfo sebesar Rp2.555.335,85, dan kas lainnya pada dinsos Sebesar Rp4.972.786,00.

Tabel 4.5.2.1
Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Peningkatan/ Penurunan
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	155.321.268.505,52	108.016.394.669,13	47.304.873.836,39
2	Kas Lainnya pada BPBD	0,00	119.025.000,00	(119.025.000,00)
3	Kas Lainnya pada Kominfo	2.555.335,85	0,00	2.555.335,85
4	Kas Lainnya pada Dinsos	4.972.786,00	0,00	4.972.786,00



No	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Peningkatan/ Penurunan
5	Koreksi Utang PFK BUD	0,00	96.643.553,92	(96.643.553,92)
Jumlah		155.328.796.627,37	108.232.063.223,05	47.096.733.404,32

4.5.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus kas keluar per 31 Desember 2024 sebesar Rp155.935.398.770,66 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp108.359.898.160,92. Pada Tahun 2024 terdapat pengeluaran PFK sebesar Rp155.284.169.385,65, Koreksi Jasa Giro Kas Lainnya sebesar Rp380.483.100,00, Sisa Belanja BOSDA 2021 pada Kas Lainnya sebesar Rp11.787.285,01 dan reklas Kas Daerah ke Piutang Lainnya sebesar Rp258.959.000,00.

Tabel 4.5.2.2
Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Peningkatan/ Penurunan
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	155.284.169.385,65	108.014.787.663,00	47.269.381.722,65
2	Koreksi Jasa Giro Kas Lainnya	380.483.100,00	0,00	380.483.100,00
3	Sisa Belanja BOSDA 2021 pada Kas Lainnya	11.787.285,01	170.240.000,00	(158.452.714,99)
4	Koreksi Utang PFK	0,00	174.870.497,92	(174.870.497,92)
5	Reklas Kasda ke Piutang Lainnya	258.959.000,00	0,00	258.959.000,00
Jumlah		155.935.398.770,66	108.359.898.160,92	47.575.500.609,74

4.5.3 Kenaikan/Penurunan Kas

Kas selama Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp174.011.089.232,11 dan Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp497.710.099.882,14.

Tabel 4.5.3
Rincian atas Kenaikan/Penurunan Kas

No	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Peningkatan/ Penurunan
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	700.260.011.565,18	1.073.794.685.984,01	(373.534.674.418,83)
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(873.664.498.927,00)	(575.956.751.164,00)	(297.707.747.763,00)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(606.602.143,29)	(127.834.937,87)	(478.767.205,42)
Jumlah Kenaikan/Penurunan Kas		(174.011.089.505,11)	497.710.099.882,14	(671.721.189.387,25)

4.5.4 Saldo Awal Kas

Saldo Awal kas Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu TA 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp899.781.462.335,43 dan Rp402.071.362.453,29, saldo awal kas mengalami kenaikan sebesar Rp497.710.099.882,14 atau 123,79%.



4.5.5 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu TA 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, saldo Kas Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp0.00 atau 0.00%.

4.5.6 Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir kas Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu TA 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp725.770.373.103,32 dan Rp899.781.462.335,43. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, saldo akhir kas mengalami penurunan sebesar Rp174.011.089.232,11 atau 19,34%. Saldo Akhir Kas merupakan seluruh Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024.

Tabel 4.5.6
Rincian Saldo Akhir Kas

No	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Peningkatan/ Penurunan
1	Kas di Kas Daerah	724.288.143.980,16	897.449.318.811,75	(173.161.174.831,59)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	11.640.000,00	0,00	11.640.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	55.108.013,00	121.723.842,00	(66.615.829,00)
4	Kas Dana BOS	114.551.782,60	200.558.767,61	(86.006.985,01)
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	246.668.383,42	681.932.644,15	(435.264.260,73)
6	Kas Lainnya	1.054.260.944,14	1.327.928.269,92	(273.667.325,78)
Jumlah		725.770.373.103,32	899.781.462.335,43	(174.011.089.232,11)

4.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Laporan Perubahan Ekuitas

URAIAN		2024	2023
	EKUITAS AWAL	4.941.542.762.806,99	3.414.820.714.152,43
	SURPLUS/DEFISIT-LO	704.818.863.750,54	1.548.693.963.912,25
	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
	KOREKSI EKUITAS	(3.947.567.738,24)	(21.971.915.257,69)
	EKUITAS AKHIR	5.642.414.058.819,29	4.941.542.762.806,99

4.6.1 Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal tahun 2024 sebesar Rp4.941.542.762.806,99 dimana jumlah ini berasal dari saldo akhir ekuitas akhir tahun 2023.



4.6.2 Surplus / Defisit - LO

Terdapat penambahan ekuitas bersumber dari Saldo Surplus-LO pada akhir periode pelaporan tahun 2024 senilai Rp704.818.863.750,54 sedangkan Surplus pada tahun 2023 senilai Rp1.548.693.963.912,25.

4.6.3 Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya menjadi pengurang dalam Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024. Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp3.947.567.738,24 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp21.971.915.257,69. Adapun rincian Koreksi Ekuitas Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6.3
Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya

No	Uraian	2024	2023
1	Kas Dana BOS	0,00	(170.240.000,00)
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	8.982.784.000,00
3	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	(7.900.000,00)	(47.462.740,00)
4	Dana Bergulir kepada Masyarakat	6.555.000,00	25.561.400,00
5	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(2.394.536.370,00)	9.536.303.972,00
6	Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	(12.150.384.126,00)
7	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	669.081.962,00	1.063.706.518,00
8	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	1.087.600.000,00
9	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	0,00	462.773.636,00
10	Bangunan Gedung Kantor	0,00	184.573.000,00
11	Bangunan Kesehatan	0,00	(184.573.000,00)
12	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	199.572.000,00
13	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	189.691.000,00
14	Jalan Nasional	454.416.680,00	(348.452.000,00)
15	Jalan Kabupaten	(454.416.680,00)	672.541.940,46
16	Jalan Desa	0,00	(9.920.000,00)
17	Jembatan pada Jalan Desa	0,00	(2.111.966.183,00)
18	Jembatan Penyeberangan	0,00	1.922.275.183,00
19	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor	590.554.258,00	(136.302.489,00)
20	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	(4.565.867.232,46)
21	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Nasional	0,00	(898.755.500,00)
22	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa	0,00	(26.058.320.008,52)
23	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	(26.939.712,09)
24	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(1.347.708.735,00)	(6.630.385,00)
25	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise	(109.776.901,00)	0,00
26	Utang PPh 22	0,00	21.583.059,64
27	Utang PPN Pusat	0,00	73.940.333,00
28	Utang Iuran Wajib Pegawai	0,00	1.120.161,28
29	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	20.940.000,00
30	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	0,00	2.000.000,00
31	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	(499.235.940,00)
32	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	254.149.260,00
33	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	0,00	542.018.595,00
34	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00
35	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	(1.307.868,00)	0,00
36	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	(3.153.773.814,55)	0,00
37	Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	(194.688.573,00)	0,00
38	lain-lain	0,00	0,00



No	Uraian	2024	2023
39	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	45.968.895,31	0,00
40	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	7.900.000,00	0,00
41	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	216.610.000,00	0,00
42	Tractor	2.871.334.408,00	0,00
43	Excavator	1.652.790.000,00	0,00
44	Mebel	(9.810.015.000,00)	0,00
45	Meja Kerja Pejabat	7.011.345.000,00	0,00
Jumlah		(3.947.567.738,24)	(21.971.915.257,69)

Rincian atas koreksi ekuitas lainnya dijelaskan pada **Lampiran 24**.

4.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir sebagai hasil dari Penjumlahan Ekuitas Awal dan Surplus/Defisit-LO serta Koreksi Ekuitas Lainnya sehingga nilai ekuitas Akhir menjadi sebesar Rp5.642.414.058.819,29 meningkat sebesar Rp700.871.296.012,30 atau 14,18% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.941.542.762.806,99.



BAB V

PENJELASAN ATAS

INFORMASI NON KEUANGAN



BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Pengungkapan Informasi Lainnya

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kepala Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu

Pada tahun 2025 Kabupaten Mahakam Ulu akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 paling lambat tanggal 24 Mei 2025 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025. Atas keputusan ini, pelaksanaan PSU membutuhkan tambahan dana yang signifikan, mencakup pencetakan ulang surat suara, distribusi logistik, biaya operasional petugas pemilu yang menjadi beban APBD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2025.



BAB VI

PENUTUP



BAB VI PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya. untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pelaksanaan Pemerintahan Daerah pada Kabupaten Mahakam Ulu dipimpin oleh:

Bupati : Dr. Bonifasius Belawan Geh, SH., ME
Wakil Bupati : Drs. Yohanes Avun, M.Si
Sekretaris Daerah : Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.Si

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 secara keseluruhan.



LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN ANGGARAN
2024



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
BELANJA MODAL
PER 31 DESEMBER 2024

KODE REKENING	NAMA REKENING	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	LEBIH / (KURANG)
5.2.01.01.01.0002	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	1.500.000.000,00	746.620.000,00	49,77	(753.380.000,00)
5.2.01.01.03.0006	Belanja Modal Tanah Lapangan Terbang	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	1.997.640.000,00	1.652.790.000,00	82,74	(344.850.000,00)
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	406.900.000,00	402.100.000,00	98,82	(4.800.000,00)
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	3.169.420.037,00	2.853.015.516,00	90,02	(316.404.521,00)
5.2.02.01.03.0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	158.026.000,00	150.000.000,00	94,92	(8.026.000,00)
5.2.02.01.03.0013	Belanja Modal Peralatan Selam	57.510.000,00	57.387.000,00	99,79	(123.000,00)
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.469.745.000,00	3.999.300.000,00	89,47	(470.445.000,00)
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	2.678.400.000,00	2.677.800.000,00	99,98	(600.000,00)
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	156.608.640,00	155.955.000,00	99,58	(653.640,00)
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.337.199.000,00	2.646.018.176,00	79,29	(691.180.824,00)
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	45.617.000,00	0,00	0,00	(45.617.000,00)
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	14.319.912.150,00	13.285.997.650,00	92,78	(1.033.914.500,00)
5.2.02.02.02.0002	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	300.000.000,00	0,00	0,00	(300.000.000,00)
5.2.02.02.03.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	975.000.000,00	975.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.02.04.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	198.400.000,00	192.000.000,00	96,77	(6.400.000,00)
5.2.02.02.04.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	8.137.639.100,00	7.962.477.914,00	97,85	(175.161.186,00)
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	19.870.800,00	19.870.800,00	100,00	0,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.03.0008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	12.865.500,00	0,00	0,00	(12.865.500,00)
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	10.286.100,00	4.545.000,00	44,19	(5.741.100,00)
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	6.103.000,00	5.805.000,00	95,12	(298.000,00)
5.2.02.04.01.0003	Belanja Modal Alat Panen	58.996.000,00	0,00	0,00	(58.996.000,00)
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	88.446.600,00	88.032.200,00	99,53	(414.400,00)
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	83.470.200,00	28.738.200,00	34,43	(54.732.000,00)
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.570.409.421,00	1.832.082.856,00	71,28	(738.326.565,00)
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.592.243.704,00	1.714.759.184,00	66,15	(877.484.520,00)
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	45.781.809.706,00	42.667.177.842,00	93,20	(3.114.631.864,00)
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	179.113.904,00	83.513.844,00	46,63	(95.600.060,00)
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	3.036.397.815,00	2.615.438.488,00	86,14	(420.959.327,00)
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	57.675.300,00	34.856.600,00	60,44	(22.818.700,00)
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.249.080.255,00	5.191.300.927,00	83,07	(1.057.779.328,00)
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	507.851.153,00	367.910.500,00	72,44	(139.940.653,00)
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	505.350.556,00	258.017.254,00	51,06	(247.333.302,00)
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	367.689.056,00	318.402.628,00	86,60	(49.286.428,00)
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	3.777.165.221,00	2.721.641.421,00	72,06	(1.055.523.800,00)
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	962.927.012,00	889.989.722,00	92,43	(72.937.290,00)
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	342.129.248,00	286.161.750,00	83,64	(55.967.498,00)
5.2.02.06.02.0002	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	510.612.000,00	509.612.000,00	99,80	(1.000.000,00)
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	12.037.891.764,00	11.435.791.131,00	95,00	(602.100.633,00)
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	134.550.000,00	114.737.300,00	85,27	(19.812.700,00)
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	658.174.200,00	621.830.000,00	94,48	(36.344.200,00)
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	24.466.800,00	24.190.800,00	98,87	(276.000,00)
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	1.010.184.000,00	1.001.219.250,00	99,11	(8.964.750,00)
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	34.792.800,00	30.418.000,00	87,43	(4.374.800,00)
5.2.02.07.01.0013	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	290.028.600,00	200.000.000,00	68,96	(90.028.600,00)
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	117.518.000,00	117.305.000,00	99,82	(213.000,00)
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	3.882.419.800,00	3.470.272.230,00	89,38	(412.147.570,00)
5.2.02.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	44.147.200,00	33.315.096,00	75,46	(10.832.104,00)
5.2.02.08.01.0008	Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	6.310.000,00	0,00	0,00	(6.310.000,00)
5.2.02.08.01.0016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	87.600.000,00	67.950.000,00	77,57	(19.650.000,00)
5.2.02.08.01.0041	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	14.908.800,00	14.908.800,00	100,00	0,00
5.2.02.08.01.0046	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	6.012.000,00	4.320.000,00	71,86	(1.692.000,00)
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	108.000.000,00	108.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.08.04.0002	Belanja Modal Modular Counting and Scientific Electronic	4.674.500,00	0,00	0,00	(4.674.500,00)
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	1.444.015.400,00	1.406.020.000,00	97,37	(37.995.400,00)
5.2.02.08.05.0002	Belanja Modal Alat Kesehatan Kerja	429.749.000,00	391.487.200,00	91,10	(38.261.800,00)
5.2.02.08.05.0006	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya	36.200.000,00	36.200.000,00	100,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	27.178.932.098,00	19.539.957.231,00	71,89	(7.638.974.867,00)
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.832.541.100,00	1.507.823.000,00	82,28	(324.718.100,00)
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	18.385.600,00	0,00	0,00	(18.385.600,00)
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.133.915.239,00	4.622.041.569,00	90,03	(511.873.670,00)
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	761.725.000,00	522.471.385,00	68,59	(239.253.615,00)
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	379.414.800,00	365.552.899,00	96,35	(13.861.901,00)
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.15.02.0003	Belanja Modal Topi Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	126.824.088,00	43.800.000,00	34,54	(83.024.088,00)
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	26.626.680,00	25.807.500,00	96,92	(819.180,00)
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	316.050.000,00	0,00	0,00	(316.050.000,00)
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	5.698.000,00	0,00	0,00	(5.698.000,00)
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	210.000.000,00	210.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	131.591.200,00	36.300.000,00	27,59	(95.291.200,00)
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	346.440.000,00	340.432.000,00	98,27	(6.008.000,00)
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	295.814.600,00	293.611.400,00	99,26	(2.203.200,00)
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	2.273.387.800,00	2.224.226.100,00	97,84	(49.161.700,00)
5.2.02.89.01.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	15.429.800,00	0,00	0,00	(15.429.800,00)
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	57.049.745.893,00	21.429.436.783,00	37,56	(35.620.309.110,00)
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	3.978.001.700,00	3.959.495.273,00	99,53	(18.506.427,00)
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	4.433.053.664,00	3.333.691.451,00	75,20	(1.099.362.213,00)

[Handwritten signature]

KODE REKENING	NAMA REKENING	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	LEBIH / (KURANG)
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.261.124.500,00	1.261.124.500,00	100,00	0,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	35.369.137.760,00	22.520.602.018,00	63,67	(12.848.535.742,00)
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	199.805.900,00	199.642.330,00	99,92	(163.570,00)
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	827.738.200,00	706.359.000,00	85,34	(121.379.200,00)
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	489.000.000,00	489.000.000,00	100,00	0,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	20.361.512.880,36	6.300.421.180,00	30,94	(14.061.091.700,36)
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	8.615.163.900,00	7.049.577.495,00	81,83	(1.565.586.405,00)
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.02.0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	6.303.261.300,00	5.591.023.387,00	88,70	(712.237.913,00)
5.2.03.01.02.0012	Belanja Modal Rumah Tidak Bersusun	625.000.000,00	0,00	0,00	(625.000.000,00)
5.2.03.02.01.0004	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	64.000.000,00	47.952.000,00	74,93	(16.048.000,00)
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	1.239.978.600,00	970.727.150,00	78,29	(269.251.450,00)
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	4.907.126.440,00	3.613.405.330,00	73,64	(1.293.721.110,00)
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	581.262.349.667,21	531.135.965.829,00	91,38	(50.126.383.838,21)
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	35.175.113.386,19	13.707.746.857,00	38,97	(21.467.366.529,19)
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.01.02.0011	Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	4.929.436.544,00	4.190.414.370,00	85,01	(739.022.174,00)
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggungan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.04.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	15.778.771.572,83	10.874.004.385,00	68,92	(4.904.767.187,83)
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.04.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	211.220.000,00	210.537.600,00	99,68	(682.400,00)
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	52.932.578.136,00	25.419.284.304,00	48,02	(27.513.293.832,00)
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	30.289.520.000,00	558.246.438,00	1,84	(29.731.273.562,00)
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00	100,00	0,00
5.2.04.03.01.0002	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	2.707.929.991,00	2.704.899.998,00	99,89	(3.029.993,00)
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	200.000.000,00	199.768.000,00	99,88	(232.000,00)
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	780.000.000,00	764.649.145,00	98,03	(15.350.855,00)
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	197.750.000,00	197.150.000,00	99,70	(600.000,00)
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	3.414.700.000,00	3.411.120.000,00	99,90	(3.580.000,00)
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	31.050.000,00	31.000.000,00	99,84	(50.000,00)
5.2.05.01.01.0011	Belanja Modal Buku Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	77.400.000,00	77.400.000,00	100,00	0,00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02.03.0001	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	102.000.000,00	90.000.000,00	88,24	(12.000.000,00)
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	199.278.600,00	192.141.000,00	96,42	(7.137.600,00)
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.08.01.0006	Belanja Modal Kajian	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	2.643.327.400,00	1.985.053.393,00	75,10	(658.274.007,00)
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	49.935.379.260,00	42.784.909.348,00	85,68	(7.150.469.912,00)
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BELANJA MODAL		1.097.104.383.641,59	863.671.053.927,00	78,72	(233.433.329.714,59)



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
BELANJA MODAL PER SKPD
PER 31 DESEMBER 2024

Kode SKPD	SKPD	5.2.01 - Belanja Modal Tanah	5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.2.06 - Belanja Modal Aset Lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.2.22.5.04.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		15.870.185.900,00	41.538.380.759,00	4.190.414.370,00	77.400.000,00	1.020.000.000,00
1.02.2.14.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		29.390.879.630,00	10.372.419.009,00	5.559.449.143,00		450.000.000,00
1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman		4.138.205.966,00	21.452.448.658,00	580.933.512.813,00		23.425.655.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	Satuan Polisi Pamong Praja		2.261.253.280,00				
1.05.0.00.0.00.26.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		9.920.065.200,00				292.007.960,00
1.06.2.08.0.00.05.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak		1.365.587.189,00				
2.11.0.00.0.00.06.0000	Dinas Lingkungan Hidup		102.610.620,00	36.065.000,00	199.768.000,00		2.531.119.200,00
2.12.0.00.0.00.07.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		2.158.636.000,00				
2.13.0.00.0.00.08.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung		174.319.600,00				
2.15.0.00.0.00.09.0000	Dinas Perhubungan	746.620.000,00	12.161.335.869,00	3.920.227.296,00	3.753.492.600,00		3.798.995.000,00
2.16.2.21.2.20.10.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian		2.054.891.154,00			31.000.000,00	323.400.000,00
2.18.0.00.0.00.11.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu		1.046.237.000,00				400.000.000,00
3.26.2.19.0.00.12.0000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		688.797.700,00			90.000.000,00	
3.27.2.09.3.25.13.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		1.905.348.240,00	104.965.175,00			3.285.938.688,00
4.01.0.00.0.00.14.0000	Sekretariat Daerah		251.390.526,00	47.952.000,00			503.360.000,00
4.01.0.00.0.00.14.0002	Bagian Hukum		167.680.000,00				79.500.000,00
4.01.0.00.0.00.14.0004	Bagian Umum		40.894.139.000,00			192.141.000,00	
4.01.0.00.0.00.14.0008	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa		207.005.000,00				
4.02.0.00.0.00.15.0000	Sekretariat DPRD		2.268.805.800,00				1.676.475.000,00
5.01.5.02.5.05.21.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		1.432.890.437,00		197.150.000,00		5.566.000.300,00
5.02.0.00.0.00.22.0000	Badan Pendapatan Daerah		1.590.415.690,00				307.710.593,00
5.02.4.01.0.00.23.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		12.978.726.142,00				376.945.800,00
5.03.5.04.0.00.24.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		613.287.124,00				135.537.000,00
5.06.0.00.0.00.26.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah		40.940.000,00				499.078.200,00
6.01.0.00.0.00.21.0000	Inspektorat		504.006.496,00				98.240.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Long Apari		249.588.600,00				
7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Long Pahangai		365.404.200,00				
7.01.0.00.0.00.18.0000	Kecamatan Long Bagun		366.753.000,00				
7.01.0.00.0.00.19.0000	Kecamatan Laham		131.800.000,00				
8.01.0.00.0.00.25.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		156.500.000,00				

[Handwritten Signature]



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
KAS DI KAS DAERAH
Desember 2024
TAHUN ANGGARAN 2024

REKONSILIASI SALDO KAS MENURUT BANK DENGAN BKU		
Keterangan	Menurut Bank Rek Koran	Menurut Lampiran 2.A
Kas Daerah No. Rek. 1661300007	723.914.491.587,75	724.288.143.980,16
DAK-DBH REBOISASI No. Rek.16613000031	186.533.488,00	
Dana Bergulir No. Rek.1661300040	187.147.194,00	
	724.288.172.269,75	724.288.143.980,16
Pengurangan		
kurang posting sp2d Nomor : 356/LS/10122250401/PPR11224	60.000,00	
Jumlah Pengurangan	60.000,00	0,00
Saldo 31 Desember 2024 Setelah Pengurangan	724.288.112.269,75	724.288.143.980,16
Penambahan		
setoran pemindahbukuan	238,02	
setoran pemindahbukuan	651,25	
setoran pemindahbukuan	25.412,56	
setoran pemindahbukuan	506,16	
setoran pemindahbukuan	1.303,56	
setoran pemindahbukuan	3.598,86	
Jumlah Penambahan	31.710,41	0,00
Saldo Kas Pada Bank BPD Kaltim	724.288.143.980,16	724.288.143.980,16
		0,00
Saldo Kas di KASDA per 31 Desember 2024	724.288.143.980,16	724.288.143.980,16



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
KAS DI BENDAHARA BOSNAS
PER 31 DESEMBER 2024

NO.	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL 2024	PENDAPATAN 2024	BELANJA 2024	KOREKSI 2024	SALDO AKHIR KAS 2024
1	SDN 001 TIONG BU'U	235.399,18	188.800.000,00	188.800.000,00	(235.399,18)	0,00
2	SDN 002 TIONG OHANG	128.918,94	235.200.000,00	235.200.000,00	(128.918,94)	0,00
3	SDN 003 LONG PENANEH	397,15	134.400.000,00	134.400.000,00	(397,15)	0,00
4	SDN 004 NOHA SILAT	281.972,71	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	281.972,71
5	SDN 005 LONG APARI	56.979,48	166.400.000,00	166.400.000,00	0,00	56.979,48
6	SDN 001 LONG PAHANGAI	947.254,31	70.400.000,00	70.400.000,00	(947.254,31)	0,00
7	SDN 002 LONG PAHANGAI	133.947,68	97.600.000,00	97.600.000,00	0,00	133.947,68
8	SDN 003 LONG TUYOQ	325.429,96	72.000.000,00	72.000.000,00	(325.429,96)	0,00
9	SDN 004 LONG ISUN	169.177,32	96.000.000,00	96.000.000,00	(169.177,32)	0,00
10	SDN 005 LONG LUNUK	236.779,14	155.200.000,00	155.200.000,00	(236.779,14)	0,00
11	SDN 006 LONG PAKAQ	198.364,09	136.000.000,00	136.000.000,00	(198.364,09)	0,00
12	SDN 007 LONG PAKAQ BARU	528.260,37	136.000.000,00	136.000.000,00	(528.260,37)	0,00
13	SDN 008 DATAH MARING	33.127,91	96.000.000,00	96.000.000,00	(33.127,91)	0,00
14	SDN 001 UJOH BILANG	366.669,06	521.700.000,00	521.700.000,00	0,00	366.669,06
15	SDN 002 UJOH BILANG	517.191,37	492.800.000,00	492.800.000,00	(517.191,37)	0,00
16	SDN 003 LONG BAGUN ILIR	863.007,07	240.000.000,00	240.000.000,00	(863.007,07)	0,00
17	SDN 004 LONG BAGUN ULU	102.723,93	310.400.000,00	310.400.000,00	0,00	102.723,93
18	SDN 005 BATU MAJANG	483.229,67	264.200.000,00	264.200.000,00	(483.229,67)	0,00
19	SDN 006 LONG MELAHAM	111.186,19	470.500.000,00	470.500.000,00	(111.186,19)	0,00
20	SDN 007 MAMAHAK BESAR	77.497,54	265.600.000,00	265.600.000,00	0,00	77.497,54
21	SDN 008 MAMAHAK BESAR	298.649,36	0,00	0,00	0,00	298.649,36
22	SDN 008 LONG HURAI	167,64	67.200.000,00	67.200.000,00	(167,64)	0,00
23	SDN 009 LONG MERAH	375.863,63	104.000.000,00	104.000.000,00	0,00	375.863,63
24	SDN 010 RUKUN DAMAI	295.218,04	164.800.000,00	164.800.000,00	(295.218,04)	0,00
25	SDN 011 BATOQ KELO	873.248,85	64.100.000,00	64.100.000,00	0,00	873.248,85
26	SDN 001 LAHAM	141.211,05	116.900.000,00	116.900.000,00	(141.211,05)	0,00
27	SDN 002 MUARA RATAH	242.680,41	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	242.680,41
28	SDN 003 LONG GELAWANG	206.513,22	112.100.000,00	89.600.000,00	0,00	22.706.513,22
29	SDN 004 NYARIBUNGAN	1.180.416,71	96.000.000,00	96.000.000,00	(1.180.416,71)	0,00
30	SDN 001 LONG HUBUNG	631.358,20	200.000.000,00	200.000.000,00	(631.358,20)	0,00
31	SDN 002 DATAH BILANG	398.051,32	134.400.000,00	134.400.000,00	(398.051,32)	0,00
32	SDN 003 DATAH BILANG	155.295.814,95	151.200.000,00	302.400.000,00	(895.814,95)	3.200.000,00
33	SDN 004 DATAH BILANG	28.788,44	182.400.000,00	182.400.000,00	(28.788,44)	0,00
34	SDN 005 LUTAN	666.170,04	177.600.000,00	177.600.000,00	0,00	666.170,04
35	SDN 006 MATALIBAQ	776.352,77	222.880.000,00	222.880.000,00	(776.352,77)	0,00
36	SDN 007 MAMAHAK TEBQQ	261.341,63	112.000.000,00	112.000.000,00	(261.341,63)	0,00
37	SDN 008 MAMAHAK TEBQQ	287.584,15	136.000.000,00	136.000.000,00	0,00	287.584,15
38	SDN 010 TRI PARIQ	17.843.920,30	76.000.000,00	93.600.000,00	(243.920,30)	0,00
39	SMPN 1 LONG APARI	2.501.658,12	477.380.000,00	477.380.000,00	0,00	2.501.658,12
40	SMPN 2 LONG APARI	0,00	32.320.000,00	32.320.000,00	0,00	0,00
41	SMPN 1 LONG PAHANGAI	43.607,85	261.900.000,00	261.900.000,00	0,00	43.607,85
42	SMPN 2 LONG PAHANGAI	461.700,99	188.520.000,00	188.520.000,00	0,00	461.700,99
43	SMPN 3 LONG PAHANGAI	0,00	82.820.000,00	79.239.700,00	0,00	3.580.300,00
44	SMPN 1 LONG BAGUN	3.311.893,59	692.120.000,00	693.620.000,00	0,00	1.811.893,59
45	SMPN 2 LONG BAGUN	346.702,04	107.060.000,00	107.060.000,00	0,00	346.702,04
46	SMPN 3 LONG BAGUN	332.919,49	153.520.000,00	153.520.000,00	0,00	332.919,49
47	SMPN 4 LONG BAGUN	557.220,13	351.480.000,00	351.480.000,00	0,00	557.220,13
48	SMPN 5 LONG BAGUN	939.926,67	212.100.000,00	212.100.000,00	0,00	939.926,67
49	SMPN 1 LAHAM	194.015,95	113.120.000,00	113.120.000,00	(194.015,95)	0,00
50	SMPN 2 LAHAM	203.651,49	48.480.000,00	48.480.000,00	0,00	203.651,49
51	SMPN 1 LONG HUBUNG	425.548,20	180.440.000,00	180.440.000,00	(425.548,20)	0,00
52	SMPN 2 LONG HUBUNG	1.537.357,14	503.640.000,00	503.640.000,00	(1.537.357,14)	0,00
53	SMPN 3 LONG HUBUNG	3.867.348,33	156.860.000,00	86.860.000,00	0,00	73.867.348,33
54	SMPN 4 LONG HUBUNG	233.560,05	113.120.000,00	113.120.000,00	0,00	233.560,05
55	TK NEGERI PEMBINA	793,79	38.220.000,00	38.220.000,00	0,00	793,79
JUMLAH		200.558.767,61	10.213.480.000,00	10.287.699.700,00	(11.787.285,01)	114.551.782,60

[Handwritten signature]



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
KAS DI BENDAHARA FKTP
PER 31 DESEMBER 2024

No	Nama SKPD	SALDO AWAL 2024	PENDAPATAN 2024	BELANJA 2024	KOREKSI 2024	SALDO AKHIR KAS 2024
1	Puskesmas Long Apari	35.249.200,01	278.373.338,00	236.721.382,65	0,00	76.901.155,36
2	Puskesmas Long Pahangai	112.519.182,41	355.433.473,00	430.912.744,58	0,00	37.039.910,83
3	Puskesmas Long Bagun	475.383.062,06	1.190.323.937,00	1.606.742.975,30	0,00	58.964.023,76
4	Puskesmas Laham	41.655.064,17	181.555.547,00	176.846.538,00	0,00	46.364.073,17
5	Puskesmas Long Hubung	17.126.135,50	412.973.718,00	430.067.535,20	0,00	32.318,30
6	Puskesmas Mamahak Besar	0,00	27.366.902,00	0,00	0,00	27.366.902,00
JUMLAH		681.932.644,15	2.446.026.915,00	2.881.291.175,73	0,00	246.668.383,42



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
REKAP KAS LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2024

No	URAIAN	NILAI
1	Kas Lainnya Atas Belanja Honorarium Diskominfo	2.555.335,85
2	Kas Lainnya atas Belanja Tambahan Penghasilan PPPK Dinsos	4.972.786,00
3	Kas Lainnya Atas Utang PFK	38.706.126,00
4	Kas Lainnya Atas BOSDA	135.254.467,29
5	Kas Dana BOK	872.772.229,00
TOTAL		1.054.260.944,14



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAHAM ULU
KAS LAINNYA ATAS BOSDA
PER 31 DESEMBER 2024

NO.	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL 2024	PENDAPATAN 2024	BELANJA 2024	KOREKSI 2024	SALDO AKHIR KAS 2024
1	SDN 001 TIONG BU'U	0,00	57.120.000,00	57.120.000,00	0,00	0,00
2	SDN 002 TIONG OHANG	0,00	73.440.000,00	73.440.000,00	-	0,00
3	SDN 003 LONG PENANEH	730.000,00	45.120.000,00	45.120.000,00	0,00	730.000,00
4	SDN 004 NOHA SILAT	7.800.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	19.800.000,00
5	SDN 005 LONG APARI	40,56	49.440.000,00	24.720.000,00	-	24.720.040,56
6	SDN 001 LONG PAHANGAI	0,00	24.960.000,00	24.960.000,00	-	0,00
7	SDN 002 LONG PAHANGAI	0,00	28.320.000,00	14.160.000,00	0,00	14.160.000,00
8	SDN 003 LONG TUYOQ	0,00	22.560.000,00	22.560.000,00	-	0,00
9	SDN 004 LONG ISUN	0,00	32.640.000,00	32.640.000,00	-	0,00
10	SDN 005 LONG LUNUK	0,00	46.560.000,00	23.280.000,00	-	23.280.000,00
11	SDN 006 LONG PAKAQ	0,00	40.320.000,00	40.320.000,00	-	0,00
12	SDN 007 LONG PAKAQ BARU	0,00	41.280.000,00	41.280.000,00	-	0,00
13	SDN 008 DATAH MARING	0,00	9.120.000,00	9.120.000,00	-	0,00
14	SDN 001 UJOH BILANG	0,00	142.080.000,00	142.080.000,00	-	0,00
15	SDN 002 UJOH BILANG	0,00	138.720.000,00	138.720.000,00	-	0,00
16	SDN 003 LONG BAGUN ILIR	0,00	89.760.000,00	89.760.000,00	0,00	0,00
17	SDN 004 LONG BAGUN ULU	0,00	95.040.000,00	95.040.000,00	-	0,00
18	SDN 005 BATU MAJANG	0,00	69.120.000,00	69.120.000,00	-	0,00
19	SDN 006 LONG MELAHAM	0,00	123.360.000,00	123.360.000,00	0,00	0,00
20	SDN 007 MAMAHAK BESAR	0,00	78.240.000,00	78.240.000,00	-	0,00
21	SDN 008 MAMAHAK BESAR	121.312,47	0,00	0,00	0,00	121.312,47
22	SDN 008 LONG HURAI	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00
23	SDN 009 LONG MERAH	16.620.000,00	34.560.000,00	34.560.000,00	-	16.620.000,00
24	SDN 010 RUKUN DAMAI	37.162,18	46.080.000,00	46.080.000,00	-	37.162,18
25	SDN 011 BATOQ KELO	0,00	15.840.000,00	15.840.000,00	-	0,00
26	SDN 001 LAHAM	0,00	34.080.000,00	34.080.000,00	-	0,00
27	SDN 002 MUARA RATAH	0,00	53.280.000,00	53.280.000,00	0,00	0,00
28	SDN 003 LONG GELAWANG	0,00	32.160.000,00	16.080.000,00	-	16.080.000,00
29	SDN 004 NYARIBUNGAN	41.206,28	15.840.000,00	15.840.000,00	1.426,50	42.632,78
30	SDN 001 LONG HUBUNG	0,00	58.560.000,00	58.560.000,00	-	0,00
31	SDN 002 DATAH BILANG	0,00	37.920.000,00	37.920.000,00	-	0,00
32	SDN 003 DATAH BILANG	1.750.000,00	91.680.000,00	91.680.000,00	-	1.750.000,00
33	SDN 004 DATAH BILANG	0,00	52.320.000,00	52.320.000,00	-	0,00
34	SDN 005 LUTAN	0,00	49.440.000,00	49.440.000,00	-	0,00
35	SDN 006 MATALIBAQ	0,00	71.520.000,00	71.520.000,00	-	0,00
36	SDN 007 MAMAHAK TEBQ	0,00	32.640.000,00	32.640.000,00	-	0,00
37	SDN 008 MAMAHAK TEBQ	0,00	39.360.000,00	39.360.000,00	0,00	0,00
38	SDN 010 TRI PARIQ	100.000,00	12.960.000,00	12.960.000,00	-	100.000,00
39	SMPN 1 LONG APARI	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-	0,00
40	SMPN 2 LONG APARI	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
41	SMPN 1 LONG PAHANGAI	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	-	0,00
42	SMPN 2 LONG PAHANGAI	1.250.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	-	1.250.000,00
43	SMPN 3 LONG PAHANGAI	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00
44	SMPN 1 LONG BAGUN	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	-	0,00
45	SMPN 2 LONG BAGUN	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-	0,00
46	SMPN 3 LONG BAGUN	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	-	0,00
47	SMPN 4 LONG BAGUN	0,00	87.000.000,00	87.000.000,00	-	0,00
48	SMPN 5 LONG BAGUN	63.319,30	60.000.000,00	60.000.000,00	-	63.319,30
49	SMPN 1 LAHAM	0,00	32.400.000,00	32.400.000,00	-	0,00
50	SMPN 2 LAHAM	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	-	0,00
51	SMPN 1 LONG HUBUNG	0,00	40.800.000,00	40.800.000,00	-	0,00
52	SMPN 2 LONG HUBUNG	0,00	114.000.000,00	114.000.000,00	-	0,00
53	SMPN 3 LONG HUBUNG	0,00	22.800.000,00	22.800.000,00	-	0,00
54	SMPN 4 LONG HUBUNG	0,00	33.000.000,00	16.500.000,00	-	16.500.000,00
55	TK NEGERI PEMBINA	0,00	18.480.000,00	14.238.450,00	(4.241.550,00)	0,00
JUMLAH		28.513.040,79	2.841.720.000,00	2.730.738.450,00	(4.240.123,50)	135.254.467,29



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
KAS DI BENDAHARA BOK
PER 31 DESEMBER 2024

No	Nama SKPD	SALDO AWAL 2024	PENDAPATAN 2024	BELANJA 2024	KOREKSI 2024	SALDO AKHIR KAS 2024
1	Puskesmas Tiong Ohang	100.629.872,00	460.970.128,00	371.558.615,00	0,00	190.041.385,00
2	Puskesmas Long Pahangai	211.473.600,00	319.018.800,00	333.861.302,00	0,00	196.631.098,00
3	Puskesmas Ujoh Bilang	211.191.571,00	276.372.029,00	294.189.324,00	0,00	193.374.276,00
4	Puskesmas Mamahak Besar	134.545.157,00	326.300.243,00	365.060.571,00	0,00	95.784.829,00
5	Puskesmas Laham	3.157.582,00	457.087.818,00	362.151.842,00	0,00	98.093.558,00
6	Puskesmas Long Hubung	236.582.341,00	252.838.859,00	390.574.117,00	0,00	98.847.083,00
JUMLAH		897.580.123,00	2.092.587.877,00	2.117.395.771,00	0,00	872.772.229,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
PIUTANG PENDAPATAN
PER 31 Desember 2024

NO	URAIAN	SALDO AWAL PIUTANG	MUTASI		SALDO AKHIR PIUTANG
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
			KETETAPAN (SKP/SKR-DAERAH)	REALISASI	
1	2	3	4	5	6 = (3+4)-5
4	PENDAPATAN	Rp 9.245.831.104,35	Rp 1.944.671.177,60	Rp 1.696.208.692,48	Rp 9.494.293.589,47
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 9.245.831.104,35	Rp 1.944.671.177,60	Rp 1.696.208.692,48	Rp 9.494.293.589,47
1.	PENDAPATAN PAJAK DAERAH	Rp 8.496.686.862,30	Rp 1.944.671.177,60	Rp 1.696.208.692,48	Rp 8.745.149.347,42
	Pajak Hotel	Rp 83.504.700,00	Rp 31.475.000,00	Rp 19.225.000,00	Rp 95.754.700,00
	Pajak Restoran	Rp 232.827.046,20	Rp 1.451.541.220,00	Rp 1.404.349.420,00	Rp 280.018.846,20
	Pajak Reklame	Rp 217.354.761,50	Rp 103.603.554,00	Rp 77.584.294,00	Rp 243.374.021,50
	Pajak Penerangan Jalan	Rp 339.064.693,67	Rp -	Rp -	Rp 339.064.693,67
	Pajak Sarang Burung Walet	Rp 4.319.950.000,00	Rp 17.000.000,00	Rp 7.000.000,00	Rp 4.329.950.000,00
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp 1.292.486.105,90	Rp 133.662.018,60	Rp 90.093.695,48	Rp 1.336.054.429,02
	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Rp 2.011.499.555,03	Rp 207.389.385,00	Rp 97.956.283,00	Rp 2.120.932.657,03
2.	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	Rp 660.662.790,00	Rp -	Rp -	Rp 660.662.790,00
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	Rp 4.935.000,00	Rp -	Rp -	Rp 4.935.000,00
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Rp 42.398.640,00	Rp -	Rp -	Rp 42.398.640,00
	Retribusi Izin Gangguan	Rp 45.229.150,00	Rp -	Rp -	Rp 45.229.150,00
	Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet	Rp 568.100.000,00	Rp -	Rp -	Rp 568.100.000,00
3.	HASIL PENGELOLAAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4.	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Rp 88.481.452,05	Rp -	Rp -	Rp 88.481.452,05
	Pendapatan Denda Pajak	Rp 83.168.052,05	Rp -	Rp -	Rp 83.168.052,05
	Pendapatan Denda Retribusi	Rp 86.400,00	Rp -	Rp -	Rp 86.400,00
	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	Rp 5.227.000,00	Rp -	Rp -	Rp 5.227.000,00
	TOTAL	Rp 9.245.831.104,35	Rp 1.944.671.177,60	Rp 1.696.208.692,48	Rp 9.494.293.589,47



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
PIUTANG TRANSFER
PER 31 Desember 2024

KODE REKENING	URAIAN	SALDO AWAL PIUTANG	MUTASI		SALDO AKHIR PIUTANG
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
			KETETAPAN (SKP/SKR-DAERAH)	REALISASI	
1	2	3	5	6	7= (3+4+5)-6
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	Rp 15.344.251.935,00	Rp 12.358.720.000,00	Rp 6.317.847.000,00	Rp 21.385.124.935,00
1.1.08.01.01.0001	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Rp 1.672.825.000,00	Rp 1.734.847.000,00	Rp 1.672.825.000,00	Rp 1.734.847.000,00
1.1.08.01.01.0002	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp 2.161.877.000,00	Rp 1.885.365.000,00	Rp 2.161.877.000,00	Rp 1.885.365.000,00
1.1.08.01.01.0003	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp 11.491.793.935,00	Rp 8.722.167.000,00	Rp 2.465.389.000,00	Rp 17.748.571.935,00
1.1.08.01.01.0004	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	Rp 17.756.000,00	Rp 16.341.000,00	Rp 17.756.000,00	Rp 16.341.000,00
TOTAL		Rp 15.344.251.935,00	Rp 12.358.720.000,00	Rp 6.317.847.000,00	Rp 21.385.124.935,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
PIUTANG LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2024

No	Keterangan	Saldo Awal	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengembalian	Saldo Akhir
A.	TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR)					
1	TGR BENDAHARA	Rp 189.400.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 189.400.000,00
2	TGR NON BENDAHARA	Rp 46.145.800,00	Rp (7.900.000,00)	Rp -	Rp -	Rp 38.245.800,00
B.	PIUTANG TASPEN	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1	KELEBIHAN PEMBAYARAN	Rp 17.806.200,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 17.806.200,00
C.	PIUTANG LAINNYA	Rp -	Rp -		Rp -	Rp -
1	PIUTANG LAINNYA PADA DINAS PUPR	Rp 1.711.260.607,87	Rp -	Rp -	Rp 1.711.260.607,87	Rp -
2	PIUTANG LAINNYA ATAS PNBP	Rp 48.060.604.380,00	Rp -	Rp -	Rp 48.060.604.380,00	Rp -
3	PIUTANG LAINNYA PADA BPBD	Rp 3.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 3.000.000,00	Rp -
4	PIUTANG LAINNYA PADA BPKAD	Rp -	Rp -	Rp 258.959.000,00	Rp -	Rp 258.959.000,00
D	Uang Muka Pengadaan Barang / Jasa	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -
	JUMLAH	Rp 50.028.216.987,87	Rp (7.900.000,00)	Rp 258.959.000,00	Rp 49.774.864.987,87	Rp 504.411.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN ASLI DAERAH
PER 31 DESEMBER 2024

NO	NAMA REKENING/AKUN	SALDO AKHIR PIUTANG PER 31 DES 2024	PENYISIHAN				TOTAL PENYISIHAN PER 31 DES 2024	NRV PER 31 DES 2024
			LANCAR (0,5%)	KURANG LANCAR (10%)	DIRAGUKAN (50%)	MACET (100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5+6+7)	9 = (3-8)
1.	PENDAPATAN PAJAK DAERAH	Rp 8.745.149.347,42	Rp 1.884.497,23	Rp 3.622.073,33	Rp 118.085.733,01	Rp 8.095.857.703,05	Rp 8.219.450.006,61	Rp 525.699.340,81
A.	Pajak Hotel	Rp 95.754.700,00	Rp 66.873,50	Rp 100.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 71.180.000,00	Rp 76.446.873,50	Rp 19.307.826,50
B.	Pajak Restoran	Rp 280.018.846,20	Rp 304.171,01	Rp 532.310,00	Rp 7.527.200,00	Rp 198.807.145,00	Rp 207.170.826,01	Rp 72.848.020,19
C.	Pajak Reklame	Rp 243.374.021,50	Rp 184.198,90	Rp 1.029.076,50	Rp 13.366.650,00	Rp 169.510.176,50	Rp 184.090.101,90	Rp 59.283.919,60
D.	Pajak Penerangan Jalan	Rp 339.064.693,67	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 339.064.693,67	Rp 339.064.693,67	Rp -
E.	Pajak Sarang Burung Walet	Rp 4.329.950.000,00	Rp 50.000,00	Rp 1.960.000,00	Rp -	Rp 4.300.350.000,00	Rp 4.302.360.000,00	Rp 27.590.000,00
F.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp 1.336.054.429,02	Rp 563.357,44	Rp 686,83	Rp 772.966,83	Rp 1.221.830.138,21	Rp 1.223.167.149,31	Rp 112.887.279,71
G.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Rp 2.120.932.657,03	Rp 715.896,38	Rp -	Rp 91.318.916,18	Rp 1.795.115.549,67	Rp 1.887.150.362,22	Rp 233.782.294,81
H.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2.	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	Rp 660.662.790,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 660.662.790,00	Rp 660.662.790,00	Rp -
A.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	Rp 4.935.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 4.935.000,00	Rp 4.935.000,00	Rp -
B.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Rp 42.398.640,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 42.398.640,00	Rp 42.398.640,00	Rp -
C.	Retribusi Izin Gangguan	Rp 45.229.150,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 45.229.150,00	Rp 45.229.150,00	Rp -
D.	Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet	Rp 568.100.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 568.100.000,00	Rp 568.100.000,00	Rp -
3.	HASIL PENGELOLAAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4.	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Rp 88.481.452,05	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 75.468.835,81	Rp 75.468.835,81	Rp 13.012.616,24
A.	Pendapatan Denda Pajak	Rp 83.168.052,05	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 70.155.435,81	Rp 70.155.435,81	Rp 13.012.616,24
B.	Pendapatan Denda Retribusi	Rp 86.400,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 86.400,00	Rp 86.400,00	Rp -
C.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	Rp 5.227.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.227.000,00	Rp 5.227.000,00	Rp -
TOTAL		Rp 9.494.293.589,47	Rp 1.884.497,23	Rp 3.622.073,33	Rp 118.085.733,01	Rp 8.831.989.328,86	Rp 8.955.581.632,42	Rp 538.711.957,05



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
PENYISIHAN PIUTANG LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2024

No	URAIAN	SALDO AKHIR PIUTANG LAINNYA	SALDO AWAL PENYISIHAN PIUTANG LAINNYA	KOREKSI SALDO AWAL PENYISIHAN PIUTANG LAINNYA	SALDO AWAL PENYISIHAN PIUTANG LAINNYA 2024	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG LAINNYA	SALDO AKHIR PENYISIHAN PIUTANG LAINNYA
A.	TGR BENDAHARA	189.400.000,00	189.400.000,00	0,00	189.400.000,00	0,00	189.400.000,00
1	SKTJM atas temuan belanja pegawai yang belum diserahkan	189.400.000,00	189.400.000,00	0,00	189.400.000,00	0,00	189.400.000,00
2	SKTJM atas SPJ yang tidak lengkap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	TGR NON BENDAHARA	56.052.000,00	54.182.000,00	(7.900.000,00)	46.282.000,00	0,00	46.282.000,00
1	D atas pekerjaan kurang volume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	E, Kampung Long Penaneh III, No: SKTJM 700/29/MP-TPTGR/TGR/X/2017	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
3	DTL , SKTJM No : 700/37/MP-TPTGR/TGR/VII/2018 Tanggal 17 Juli 2018	8.500.000,00	11.400.000,00	(2.900.000,00)	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
4	LB , SKTJM No : 700/38/MP-TPTGR/TGR/VII/2018 Tanggal 17 Juli 2018	6.862.000,00	6.862.000,00	0,00	6.862.000,00	0,00	6.862.000,00
5	RB, SKTJM No : 700/39/MP-TPTGR/TGR/VII/2018 Tanggal 17 Juli 2018	5.150.000,00	10.150.000,00	(5.000.000,00)	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00
6	M : SKTJM No : 700/ 54 /MP-TPTGR/TGR/XII/2020 Tanggal 3 Desember 2020	1.165.000,00	582.500,00	0,00	582.500,00	0,00	582.500,00
7	PH : SKTJM No : 700/ 53 /MP-TPTGR/TGR/XII/2020 Tanggal 3 Desember 2020	18.375.000,00	9.187.500,00	0,00	9.187.500,00	0,00	9.187.500,00
	Koreksi BPK atas Kurang Volume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PIUTANG TASPEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KELEBIHAN PEMBAYARAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UANG MUKA PENGADAAN BARANG/JASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	245.452.000,00	243.582.000,00	(7.900.000,00)	235.682.000,00	0,00	235.682.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
RINCIAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA
PER 31 DESEMBER 2024

NO	Nama SKPD	Kegiatan	Masa Sewa		Sisa Periode Sewa	Nilai Sewa	Nilai Dibayar Dimuka
			Mulai	Berakhir			
1	Dinas Ketahanan Pangan dan	Sewa Gudang Arsip Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	06 Februari 2024	06 Februari 2025	1	Rp 60.000.000,00	Rp 5.000.000,00
		JUMLAH				Rp 60.000.000,00	Rp 5.000.000,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja	Sewa Bangunan Gedung Kantor	15 Februari 2024	15 Februari 2025	1	Rp 250.000.000,00	Rp 20.833.333,33
		JUMLAH				Rp 250.000.000,00	Rp 20.833.333,33
3	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan	Long Pahangai Jalan Poros				Rp 765.389.077,00	Rp 765.389.077,00
		Long Laham Tukung Sirang				Rp 355.911.168,02	Rp 355.911.168,02
		Long Gelawang RTC				Rp 2.887.864.162,51	Rp 2.887.864.162,51
		Beban dibayar dimuka atas Persediaan				Rp 288.451.254,74	Rp 288.451.254,74
		Beban dibayar dimuka Atas Aset Tetap Jalan				Rp 17.741.325.827,41	Rp 17.741.325.827,41
		JUMLAH				Rp 22.038.941.489,68	Rp 22.038.941.489,68
4	Dinas Lingkungan Hidup	Sewa Gedung Kantor	1 Maret 2024	28 Februari 2025	2	254.000.000,00	Rp 42.333.333,33
		JUMLAH				254.000.000,00	Rp 42.333.333,33
5	Dinas Perhubungan	Sewa Gedung/Bangunan Kantor Dinas Perhubungan	02 Februari 2024	02 Februari 2025	1	108.791.100,00	Rp 9.065.925,00
		JUMLAH				108.791.100,00	Rp 9.065.925,00
6	Inspektorat	Sewa Kantor 1	18 Juli 2024	18 Juli 2025	7	121.000.000,00	Rp 70.583.333,33
		Sewa Kantor 2	3 Oktober 2024	3 Oktober 2025	9	90.750.000,00	Rp 68.062.500,00
		JUMLAH					Rp 138.645.833,33
7	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Sewa Gedung Kantor/Arsip 1	01 Juni 2024	31 Mei 2025	5	60.000.000,00	Rp 25.000.000,00
		Sewa Gedung Kantor/Arsip 2	01 Desember 2024	30 November 2025	11	150.000.000,00	Rp 137.500.000,00
		Sewa Gedung Kantor/ Aset	01 Juni 2024	31 Maret 2025	3	150.000.000,00	Rp 50.000.000,00
		Sewa Kendaraan Dinas Operasional (20 UNIT)	04 Desember 2024	04 Desember 2025	11	3.742.680.000,00	Rp 3.430.790.000,00
		Sewa Kendaraan Dinas Operasional (44 UNIT)	21 Maret 2024	21 Maret 2025	3	8.245.560.000,00	Rp 2.061.390.000,00
		JUMLAH				12.348.240.000,00	Rp 5.704.680.000,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sewa Kantor Sekretariat FKUB	01 Juni 2024	01 Juni 2025	5	65.000.000,00	Rp 27.083.333,33
		JUMLAH				65.000.000,00	Rp 27.083.333,33

[Handwritten signature]

NO	Nama SKPD	Kegiatan	Masa Sewa		Sisa Periode Sewa	Nilai Sewa	Nilai Dibayar Dimuka		
			Mulai	Berakhir					
9	Sekretariat Daerah	Biaya Sewa Gudang 01 Sekretariat Daerah Mahakam Ulu	01 Oktober 2024	30 September 2025	9	35.000.000,00	Rp	26.250.000,00	
		Biaya Sewa Gudang 03 Sekretariat Daerah Mahakam Ulu	01 Mei 2024	30 April 2025	4	40.000.000,00	Rp	13.333.333,33	
		Biaya Sewa Gudang 04 Sekretariat Daerah Mahakam Ulu	01 Agustus 2024	31 Juli 2025	7	75.000.000,00	Rp	43.750.000,00	
		JUMLAH				150.000.000,00	Rp	83.333.333,33	
10	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	Sewa Tempat Tunggu Kelahiran di Samarinda	01 April 2024	01 April 2025	3	Rp	60.271.000,00	Rp	15.067.750,00
		Sewa Tempat Tunggu Kelahiran di Ujoh Bilang (DAK Non	05 Agustus 2024	05 Agustus 2025	7	Rp	25.000.000,00	Rp	14.583.333,33
		Sewa Tempat Tunggu Kelahiran (DAK Non Fisik) di	05 Agustus 2024	05 Agustus 2025	7	Rp	27.800.000,00	Rp	16.216.666,67
		Sewa Tempat Tunggu Kelahiran di Wilayah Kerja	05 Agustus 2024	05 Agustus 2025	7	Rp	25.000.000,00	Rp	14.583.333,33
		Sewa Tempat Tunggu Kelahiran di Wilayah Kerja	05 Agustus 2024	05 Agustus 2025	7	Rp	25.000.000,00	Rp	14.583.333,33
		Sewa Tempat Tunggu Kelahiran di Kutai Barat	01 Oktober 2024	01 Oktober 2025	9	Rp	68.000.000,00	Rp	51.000.000,00
		Sewa Gudang DINKESP2KB	01 Juni 2024	01 Juni 2025	5	Rp	30.000.000,00	Rp	12.500.000,00
		Sewa Rumah DINKESP2KB	01 Juni 2024	01 Juni 2025	5	Rp	35.000.000,00	Rp	14.583.333,33
		JUMLAH				125.271.000,00	Rp	153.117.749,99	
TOTAL								Rp	28.223.034.331,33



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
RINCIAN PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2024

No	SKPD	Bahan Kimia	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bahan Bakar dan Pelumas	Suku Cadang Alat Angkutan	Alat Tulis Kantor	Kertas dan Cover	Bahan Cetak	Benda Pos	Perabot Kantor	Alat Listrik	Suvenir/Cendera Mata	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Obat	Obat-obatan Lainnya	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.987.786.435,00	17.987.786.435,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.398.600,00	0,00	0,00	0,00	50.507.454,00	23.001.860,00	0,00	0,00	10.438.840,00	3.346.000,00	0,00	1.840.770,00	6.236.306.034,77	6.343.087.347,44	0,00	12.669.926.906,21
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	1.119.068.520,00	1.965.109.450,00	38.430.700,00	16.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.513.763.531,85	386.252.807.201,85
4	Satuan Polisi Pemong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	568.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.900,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah BTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	2.878.400,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.178.400,00
11	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.000,00	5.233.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.578.500,00
14	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.814.700,00	181.814.700,00
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00
16	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	13.778.850,00	0,00	22.960.732,00	3.313.394,00	0,00	3.390.000,00	0,00	0,00	238.090.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	749.191.500,00	1.055.724.476,00
17	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.770.000,00
18	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00
20	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	678.543,00	838.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517.259,00
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sebagai SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Long Apari	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005.200,00	2.177.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182.700,00
26	Kecamatan Long Pahangai	0,00	0,00	816.650,00	0,00	628.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669.650,00
27	Kecamatan Long Bagun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Laham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Long Hubung	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510.700,00
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
TOTAL		1.398.600,00	1.119.068.520,00	1.579.704.950,00	38.430.700,00	135.809.529,00	76.063.370,00	6.140.000,00	3.615.000,00	10.438.840,00	3.346.000,00	238.090.000,00	26.840.770,00	6.236.306.034,77	6.343.087.347,44	402.432.576.166,85	418.250.915.828,06



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
DANA BERGULIR
PER 31 DESEMBER 2024

No.	Nama Debitur	ALAMAT	KECAMATAN	JANGKA WAKTU			SK Bupati	Plafon Kredit	Jumlah Tunggakan				
				AWAL	JTH. TEMPO	TAHUN			Pokok	Bunga	Total	Setoran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	S. Hong Liah	Long Hubung RT. III	Long Hubung	16 Mei 2004	16 Mei 2006	2006	518/K.373/20 03 tgl. 29 Oktober 2003	8.000.000,00	4.000.200,00	480.000,00	4.480.200,00	0,00	4.480.200,00
2	KUD. Nedau Apau/Awang Nyangun	Long Melaham RT. III	Long Bagun	2 Juni 2004	2 Juni 2007	2007	518/K.373/20 03 tgl. 29 Oktober 2003	10.000.000,00	5.556.000,00	1.000.000,00	6.556.000,00	0,00	6.556.000,00
3	Weli Broidus Huvat	Mamahak Teboq RT. V	Long Hubung	21 April 2004	21 April 2007	2007	518/K.373/20 03 tgl. 29 Oktober 2003	20.000.000,00	16.698.000,00	3.000.000,00	19.698.000,00	0,00	19.698.000,00
4	Yovita Sangiq	Tiong Ohang RT. I	Long Apari	21 April 2004	21 April 2007	2007	518/K.373/20 03 tgl. 29 Oktober 2003	14.000.000,00	12.444.800,00	2.240.000,00	14.684.800,00	0,00	14.684.800,00
5	G. Simon A.	Ujoh Bilang RT. IV	Long Bagun	24 April 2004	24 April 2007	2007	518/K.373/20 03 tgl. 29 Oktober 2003	10.000.000,00	9.167.400,00	1.650.000,00	10.817.400,00	0,00	10.817.400,00
6	Sugeng Santoso	Ujoh Bilang RT. IV	Long Bagun	24 April 2004	24 April 2007	2007	518/K.373/20 03 tgl. 29 Oktober 2003	10.000.000,00	10.000.800,00	1.800.000,00	11.800.800,00	0,00	11.800.800,00
7	P. Luhut Ding	Long Tuyuq	Long Pahangai	11 Juli 2004	11 Juli 2007	2007	518/K.373/20 03 tgl. 29 Oktober 2003	8.000.000,00	8.001.000,00	1.440.000,00	9.441.000,00	0,00	9.441.000,00
8	KUB. Ivah Lebuq	Long Lunuk RT. II	Long Pahangai	20 Februari 2004	20 Februari 2006	2006	518/K.373/20 03 tgl. 29 Oktober 2003	5.000.000,00	14.285.214,00	1.714.286,00	15.999.500,00	0,00	15.999.500,00
9	KUB. Serba Usaha	Mamahak Besar RT. IV	Long Bagun	25 Februari 2004	25 Februari 2006	2006	518/K.373/20 03 tgl. 29 Oktober 2003	50.000.000,00	30.952.114,00	3.714.286,00	34.666.400,00	0,00	34.666.400,00
10	KUB. 008 Laham	Laham RT. I	Laham	19 Februari 2004	19 Februari 2006	2006	518/K.373/20 03 tgl. 29 Oktober 2003	50.000.000,00	35.714.087,00	4.285.714,00	39.999.801,00	0,00	39.999.801,00
11	KUB. Ilau Ala'an Urip	Bato Beloh RT. I	Long Hubung	5 Februari 2004	5 Februari 2006	2006	518/K.373/20 03 tgl. 29 Oktober 2003	50.000.000,00	38.095.071,00	4.571.428,00	42.666.499,00	0,00	42.666.499,00

No.	Nama Debitur	ALAMAT	KECAMATAN	JANGKA WAKTU			SK Bupati	Plafon Kredit	Jumlah Tunggalan				
				AWAL	JTH. TEMPO	TAHUN			Pokok	Bunga	Total	Setoran	Saldo
12	Thomas Patulak	Long Hubung RT. V	Long Hubung	12 November 2004	12 November 2007	2007	412.61/K.229/2004 tgl. 03 Agustus 2004	10.000.000,00	4.167.000,00	750.000,00	4.917.000,00	0,00	4.917.000,00
13	Thomas Didimus	Tripariq Makmur RT. III	Long Hubung	2 Maret 2005	2 Maret 2007	2007	412.61/K.229/2004 tgl. 03 Agustus 2004	7.000.000,00	4.958.900,00	595.000,00	5.553.900,00	0,00	5.553.900,00
14	Yohanes Banafanu	Tripariq Makmur RT. II	Long Hubung	2 Maret 2005	2 Maret 2007	2007	412.61/K.229/2004 tgl. 03 Agustus 2004	7.000.000,00	5.250.600,00	630.000,00	5.880.600,00	0,00	5.880.600,00
15	Helong Wan	Lutan RT. III	Long Hubung	4 Desember 2004	4 Desember 2007	2007	412.61/K.229/2004 tgl. 03 Agustus 2004	10.000.000,00	5.833.800,00	1.050.000,00	6.883.800,00	0,00	6.883.800,00
16	Adimansyah	Lirung Ubung	Long Pahangai	25 Februari 2005	25 Februari 2008	2008	412.61/K.229/2004 tgl. 03 Agustus 2004	10.000.000,00	7.500.600,00	1.350.000,00	8.850.600,00	0,00	8.850.600,00
17	Yohanes Behen Jakin	Tiong Ohang RT. II	Long Apari	05 November 2004	05 November 2007	2007	412.61/K.229/2004 tgl. 03 Agustus 2004	20.000.000,00	16.112.400,00	2.900.000,00	19.012.400,00	0,00	19.012.400,00
18	Adelina Tonis	Tripariq Makmur RT. I	Long Hubung	01 April 2005	01 April 2008	2008	412.61/K.229/2004 tgl. 03 Agustus 2004	10.000.000,00	8.056.200,00	1.450.000,00	9.506.200,00	0,00	9.506.200,00
19	FX. Maru Baing	Long Hubung RT. V	Long Hubung	12 November 2004	12 November 2007	2007	412.61/K.229/2004 tgl. 03 Agustus 2004	10.000.000,00	8.334.000,00	1.500.000,00	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00
20	Sulaiman Lawai	Datah Bilang Ilir RT. III	Long Hubung	12 Februari 2005	12 Februari 2008	2008	412.61/K.229/2004 tgl. 03 Agustus 2004	14.000.000,00	11.687.000,00	2.100.000,00	13.787.000,00	0,00	13.787.000,00
21	Lukas Ingan	Tripariq Makmur RT. III	Long Hubung	15 April 2005	15 April 2008	2008	412.61/K.229/2004 tgl. 03 Agustus 2004	7.000.000,00	6.029.500,00	1.085.000,00	7.114.500,00	0,00	7.114.500,00
22	Hengki Budi Setianto	Long Hubung RT. V	Long Hubung	11 November 2004	11 November 2007	2007	412.61/K.229/2004 tgl. 03 Agustus 2004	10.000.000,00	8.889.600,00	1.600.000,00	10.489.600,00	0,00	10.489.600,00
23	Barto Kono	Tripariq Makmur RT. I	Long Hubung	21 Maret 2005	21 Maret 2008	2008	412.61/K.229/2004 tgl. 03 Agustus 2004	7.000.000,00	6.224.000,00	1.120.000,00	7.344.000,00	0,00	7.344.000,00
24	Albert Talan	Tripariq Makmur RT. III	Long Hubung	01 April 2005	31 Maret 2008	2008	412.61/K.229/2004 tgl. 03 Agustus 2004	7.000.000,00	6.224.000,00	1.120.000,00	7.344.000,00	0,00	7.344.000,00
25	Tariman	Lutan RT. II	Long Hubung	2 Desember 2004	2 Desember 2007	2007	412.61/K.229/2004 tgl. 03 Agustus 2004	10.000.000,00	9.167.400,00	1.650.000,00	10.817.400,00	0,00	10.817.400,00
26	Agustinus Hanyek Ibau	Lutan RT. II	Long Hubung	2 Desember 2004	2 Desember 2007	2007	412.61/K.229/2004 tgl. 03 Agustus 2004	20.000.000,00	18.334.500,00	3.300.000,00	21.634.500,00	0,00	21.634.500,00
27	Subai Torok	Datah Bilang RT. III	Long Hubung	14 Februari 2005	14 Februari 2008	2008	412.61/K.229/2004 tgl. 03 Agustus 2004	10.000.000,00	9.167.400,00	1.650.000,00	10.817.400,00	0,00	10.817.400,00

No.	Nama Debitur	ALAMAT	KECAMATAN	JANGKA WAKTU			SK Bupati	Plafon Kredit	Jumlah Tunggalan				
				AWAL	JTH. TEMPO	TAHUN			Pokok	Bunga	Total	Setoran	Saldo
28	Maksimus Moensaku	Tripariq Makmur RT. I	Long Hubung	21 Maret 2005	21 Maret 2008	2008	412.61/K.229/2004 tgl. 03 Agustus 2004	10.000.000,00	9.445.200,00	1.700.000,00	11.145.200,00	0,00	11.145.200,00
29	Irmira Payaq J.	Long Hubung RT. III	Long Hubung	01 April 2005	31 Maret 2008	2008	412.61/K.229/2004 tgl. 03 Agustus 2004	14.000.000,00	13.227.600,00	2.380.000,00	15.607.600,00	0,00	15.607.600,00
30	Elisabet Mebang	Long Hubung RT. III	Long Hubung	15 Maret 2005	15 Maret 2008	2008	412.61/K.229/2004 tgl. 03 Agustus 2004	14.000.000,00	13.611.500,00	2.450.000,00	16.061.500,00	0,00	16.061.500,00
31	Petrus Jumri	Ujoh Bilang RT. II	Long Bagun	14 November 2004	14 November 2007	2007	412.61/K.229/2004 tgl. 03 Agustus 2004	10.000.000,00	10.000.500,00	1.800.000,00	11.800.500,00	0,00	11.800.500,00
32	Davit Hingan	Long Hubung RT. IV	Long Hubung	12 Februari 2005	12 Februari 2008	2008	412.61/K.229/2004 tgl. 03 Agustus 2004	14.000.000,00	14.000.400,00	2.520.000,00	16.520.400,00	0,00	16.520.400,00
33	O. Mayang Uning	Long Hubung RT. V	Long Hubung	13 Februari 2005	13 Februari 2008	2008	412.61/K.229/2004 tgl. 03 Agustus 2004	14.000.000,00	14.000.400,00	2.520.000,00	16.520.400,00	0,00	16.520.400,00
34	Nilus Weng	Long Hubung RT. V	Long Hubung	13 Februari 2005	13 Februari 2008	2008	412.61/K.229/2004 tgl. 03 Agustus 2004	14.000.000,00	14.000.400,00	2.520.000,00	16.520.400,00	0,00	16.520.400,00
35	P. Hibau Jenau	Long Hubung RT. III	Long Hubung	13 Februari 2005	13 Februari 2008	2008	412.61/K.229/2004 tgl. 03 Agustus 2004	14.000.000,00	14.000.400,00	2.520.000,00	16.520.400,00	0,00	16.520.400,00
36	Ebid Njau	Datah Bilang Ulu RT. II	Long Hubung	14 Februari 2005	14 Februari 2008	2008	412.61/K.229/2004 tgl. 03 Agustus 2004	14.000.000,00	14.000.400,00	2.520.000,00	16.520.400,00	0,00	16.520.400,00
37	Noh Ingan	Datah Bilang Ilir RT. II	Long Hubung	14 Februari 2005	14 Februari 2008	2008	412.61/K.229/2004 tgl. 03 Agustus 2004	10.000.000,00	10.000.800,00	1.800.000,00	11.800.800,00	0,00	11.800.800,00
38	Hendrikus Jalaq	Long Hubung RT. III	Long Hubung	7 Maret 2005	7 Maret 2008	2008	412.61/K.229/2004 tgl. 03 Agustus 2004	14.000.000,00	14.000.400,00	2.520.000,00	16.520.400,00	0,00	16.520.400,00
39	Ursula Hedoq Tekwan	Long Hubung RT. III	Long Hubung	7 Maret 2005	7 Maret 2008	2008	412.61/K.229/2004 tgl. 03 Agustus 2004	14.000.000,00	14.000.400,00	2.520.000,00	16.520.400,00	0,00	16.520.400,00
40	Ayang Bayau	Mamahak Teboq RT. V	Long Hubung	22 April 2004	22 April 2008	2008	412.61/K.229/2004 tgl. 03 Agustus 2004	10.000.000,00	10.000.500,00	1.800.000,00	11.800.500,00	0,00	11.800.500,00
41	Felianus Irang	Mamahak Teboq RT. IV	Long Hubung	22 April 2004	22 April 2008	2008	412.61/K.229/2004 tgl. 03 Agustus 2004	14.000.000,00	14.000.400,00	2.520.000,00	16.520.400,00	0,00	16.520.400,00
42	Iskandar Idris	Long Pahangai RT II	Long Pahangai	1 Maret 2005	1 Maret 2008	2008	412.61/K.229/2004 tgl. 03 Agustus 2004	7.000.000,00	4.668.000,00	840.000,00	5.508.000,00	5.508.000,00	0,00

No.	Nama Debitur	ALAMAT	KECAMATAN	JANGKA WAKTU			SK Bupati	Plafon Kredit	Jumlah Tunggalan				
				AWAL	JTH. TEMPO	TAHUN			Pokok	Bunga	Total	Setoran	Saldo
43	Patresia Huting Ding	Long Pahangai	Long Pahangai	01 April 2008	01 April 2010	2010	412.21/K.113/2008 tgl. 04 Maret 2008	20.000.000,00	5.833.800,00	700.000,00	6.533.800,00	6.533.800,00	0,00
44	Leander Awang Ajat	Long Bagun Ilir RT. II	Long Bagun	17 Maret 2008	17 Maret 2011	2011	412.21/K.113/2008 tgl. 04 Maret 2008	30.000.000,00	15.834.600,00	2.850.000,00	18.684.600,00	0,00	18.684.600,00
45	K. Devung Unut	Long Hubung RT. V	Long Hubung	18 Maret 2008	18 Maret 2011	2011	412.21/K.113/2008 tgl. 04 Maret 2008	20.000.000,00	10.556.400,00	1.900.000,00	12.456.400,00	12.456.400,00	0,00
46	Yasintus Milang Liah	Ujoh Bilang RT. II	Long Bagun	24 Maret 2008	24 Maret 2011	2011	412.21/K.113/2008 tgl. 04 Maret 2008	50.000.000,00	25.000.200,00	4.500.000,00	29.500.200,00	0,00	29.500.200,00
47	M. Arfin	Long Bagun Ulu RT. I	Long Bagun	17 Maret 2008	17 Maret 2011	2011	412.21/K.113/2008 tgl. 04 Maret 2008	30.000.000,00	20.850.000,00	3.750.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00
48	Valentinus Iliq	Ujoh Bilang RT. II	Long Bagun	18 Maret 2008	18 Maret 2011	2011	412.21/K.113/2008 tgl. 04 Maret 2008	50.000.000,00	34.722.500,00	6.250.000,00	40.972.500,00	0,00	40.972.500,00
49	Maria Ekumalata Lenik	Long Hubung RT. I	Long Hubung	03 April 2008	03 April 2011	2011	412.21/K.113/2008 tgl. 04 Maret 2008	20.000.000,00	13.890.000,00	2.500.000,00	16.390.000,00	0,00	16.390.000,00
50	V.K. Tirah	Ujoh Bilang	Long Bagun	17 Maret 2008	17 Maret 2011	2011	412.21/K.113/2008 tgl. 04 Maret 2008	25.000.000,00	20.140.500,00	3.625.000,00	23.765.500,00	0,00	23.765.500,00
51	Ahmadan	Mamahak Besar	Long Bagun	14 Maret 2008	14 Maret 2011	2011	412.21/K.113/2008 tgl. 04 Maret 2008	50.000.000,00	43.055.900,00	7.750.000,00	50.805.900,00	0,00	50.805.900,00
52	Arie Purwadi	Ujoh Bilang RT. I	Long Bagun	10 April 2008	10 April 2011	2011	412.21/K.113/2008 tgl. 04 Maret 2008	30.000.000,00	26.668.800,00	4.800.000,00	31.468.800,00	0,00	31.468.800,00
53	Philippus Bau	Batu Majang RT. I	Long Bagun	14 Maret 2008	14 Maret 2011	2011	412.21/K.113/2008 tgl. 04 Maret 2008	40.000.000,00	36.696.000,00	6.600.000,00	43.296.000,00	0,00	43.296.000,00
54	Raymundus B.	Noha Silat RT. II	Long Apari	02 April 2008	02 April 2011	2011	412.21/K.113/2008 tgl. 04 Maret 2008	50.000.000,00	50.000.400,00	9.000.000,00	59.000.400,00	0,00	59.000.400,00
55	Lorensius Brit	Long Bagun Ilir RT. II	Long Bagun	08 Januari 2009	08 Januari 2012	2012	518/K.1027/2008 tgl. 19 Desember 2008	30.000.000,00	13.334.400,00	2.400.000,00	15.734.400,00	0,00	15.734.400,00
56	Karolina Husun	Ujoh Bilang RT. II	Long Bagun	07 Januari 2009	07 Januari 2011	2011	518/K.1027/2008 tgl. 19 Desember 2008	35.000.000,00	23.328.000,00	2.800.000,00	26.128.000,00	0,00	26.128.000,00

No.	Nama Debitur	ALAMAT	KECAMATAN	JANGKA WAKTU			SK Bupati	Plafon Kredit	Jumlah Tunggalan				
				AWAL	JTH. TEMPO	TAHUN			Pokok	Bunga	Total	Setoran	Saldo
57	Perdinandus Irang	Long Bagun Ilir RT. II	Long Bagun	08 Januari 2009	08 Januari 2012	2012	518/K.1027/2008 tgl. 19 Desember 2008	30.000.000,00	20.001.600,00	3.600.000,00	23.601.600,00	0,00	23.601.600,00
58	Klementinus Jaang	Long Melaham, Jl. Dr. Soetomo	Long Bagun	13 Maret 2009	13 Maret 2012	2012	518/K.1027/2008 tgl. 19 Desember 2008	30.000.000,00	23.335.200,00	4.200.000,00	27.535.200,00	0,00	27.535.200,00
59	Susana Santi Seting	Ujoh Bilang RT. III	Long Bagun	07 Januari 2009	07 Januari 2012	2012	518/K.1027/2008 tgl. 19 Desember 2008	35.000.000,00	28.341.700,00	5.075.000,00	33.416.700,00	2.000.000,00	31.416.700,00
60	Alosius Batoq	Long Hubung RT. V	Long Hubung	07 Januari 2009	07 Januari 2012	2012	518/K.1027/2008 tgl. 19 Desember 2008	25.000.000,00	20.140.500,00	3.625.000,00	23.765.500,00	0,00	23.765.500,00
61	Eka Saptha	Tiong Buu, Jl. Di. Panjaitan	Melak	23 Januari 2009	23 Januari 2012	2012	518/K.1027/2008 tgl. 19 Desember 2008	25.000.000,00	20.140.500,00	3.625.000,00	23.765.500,00	0,00	23.765.500,00
62	Khatarina Dew Luhat	Mamahak Besar RT. II	Long Bagun	07 Januari 2009	07 Januari 2012	2012	518/K.1027/2008 tgl. 19 Desember 2008	30.000.000,00	27.502.200,00	4.950.000,00	32.452.200,00	2.500.000,00	29.952.200,00
63	Lorensius Hanyeq	Mamahak Teboq RT. VII	Long Hubung	07 Januari 2009	07 Januari 2012	2012	518/K.1027/2008 tgl. 19 Desember 2008	20.000.000,00	18.334.800,00	3.300.000,00	21.634.800,00	0,00	21.634.800,00
64	Wehelmus Wimpi F	Noha Boan RT. II	Long Apari	19 Januari 2009	19 Januari 2012	2012	518/K.1027/2008 tgl. 19 Desember 2008	30.000.000,00	28.335.600,00	5.100.000,00	33.435.600,00	0,00	33.435.600,00
65	Eko Budi Cahyono	Ujoh Bilang RT. II	Long Bagun	07 Januari 2009	07 Januari 2012	2012	518/K.1027/2008 tgl. 19 Desember 2008	20.000.000,00	19.446.000,00	3.500.000,00	22.946.000,00	0,00	22.946.000,00
66	Petrus Bawan Juk	Long Lunuk RT. II	Long Pahangai	23 Februari 2009	23 Maret 2012	2012	518/K.1027/2008 tgl. 19 Desember 2008	30.000.000,00	30.002.400,00	5.400.000,00	35.402.400,00	0,00	35.402.400,00
67	Hendrianus Hajang	Long Melaham RT. IV	Long Bagun	07 Januari 2009	07 Januari 2012	2012	518/K.1027/2008 tgl. 19 Desember 2008	25.000.000,00	25.002.000,00	4.500.000,00	29.502.000,00	0,00	29.502.000,00
68	Abrilius Ujuk	Datah Bilang RT. II	Long Hubung	08 Januari 2009	08 Januari 2012	2012	518/K.1027/2008 tgl. 19 Desember 2008	25.000.000,00	25.002.000,00	4.500.000,00	29.502.000,00	0,00	29.502.000,00
69	Beata Benedikta Dahai	Long Bagun Ilir RT. II	Long Bagun	03 Maret 2010	03 Maret 2013	2013	518/K.927/2009 tgl. 17 Nopember 2009	15.000.000,00	7.500.000,00	1.350.006,00	8.850.006,00	0,00	8.850.006,00
70	Stefanus Afandi	Long Tuyuq	Long Pahangai	04 Februari 2010	04 Februari 2013	2013	518/K.927/2009 tgl. 17 Nopember 2009	40.000.000,00	7.777.778,00	1.400.000,00	9.177.778,00	0,00	9.177.778,00

No.	Nama Debitur	ALAMAT	KECAMATAN	JANGKA WAKTU			SK Bupati	Plafon Kredit	Jumlah Tunggalan				
				AWAL	JTH. TEMPO	TAHUN			Pokok	Bunga	Total	Setoran	Saldo
71	Muslimin Usman	Barong Tongkok	Barong Tongkok	08 Februari 2010	08 Februari 2013	2013	518/K.927/2009 tgl. 17 Nopember 2009	20.000.000,00	10.555.556,00	1.900.008,00	12.455.564,00	0,00	12.455.564,00
72	Herman Tomas	Rukun Damai	Long Hubung	17 Februari 2010	17 Februari 2013	2013	518/K.927/2009 tgl. 17 Nopember 2009	20.000.000,00	13.333.333,00	2.400.010,00	15.733.343,00	1.100.000,00	14.633.343,00
73	Simson Uluk	Rukun Damai	Long Hubung	04 Februari 2010	04 Februari 2012	2012	518/K.927/2009 tgl. 17 Nopember 2009	20.000.000,00	16.666.667,00	2.000.000,00	18.666.667,00	16.799.994,00	1.866.673,00
74	Elia Uluk	Rukun Damai	Long Bagun	05 Februari 2010	05 Februari 2013	2013	518/K.927/2009 tgl. 17 Nopember 2009	20.000.000,00	18.333.333,00	3.299.981,00	21.633.314,00	0,00	21.633.314,00
75	Aulia Rahman	Ujoh Bilang RT. III	Long Bagun	05 Februari 2010	05 Februari 2013	2013	518/K.927/2009 tgl. 17 Nopember 2009	20.000.000,00	19.444.444,00	3.499.980,00	22.944.424,00	0,00	22.944.424,00
76	Romi	Mamahak Besar RT. II	Long Bagun	12 Januari 2011	12 Januari 2014	2014	518/K.1127/2010 tgl. 31 Desember 2010	35.000.000,00	27.222.222,00	4.899.993,00	32.122.215,00	0,00	32.122.215,00
77	Ubeldus Ngo Juk	Long Pakaq RT. IV	Long Pahangai	12 Januari 2011	12 Januari 2014	2014	518/K.1127/2010 tgl. 31 Desember 2010	30.000.000,00	27.500.000,00	4.949.990,00	32.449.990,00	0,00	32.449.990,00
78	Mikael Awang Urang	Long Pakaq RT. III	Long Pahangai	12 Januari 2011	12 Januari 2014	2014	518/K.1127/2010 tgl. 31 Desember 2010	25.000.000,00	23.611.111,00	4.268.889,00	27.880.000,00	0,00	27.880.000,00
79	Gunawan	Datah Bilang Ilir RT. II	Long Hubung	12 Januari 2011	12 Januari 2014	2014	518/K.1127/2010 tgl. 31 Desember 2010	20.000.000,00	19.444.445,00	3.515.556,00	22.960.001,00	0,00	22.960.001,00
80	Wewelius Takhen	Laham	Laham	12 Januari 2011	12 Januari 2014	2014	518/K.1127/2010 tgl. 31 Desember 2010	20.000.000,00	19.444.445,00	3.500.015,00	22.944.460,00	0,00	22.944.460,00
81	Darmawi Kirik	Long Melaham	Long Bagun	12 Januari 2011	12 Januari 2014	2014	518/K.1127/2010 tgl. 31 Desember 2010	25.000.000,00	25.000.000,00	4.499.984,00	29.499.984,00	0,00	29.499.984,00
82	Ismael Supratmanto	Long Melaham	Long Bagun	12 Januari 2011	12 Januari 2014	2014	518/K.1127/2010 tgl. 31 Desember 2010	20.000.000,00	19.444.444,00	3.500.015,00	22.944.459,00	0,00	22.944.459,00
83	Sofia Hurai	Long Hubung RT. I	Long Hubung	21 Januari 2012	21 Januari 2014	2014	518/K.929/2011 tgl. 15 November 2011	25.000.000,00	23.611.111,00	4.250.000,00	27.861.111,00	0,00	27.861.111,00
84	Harizun	Long Gelawang RT. II	Laham	29 Desember 2011	29 Desember 2014	2014	518/K.929/2011 tgl. 15 November 2011	30.000.000,00	28.333.333,00	5.100.000,00	33.433.333,00	0,00	33.433.333,00
85	Ahmad Ramli	Tiong Ohang RT. I	Long Apari	29 Desember 2011	29 Desember 2014	2014	518/K.929/2011 tgl. 15 November 2011	50.000.000,00	50.000.000,00	9.000.000,00	59.000.000,00	0,00	59.000.000,00

No.	Nama Debitur	ALAMAT	KECAMATAN	JANGKA WAKTU			SK Bupati	Plafon Kredit	Jumlah Tunggalan				
				AWAL	JTH. TEMPO	TAHUN			Pokok	Bunga	Total	Setoran	Saldo
86	Surya	Datah Bilang Ilir RT. V	Long Hubung	21 Januari 2012	21 Januari 2015	2015	518/K.929/2011 tgl. 15 November 2011	65.000.000,00	65.000.000,00	11.700.000,00	76.700.000,00	0,00	76.700.000,00
87	Serom Balan	Datah Bilang Ulu	Long Hubung	21 Februari 2012	21 Februari 2014	2014	518/K.929/2011 tgl. 15 November 2011	20.000.000,00	20.000.000,00	3.600.000,00	23.600.000,00	0,00	23.600.000,00
88	Inggong Laing	Datah Bilang Ilir	Long Hubung	21 Januari 2012	21 Januari 2014	2014	518/K.929/2011 tgl. 15 November 2011	50.000.000,00	50.000.000,00	9.000.000,00	59.000.000,00	0,00	59.000.000,00
89	Norlin	Datah Bilang Ulu	Long Hubung	21/012/20100	21 Desember 2014	2014	518/K.929/2011 tgl. 15 November 2011	35.000.000,00	35.000.000,00	6.300.000,00	41.300.000,00	0,00	41.300.000,00
90	Suyatno	Datah Bilang	Long Hubung	21 Desember 2011	21 Desember 2014	2014	518/K.929/2011 tgl. 15 November 2011	40.000.000,00	40.000.000,00	7.200.000,00	47.200.000,00	11.801.000,00	35.399.000,00
91	Sahriati, S.Pd.	Datah Bilang	Long Hubung	21 Desember 2011	21 Desember 2014	2014	518/K.929/2011 tgl. 15 November 2011	45.000.000,00	45.000.000,00	8.100.000,00	53.100.000,00	0,00	53.100.000,00
92	Lusiana Luno, SE.	Mamahak Teboq	Long Hubung	21 Desember 2011	21 Desember 2014	2014	518/K.929/2011 tgl. 15 November 2011	25.000.000,00	25.000.000,00	4.500.000,00	29.500.000,00	0,00	29.500.000,00
93	Leonardus H.	Laham RT. II	Laham	22 Desember 2011	22 Desember 2014	2014	518/K.929/2011 tgl. 15 November 2011	25.000.000,00	25.000.000,00	4.500.000,00	29.500.000,00	0,00	29.500.000,00
94	Martinus Lasah	Laham RT. II	Laham	23 Desember 2011	23 Desember 2014	2014	518/K.929/2011 tgl. 15 November 2011	30.000.000,00	30.000.000,00	5.400.000,00	35.400.000,00	0,00	35.400.000,00
95	Nanang Puji Utomo	Lutan	Long Hubung	08 Juni 2012	08 Juni 2015	2015	518/K.443/2012 tgl. 30 April 2012	65.000.000,00	65.000.000,00	11.700.000,00	76.700.000,00	54.920.000,00	21.780.000,00
96	Lut Minal Abidin	Lutan	Long Hubung	08 Juni 2012	08 Juni 2015	2015	518/K.443/2012 tgl. 30 April 2012	50.000.000,00	50.000.000,00	9.000.000,00	59.000.000,00	24.000.000,00	35.000.000,00
97	Syahroni	Laham	Laham	26 Juli 2012	26 Juli 2015	2015	518/K.617/2012 tgl. 16 Juli 2012	40.000.000,00	37.777.777,00	6.800.000,00	44.577.777,00	0,00	44.577.777,00
98	Arbain	Datah Bilang Ilir RT. IV	Long Hubung	25 Juli 2012	25 Juli 2015	2015	518/K.617/2012 tgl. 16 Juli 2012	40.000.000,00	40.000.000,00	7.200.000,00	47.200.000,00	0,00	47.200.000,00
99	Alan Jiu	Datah Bilang RT. II	Long Hubung	09 Agustus 2005	09 Agustus 2008	2008	412.61/K.255/2005 tgl. 21 Juni 2005	10.000.000,00	7.777.784,00	1.400.000,00	9.177.784,00	0,00	9.177.784,00
100	Atikah Latengke	Wana Pariq RT. I	Long Hubung	02 Juni 2006	02 Juni 2009	2009	412.61/K.563/2005 tgl. 09 Desember 2005	14.000.000,00	14.000.004,00	2.520.000,00	16.520.004,00	0,00	16.520.004,00
101	Irmina Bulan	Long Bagun Ilir RT. I	Long Bagun	18 September 2006	18 September 2009	2009	412.61/K.563/2005 tgl. 09 Desember 2005	15.000.000,00	12.083.333,00	2.175.000,00	14.258.333,00	0,00	14.258.333,00

No.	Nama Debitur	ALAMAT	KECAMATAN	JANGKA WAKTU			SK Bupati	Plafon Kredit	Jumlah Tunggalan				
				AWAL	JTH. TEMPO	TAHUN			Pokok	Bunga	Total	Setoran	Saldo
102	D. Jenau Juk (David Jenau)	Lutan RT. III	Long Hubung	15 Mei 2007	15 Mei 2010	2010	412.61/K.199/2007 tgl. 02 April 2007	25.000.000,00	23.613.000,00	4.250.000,00	27.863.000,00	0,00	27.863.000,00
103	Hubertus Hajang L.	Laham RT. III	Laham	26 September 2008	26 September 2010	2010	412.21/K.265/2008 tgl. 16 April 2008	20.000.000,00	8.334.000,00	1.000.000,00	9.334.000,00	0,00	9.334.000,00
104	Dionisius Haran	Long Hubung RT. III	Long Hubung	18 Juni 2008	18 Juni 2011	2011	412.21/K.265/2008 tgl. 16 April 2008	25.000.000,00	12.501.000,00	2.250.000,00	14.751.000,00	4.000.000,00	10.751.000,00
105	Yosef Bith Doq	Long Hubung RT. IV	Long Hubung	01 September 2008	01 September 2011	2011	412.21/K.265/2008 tgl. 16 April 2008	20.000.000,00	12.223.200,00	2.200.000,00	14.423.200,00	0,00	14.423.200,00
106	Daniel Sang Juk	Long Bagun Ilir RT. II	Long Bagun	01 September 2008	01 September 2011	2011	412.21/K.265/2008 tgl. 16 April 2008	40.000.000,00	31.113.600,00	5.600.000,00	36.713.600,00	0,00	36.713.600,00
107	Hadi Sutrisno	Batu Majang RT. V	Long Bagun	01 September 2008	01 September 2011	2011	412.21/K.265/2008 tgl. 16 April 2008	10.000.000,00	8.056.200,00	1.450.000,00	9.506.200,00	0,00	9.506.200,00
108	M. Tolla	Datah Bilang Ilir RT. I	Long Hubung	01 September 2008	01 September 2011	2011	412.21/K.265/2008 tgl. 16 April 2008	20.000.000,00	18.334.800,00	3.300.000,00	21.634.800,00	0,00	21.634.800,00
109	Yosep Ding J	Ujoh Bilang RT. I	Long Bagun	06 Agustus 2008	06 Agustus 2011	2011	412.21/K.265/2008 tgl. 16 April 2008	10.000.000,00	9.445.200,00	1.700.000,00	11.145.200,00	0,00	11.145.200,00
110	Tigang Imang	Mamahak Teboq RT. VII	Long Hubung	20 Agustus 2010	20 Agustus 2013	2013	518/K.705/2010 tgl. 03 Agustus 2010	25.000.000,00	16.666.667,00	3.013.333,00	19.680.000,00	0,00	19.680.000,00
111	Martinus Madang	Long Gelawang RT. II	Laham	26 Agustus 2010	26 Agustus 2012	2012	518/K.705/2010 tgl. 03 Agustus 2010	30.000.000,00	16.250.000,00	1.950.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00
112	Bibing	Mamahak Besar RT. II	Long Bagun	19 Agustus 2010	19 Agustus 2013	2013	518/K.705/2010 tgl. 03 Agustus 2010	30.000.000,00	20.833.333,00	3.766.667,00	24.600.000,00	0,00	24.600.000,00
113	Margareta Bong Awan	Ujoh Bilang RT. I	Long Bagun	19 Agustus 2010	19 Agustus 2013	2013	518/K.705/2010 tgl. 03 Agustus 2010	25.000.000,00	21.527.778,00	3.892.222,00	25.420.000,00	1.000.000,00	24.420.000,00
114	Savang Unyang	Long Melaham RT. III	Long Bagun	09 Agustus 2010	09 Agustus 2013	2013	518/K.705/2010 tgl. 03 Agustus 2010	15.000.000,00	13.333.333,00	2.410.667,00	15.744.000,00	0,00	15.744.000,00
115	B. Iron Dafo	Long Bagun Ilir RT. I	Long Bagun	20 Agustus 2010	20 Agustus 2013	2013	518/K.705/2010 tgl. 03 Agustus 2010	25.000.000,00	16.666.667,00	6.949.333,00	23.616.000,00	0,00	23.616.000,00
116	Abdullah	Long Melaham RT. I	Long Bagun	24 Agustus 2010	24 Agustus 2013	2013	518/K.705/2010 tgl. 03 Agustus 2010	25.000.000,00	22.222.222,00	4.017.777,00	26.239.999,00	0,00	26.239.999,00

No.	Nama Debitur	ALAMAT	KECAMATAN	JANGKA WAKTU			SK Bupati	Plafon Kredit	Jumlah Tunggalan				
				AWAL	JTH. TEMPO	TAHUN			Pokok	Bunga	Total	Setoran	Saldo
117	Angelbertus Tuba	Mamahak Besar RT. II	Long Bagun	26 Agustus 2010	26 Agustus 2013	2013	518/K.705/2010 tgl. 03 Agustus 2010	40.000.000,00	35.555.556,00	6.428.444,00	41.984.000,00	0,00	41.984.000,00
118	Subai Torok	Datah Bilang Ilir RT. III	Long Hubung	25 Agustus 2010	25 Agustus 2013	2013	518/K.705/2010 tgl. 03 Agustus 2010	20.000.000,00	18.333.333,00	3.314.667,00	21.648.000,00	16.648.000,00	5.000.000,00
119	Hang Ding	Ujoh Bilang	Long Bagun	26 Agustus 2010	26 Agustus 2013	2013	518/K.705/2010 tgl. 03 Agustus 2010	50.000.000,00	45.833.333,00	8.253.667,00	54.087.000,00	0,00	54.087.000,00
120	Leonardus Gatot S.	Ujoh Bilang	Long Bagun	25 Agustus 2010	25 Agustus 2013	2013	518/K.705/2010 tgl. 03 Agustus 2010	25.000.000,00	23.611.111,00	4.268.889,00	27.880.000,00	27.880.000,00	0,00
121	Gredianus Batoq	Ujoh Bilang RT. II	Long Bagun	31 Agustus 2010	31 Agustus 2012	2012	518/K.705/2010 tgl. 03 Agustus 2010	50.000.000,00	45.833.333,00	5.514.667,00	51.348.000,00	0,00	51.348.000,00
122	H. Sanusi	Long Lunuk	Long Pahangai	15 Oktober 2010	15 Oktober 2012	2012	518/K.705/2010 tgl. 03 Agustus 2010	25.000.000,00	25.000.000,00	3.008.000,00	28.008.000,00	0,00	28.008.000,00
123	Benedikta Buaq	Mamahak Besar RT. II	Long Bagun	19 September 2010	19 Agustus 2013	2013	518/K.705/2010 tgl. 03 Agustus 2010	40.000.000,00	38.888.889,00	7.031.111,00	45.920.000,00	0,00	45.920.000,00
124	Lobertus Hibau	Ujoh Bilang RT. III	Long Bagun	31 Agustus 2010	30 April 2012	2012	518/K.705/2010 tgl. 03 Agustus 2010	50.000.000,00	47.500.000,00	4.750.000,00	52.250.000,00	0,00	52.250.000,00
125	Santi Fransiska	Ujoh Bilang RT. III	Long Bagun	19 Agustus 2010	19 Agustus 2013	2013	518/K.705/2010 tgl. 03 Agustus 2010	20.000.000,00	20.000.000,00	3.616.000,00	23.616.000,00	0,00	23.616.000,00
126	Sopiana Lenik	Mamahak Teboq	Long Hubung	19 Agustus 2010	19 Agustus 2013	2013	518/K.705/2010 tgl. 03 Agustus 2010	20.000.000,00	20.000.000,00	2.416.000,00	22.416.000,00	0,00	22.416.000,00
127	Stepanus Juk	Long Melaham RT. III	Long Bagun	20 Agustus 2010	20 Agustus 2013	2013	518/K.705/2010 tgl. 03 Agustus 2010	30.000.000,00	30.000.000,00	5.424.000,00	35.424.000,00	0,00	35.424.000,00
128	Lusia Tuko Ding	Ujoh Bilang	Long Bagun	14 Januari 2011	14 Januari 2014	2014	518/K.1125/2010 tgl. 31 Desember 2010	50.000.000,00	43.055.555,00	7.750.003,00	50.805.558,00	0,00	50.805.558,00
129	Lidwina Lawaq	Ujoh Bilang	Long Bagun	13 Januari 2011	13 Januari 2014	2014	518/K.1125/2010 tgl. 31 Desember 2010	15.000.000,00	14.583.333,00	2.625.012,00	17.208.345,00	0,00	17.208.345,00
130	Ferdinandus Lung	Long Melaham	Long Bagun	13 Januari 2011	13 Januari 2014	2014	518/K.1125/2010 tgl. 31 Desember 2010	20.000.000,00	20.000.000,00	3.600.016,00	23.600.016,00	0,00	23.600.016,00

No.	Nama Debitur	ALAMAT	KECAMATAN	JANGKA WAKTU			SK Bupati	Plafon Kredit	Jumlah Tunggakan				
				AWAL	JTH. TEMPO	TAHUN			Pokok	Bunga	Total	Setoran	Saldo
131	Helena Milawati	Laham	Laham	14 Januari 2011	14 Januari 2014	2014	518/K.1125/2010 tgl. 31 Desember 2010	40.000.000,00	40.000.000,00	7.199.996,00	47.199.996,00	0,00	47.199.996,00
132	Santi Wahyuni	Datah Bilang ilir	Long Hubung	12 Agustus 2011	12 Agustus 2014	2014	518/K.535/2011 tgl. 19 Juli 2011	35.000.000,00	35.000.000,00	6.300.000,00	41.300.000,00	0,00	41.300.000,00
133	Ina Nurhayati	Laham	Laham	31 Mei 2012	31 Mei 2015	2015	518/K.457/2012 tgl. 01 Mei 2012	55.000.000,00	55.000.000,00	9.900.000,00	64.900.000,00	0,00	64.900.000,00
JUMLAH											3.354.537.061,00	229.947.194,00	3.124.589.867,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
PENYISIHAN DANA BERGULIR
PER 31 DESEMBER 2024

No.	Nama Debitur	JANGKA WAKTU			Plafon Kredit	PENYISIHAN S/D 31 DES 2023	Jumlah Tunggal Per 31 Des 2024			Umur s/d 2024		% KUALITAS	PENYISIHAN S/D 31 DES 2024	NRV PER 31 DES 2024
		AWAL	JTH. TEMPO	TAHUN			Saldo Awal	Setoran	Saldo					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	S. Hong Liah	16 Mei 2004	16 Mei 2006	2006	8.000.000,00	4.480.200,00	4.480.200,00	0,00	4.480.200,00	2024	18	100%	4.480.200,00	-
2	KUD. Nedau Apau/Awang Nyangun	2 Juni 2004	2 Juni 2007	2007	10.000.000,00	6.556.000,00	6.556.000,00	0,00	6.556.000,00	2024	17	100%	6.556.000,00	-
3	Weli Broidus Huvat	21 April 2004	21 April 2007	2007	20.000.000,00	19.698.000,00	19.698.000,00	0,00	19.698.000,00	2024	17	100%	19.698.000,00	-
4	Yovita Sangiq	21 April 2004	21 April 2007	2007	14.000.000,00	14.684.800,00	14.684.800,00	0,00	14.684.800,00	2024	17	100%	14.684.800,00	-
5	G. Simon A.	24 April 2004	24 April 2007	2007	10.000.000,00	10.817.400,00	10.817.400,00	0,00	10.817.400,00	2024	17	100%	10.817.400,00	-
6	Sugeng Santoso	24 April 2004	24 April 2007	2007	10.000.000,00	11.800.800,00	11.800.800,00	0,00	11.800.800,00	2024	17	100%	11.800.800,00	-
7	P. Luhat Ding	11 Juli 2004	11 Juli 2007	2007	8.000.000,00	9.441.000,00	9.441.000,00	0,00	9.441.000,00	2024	17	100%	9.441.000,00	-
8	KUB. Ivah Lebuq	20 Februari 2004	20 Februari 2006	2006	5.000.000,00	15.999.500,00	15.999.500,00	0,00	15.999.500,00	2024	18	100%	15.999.500,00	-
9	KUB. Serba Usaha	25 Februari 2004	25 Februari 2006	2006	50.000.000,00	34.666.400,00	34.666.400,00	0,00	34.666.400,00	2024	18	100%	34.666.400,00	-
10	KUB. 008 Laham	19 Februari 2004	19 Februari 2006	2006	50.000.000,00	39.999.801,00	39.999.801,00	0,00	39.999.801,00	2024	18	100%	39.999.801,00	-
11	KUB. Ilau Alaan Urip	5 Februari 2004	5 Februari 2006	2006	50.000.000,00	42.666.499,00	42.666.499,00	0,00	42.666.499,00	2024	18	100%	42.666.499,00	-
12	Thomas Patulak	12 November 2004	12 November 2007	2007	10.000.000,00	4.917.000,00	4.917.000,00	0,00	4.917.000,00	2024	17	100%	4.917.000,00	-
13	Thomas Didimus	2 Maret 2005	2 Maret 2007	2007	7.000.000,00	5.553.900,00	5.553.900,00	0,00	5.553.900,00	2024	17	100%	5.553.900,00	-
14	Yohanes Banafanu	2 Maret 2005	2 Maret 2007	2007	7.000.000,00	5.880.600,00	5.880.600,00	0,00	5.880.600,00	2024	17	100%	5.880.600,00	-
15	Helong Wan	4 Desember 2004	4 Desember 2007	2007	10.000.000,00	6.883.800,00	6.883.800,00	0,00	6.883.800,00	2024	17	100%	6.883.800,00	-
16	Adimansyah	25 Februari 2005	25 Februari 2008	2008	10.000.000,00	8.850.600,00	8.850.600,00	0,00	8.850.600,00	2024	16	100%	8.850.600,00	-
17	Yohanes Behen Jakin	05 November 2004	05 November 2007	2007	20.000.000,00	19.012.400,00	19.012.400,00	0,00	19.012.400,00	2024	17	100%	19.012.400,00	-
18	Adelina Tonis	01 April 2005	01 April 2008	2008	10.000.000,00	9.506.200,00	9.506.200,00	0,00	9.506.200,00	2024	16	100%	9.506.200,00	-
19	FX. Maru Baing	12 November 2004	12 November 2007	2007	10.000.000,00	9.834.000,00	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00	2024	17	100%	9.834.000,00	-
20	Sulaiman Lawai	12 Februari 2005	12 Februari 2008	2008	14.000.000,00	13.787.000,00	13.787.000,00	0,00	13.787.000,00	2024	16	100%	13.787.000,00	-
21	Lukas Ingan	15 April 2005	15 April 2008	2008	7.000.000,00	7.114.500,00	7.114.500,00	0,00	7.114.500,00	2024	16	100%	7.114.500,00	-
22	Hengki Budi Setianto	11 November 2004	11 November 2007	2007	10.000.000,00	10.489.600,00	10.489.600,00	0,00	10.489.600,00	2024	17	100%	10.489.600,00	-
23	Barto Kono	21 Maret 2005	21 Maret 2008	2008	7.000.000,00	7.344.000,00	7.344.000,00	0,00	7.344.000,00	2024	16	100%	7.344.000,00	-
24	Albert Talan	01 April 2005	31 Maret 2008	2008	7.000.000,00	7.344.000,00	7.344.000,00	0,00	7.344.000,00	2024	16	100%	7.344.000,00	-
25	Tariman	2 Desember 2004	2 Desember 2007	2007	10.000.000,00	10.817.400,00	10.817.400,00	0,00	10.817.400,00	2024	17	100%	10.817.400,00	-
26	Agustinus Hanyek Iba	2 Desember 2004	2 Desember 2007	2007	20.000.000,00	21.634.500,00	21.634.500,00	0,00	21.634.500,00	2024	17	100%	21.634.500,00	-
27	Subai Torok	14 Februari 2005	14 Februari 2008	2008	10.000.000,00	10.817.400,00	10.817.400,00	0,00	10.817.400,00	2024	16	100%	10.817.400,00	-
28	Maksimus Moensaku	21 Maret 2005	21 Maret 2008	2008	10.000.000,00	11.145.200,00	11.145.200,00	0,00	11.145.200,00	2024	16	100%	11.145.200,00	-
29	Irmia Payaq J.	01 April 2005	31 Maret 2008	2008	14.000.000,00	15.607.600,00	15.607.600,00	0,00	15.607.600,00	2024	16	100%	15.607.600,00	-
30	Elisabet Mebang	15 Maret 2005	15 Maret 2008	2008	14.000.000,00	16.061.500,00	16.061.500,00	0,00	16.061.500,00	2024	16	100%	16.061.500,00	-
31	Petrus Jumri	14 November 2004	14 November 2007	2007	10.000.000,00	11.800.500,00	11.800.500,00	0,00	11.800.500,00	2024	17	100%	11.800.500,00	-
32	Davit Hingan	12 Februari 2005	12 Februari 2008	2008	14.000.000,00	16.520.400,00	16.520.400,00	0,00	16.520.400,00	2024	16	100%	16.520.400,00	-
33	O. Mayang Uning	13 Februari 2005	13 Februari 2008	2008	14.000.000,00	16.520.400,00	16.520.400,00	0,00	16.520.400,00	2024	16	100%	16.520.400,00	-
34	Nilus Weng	13 Februari 2005	13 Februari 2008	2008	14.000.000,00	16.520.400,00	16.520.400,00	0,00	16.520.400,00	2024	16	100%	16.520.400,00	-
35	P. Hibau Jenau	13 Februari 2005	13 Februari 2008	2008	14.000.000,00	16.520.400,00	16.520.400,00	0,00	16.520.400,00	2024	16	100%	16.520.400,00	-
36	Ebid Njau	14 Februari 2005	14 Februari 2008	2008	14.000.000,00	16.520.400,00	16.520.400,00	0,00	16.520.400,00	2024	16	100%	16.520.400,00	-
37	Noh Ingan	14 Februari 2005	14 Februari 2008	2008	10.000.000,00	11.800.800,00	11.800.800,00	0,00	11.800.800,00	2024	16	100%	11.800.800,00	-
38	Hendrikus Jalaq	7 Maret 2005	7 Maret 2008	2008	14.000.000,00	16.520.400,00	16.520.400,00	0,00	16.520.400,00	2024	16	100%	16.520.400,00	-
39	Ursula Heddoq Tekwan	7 Maret 2005	7 Maret 2008	2008	14.000.000,00	16.520.400,00	16.520.400,00	0,00	16.520.400,00	2024	16	100%	16.520.400,00	-
40	Ayang Bayau	22 April 2004	22 April 2008	2008	10.000.000,00	11.800.500,00	11.800.500,00	0,00	11.800.500,00	2024	16	100%	11.800.500,00	-

No.	Nama Debitur	JANGKA WAKTU			Plafon Kredit	PENYISIHAN S/D 31 DES 2023	Jumlah Tunggalan Per 31 Des 2024			Umur s/d 2024		% KUALITAS	PENYISIHAN S/D 31 DES 2024	NRV PER 31 DES 2024
		AWAL	JTH. TEMPO	TAHUN			Saldo Awal	Setoran	Saldo					
41	Felianus Irang	22 April 2004	22 April 2008	2008	14.000.000,00	16.520.400,00	16.520.400,00	0,00	16.520.400,00	2024	16	100%	16.520.400,00	-
42	Iskandar Idris	1 Maret 2005	1 Maret 2008	2008	7.000.000,00	-	0,00	0,00	0,00	2024	16	100%	-	-
43	Patresia Huting Ding	01 April 2008	01 April 2010	2010	20.000.000,00	-	0,00	0,00	0,00	2024	14	100%	-	-
44	Leander Awang Ajat	17 Maret 2008	17 Maret 2011	2011	30.000.000,00	18.684.600,00	18.684.600,00	0,00	18.684.600,00	2024	13	100%	18.684.600,00	-
45	K. Devung Unut	18 Maret 2008	18 Maret 2011	2011	20.000.000,00	-	0,00	0,00	0,00	2024	13	100%	-	-
46	Yasintus Milang Liah	24 Maret 2008	24 Maret 2011	2011	50.000.000,00	29.500.200,00	29.500.200,00	0,00	29.500.200,00	2024	13	100%	29.500.200,00	-
47	M. Arfin	17 Maret 2008	17 Maret 2011	2011	30.000.000,00	-	0,00	0,00	0,00	2024	13	100%	-	-
48	Valentinus Iliq	18 Maret 2008	18 Maret 2011	2011	50.000.000,00	40.972.500,00	40.972.500,00	0,00	40.972.500,00	2024	13	100%	40.972.500,00	-
49	Maria Ekumalata Lenik	03 April 2008	03 April 2011	2011	20.000.000,00	16.390.000,00	16.390.000,00	0,00	16.390.000,00	2024	13	100%	16.390.000,00	-
50	V.K. Tirah	17 Maret 2008	17 Maret 2011	2011	25.000.000,00	23.765.500,00	23.765.500,00	0,00	23.765.500,00	2024	13	100%	23.765.500,00	-
51	Ahmadan	14 Maret 2008	14 Maret 2011	2011	50.000.000,00	50.805.900,00	50.805.900,00	0,00	50.805.900,00	2024	13	100%	50.805.900,00	-
52	Arie Purwadi	10 April 2008	10 April 2011	2011	30.000.000,00	31.468.800,00	31.468.800,00	0,00	31.468.800,00	2024	13	100%	31.468.800,00	-
53	Philipus Bau	14 Maret 2008	14 Maret 2011	2011	40.000.000,00	43.296.000,00	43.296.000,00	0,00	43.296.000,00	2024	13	100%	43.296.000,00	-
54	Raymundus B.	02 April 2008	02 April 2011	2011	50.000.000,00	59.000.400,00	59.000.400,00	0,00	59.000.400,00	2024	13	100%	59.000.400,00	-
55	Lorensius Brit	08 Januari 2009	08 Januari 2012	2012	30.000.000,00	15.734.400,00	15.734.400,00	0,00	15.734.400,00	2024	12	100%	15.734.400,00	-
56	Karolina Husun	07 Januari 2009	07 Januari 2011	2011	35.000.000,00	26.128.000,00	26.128.000,00	0,00	26.128.000,00	2024	13	100%	26.128.000,00	-
57	Perdinandus Irang	08 Januari 2009	08 Januari 2012	2012	30.000.000,00	23.601.600,00	23.601.600,00	0,00	23.601.600,00	2024	12	100%	23.601.600,00	-
58	Klementinus Jaang	13 Maret 2009	13 Maret 2012	2012	30.000.000,00	27.535.200,00	27.535.200,00	0,00	27.535.200,00	2024	12	100%	27.535.200,00	-
59	Susana Santi Seting	07 Januari 2009	07 Januari 2012	2012	35.000.000,00	31.416.700,00	31.416.700,00	0,00	31.416.700,00	2024	12	100%	31.416.700,00	-
60	Alosius Batoq	07 Januari 2009	07 Januari 2012	2012	25.000.000,00	23.765.500,00	23.765.500,00	0,00	23.765.500,00	2024	12	100%	23.765.500,00	-
61	Eka Sapha	23 Januari 2009	23 Januari 2012	2012	25.000.000,00	23.765.500,00	23.765.500,00	0,00	23.765.500,00	2024	12	100%	23.765.500,00	-
62	Khatarina Dew Luhah	07 Januari 2009	07 Januari 2012	2012	30.000.000,00	29.952.200,00	29.952.200,00	0,00	29.952.200,00	2024	12	100%	29.952.200,00	-
63	Lorensius Haryeq	07 Januari 2009	07 Januari 2012	2012	20.000.000,00	21.634.800,00	21.634.800,00	0,00	21.634.800,00	2024	12	100%	21.634.800,00	-
64	Wehelmus Wimpi F	19 Januari 2009	19 Januari 2012	2012	30.000.000,00	33.435.600,00	33.435.600,00	0,00	33.435.600,00	2024	12	100%	33.435.600,00	-
65	Eko Budi Cahyono	07 Januari 2009	07 Januari 2012	2012	20.000.000,00	22.946.000,00	22.946.000,00	0,00	22.946.000,00	2024	12	100%	22.946.000,00	-
66	Petrus Bawan Juk	23 Februari 2009	23 Maret 2012	2012	30.000.000,00	35.402.400,00	35.402.400,00	0,00	35.402.400,00	2024	12	100%	35.402.400,00	-
67	Hendrianus Hajang	07 Januari 2009	07 Januari 2012	2012	25.000.000,00	29.502.000,00	29.502.000,00	0,00	29.502.000,00	2024	12	100%	29.502.000,00	-
68	Abrilius Ujuk	08 Januari 2009	08 Januari 2012	2012	25.000.000,00	29.502.000,00	29.502.000,00	0,00	29.502.000,00	2024	12	100%	29.502.000,00	-
69	Beata Benedikta Dahai	03 Maret 2010	03 Maret 2013	2013	15.000.000,00	8.850.006,00	8.850.006,00	0,00	8.850.006,00	2024	11	100%	8.850.006,00	-
70	Stefanus Afandi	04 Februari 2010	04 Februari 2013	2013	40.000.000,00	9.177.778,00	9.177.778,00	0,00	9.177.778,00	2024	11	100%	9.177.778,00	-
71	Muslimin Usman	08 Februari 2010	08 Februari 2013	2013	20.000.000,00	12.455.564,00	12.455.564,00	0,00	12.455.564,00	2024	11	100%	12.455.564,00	-
72	Herman Tomas	17 Februari 2010	17 Februari 2013	2013	20.000.000,00	14.633.343,00	14.633.343,00	0,00	14.633.343,00	2024	11	100%	14.633.343,00	-
73	Simson Uluk	04 Februari 2010	04 Februari 2012	2012	20.000.000,00	1.866.673,00	1.866.673,00	0,00	1.866.673,00	2024	12	100%	1.866.673,00	-
74	Elia Uluk	05 Februari 2010	05 Februari 2013	2013	20.000.000,00	21.633.314,00	21.633.314,00	0,00	21.633.314,00	2024	11	100%	21.633.314,00	-
75	Aulia Rahman	05 Februari 2010	05 Februari 2013	2013	20.000.000,00	22.944.424,00	22.944.424,00	0,00	22.944.424,00	2024	11	100%	22.944.424,00	-
76	Romi	12 Januari 2011	12 Januari 2014	2014	35.000.000,00	32.122.215,00	32.122.215,00	0,00	32.122.215,00	2024	10	100%	32.122.215,00	-
77	Ubeldus Ngo Juk	12 Januari 2011	12 Januari 2014	2014	30.000.000,00	32.449.990,00	32.449.990,00	0,00	32.449.990,00	2024	10	100%	32.449.990,00	-
78	Mikael Awang Urang	12 Januari 2011	12 Januari 2014	2014	25.000.000,00	27.880.000,00	27.880.000,00	0,00	27.880.000,00	2024	10	100%	27.880.000,00	-
79	Gunawan	12 Januari 2011	12 Januari 2014	2014	20.000.000,00	22.960.001,00	22.960.001,00	0,00	22.960.001,00	2024	10	100%	22.960.001,00	-
80	Wewelius Takhen	12 Januari 2011	12 Januari 2014	2014	20.000.000,00	22.944.460,00	22.944.460,00	0,00	22.944.460,00	2024	10	100%	22.944.460,00	-
81	Darmawi Kirik	12 Januari 2011	12 Januari 2014	2014	25.000.000,00	29.499.984,00	29.499.984,00	0,00	29.499.984,00	2024	10	100%	29.499.984,00	-
82	Ismael Supratmanto	12 Januari 2011	12 Januari 2014	2014	20.000.000,00	22.944.459,00	22.944.459,00	0,00	22.944.459,00	2024	10	100%	22.944.459,00	-
83	Sofia Hurai	21 Januari 2012	21 Januari 2014	2014	25.000.000,00	27.861.111,00	27.861.111,00	0,00	27.861.111,00	2024	10	100%	27.861.111,00	-
84	Harizun	29 Desember 2011	29 Desember 2014	2014	30.000.000,00	33.433.333,00	33.433.333,00	0,00	33.433.333,00	2024	10	100%	33.433.333,00	-
85	Ahmad Ramli	29 Desember 2011	29 Desember 2014	2014	50.000.000,00	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	59.000.000,00	2024	10	100%	59.000.000,00	-

No.	Nama Debitur	JANGKA WAKTU			Plafon Kredit	PENYISIHAN S/D 31 DES 2023	Jumlah Tunggal Per 31 Des 2024			Umur s/d 2024		% KUALITAS	PENYISIHAN S/D 31 DES 2024	NRV PER 31 DES 2024
		AWAL	JTH. TEMPO	TAHUN			Saldo Awal	Setoran	Saldo					
86	Surya	21 Januari 2012	21 Januari 2015	2015	65.000.000,00	76.700.000,00	76.700.000,00	0,00	76.700.000,00	2024	9	100%	76.700.000,00	-
87	Serom Balan	21 Februari 2012	21 Februari 2014	2014	20.000.000,00	23.600.000,00	23.600.000,00	0,00	23.600.000,00	2024	10	100%	23.600.000,00	-
88	Inggong Laing	21 Januari 2012	21 Januari 2014	2014	50.000.000,00	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	59.000.000,00	2024	10	100%	59.000.000,00	-
89	Norlin	21/012/20100	21 Desember 2014	2014	35.000.000,00	41.300.000,00	41.300.000,00	0,00	41.300.000,00	2024	10	100%	41.300.000,00	-
90	Suyatno	21 Desember 2011	21 Desember 2014	2014	40.000.000,00	35.399.000,00	35.399.000,00	0,00	35.399.000,00	2024	10	100%	35.399.000,00	-
91	Sahriati, S.Pd.	21 Desember 2011	21 Desember 2014	2014	45.000.000,00	53.100.000,00	53.100.000,00	0,00	53.100.000,00	2024	10	100%	53.100.000,00	-
92	Lusiana Luno, SE.	21 Desember 2011	21 Desember 2014	2014	25.000.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	29.500.000,00	2024	10	100%	29.500.000,00	-
93	Leonardus H.	22 Desember 2011	22 Desember 2014	2014	25.000.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	29.500.000,00	2024	10	100%	29.500.000,00	-
94	Martinus Lasah	23 Desember 2011	23 Desember 2014	2014	30.000.000,00	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	35.400.000,00	2024	10	100%	35.400.000,00	-
95	Nanang Puji Utomo	08 Juni 2012	08 Juni 2015	2015	65.000.000,00	28.335.000,00	28.335.000,00	6.555.000,00	21.780.000,00	2024	9	100%	21.780.000,00	-
96	Lut Minal Abidin	08 Juni 2012	08 Juni 2015	2015	50.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	2024	9	100%	35.000.000,00	-
97	Syahroni	26 Juli 2012	26 Juli 2015	2015	40.000.000,00	44.577.777,00	44.577.777,00	0,00	44.577.777,00	2024	9	100%	44.577.777,00	-
98	Arbain	25 Juli 2012	25 Juli 2015	2015	40.000.000,00	47.200.000,00	47.200.000,00	0,00	47.200.000,00	2024	9	100%	47.200.000,00	-
99	Alan Jiu	09 Agustus 2005	09 Agustus 2008	2008	10.000.000,00	9.177.784,00	9.177.784,00	0,00	9.177.784,00	2024	16	100%	9.177.784,00	-
100	Atikah Latengke	02 Juni 2006	02 Juni 2009	2009	14.000.000,00	16.520.004,00	16.520.004,00	0,00	16.520.004,00	2024	15	100%	16.520.004,00	-
101	Irmia Bulan	18 September 2006	18 September 2009	2009	15.000.000,00	14.258.333,00	14.258.333,00	0,00	14.258.333,00	2024	15	100%	14.258.333,00	-
102	D. Jenau Juk (David Jenau)	15 Mei 2007	15 Mei 2010	2010	25.000.000,00	27.863.000,00	27.863.000,00	0,00	27.863.000,00	2024	14	100%	27.863.000,00	-
103	Hubertus Hajang L.	26 September 2008	26 September 2010	2010	20.000.000,00	9.334.000,00	9.334.000,00	0,00	9.334.000,00	2024	14	100%	9.334.000,00	-
104	Dionisius Haran	18 Juni 2008	18 Juni 2011	2011	25.000.000,00	10.751.000,00	10.751.000,00	0,00	10.751.000,00	2024	13	100%	10.751.000,00	-
105	Yosef Bith Doq	01 September 2008	01 September 2011	2011	20.000.000,00	14.423.200,00	14.423.200,00	0,00	14.423.200,00	2024	13	100%	14.423.200,00	-
106	Daniel Sang Juk	01 September 2008	01 September 2011	2011	40.000.000,00	36.713.600,00	36.713.600,00	0,00	36.713.600,00	2024	13	100%	36.713.600,00	-
107	Hadi Sutrisno	01 September 2008	01 September 2011	2011	10.000.000,00	9.506.200,00	9.506.200,00	0,00	9.506.200,00	2024	13	100%	9.506.200,00	-
108	M. Tolla	01 September 2008	01 September 2011	2011	20.000.000,00	21.634.800,00	21.634.800,00	0,00	21.634.800,00	2024	13	100%	21.634.800,00	-
109	Yosep Ding J	06 Agustus 2008	06 Agustus 2011	2011	10.000.000,00	11.145.200,00	11.145.200,00	0,00	11.145.200,00	2024	13	100%	11.145.200,00	-
110	Tigang Imang	20 Agustus 2010	20 Agustus 2013	2013	25.000.000,00	19.680.000,00	19.680.000,00	0,00	19.680.000,00	2024	11	100%	19.680.000,00	-
111	Martinus Madang	26 Agustus 2010	26 Agustus 2012	2012	30.000.000,00	-	0,00	0,00	0,00	2024	12	100%	-	-
112	Bibing	19 Agustus 2010	19 Agustus 2013	2013	30.000.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	24.600.000,00	2024	11	100%	24.600.000,00	-
113	Margareta Bong Awan	19 Agustus 2010	19 Agustus 2013	2013	25.000.000,00	24.420.000,00	24.420.000,00	0,00	24.420.000,00	2024	11	100%	24.420.000,00	-
114	Savang Unyang	09 Agustus 2010	09 Agustus 2013	2013	15.000.000,00	15.744.000,00	15.744.000,00	0,00	15.744.000,00	2024	11	100%	15.744.000,00	-
115	B. Iron Dafo	20 Agustus 2010	20 Agustus 2013	2013	25.000.000,00	23.616.000,00	23.616.000,00	0,00	23.616.000,00	2024	11	100%	23.616.000,00	-
116	Abdullah	24 Agustus 2010	24 Agustus 2013	2013	25.000.000,00	26.239.999,00	26.239.999,00	0,00	26.239.999,00	2024	11	100%	26.239.999,00	-
117	Angelbertus Tuba	26 Agustus 2010	26 Agustus 2013	2013	40.000.000,00	41.984.000,00	41.984.000,00	0,00	41.984.000,00	2024	11	100%	41.984.000,00	-
118	Subai Torok	25 Agustus 2010	25 Agustus 2013	2013	20.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2024	11	100%	5.000.000,00	-
119	Hang Ding	26 Agustus 2010	26 Agustus 2013	2013	50.000.000,00	54.087.000,00	54.087.000,00	0,00	54.087.000,00	2024	11	100%	54.087.000,00	-
120	Leonardus Gatot S.	25 Agustus 2010	25 Agustus 2013	2013	25.000.000,00	-	0,00	0,00	0,00	2024	11	100%	-	-
121	Gredianus Batoq	31 Agustus 2010	31 Agustus 2012	2012	50.000.000,00	51.348.000,00	51.348.000,00	0,00	51.348.000,00	2024	12	100%	51.348.000,00	-
122	H. Sanusi	15 Oktober 2010	15 Oktober 2012	2012	25.000.000,00	28.008.000,00	28.008.000,00	0,00	28.008.000,00	2024	12	100%	28.008.000,00	-
123	Benedikta Buaq	19 September 2010	19 Agustus 2013	2013	40.000.000,00	45.920.000,00	45.920.000,00	0,00	45.920.000,00	2024	11	100%	45.920.000,00	-
124	Lobertus Hibau	31 Agustus 2010	30 April 2012	2012	50.000.000,00	52.250.000,00	52.250.000,00	0,00	52.250.000,00	2024	12	100%	52.250.000,00	-
125	Santi Fransiska	19 Agustus 2010	19 Agustus 2013	2013	20.000.000,00	23.616.000,00	23.616.000,00	0,00	23.616.000,00	2024	11	100%	23.616.000,00	-
126	Sopiana Lenik	19 Agustus 2010	19 Agustus 2013	2013	20.000.000,00	22.416.000,00	22.416.000,00	0,00	22.416.000,00	2024	11	100%	22.416.000,00	-
127	Stepanus Juk	20 Agustus 2010	20 Agustus 2013	2013	30.000.000,00	35.424.000,00	35.424.000,00	0,00	35.424.000,00	2024	11	100%	35.424.000,00	-
128	Lusia Tuko Ding	14 Januari 2011	14 Januari 2014	2014	50.000.000,00	50.805.558,00	50.805.558,00	0,00	50.805.558,00	2024	10	100%	50.805.558,00	-
129	Lidwina Lawaq	13 Januari 2011	13 Januari 2014	2014	15.000.000,00	17.208.345,00	17.208.345,00	0,00	17.208.345,00	2024	10	100%	17.208.345,00	-

No.	Nama Debitur	JANGKA WAKTU			Plafon Kredit	PENYISIHAN S/D 31 DES 2023	Jumlah Tunggakan Per 31 Des 2024			Umur s/d 2024		% KUALITAS	PENYISIHAN S/D 31 DES 2024	NRV PER 31 DES 2024
		AWAL	JTH. TEMPO	TAHUN			Saldo Awal	Setoran	Saldo					
130	Ferdinandus Lung	13 Januari 2011	13 Januari 2014	2014	20.000.000,00	23.600.016,00	23.600.016,00	0,00	23.600.016,00	2024	10	100%	23.600.016,00	-
131	Helena Milawati	14 Januari 2011	14 Januari 2014	2014	40.000.000,00	47.199.996,00	47.199.996,00	0,00	47.199.996,00	2024	10	100%	47.199.996,00	-
132	Santi Wahyuni	12 Agustus 2011	12 Agustus 2014	2014	35.000.000,00	41.300.000,00	41.300.000,00	0,00	41.300.000,00	2024	10	100%	41.300.000,00	-
133	Ina Nurhayati	31 Mei 2012	31 Mei 2015	2015	55.000.000,00	64.900.000,00	64.900.000,00	0,00	64.900.000,00	2024	9	100%	64.900.000,00	-
JUMLAH						3.131.144.867,00	3.131.144.867,00	6.555.000,00	3.124.589.867				3.124.589.867,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PER 31 DESEMBER 2024

No	Tanggal Dokumen	Nomor Bukti	Uraian	Nilai
1	28 Desember 2017	04110/SP2D-LS/BPKAD-SKPKD/2017	Penyertaan Modal/Invenstasi Pemerintah Daerah pada Bank Kaltimtara	5.000.000.000,000
2	23 Agustus 2021	00780/SP2D-LS/SKPKD/2021	SP2D-LS Penyertaan Modal II Tahun Anggaran 2021	2.850.000.000,000
3	28 Desember 2023	16.16/04.0/1/LS/5.02.4.01.0.00.23.0000/P.02/12/2023	SP2D LS Penyertaan Modal Pada Bankaltimtara TA 2023.	12.150.000.000,000
4	01 Maret 2024	64.11/04.0/000001/Pembiayaan/5.02.4.01.0.00.23.0000/M/3	SP2D LS Penyertaan Modal Pada Bankaltimtara TA 2024.	10.000.000.000,000
TOTAL				30.000.000.000,000



REKAPITULASI ASET TETAP
TANAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

NO	UPB	SALDO AWAL 2024	KOREKSI SALDO AWAL	MUTASI		JUMLAH MUTASI	SALDO AKHIR 2024	KETERANGAN
				TAMBAH	KURANG			
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6	8 = 3 + 4 + 7	9
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.532.062.000,00	0,00	113.700.000,00	0,00	113.700.000,00	3.645.762.000,00	
2	SMAN 1 LONG APARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	SMAN 1 LONG PAHANGAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	SMAN 1 LONG BAGUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	SMAN 1 LONG HUBUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	SMP NEGERI 1 LONG APARI	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00	
7	SMP NEGERI 1 LONG PAHANGAI	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	
8	SMP NEGERI 1 LONG BAGUN	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00	
9	SMP NEGERI 1 LAHAM	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	
10	SMP NEGERI 1 LONG HUBUNG	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	
11	SMP NEGERI 2 LONG PAHANGAI	0,00	0,00	64.500.000,00	0,00	64.500.000,00	64.500.000,00	
12	SMP NEGERI 2 LONG BAGUN	200.000.000,00	0,00	26.150.000,00	0,00	26.150.000,00	226.150.000,00	
13	SMP NEGERI 2 LONG HUBUNG	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	
14	SMP NEGERI 2 LONG APARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	SMP NEGERI 2 LAHAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	SMP NEGERI 3 LONG BAGUN	144.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.835.000,00	
17	SMP NEGERI 3 LONG HUBUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	SMP NEGERI 3 LONG PAHANGAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	SMP NEGERI 4 LONG HUBUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	SMP NEGERI 4 LONG BAGUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	SMP NEGERI 5 LONG BAGUN	144.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.835.000,00	
22	SMP NEGERI 6 LONG BAGUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.238.289.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238.289.150,00	
24	PUSKESMAS LONG APARI	74.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.050.000,00	
25	PUSKESMAS LONG PAHANGAI	14.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.150.000,00	
26	PUSKESMAS LONG BAGUN	30.222.000,00	0,00	8.370.000,00	0,00	8.370.000,00	38.592.000,00	
27	PUSKESMAS LAHAM	59.283.000,00	0,00	3.890.000,00	0,00	3.890.000,00	63.173.000,00	
28	PUSKESMAS LONG HUBUNG	14.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600.000,00	
29	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	37.783.690.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.783.690.038,00	
30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	DINAS PERHUBUNGAN	26.528.262.325,00	0,00	845.343.400,00	0,00	845.343.400,00	27.373.605.725,00	
37	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	127.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.400.000,00	
38	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	18.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.760.000,00	
41	BAGIAN PEMERINTAHAN	105.305.852.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.305.852.247,00	
42	BAGIAN HUKUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	BAGIAN EKONOMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	BAGIAN UMUM	101.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.725.000,00	

NO	UPB	SALDO AWAL 2024	KOREKSI SALDO AWAL	MUTASI		JUMLAH MUTASI	SALDO AKHIR 2024	KETERANGAN
				TAMBAH	KURANG			
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6	8 = 3 + 4 + 7	9
46	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	BAGIAN PEMBANGUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	BAGIAN KEUANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	KECAMATAN LONG APARI	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	
54	KECAMATAN LONG PAHANGAI	54.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.354.000,00	
55	KECAMATAN LONG BAGUN	641.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.385.000,00	
56	KECAMATAN LAHAM	563.833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.833.000,00	
57	KECAMATAN LONG HUBUNG	1.062.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.310.000,00	
58	INSPEKTORAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586.000,00	
60	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		179.555.483.760,00	0,00	1.061.953.400,00	0,00	1.061.953.400,00	180.617.437.160,00	



REKAPITULASI ASET TETAP
PERALATAN DAN MESIN
PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

NO	UPB	SALDO AWAL 2024	KOREKSI SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH / (KURANG)	KOREKSI AUDITED	SALDO AKHIR 2024	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 + 6	8
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	30.223.099.156,08	0,00	8.399.072.652,00	0,00	38.622.171.808,08	
2	SMAN 1 LONG APARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	SMAN 1 LONG PAHANGAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	SMAN 1 LONG BAGUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	SMAN 1 LONG HUBUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	SMP NEGERI 1 LONG APARI	1.972.849.000,00	0,00	303.146.000,00	0,00	2.275.995.000,00	
7	SMP NEGERI 1 LONG PAHANGAI	966.383.000,00	0,00	28.446.000,00	0,00	994.829.000,00	
8	SMP NEGERI 1 LONG BAGUN	1.514.032.100,00	0,00	1.143.661.900,00	0,00	2.657.694.000,00	
9	SMP NEGERI 1 LAHAM	788.219.700,00	0,00	635.813.000,00	0,00	1.424.032.700,00	
10	SMP NEGERI 1 LONG HUBUNG	668.284.489,00	0,00	295.350.000,00	0,00	963.634.489,00	
11	SMP NEGERI 2 LONG PAHANGAI	680.567.000,00	0,00	201.470.500,00	0,00	882.037.500,00	
12	SMP NEGERI 2 LONG BAGUN	677.559.000,00	0,00	33.400.000,00	0,00	710.959.000,00	
13	SMP NEGERI 2 LONG HUBUNG	831.899.700,00	0,00	832.160.000,00	0,00	1.664.059.700,00	
14	SMP NEGERI 2 LONG APARI	197.365.300,00	0,00	70.100.000,00	0,00	267.465.300,00	
15	SMP NEGERI 2 LAHAM	318.004.000,00	0,00	77.141.600,00	0,00	395.145.600,00	
16	SMP NEGERI 3 LONG BAGUN	400.348.400,00	0,00	31.150.000,00	0,00	431.498.400,00	
17	SMP NEGERI 3 LONG HUBUNG	736.117.700,00	0,00	70.190.000,00	0,00	806.307.700,00	
18	SMP NEGERI 3 LONG PAHANGAI	22.500.000,00	0,00	225.531.600,00	0,00	248.031.600,00	
19	SMP NEGERI 4 LONG HUBUNG	599.277.019,99	0,00	394.240.000,00	0,00	993.517.019,99	
20	SMP NEGERI 4 LONG BAGUN	1.164.769.020,00	0,00	192.009.600,00	0,00	1.356.778.620,00	
21	SMP NEGERI 5 LONG BAGUN	1.051.034.500,00	0,00	500.646.600,00	0,00	1.551.681.100,00	
22	SMP NEGERI 6 LONG BAGUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	77.840.256.178,00	0,00	28.663.297.414,00	0,00	106.503.553.592,00	
24	PUSKESMAS LONG APARI	933.556.421,00	0,00	921.060.000,00	0,00	1.854.616.421,00	
25	PUSKESMAS LONG PAHANGAI	1.574.793.380,00	0,00	25.400.000,00	0,00	1.600.193.380,00	
26	PUSKESMAS LONG BAGUN	1.341.581.450,00	0,00	747.481.250,00	0,00	2.089.062.700,00	
27	PUSKESMAS LAHAM	1.045.491.500,00	0,00	201.200.000,00	0,00	1.246.691.500,00	
28	PUSKESMAS LONG HUBUNG	798.431.608,00	0,00	271.870.600,00	0,00	1.070.302.208,00	
29	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	35.026.143.873,00	0,00	3.774.805.966,00	0,00	38.800.949.839,00	
30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.967.015.692,00	0,00	2.255.973.280,00	0,00	6.222.988.972,00	
31	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.008.803.490,00	0,00	226.210.700,00	0,00	1.235.014.190,00	

NO	UPB	SALDO AWAL 2024	KOREKSI SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH / (KURANG)	KOREKSI AUDITED	SALDO AKHIR 2024	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 + 6	8
32	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK	1.470.013.055,00	0,00	1.900.517.892,00	2.854.000,00	3.373.384.947,00	
33	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	13.264.796.431,00	0,00	1.755.400.620,00	0,00	15.020.197.051,00	
34	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	3.861.353.250,00	0,00	1.946.830.000,00	0,00	5.808.183.250,00	
35	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	2.896.224.000,00	0,00	174.319.600,00	0,00	3.070.543.600,00	
36	DINAS PERHUBUNGAN	4.586.024.667,00	0,00	4.876.075.305,00	0,00	9.462.099.972,00	
37	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	8.209.160.949,00	0,00	2.621.819.766,00	0,00	10.830.980.715,00	
38	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	1.366.554.170,00	0,00	1.045.278.100,00	0,00	2.411.832.270,00	
39	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	907.400.840,00	0,00	621.359.600,00	0,00	1.528.760.440,00	
40	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	6.207.233.855,00	0,00	1.898.583.240,00	0,00	8.105.817.095,00	
41	BAGIAN PEMERINTAHAN	1.041.359.655,00	0,00	397.365.350,00	0,00	1.438.725.005,00	
42	BAGIAN HUKUM	658.391.830,00	0,00	242.180.000,00	0,00	900.571.830,00	
43	BAGIAN EKONOMI	57.850.000,00	0,00	246.275.350,00	0,00	304.125.350,00	
44	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	628.448.010,00	0,00	44.750.000,00	0,00	673.198.010,00	
45	BAGIAN UMUM	96.685.800.034,00	0,00	12.469.090.000,00	0,00	109.154.890.034,00	
46	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	1.671.402.400,00	0,00	145.520.000,00	0,00	1.816.922.400,00	
47	BAGIAN PEMBANGUNAN	0,00	0,00	212.746.050,00	0,00	212.746.050,00	
48	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	551.953.000,00	0,00	27.165.176,00	0,00	579.118.176,00	
49	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	796.721.075,00	0,00	266.307.204,00	0,00	1.063.028.279,00	
50	BAGIAN KEUANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA	756.220.500,00	0,00	40.940.000,00	0,00	797.160.500,00	
52	SEKRETARIAT DPRD	8.597.921.499,00	0,00	12.381.846.300,00	0,00	20.979.767.799,00	
53	KECAMATAN LONG APARI	932.125.420,00	0,00	838.263.708,00	0,00	1.770.389.128,00	
54	KECAMATAN LONG PAHANGAI	1.808.144.700,00	0,00	884.368.608,00	0,00	2.692.513.308,00	
55	KECAMATAN LONG BAGUN	3.594.347.884,00	0,00	3.258.098.408,00	0,00	6.852.446.292,00	
56	KECAMATAN LAHAM	1.085.225.360,00	0,00	204.464.408,00	0,00	1.289.689.768,00	
57	KECAMATAN LONG HUBUNG	1.334.225.000,00	0,00	518.964.408,00	0,00	1.853.189.408,00	
58	INSPEKTORAT	1.488.291.605,00	0,00	732.773.696,00	0,00	2.221.065.301,00	
59	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.472.973.822,00	0,00	8.104.474.845,00	0,00	13.577.448.667,00	

NO	UPB	SALDO AWAL 2024	KOREKSI SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH / (KURANG)	KOREKSI AUDITED	SALDO AKHIR 2024	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 + 6	8
60	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2.724.985.535,00	0,00	1.538.060.640,00	0,00	4.263.046.175,00	
61	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	24.012.052.509,00	0,00	4.167.510.192,00	0,00	28.179.562.701,00	
62	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.391.550.500,00	0,00	533.535.100,00	0,00	1.925.085.600,00	
63	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.505.776.676,00	0,00	9.893.980.800,00	0,00	14.399.757.476,00	
TOTAL		368.912.910.908,07	0,00	124.509.693.028,00	2.854.000,00	493.425.457.936,07	



**REKAPITULASI ASET TETAP
GEDUNG DAN BANGUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU**

NO	UPB	SALDO AWAL 2024	KOREKSI SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR 2024
				TAMBAH / (KURANG)	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	165.359.179.663,91	0,00	21.102.811.537,00	186.461.991.200,91
2	SMAN 1 LONG APARI	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SMAN 1 LONG PAHANGAI	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SMAN 1 LONG BAGUN	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SMAN 1 LONG HUBUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SMP NEGERI 1 LONG APARI	4.999.880.750,00	0,00	812.911.300,00	5.812.792.050,00
7	SMP NEGERI 1 LONG PAHANGAI	2.900.623.822,00	0,00	2.858.360.620,65	5.758.984.442,65
8	SMP NEGERI 1 LONG BAGUN	4.793.046.200,00	0,00	3.523.435.497,35	8.316.481.697,35
9	SMP NEGERI 1 LAHAM	3.012.923.400,00	0,00	252.200.000,00	3.265.123.400,00
10	SMP NEGERI 1 LONG HUBUNG	3.958.821.207,00	0,00	0,00	3.958.821.207,00
11	SMP NEGERI 2 LONG PAHANGAI	2.603.224.425,00	0,00	507.973.000,00	3.111.197.425,00
12	SMP NEGERI 2 LONG BAGUN	3.335.801.795,00	0,00	0,00	3.335.801.795,00
13	SMP NEGERI 2 LONG HUBUNG	5.190.325.850,00	0,00	379.541.394,00	5.569.867.244,00
14	SMP NEGERI 2 LONG APARI	0,00	0,00	625.745.000,00	625.745.000,00
15	SMP NEGERI 2 LAHAM	887.648.000,00	0,00	1.591.000.000,00	2.478.648.000,00
16	SMP NEGERI 3 LONG BAGUN	2.155.987.000,00	0,00	0,00	2.155.987.000,00
17	SMP NEGERI 3 LONG HUBUNG	604.920.000,00	0,00	0,00	604.920.000,00
18	SMP NEGERI 3 LONG PAHANGAI	2.103.878.900,00	0,00	1.329.589.630,66	3.433.468.530,66
19	SMP NEGERI 4 LONG HUBUNG	3.792.601.000,00	0,00	0,00	3.792.601.000,00
20	SMP NEGERI 4 LONG BAGUN	2.309.352.500,00	0,00	2.745.208.238,95	5.054.560.738,95

NO	UPB	SALDO AWAL 2024	KOREKSI SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR 2024
				TAMBAH / (KURANG)	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
21	SMP NEGERI 5 LONG BAGUN	12.229.362.268,00	0,00	1.484.743.000,00	13.714.105.268,00
22	SMP NEGERI 6 LONG BAGUN	0,00	0,00	2.495.298.855,00	2.495.298.855,00
23	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	146.452.824.556,87	0,00	7.988.548.013,17	154.441.372.570,04
24	PUSKESMAS LONG APARI	2.726.129.000,00	0,00	0,00	2.726.129.000,00
25	PUSKESMAS LONG PAHANGAI	10.495.209.903,53	0,00	0,00	10.495.209.903,53
26	PUSKESMAS LONG BAGUN	3.557.103.000,00	0,00	178.239.500,00	3.735.342.500,00
27	PUSKESMAS LAHAM	1.403.150.650,00	0,00	0,00	1.403.150.650,00
28	PUSKESMAS LONG HUBUNG	2.966.048.000,00	0,00	0,00	2.966.048.000,00
29	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	459.867.642.929,83	0,00	28.019.678.658,00	487.887.321.587,83
30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
31	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	0,00	0,00
32	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	0,00	0,00
33	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00	0,00
34	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	0,00	0,00
35	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
36	DINAS PERHUBUNGAN	59.890.214.674,00	0,00	11.425.261.287,97	71.315.475.961,97
37	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	30.365.373.262,00	0,00	0,00	30.365.373.262,00
38	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	0,00	0,00	0,00	0,00
39	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1.082.916.000,00	0,00	104.965.175,00	1.187.881.175,00

NO	UPB	SALDO AWAL 2024	KOREKSI SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR 2024
				TAMBAH / (KURANG)	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
41	BAGIAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	0,00	0,00
42	BAGIAN HUKUM	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BAGIAN EKONOMI	0,00	0,00	0,00	0,00
44	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	0,00	0,00	0,00	0,00
45	BAGIAN UMUM	1.904.343.000,00	0,00	0,00	1.904.343.000,00
46	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	0,00	0,00	0,00	0,00
47	BAGIAN PEMBANGUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
48	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	0,00	0,00	0,00	0,00
49	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	0,00
50	BAGIAN KEUANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
51	BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA	0,00	0,00	0,00	0,00
52	SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
53	KECAMATAN LONG APARI	368.166.000,00	0,00	0,00	368.166.000,00
54	KECAMATAN LONG PAHANGAI	388.100.000,00	0,00	0,00	388.100.000,00
55	KECAMATAN LONG BAGUN	5.113.097.544,00	0,00	0,00	5.113.097.544,00
56	KECAMATAN LAHAM	2.049.169.064,00	0,00	0,00	2.049.169.064,00
57	KECAMATAN LONG HUBUNG	2.380.907.048,00	0,00	0,00	2.380.907.048,00
58	INSPEKTORAT	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.481.312.840,00	0,00	0,00	1.481.312.840,00
60	BADAN PENDAPATAN DAERAH	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00

NO	UPB	SALDO AWAL 2024	KOREKSI SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR 2024
				TAMBAH / (KURANG)	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
61	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	227.763.000,00	0,00	0,00	227.763.000,00
62	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0,00	0,00	0,00	0,00
63	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00
TOTAL		953.171.047.253,14	0,00	87.425.510.707,75	1.040.596.557.960,89





REKAPITULASI ASET TETAP
JALAN, JARINGAN & IIRIGASI
PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

NO	UPB	SALDO AWAL 2024	KOREKSI	MUTASI	SALDO AKHIR 2024	KETERANGAN
				TAMBAH / (KURANG)		
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.450.701.282,49	0,00	3.084.820.600,00	6.535.521.882,49	
2	SMAN 1 LONG APARI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	SMAN 1 LONG PAHANGAI	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	SMAN 1 LONG BAGUN	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	SMAN 1 LONG HUBUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	SMP NEGERI 1 LONG APARI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	SMP NEGERI 1 LONG PAHANGAI	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	SMP NEGERI 1 LONG BAGUN	0,00	0,00	693.353.680,00	693.353.680,00	
9	SMP NEGERI 1 LAHAM	0,00	0,00	250.500.000,00	250.500.000,00	
10	SMP NEGERI 1 LONG HUBUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	SMP NEGERI 2 LONG PAHANGAI	0,00	0,00	254.161.000,00	254.161.000,00	
12	SMP NEGERI 2 LONG BAGUN	234.750.000,00	0,00	0,00	234.750.000,00	
13	SMP NEGERI 2 LONG HUBUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	SMP NEGERI 2 LONG APARI	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	SMP NEGERI 2 LAHAM	0,00	0,00	0,00	0,00	

NO	UPB	SALDO AWAL 2024	KOREKSI	MUTASI	SALDO AKHIR 2024	KETERANGAN
				TAMBAH / (KURANG)		
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7
16	SMP NEGERI 3 LONG BAGUN	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	SMP NEGERI 3 LONG HUBUNG	0,00	0,00	484.000.000,00	484.000.000,00	
18	SMP NEGERI 3 LONG PAHANGAI	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	SMP NEGERI 4 LONG HUBUNG	259.200.000,00	0,00	0,00	259.200.000,00	
20	SMP NEGERI 4 LONG BAGUN	465.800.000,00	0,00	232.650.123,56	698.450.123,56	
21	SMP NEGERI 5 LONG BAGUN	257.635.000,00	0,00	977.337.290,00	1.234.972.290,00	
22	SMP NEGERI 6 LONG BAGUN	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.769.199.837,56	0,00	5.495.416.717,88	14.264.616.555,44	
24	PUSKESMAS LONG APARI	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	PUSKESMAS LONG PAHANGAI	1.553.175.678,62	0,00	0,00	1.553.175.678,62	
26	PUSKESMAS LONG BAGUN	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	
27	PUSKESMAS LAHAM	384.549.000,00	0,00	0,00	384.549.000,00	
28	PUSKESMAS LONG HUBUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	1.867.220.798.166,81	0,00	557.410.194.636,49	2.424.630.992.803,30	

NO	UPB	SALDO AWAL 2024	KOREKSI	MUTASI	SALDO AKHIR 2024	KETERANGAN
				TAMBAH / (KURANG)		
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7
30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	DINAS PERHUBUNGAN	308.351.500,00	0,00	3.944.913.800,00	4.253.265.300,00	
37	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	7.285.416.000,00	0,00	0,00	7.285.416.000,00	
38	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	0,00	0,00	0,00	0,00	

NO	UPB	SALDO AWAL 2024	KOREKSI	MUTASI	SALDO AKHIR 2024	KETERANGAN
				TAMBAH / (KURANG)		
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7
39	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	BAGIAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	BAGIAN HUKUM	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	BAGIAN EKONOMI	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	BAGIAN UMUM	335.090.500,00	0,00	0,00	335.090.500,00	
46	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	BAGIAN PEMBANGUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	BAGIAN KEUANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	KECAMATAN LONG APARI	4.901.575.183,00	0,00	0,00	4.901.575.183,00	

NO	UPB	SALDO AWAL 2024	KOREKSI	MUTASI	SALDO AKHIR 2024	KETERANGAN
				TAMBAH / (KURANG)		
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7
54	KECAMATAN LONG PAHANGAI	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	KECAMATAN LONG BAGUN	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	KECAMATAN LAHAM	23.410.000,00	0,00	0,00	23.410.000,00	
57	KECAMATAN LONG HUBUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	INSPEKTORAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	28.300.000,00	0,00	0,00	28.300.000,00	
60	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		1.895.497.952.148,48	0,00	572.827.347.847,93	2.468.325.299.996,41	



REKAPITULASI ASET TETAP
ASET TETAP LAINNYA
PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

NO	UPB	SALDO AWAL 2024	KOREKSI SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR 2024	KETERANGAN
				TAMBAH / (KURANG)		
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.479.400.146,00	0,00	1.189.041.700,00	4.668.441.846,00	
2	SMAN 1 LONG APARI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	SMAN 1 LONG PAHANGAI	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	SMAN 1 LONG BAGUN	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	SMAN 1 LONG HUBUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	SMP NEGERI 1 LONG APARI	110.693.275,00	0,00	11.000.000,00	121.693.275,00	
7	SMP NEGERI 1 LONG PAHANGAI	88.797.900,00	0,00	15.943.300,00	104.741.200,00	
8	SMP NEGERI 1 LONG BAGUN	163.099.323,00	0,00	78.522.500,00	241.621.823,00	
9	SMP NEGERI 1 LAHAM	89.526.200,00	0,00	24.588.000,00	114.114.200,00	
10	SMP NEGERI 1 LONG HUBUNG	146.978.875,00	0,00	28.954.900,00	175.933.775,00	
11	SMP NEGERI 2 LONG PAHANGAI	59.874.600,00	0,00	0,00	59.874.600,00	
12	SMP NEGERI 2 LONG BAGUN	63.106.310,00	0,00	12.246.800,00	75.353.110,00	
13	SMP NEGERI 2 LONG HUBUNG	146.604.070,00	0,00	0,00	146.604.070,00	
14	SMP NEGERI 2 LONG APARI	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	SMP NEGERI 2 LAHAM	28.286.100,00	0,00	20.571.400,00	48.857.500,00	
16	SMP NEGERI 3 LONG BAGUN	75.350.840,00	0,00	30.256.000,00	105.606.840,00	
17	SMP NEGERI 3 LONG HUBUNG	64.850.400,00	0,00	8.600.000,00	73.450.400,00	
18	SMP NEGERI 3 LONG PAHANGAI	6.500.000,00	0,00	5.352.600,00	11.852.600,00	
19	SMP NEGERI 4 LONG HUBUNG	91.821.600,00	0,00	0,00	91.821.600,00	
20	SMP NEGERI 4 LONG BAGUN	140.164.975,00	0,00	89.900.000,00	230.064.975,00	
21	SMP NEGERI 5 LONG BAGUN	51.329.700,00	0,00	24.972.600,00	76.302.300,00	
22	SMP NEGERI 6 LONG BAGUN	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	51.948.000,00	0,00	0,00	51.948.000,00	
24	PUSKESMAS LONG APARI	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
25	PUSKESMAS LONG PAHANGAI	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	PUSKESMAS LONG BAGUN	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	PUSKESMAS LAHAM	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	PUSKESMAS LONG HUBUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	
31	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	0,00	0,00	

NO	UPB	SALDO AWAL 2024	KOREKSI SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR 2024	KETERANGAN
				TAMBAH / (KURANG)		
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7
32	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	
35	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	DINAS PERHUBUNGAN	53.700.000,00	0,00	0,00	53.700.000,00	
37	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	508.087.000,00	0,00	0,00	508.087.000,00	
38	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	BAGIAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	BAGIAN HUKUM	25.200.000,00	0,00	0,00	25.200.000,00	
43	BAGIAN EKONOMI	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	
45	BAGIAN UMUM	371.713.720,00	0,00	0,00	371.713.720,00	
46	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	BAGIAN PEMBANGUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	BAGIAN KEUANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA	34.390.000,00	0,00	0,00	34.390.000,00	
52	SEKRETARIAT DPRD	48.147.900,00	0,00	0,00	48.147.900,00	
53	KECAMATAN LONG APARI	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	KECAMATAN LONG PAHANGAI	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	KECAMATAN LONG BAGUN	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	KECAMATAN LAHAM	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	KECAMATAN LONG HUBUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	INSPEKTORAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.751.880.000,00	0,00	0,00	1.751.880.000,00	
60	BADAN PENDAPATAN DAERAH	3.215.000,00	0,00	0,00	3.215.000,00	
61	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		7.677.785.934,00	-	1.539.949.800,00	9.217.735.734,00	



REKAPITULASI ASET TETAP
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

NO	UPB	SALDO AWAL 2024	KOREKSI SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH / (KURANG)	KOREKSI AUDITED	SALDO AKHIR 2024	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.279.936.600,00	0,00	2.633.225.000,00	0,00	5.913.161.600,00	
2	SMAN 1 LONG APARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	SMAN 1 LONG PAHANGAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	SMAN 1 LONG BAGUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	SMAN 1 LONG HUBUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	SMP NEGERI 1 LONG APARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	SMP NEGERI 1 LONG PAHANGAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	SMP NEGERI 1 LONG BAGUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	SMP NEGERI 1 LAHAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	SMP NEGERI 1 LONG HUBUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	SMP NEGERI 2 LONG PAHANGAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	SMP NEGERI 2 LONG BAGUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	SMP NEGERI 2 LONG HUBUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SMP NEGERI 2 LONG APARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	SMP NEGERI 2 LAHAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	SMP NEGERI 3 LONG BAGUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	SMP NEGERI 3 LONG HUBUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SMP NEGERI 3 LONG PAHANGAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	SMP NEGERI 4 LONG HUBUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	SMP NEGERI 4 LONG BAGUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	SMP NEGERI 5 LONG BAGUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.961.952.000,00	0,00	545.858.000,00	0,00	2.507.810.000,00	
21	PUSKESMAS LONG APARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	PUSKESMAS LONG PAHANGAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	PUSKESMAS LONG BAGUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	PUSKESMAS LAHAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	PUSKESMAS LONG HUBUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	308.809.816.318,08	0,00	49.354.229.722,00	(1.868.551.732,88)	356.295.494.307,20	
27	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	DINAS PERHUBUNGAN	2.554.049.500,00	0,00	8.918.850,00	0,00	2.562.968.350,00	
34	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	
37	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	49.720.000,00	0,00	0,00	0,00	49.720.000,00	
38	BAGIAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	BAGIAN HUKUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	BAGIAN EKONOMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	BAGIAN UMUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NO	UPB	SALDO AWAL 2024	KOREKSI SALDO AWAL	MUTASI	KOREKSI AUDITED	SALDO AKHIR 2024	KETERANGAN
				TAMBAH / (KURANG)			
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 + 6	8
43	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	BAGIAN PEMBANGUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	BAGIAN KEUANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	KECAMATAN LONG APARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	KECAMATAN LONG PAHANGAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	KECAMATAN LONG BAGUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	KECAMATAN LAHAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	KECAMATAN LONG HUBUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	INSPEKTORAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	749.983.300,00	0,00	0,00	0,00	749.983.300,00	
57	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		317.705.457.718,08	0,00	52.542.231.572,00	(1.868.551.732,88)	368.379.137.557,20	



REKAPITULASI ASET TETAP
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP
PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

NO	UPB	Total Saldo Awal Akum Susut Audited 31 Desember 2023	Koreksi Saldo Awal	Koreksi Audited Saldo Awal	Total Saldo Awal Akum Penyusutan 1 Januari 2024	Beban Penyusutan Unaudited	Koreksi Audited Beban Penyusutan	Beban Penyusutan 2024	Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 6 + 9
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	53.744.727.120,08		0,00	53.744.727.120,08	11.361.135.945,00	-3.769.433,00	11.357.366.512,00	65.102.093.632,08
2	SEKRETARIAT DPRD	4.812.659.677,00	930.135.500	0,00	5.742.795.177,00	1.418.068.445,00	0,00	1.418.068.445,00	7.160.863.622,00
3	BAGIAN PEMERINTAHAN	474.432.121,00	-474.432.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BAGIAN HUKUM	404.456.022,00	-404.456.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	199.514.727,00	-199.514.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BAGIAN UMUM	83.280.806.873,00	(2.235.439.258)		81.045.367.615,00	6.622.431.065,00	0,00	6.622.431.065,00	87.667.798.680,00
7	KECAMATAN LONG PAHANGAI	1.648.444.301,00	0	0,00	1.648.444.301,00	182.135.680,00	0,00	182.135.680,00	1.830.579.981,00
8	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	564.413.313,00	-564.413.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	848.772.247,00	-848.772.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	240.380.795,00	-240.380.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	KANTOR PENGELOLA PERBATASAN	585.554.258,00	0	0,00	585.554.258,00	50.850.812,00	0,00	50.850.812,00	636.405.070,00
12	DINAS PEKERJAAN UMUM	786.521.694.568,00		0,00	786.521.694.568,00	151.907.992.745,00	-34.050.366,00	151.873.942.379,00	938.395.636.947,00
13	DINAS PERHUBUNGAN	5.722.184.004,00		0,00	5.722.184.004,00	2.350.611.584,00	-45.021,00	2.350.566.563,00	8.072.750.567,00
14	DINAS KESEHATAN	80.281.564.115,00		0,00	80.281.564.115,00	13.738.410.812,00	-3.590.781,00	13.734.820.031,00	94.016.384.146,00
15	PUSKESMAS LONG APARI	981.871.228,00	-981.871.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PUSKESMAS LONG PAHANGAI	1.652.854.871,00	-1.652.854.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	PUSKESMAS LONG BAGUN	2.016.645.311,00	-2.016.645.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PUSKESMAS LAHAM	1.006.563.594,00	-1.006.563.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PUSKESMAS LONG HUBUNG	735.729.819,00	-735.729.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SMP NEGERI 2 LONG HUBUNG	950.684.963,00	-950.684.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	SMP NEGERI 1 LONG HUBUNG	904.787.241,00	-904.787.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SMP NEGERI 1 LONG APARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	UPB	Total Saldo Awal Akum Susut Audited 31 Desember 2023	Koreksi Saldo Awal	Koreksi Audited Saldo Awal	Total Saldo Awal Akum Penyusutan 1 Januari 2024	Beban Penyusutan Unaudited	Koreksi Audited Beban Penyusutan	Beban Penyusutan 2024	Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 6 + 9
22	SMP NEGERI 1 LAHAM	759.137.336,00	-759.137.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SMP NEGERI 1 LONG BAGUN	1.312.691.750,00	-1.312.691.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	SMP NEGERI 1 LONG PAHANGAI	951.702.754,00	-951.702.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	SMP NEGERI 1 LONG APARI	1.152.360.264,00	-1.152.360.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SMP NEGERI 2 LONG BAGUN	616.193.422,00	-616.193.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	SMP NEGERI 3 LONG HUBUNG	450.275.589,00	-450.275.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SMP NEGERI 3 LONG BAGUN	247.679.026,00	-247.679.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SMP NEGERI 3 LONG PAHANGAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	SMP NEGERI 2 LONG PAHANGAI	359.248.379,00	-359.248.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	SMPN 4 LONG BAGUN	862.914.911,00	-862.914.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SDN 003 LONG BAGUN ILIR	915.760.364,00	-915.760.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	SMPN 2 LAHAM	112.965.593,00	-112.965.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	SMP NEGERI 5 LONG BAGUN	719.352.080,00	-719.352.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	SMPN 4 LONG HUBUNG	696.903.875,00	-696.903.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	SMPN 3 LONG PAHANGAI	95.084.826,00	-95.084.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	1.571.839.323,00		0,00	1.571.839.323,00	482.441.143,00	0,00	482.441.143,00	2.054.280.466,00
37	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	740.682.383,00	0	0,00	740.682.383,00	391.481.736,00	47.567,00	391.529.303,00	1.132.211.686,00
38	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	3.332.283.762,00	0	0,00	3.332.283.762,00	352.653.474,00	0,00	352.653.474,00	3.684.937.236,00
39	DINAS KETAHANAN	4.441.889.086,00	0	0,00	4.441.889.086,00	622.388.535,00	0,00	622.388.535,00	5.064.277.621,00
40	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2.447.078.547,00	0	0,00	2.447.078.547,00	190.883.606,00	0,00	190.883.606,00	2.637.962.153,00
41	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	726.350.317,00	0	0,00	726.350.317,00	183.697.618,00	0,00	183.697.618,00	910.047.935,00

NO	UPB	Total Saldo Awal Akum Susut Audited 31 Desember 2023	Koreksi Saldo Awal	Koreksi Audited Saldo Awal	Total Saldo Awal Akum Penyusutan 1 Januari 2024	Beban Penyusutan Unaudited	Koreksi Audited Beban Penyusutan	Beban Penyusutan 2024	Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 6 + 9
42	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	15.166.212.645,00	714.749.500	0,00	15.880.962.145,00	2.805.305.746,00	0,00	2.805.305.746,00	18.686.267.891,00
43	INSPEKTORAT	1.028.207.811,00	0	0,00	1.028.207.811,00	180.196.092,00	0,00	180.196.092,00	1.208.403.903,00
44	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.868.324.938,00	0	0,00	4.868.324.938,00	1.021.386.710,00	0,00	1.021.386.710,00	5.889.711.648,00
45	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6.637.091.126,00	0	0,00	6.637.091.126,00	2.177.418.043,00	0,00	2.177.418.043,00	8.814.509.169,00
46	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	626.905.342,00	0	0,00	626.905.342,00	109.664.075,00	0,00	109.664.075,00	736.569.417,00
47	KANTOR KESBANGPOL	754.084.293,00	0	0,00	754.084.293,00	94.427.065,00	0,00	94.427.065,00	848.511.358,00
48	DINAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.350.175.155,00	0	0,00	1.350.175.155,00	687.103.828,00	0,00	687.103.828,00	2.037.278.983,00
49	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN	865.210.136,00	0	0,00	865.210.136,00	208.712.250,00	0,00	208.712.250,00	1.073.922.386,00
50	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	10.546.576.197,00	0	0,00	10.546.576.197,00	1.965.576.778,00	0,00	1.965.576.778,00	12.512.152.975,00
51	KECAMATAN LONG APARI	1.760.180.907,00	0	0,00	1.760.180.907,00	283.644.672,00	0,00	283.644.672,00	2.043.825.579,00
52	KECAMATAN LONG BAGUN	4.322.208.910,00	0	0,00	4.322.208.910,00	809.360.396,00	0,00	809.360.396,00	5.131.569.306,00
53	KECAMATAN LAHAM	1.358.856.145,00	0	0,00	1.358.856.145,00	160.730.116,00	0,00	160.730.116,00	1.519.586.261,00
54	KECAMATAN LONG HUBUNG	2.313.711.631,00	0	0,00	2.313.711.631,00	150.423.745,00	0,00	150.423.745,00	2.464.135.376,00
55	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH	347.637.040,00		0,00	347.637.040,00	1.519.527.893,00		1.519.527.893,00	1.867.164.933,00
56	BAGIAN EKONOMI	509.376,00	-509.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.102.037.026.407,08	(20.824.440.055)	-	1.081.212.586.352,08	202.028.660.609,00	(41.408.034,00)	201.987.252.575,00	1.283.199.838.927,08



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
TUNTUTAN GANTI RUGI PIHAK KETIGA
PER 31 DESEMBER 2024

No	Keterangan	Saldo Awal	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pemotongan Tagihan	Pengembalian	Saldo Akhir
A.	ASET LAINNYA						
I	Tagihan Jangka Panjang	2.821.723.047,12	0,00	13.205.399.455,99	0,00	30.614.200,00	15.996.508.303,11
1	CV.KM, SK Pembebanan No: 700.030/K.195g/2015, Tanggal 2 Januari 2018	109.718.550,36	0,00	0,00	0,00	0,00	109.718.550,36
2	PT.PBE, SKTJM No: 700/MP-TPTGR/TGR/III/2016	215.489.786,90	0,00	0,00	0,00	0,00	215.489.786,90
3	PT. PGS, SKTJM No: 700/15/MP-TPTGR/TGR/VI/2016	136.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.500.000,00
4	CV.MJK, SKTJM No: 700/22/MP-TPTGR/TGR/VIII/2017	90.375.066,94	0,00	0,00	0,00	0,00	90.375.066,94
5	Review Atas LKPD 2021	1.611.999.756,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611.999.756,78
6	Koreksi BPK 2022	417.067.898,86	0,00	0,00	0,00	12.114.200,00	404.953.698,86
7	Koreksi BPK 2023	240.571.987,28	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	222.071.987,28
8	Koreksi BPK 2024	0,00	0,00	13.205.399.455,99	0,00	0,00	13.205.399.455,99



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
ASET TIDAK BERWUJUD DAN AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2024

NO.	ID OPD & Aset	Nama UPB	Kode Aset	No Reg	Nama Aset	Tahun	Saldo Audited 2023	Koreksi Saldo Awal	Penambahan 2024	Nilai Perolehan 2024	Sisa masa		Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2023	Koreksi Saldo Awal Amortisasi	Akumulasi Amortisasi 01 Januari 2024	Beban Amortisasi Tahun 2024					Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2024	Nilai Buku 2024
											Tahun	Bulan				Semester 1	Semester 2	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 + 16	18 = 8 - 17				
	01010101016000001	Sekretariat DPRD	1.5.3.1.1.6.1	1	Kajian	2024	350.000.000,00	350.000.000,00	4	5	5.833.333,00	35.000.000,00	40.833.333,00	32.083.333,00	32.083.333,00	32.083.333,00	32.083.333,00	32.083.333,00	32.083.333,00			
	01010101016000002	Sekretariat DPRD	1.5.3.1.1.6.1	2	Kajian	2024	175.000.000,00	175.000.000,00	4	1	5.833.333,00	17.500.000,00	23.333.333,00	23.333.333,00	23.333.333,00	23.333.333,00	23.333.333,00	23.333.333,00	23.333.333,00			
	01010101016000003	Sekretariat DPRD	1.5.3.1.1.6.1	3	Kajian	2024	175.000.000,00	175.000.000,00	4	1	5.833.333,00	17.500.000,00	23.333.333,00	23.333.333,00	23.333.333,00	23.333.333,00	23.333.333,00	23.333.333,00	23.333.333,00			
	01010101016000004	Sekretariat DPRD	1.5.3.1.1.6.1	4	Kajian	2024	175.000.000,00	175.000.000,00	4	4	5.833.333,00	17.500.000,00	23.333.333,00	23.333.333,00	23.333.333,00	23.333.333,00	23.333.333,00	23.333.333,00	23.333.333,00			
	01010101016000005	Sekretariat DPRD	1.5.3.1.1.6.1	5	Kajian	2024	175.000.000,00	175.000.000,00	4	4	5.833.333,00	17.500.000,00	23.333.333,00	23.333.333,00	23.333.333,00	23.333.333,00	23.333.333,00	23.333.333,00	23.333.333,00			
	01010101016000006	Sekretariat DPRD	1.5.3.1.1.6.1	6	Kajian	2024	175.000.000,00	175.000.000,00	4	1	5.833.333,00	17.500.000,00	23.333.333,00	23.333.333,00	23.333.333,00	23.333.333,00	23.333.333,00	23.333.333,00	23.333.333,00			
	01010101016000007	Sekretariat DPRD	1.5.3.1.1.6.1	7	Kajian	2024	175.000.000,00	175.000.000,00	4	4	5.833.333,00	17.500.000,00	23.333.333,00	23.333.333,00	23.333.333,00	23.333.333,00	23.333.333,00	23.333.333,00	23.333.333,00			
	01010101016000008	Sekretariat DPRD	1.5.3.1.1.6.1	8	Kajian	2024	131.000.000,00	131.000.000,00	4	7	0,00	10.916.667,00	10.916.667,00	10.916.667,00	10.916.667,00	10.916.667,00	10.916.667,00	10.916.667,00	10.916.667,00			
	01010101016000009	Sekretariat DPRD	1.5.3.1.1.5.1	1	Software	2024	50.475.000,00	50.475.000,00	4	7	0,00	7.539.583,00	7.539.583,00	7.539.583,00	7.539.583,00	7.539.583,00	7.539.583,00	7.539.583,00	7.539.583,00			
	01010101016000010	Sekretariat DPRD	1.5.3.1.1.5.1	2	Software	2024	55.000.000,00	55.000.000,00	4	9	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00			
	Sub Total Sekretariat DPRD						0,00	0,00	1.676.475.000,00	1.676.475.000,00	0,00	0	0,00	67.083.331,00	161.206.250,00	228.289.581,00	228.289.581,00	1.448.185.419,00				
1	04010101026000001	Bagian Hukum	1.5.3.1.1.5.1	1	Software	2015	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0	0	60.000.000,00	0	60.000.000,00	0,00	0,00	-	60.000.000,00	0,00		
2	04010101026000002	Bagian Hukum	1.5.3.1.1.6.2	1	Kajian Lainnya	2023	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	3	10	6.666.667,00	0	6.666.667,00	20.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	46.666.667,00	153.333.333,00		
3	04010101026000003	Bagian Hukum	1.5.3.1.1.6.2	2	Kajian Lainnya	2023	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	3	10	6.666.667,00	0	6.666.667,00	20.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	46.666.667,00	153.333.333,00		
4	04010101026000004	Bagian Hukum	1.5.3.1.1.6.2	3	Kajian Lainnya	2023	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	3	10	6.666.667,00	0	6.666.667,00	20.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	46.666.667,00	153.333.333,00		
	Sub Total Bagian Hukum						660.000.000,00	0,00	0,00	660.000.000,00	80.000.001,00	0,00	80.000.001,00	0,00	80.000.001,00	60.000.000,00	60.000.000,00	120.000.000,00	200.000.001,00	499.999.999,00		
5	04010101096000001	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1.5.3.1.1.5.1	1	Software	2022	190.000.000,00	0,00	0,00	190.000.000,00	2	11	43.116.667,00	0	43.116.667,00	19.000.000,00	19.000.000,00	38.000.000,00	42.916.667,00	116.083.333,00		
6	04010101096000002	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1.5.3.1.1.5.1	2	Software	2023	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	3	10	3.333.334,00	(1)	3.333.333,00	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	23.333.333,00	76.666.667,00		
	Sub Total Bagian Pengadaan Barang dan Jasa						290.000.000,00	0,00	0,00	290.000.000,00	46.450.001,00	0,00	46.450.001,00	(1)	46.450.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	58.000.000,00	106.250.000,00	192.750.000,00		
7	04010101086000001	Bagian Pembangunan	1.5.3.1.1.5.1	1	Software	2023	198.000.000,00	0,00	0,00	198.000.000,00	3	10	6.600.000,00	0	6.600.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	39.600.000,00	46.200.000,00	151.800.000,00		
	Sub Total Bagian Pembangunan						198.000.000,00	0,00	0,00	198.000.000,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0	6.600.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	39.600.000,00	46.200.000,00	151.800.000,00		
8	04010101116000001	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	1.5.3.1.1.5.1	1	Software	2017	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0	0	50.000.000,00	0	50.000.000,00	0,00	0,00	-	50.000.000,00	0,00		
9	04010101116000002	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	1.5.3.1.1.5.1	2	Software	2018	387.490.000,00	0,00	0,00	387.490.000,00	0	0	324.618.833,00	72.873.167	387.490.000,00	0,00	0,00	-	387.490.000,00	0,00		
10	04010101116000003	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	1.5.3.1.1.5.1	3	Software	2018	348.190.000,00	0,00	0,00	348.190.000,00	0	0	307.567.833,00	40.622.167	348.190.000,00	0,00	0,00	-	348.190.000,00	0,00		
11	04010101116000004	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	1.5.3.1.1.5.1	4	Software	2018	323.690.000,00	0,00	0,00	323.690.000,00	0	0	264.346.833,00	59.343.167	323.690.000,00	0,00	0,00	-	323.690.000,00	0,00		
12	04010101116000005	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	1.5.3.1.1.5.1	5	Software	2019	99.000.000,00	0,00	0,00	99.000.000,00	0	0	90.750.000,00	0	90.750.000,00	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	99.000.000,00	0,00		
13	04010101116000006	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	1.5.3.1.1.5.1	6	Software	2019	163.000.000,00	0,00	0,00	163.000.000,00	0	0	135.833.333,00	0	135.833.333,00	0,00	27.166.667,00	27.166.667,00	163.000.000,00	0,00		
14	04010101116000007	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	1.5.3.1.1.5.1	7	Software	2020	149.500.000,00	0,00	0,00	149.500.000,00	0	10	94.683.333,00	0	94.683.333,00	14.950.000,00	40.000.000,00	29.900.000,00	124.583.333,00	24.916.667,00		
15	04010101116000008	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	1.5.3.1.1.6.1	1	Kajian	2022	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	2	11	86.666.667,00	0	86.666.667,00	40.000.000,00	40.000.000,00	80.000.000,00	166.666.667,00	233.333.333,00		
16	04010101116000009	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	1.5.3.1.1.6.1	2	Kajian	2023	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	3	11	3.333.334,00	(1)	3.333.333,00	20.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	43.333.333,00	156.666.667,00		
	Sub Total Bagian Organisasi dan Tata Laksana						2.130.870.000,00	0,00	0,00	2.130.870.000,00	1.357.798.166,00	0,00	1.357.798.166,00	172.838.500	1.530.636.666,00	74.950.000,00	110.366.667,00	185.316.667,00	1.715.953.333,00	414.916.667,00		
17	04010101016000001	Bagian Pemerintahan	1.5.3.1.1.5.1	1	Software	2023	36.399.783,00	0,00	0,00	167.999.000,00	3	11	2.799.984,00	(1)	2.799.983,00	16.799.900,00	16.799.900,00	33.599.800,00	36.399.783,00	131.599.217,00		
18	04010101016000002	Bagian Pemerintahan	1.5.3.1.1.5.1	2	Software	2023	41.870.617,00	0,00	0,00	193.249.000,00	3	11	3.220.817,00	0	3.220.817,00	19.324.900,00	19.324.900,00	38.649.800,00	41.870.617,00	151.378.383,00		
19	04010101016000003	Bagian Pemerintahan	1.5.3.1.1.6.1	3	Kajian	2024	0,00	0,00	251.680.000,00	251.680.000,00	4	11	0,00	0	0,00	0,00	4.194.667,00	4.194.667,00	247.485.333,00	0,00		
20	04010101016000004	Bagian Pemerintahan	1.5.3.1.1.6.1	4	Kajian	2024	0,00	0,00	251.680.000,00	251.680.000,00	4	11	0,00	0	0,00	0,00	4.194.667,00	4.194.667,00	247.485.333,00	0,00		
	Sub Total Bagian Pemerintahan						78.270.400,00	0,00	0,00	864.668.000,00	6.020.801,00	(1)	6.020.801,00	(1)	6.020.801,00	36.124.800,00	44.514.134,00	80.638.934,00	86.668.734,00	771.668.266,00		
19	06010101016000003	Dinas Perhubungan	1.5.3.1.1.6.1	1	Kajian	2020	461.000.000,00	0,00	0,00	461.000.000,00	0	11	284.283.333,00	0	284.283.333,00	46.100.000,00	46.100.000,00	92.200.000,00	378.483.333,00	84.516.667,00		
20	06010101016000004	Dinas Perhubungan	1.5.3.1.1.6.1	2	Kajian	2020	937.000.000,00	0,00	0,00	937.000.000,00	0	11	577.816.667,00	0	577.816.667,00	93.700.000,00	93.700.000,00	187.400.000,00	765.216.667,00	171.783.333,00		
21	06010101016000005	Dinas Perhubungan	1.																			

NO.	ID OPD & Aset	Nama UPB	Kode Aset	No Reg	Nama Aset	Tahun	Saldo Audited 2023	Koreksi Saldo Awal	Penambahan 2024	Nilai Perolehan 2024	Sisa masa		Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2023	Koreksi Saldo Awal Amortisasi	Akumulasi Amortisasi 01 Januari 2024	Beban Amortisasi Tahun 2024				Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2024	Nilai Buku 2024
											Tahun	Bulan				Semester 1	Semester 2	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 + 16	18 = 8 - 17	
56	130100100160000004	Badan Pendapatan Daerah	1.5.3.1.1.5.1	4	Software	2015	114.000.000,00	0,00	0,00	114.000.000,00	0	0	114.000.000,00	0	114.000.000,00	0,00	0,00	-	114.000.000,00	0,00	
57	130100100160000005	Badan Pendapatan Daerah	1.5.3.1.1.5.1	5	Software	2015	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00	0	0	34.000.000,00	0	34.000.000,00	0,00	0,00	-	34.000.000,00	0,00	
58	130100100160000006	Badan Pendapatan Daerah	1.5.3.1.1.5.1	6	Software	2015	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0	0	19.000.000,00	0	19.000.000,00	0,00	0,00	-	19.000.000,00	0,00	
59	130100100160000007	Badan Pendapatan Daerah	1.5.3.1.1.5.1	7	Software	2015	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0	0	17.000.000,00	0	17.000.000,00	0,00	0,00	-	17.000.000,00	0,00	
60	130100100160000008	Badan Pendapatan Daerah	1.5.3.1.1.5.1	8	Software	2015	330.000.000,00	0,00	0,00	330.000.000,00	0	0	330.000.000,00	0	330.000.000,00	0,00	0,00	-	330.000.000,00	0,00	
61	130100100160000009	Badan Pendapatan Daerah	1.5.3.1.1.5.1	9	Software	2015	265.000.000,00	0,00	0,00	265.000.000,00	0	0	265.000.000,00	0	265.000.000,00	0,00	0,00	-	265.000.000,00	0,00	
62	130100100160000010	Badan Pendapatan Daerah	1.5.3.1.1.5.1	10	Software	2015	312.425.000,00	0,00	0,00	312.425.000,00	0	0	312.425.000,00	0	312.425.000,00	0,00	0,00	-	312.425.000,00	0,00	
63	130100100160000011	Badan Pendapatan Daerah	1.5.3.1.1.5.1	11	Software	2024	0,00	0,00	199.800.000,00	199.800.000,00	4	9	0,00	0	0,00	0,00	9.990.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00	189.810.000,00	
64	130100100160000012	Badan Pendapatan Daerah	1.5.3.1.1.5.1	12	Software	2024	0,00	0,00	107.910.593,00	107.910.593,00	4	11	0,00	0	0,00	0,00	1.798.510,00	1.798.510,00	1.798.510,00	106.112.083,00	
		Sub Total Badan Pendapatan Daerah					1.126.675.000,00	0,00	307.710.593,00	1.434.385.593,00			1.126.675.000,00	0	1.126.675.000,00	0,00	11.788.510,00	11.788.510,00	1.138.463.510,00	295.922.083,00	
63	150100100160000005	Badan Perencanaan Pemabngunan, Penelitian, dan Pembanounan Daerah	1.5.3.1.1.6.1	1	Kajian	2017	750.000.000,00	0,00	0,00	750.000.000,00	0	0	750.000.000,00	0	750.000.000,00	0,00	0,00	-	750.000.000,00	0,00	
64	150100100160000006	Badan Perencanaan Pemabngunan, Penelitian, dan Pembanounan Daerah	1.5.3.1.1.6.1	2	Kajian	2017	717.579.750,00	0,00	0,00	717.579.750,00	0	0	717.579.750,00	0	717.579.750,00	0,00	0,00	-	717.579.750,00	0,00	
65	150100100160000007	Badan Perencanaan Pemabngunan, Penelitian, dan Pembanounan Daerah	1.5.3.1.1.6.1	3	Kajian	2017	509.400.000,00	0,00	0,00	509.400.000,00	0	0	509.400.000,00	0	509.400.000,00	0,00	0,00	-	509.400.000,00	0,00	
66	150100100160000008	Badan Perencanaan Pemabngunan, Penelitian, dan Pembanounan Daerah	1.5.3.1.1.6.1	4	Kajian	2017	1.452.000.000,00	0,00	0,00	1.452.000.000,00	0	0	1.452.000.000,00	0	1.452.000.000,00	0,00	0,00	-	1.452.000.000,00	0,00	
67	150100100160000009	Badan Perencanaan Pemabngunan, Penelitian, dan Pembanounan Daerah	1.5.3.1.1.6.1	5	Kajian	2017	1.700.000.000,00	0,00	0,00	1.700.000.000,00	0	0	1.700.000.000,00	0	1.700.000.000,00	0,00	0,00	-	1.700.000.000,00	0,00	
68	150100100160000010	Badan Perencanaan Pemabngunan, Penelitian, dan Pembanounan Daerah	1.5.3.1.1.6.1	6	Kajian	2017	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0	0	700.000.000,00	0	700.000.000,00	0,00	0,00	-	700.000.000,00	0,00	
69	150100100160000011	Badan Perencanaan Pemabngunan, Penelitian, dan Pembanounan Daerah	1.5.3.1.1.6.1	7	Kajian	2017	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0	0	500.000.000,00	0	500.000.000,00	0,00	0,00	-	500.000.000,00	0,00	
70	150100100160000012	Badan Perencanaan Pemabngunan, Penelitian, dan Pembanounan Daerah	1.5.3.1.1.6.1	8	Kajian	2017	756.540.000,00	0,00	0,00	756.540.000,00	0	0	756.540.000,00	0	756.540.000,00	0,00	0,00	-	756.540.000,00	0,00	
71	150100100160000013	Badan Perencanaan Pemabngunan, Penelitian, dan Pembanounan Daerah	1.5.3.1.1.6.1	9	Kajian	2017	441.488.000,00	0,00	0,00	441.488.000,00	0	0	441.488.000,00	0	441.488.000,00	0,00	0,00	-	441.488.000,00	0,00	
72	150100100160000014	Badan Perencanaan Pemabngunan, Penelitian, dan Pembanounan Daerah	1.5.3.1.1.6.1	10	Kajian	2017	1.348.070.000,00	0,00	0,00	1.348.070.000,00	0	0	1.348.070.000,00	0	1.348.070.000,00	0,00	0,00	-	1.348.070.000,00	0,00	
73	150100100160000015	Badan Perencanaan Pemabngunan, Penelitian, dan Pembanounan Daerah	1.5.3.1.1.6.1	11	Kajian	2017	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0	0	400.000.000,00	0	400.000.000,00	0,00	0,00	-	400.000.000,00	0,00	
74	150100100160000016	Badan Perencanaan Pemabngunan, Penelitian, dan Pembanounan Daerah	1.5.3.1.1.6.1	12	Kajian	2017	1.254.567.000,00	0,00	0,00	1.254.567.000,00	0	0	1.254.567.000,00	0	1.254.567.000,00	0,00	0,00	-	1.254.567.000,00	0,00	
75	150100100160000017	Badan Perencanaan Pemabngunan, Penelitian, dan Pembanounan Daerah	1.5.3.1.1.6.1	13	Kajian	2017	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0	0	400.000.000,00	0	400.000.000,00	0,00	0,00	-	400.000.000,00	0,00	
76	150100100160000019	Badan Perencanaan Pemabngunan, Penelitian, dan Pembanounan Daerah	1.5.3.1.1.6.1	14	Kajian	2018	690.947.000,00	0,00	0,00	690.947.000,00	0	0	564.273.383,00	126.673.617	690.947.000,00	0,00	0,00	-	690.947.000,00	0,00	
77	150100100160000020	Badan Perencanaan Pemabngunan, Penelitian, dan Pembanounan Daerah	1.5.3.1.1.6.1	15	Kajian	2018	1.054.172.000,00	0,00	0,00	1.054.172.000,00	0	0	860.907.133,00	193.264.867	1.054.172.000,00	0,00	0,00	-	1.054.172.000,00	0,00	
78	150100100160000021	Badan Perencanaan Pemabngunan, Penelitian, dan Pembanounan Daerah	1.5.3.1.1.6.1	16	Kajian	2018	1.054.677.000,00	0,00	0,00	1.054.677.000,00	0	0	861.319.550,00	193.357.450	1.054.677.000,00	0,00	0,00	-	1.054.677.000,00	0,00	
79	150100100160000022	Badan Perencanaan Pemabngunan, Penelitian, dan Pembanounan Daerah	1.5.3.1.1.6.1	17	Kajian	2018	864.765.000,00	0,00	0,00	864.765.000,00	0	0	706.224.750,00	158.540.250	864.765.000,00	0,00	0,00	-	864.765.000,00	0,00	
80	150100100160000023	Badan Perencanaan Pemabngunan, Penelitian, dan Pembanounan Daerah	1.5.3.1.1.6.1	18	Kajian	2018	588.797.000,00	0,00	0,00	588.797.000,00	0	0	480.850.883,00	107.946.117	588.797.000,00	0,00	0,00	-	588.797.000,00	0,00	
81	150100100160000024	Badan Perencanaan Pemabngunan, Penelitian, dan Pembanounan Daerah	1.5.3.1.1.6.1	19	Kajian	2018	1.523.610.000,00	0,00	0,00	1.523.610.000,00	0	0	1.244.281.500,00	279.328.500	1.523.610.000,00	0,00	0,00	-	1.523.610.000,00	0,00	
82	150100100160000025	Badan Perencanaan Pemabngunan, Penelitian, dan Pembanounan Daerah	1.5.3.1.1.6.1	20	Kajian	2018	1.276.545.000,00	0,00	0,00	1.276.545.000,00	0	0	1.042.511.750,00	234.033.250	1.276.545.000,00	0,00	0,00	-	1.276.545.000,00	0,00	
83	150100100160000026	Badan Perencanaan Pemabngunan, Penelitian, dan Pembanounan Daerah	1.5.3.1.1.6.1	21	Kajian	2018	306.516.500,00	0,00	0,00	306.516.500,00	0	0	250.321.808,00	56.194.692	306.516.500,00	0,00	0,00	-	306.516.500,00	0,00	
84	150100100160000001	Badan Perencanaan Pemabngunan, Penelitian, dan Pembanounan Daerah	1.5.3.1.1.5.1	1	Software	2015	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0	0	125.000.000,00	0	125.000.000,00	0,00	0,00	-	125.000.000,00	0,00	
85	150100100160000002	Badan Perencanaan Pemabngunan, Penelitian, dan Pembanounan Daerah	1.5.3.1.1.5.1	2	Software	2015	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0	0	100.000.000,00	0	100.000.000,00	0,00	0,00	-	100.000.000,00	0,00	
86	150100100160000003	Badan Perencanaan Pemabngunan, Penelitian, dan Pembanounan Daerah	1.5.3.1.1.5.1	3	Software	2017	148.750.000,00	0,00	0,00	148.750.000,00	0	0	148.750.000,00	0	148.750.000,00	0,00	0,00	-	148.750.000,00	0,00	
87	150100100160000004	Badan Perencanaan Pemabngunan, Penelitian, dan Pembanounan Daerah	1.5.3.1.1.5.1	4	Software	2017	135.300.000,00	0,00	0,00	135.300.000,00	0	0	135.300.000,00	0	135.300.000,00	0,00	0,00	-	135.300.000,00	0,00	
88	150100100160000018	Badan Perencanaan Pemabngunan, Penelitian, dan Pembanounan Daerah	1.5.3.1.1.5.1	5	Software	2017	175.600.000,00	0,00	0,00	175.600.000,00	0	0	175.600.000,00	0	175.600.000,00	0,00	0,00	-	175.600.000,00	0,00	
89	150100100160000027	Badan Perencanaan Pemabngunan, Penelitian, dan Pembanounan Daerah	1.5.3.1.1.6.1	22	Kajian	2023	499.667.000,00	0,00	0,00	499.667.000,00	3	10	16.655.567,00	0	16.655.567,00	49.966.700,00	49.966.700,00	99.933.400,00	116.588.967,00	383.078.033,00	
90	150100100160000028	Badan Perencanaan Pemabngunan, Penelitian, dan Pembanounan Daerah	1.5.3.5																		

NO.	ID OPD & Aset	Nama UPB	Kode Aset	No Reg	Nama Aset	Tahun	Saldo Audited 2023	Koreksi Saldo Awal	Penambahan 2024	Nilai Perolehan 2024	Sisa masa		Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2023	Koreksi Saldo Awal Amortisasi	Akumulasi Amortisasi 01 Januari 2024	Beban Amortisasi Tahun 2024			Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2024	Nilai Buku 2024
											Tahun	Bulan				Semester 1	Semester 2	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 + 16	18 = 8 - 17
107	15010010016000045	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah	1.5.3.1.1.6.1	10	Kajian	2024	0,00	0,00	411.810.000,00	411.810.000,00	4	7	0,00	0	0,00	0,00	34.317.500,00	34.317.500,00	34.317.500,00	377.492.500,00
108	15010010016000046	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah	1.5.3.1.1.6.1	11	Kajian	2024	0,00	0,00	666.700.000,00	666.700.000,00	4	7	0,00	0	0,00	0,00	55.558.333,00	55.558.333,00	55.558.333,00	611.141.667,00
109	15010010016000047	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah	1.5.3.1.1.6.1	12	Kajian	2024	0,00	0,00	286.935.000,00	286.935.000,00	4	7	0,00	0	0,00	0,00	23.911.250,00	23.911.250,00	23.911.250,00	263.023.750,00
		Sub Total Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah					22.871.823.250,00	0,00	5.535.539.500,00	28.407.362.750,00			17.851.497.426,00	1.349.338.741	19.200.836.167,00	544.699.900,00	902.694.858,00	1.447.394.758,00	20.648.230.925,00	7.759.131.825,00
97	10010010016000001	Dinas Kependudukan dan Catatan sipil	1.5.3.1.1.5.1	1	Software	2021	1.299.999,00	0,00	0,00	1.299.999,00	1	6	650.000,00	0	650.000,00	130.000,00	130.000,00	260.000,00	910.000,00	389.999,00
98	10010010016000002	Dinas Kependudukan dan Catatan sipil	1.5.3.1.1.5.1	2	Software	2021	3.413.500,00	0,00	0,00	3.413.500,00	1	9	1.592.967,00	0	1.592.967,00	241.350,00	241.350,00	482.700,00	2.275.867,00	1.137.633,00
99	10010010016000003	Dinas Kependudukan dan Catatan sipil	1.5.3.1.1.5.1	3	Software	2021	2.427.600,00	0,00	0,00	2.427.600,00	1	10	1.051.960,00	0	1.051.960,00	242.760,00	242.760,00	485.520,00	1.537.480,00	890.120,00
100	10010010016000004	Dinas Kependudukan dan Catatan sipil	1.5.3.1.1.5.1	4	Software	2021	6.874.000,00	0,00	0,00	6.874.000,00	1	11	2.864.167,00	0	2.864.167,00	687.400,00	687.400,00	1.374.800,00	4.238.967,00	2.635.033,00
101	10010010016000005	Dinas Kependudukan dan Catatan sipil	1.5.3.1.1.5.1	5	Software	2023	98.488.288,00	0,00	0,00	98.488.288,00	3	7	8.207.358,00	(1)	8.207.357,00	9.848.829,00	9.848.829,00	19.097.658,00	27.905.015,00	70.583.273,00
102	10010010016000006	Dinas Kependudukan dan Catatan sipil	1.5.3.1.1.5.1	6	Software	2023	49.600.000,00	0,00	0,00	49.600.000,00	3	7	4.133.334,00	(2)	4.133.334,00	4.960.000,00	4.960.000,00	9.920.000,00	14.053.333,00	36.546.667,00
103	10010010016000007	Dinas Kependudukan dan Catatan sipil	1.5.3.1.1.5.1	7	Software	2023	98.068.018,00	0,00	0,00	98.068.018,00	3	7	8.172.335,00	0	8.172.335,00	9.808.802,00	9.808.802,00	19.613.604,00	27.785.939,00	70.292.079,00
		Sub Total Dinas Kependudukan dan Catatan sipil					260.171.405,00	0,00	0,00	260.171.405,00			26.672.121,00	(3)	26.672.119,00	26.017.141,00	26.017.141,00	52.034.282,00	78.706.401,00	181.465.004,00
104	17010010016000001	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	1.5.3.1.1.6.1	1	Kajian	2019	450.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00	0	0	405.000.000,00	0	405.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	450.000.000,00	0,00
105	17010010016000004	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	1.5.3.1.1.6.1	1	Software	2021	99.880.000,00	0,00	0,00	99.880.000,00	1	5	51.604.667,00	0	51.604.667,00	9.988.000,00	9.988.000,00	19.976.000,00	71.580.667,00	28.299.333,00
106	17010010016000002	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	1.5.3.1.1.6.2	4	Kajian Lainnya	2021	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	2	11	145.833.333,00	0	145.833.333,00	35.000.000,00	35.000.000,00	70.000.000,00	215.833.333,00	134.166.667,00
107	17010010016000003	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	1.5.3.1.1.6.1	3	Kajian	2021	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	1	11	166.666.667,00	0	166.666.667,00	40.000.000,00	40.000.000,00	80.000.000,00	246.666.667,00	153.333.333,00
108	17010010016000005	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	1.5.3.1.1.6.1	4	Kajian	2023	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	3	11	5.000.000,00	0	5.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	65.000.000,00	235.000.000,00
		Sub Total Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga					1.599.880.000,00	0,00	0,00	1.599.880.000,00			774.104.667,00	0	774.104.667,00	159.988.000,00	114.988.000,00	274.976.000,00	1.049.080.667,00	550.799.333,00
109	13020010016000001	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	1.5.3.1.1.6.1	1	Kajian	2023	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	3	6	30.000.000,00	0	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	90.000.000,00	210.000.000,00
110	13020010016000002	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	1.5.3.1.1.6.1	2	Kajian	2023	325.000.000,00	0,00	0,00	325.000.000,00	3	11	5.416.667,00	0	5.416.667,00	32.500.000,00	32.500.000,00	65.000.000,00	70.416.667,00	254.583.333,00
111	13020010016000003	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	1.5.3.1.1.6.1	1	Software	2023	24.600.000,00	0,00	0,00	24.600.000,00	3	10	2.460.000,00	0	2.460.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00	4.920.000,00	5.740.000,00	820.000,00
112	13020010016000004	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	1.5.3.1.1.6.1	2	Software	2023	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00	3	10	1.650.000,00	0	1.650.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	9.900.000,00	11.550.000,00	37.950.000,00
113	13020010016000005	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	1.5.3.1.1.6.1	3	Kajian	2024	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	4	5	0,00	0	0,00	3.333.333,00	20.000.000,00	23.333.333,00	23.333.333,00	176.666.667,00
114	13020010016000006	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	1.5.3.1.1.6.1	4	Kajian	2024	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	4	7	0,00	0	0,00	0,00	16.666.667,00	16.666.667,00	16.666.667,00	183.333.333,00
		Sub Total Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu					699.100.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00			37.886.667,00	0	37.886.667,00	73.243.333,00	106.576.667,00	179.820.000,00	217.706.667,00	881.393.333,00
113	19010010016000001	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	1.5.3.1.1.5.1	1	Software	2013	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00	0	0	49.500.000,00	0	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00	0,00	0,00
114	19010010016000002	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	1.5.3.1.1.5.1	2	Software	2014	94.950.000,00	0,00	0,00	94.950.000,00	0	0	94.950.000,00	0	94.950.000,00	0,00	0,00	94.950.000,00	0,00	0,00
115	19010010016000003	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	1.5.3.1.1.5.1	3	Software	2022	398.069.500,00	0,00	0,00	398.069.500,00	2	10	92.882.868,00	(46.412.785)	46.470.083,00	19.915.750,00	19.915.750,00	39.831.500,00	86.301.583,00	311.767.917,00
116	19010010016000004	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	1.5.3.1.1.6.1	1	Kajian	2023	99.345.000,00	0,00	0,00	99.345.000,00	3	11	1.655.750,00	0	1.655.750,00	9.934.500,00	9.934.500,00	19.869.000,00	21.524.750,00	77.820.250,00
117	19010010016000005	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	1.5.3.1.1.6.1	2	Kajian	2023	99.345.000,00	0,00	0,00	99.345.000,00	3	11	1.655.750,00	0	1.655.750,00	9.934.500,00	9.934.500,00	19.869.000,00	21.524.750,00	77.820.250,00
118	19010010016000006	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	1.5.3.1.1.6.1	3	Kajian	2023	99.345.000,00	0,00	0,00	99.345.000,00	3	11	1.655.750,00	0	1.655.750,00	9.934.500,00	9.934.500,00	19.869.000,00	21.524.750,00	77.820.250,00
119	19010010016000007	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	1.5.3.1.1.6.1	4	Kajian	2023	99.345.000,00	0,00	0,00	99.345.000,00	3	11	1.655.750,00	0	1.655.750,00	9.934.500,00	9.934.500,00	19.869.000,00	21.524.750,00	77.820.250,00
120	19010010016000008	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	1.5.3.1.1.5.1	4	Software	2023	199.500.000,00	0,00	0,00	199.500.000,00	3	10	6.650.000,00	0	6.650.000,00	19.950.000,00	19.950.000,00	39.900.000,00	46.550.000,00	152.950.000,00
121	19010010016000009	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	1.5.3.1.1.5.2	1	Software Lainnya	2024	0,00	0,00	94.815.000,00	94.815.000,00	4	0	0,00	0	0,00	9.481.500,00	9.481.500,00	18.963.000,00	18.963.000,00	75.852.000,00
122	19010010016000010	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	1.5.3.1.1.5.2	2	Software Lainnya	2024	0,00	0,00	40.722.000,00	40.722.000,00	4	0	0,00	0	0,00	4.072.200,00	4.072.200,00	8.144.400,00	8.144.400,00	32.577.600,00
		Sub Total Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan					1.139.399.500,00	0,00	135.537.000,00	1.274.936.500,00			250.605.868,00	(46.412.785)	204.193.083,00	93.157.450,00	93.157.450,00	186.314.900,00	390.507.983,00	884.428.517,00
121	18030010016000001	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.5.3.1.1.5.2	1	Software Lainnya	2023	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	3	10	5.000.000,00	0	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00	115.000.000,00
122	18030010016000002	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.5.3.1.1.5.1	1	Software	2023	199.000.000,00	0,00	0,00	199.000.000,00	3	10	6.633.334,00	(1)	6.633.333,00	19.900.000,00	19.900.000,00	39.800.000,00	46.433.333,00	152.566.667,00
123	18030010016000003	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.5.3.1.1.6.1	1	Kajian	2023	730.019.900,00	0,00	0,00	730.019.900,00	3	10	24.333.997,00	0	24.333.997,00	73.001.990,00	73.001.990,00	146.003.980,00	170.337.977,00	243.339.967,00
		Sub Total Badan Penanggulangan Bencana Daerah					1.079.019.900,00	0,00	0,00	1.079.019.900,00			35.967.331,00	(1)	35.967.330,00	107.901.990,00	107.901.990,00	215.803.980,00	251.771.310,00	510.906.634,00
124	05010010016000002	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.5.3.1.1.6.1	2	Kajian	2020	773.382.500,00	0,00	0,00	773.382.500,00	0	11	476.919.208,00	0	476.919.208,00	77.338.250,00	77.338.250,00	154.676.500,00	631.595.708,00	141.786.792,00
125	05010010016000001	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.5.3.1.1.6.1	1	Kajian	2020	1.267.915.000,00	0,00	0,00	1.267.915.000,00	0	11	781.880.917,00	0	781.880.917,00	126.791.500,00	126.791.500,00	253.583.000,00	1.035.463.917,00	232.45

No.	ID OPD & Aset	Nama UPB	Kode Aset	No Reg	Nama Aset	Tahun	Saldo Audited 2023	Koreksi Saldo Awal	Penambahan 2024	Nilai Perolehan 2024	Sisa masa		Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2023	Koreksi Saldo Awal Amortisasi	Akumulasi Amortisasi 01 Januari 2024	Beban Amortisasi Tahun 2024					Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2024	Nilai Buku 2024
											Tahun	Bulan				13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 + 16		
140	05010010016000017	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.5.3.1.1.6.1	12	Kajian	2023	328.600.000,00	0,00	0,00	328.600.000,00	3	6	32.860.000,00	0	32.860.000,00	32.860.000,00	32.860.000,00	65.720.000,00	98.580.000,00	230.020.000,00		
141	05010010016000018	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.5.3.1.1.6.1	13	Kajian	2023	1.300.000.000,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00	3	11	21.666.667,00	0	21.666.667,00	130.000.000,00	130.000.000,00	260.000.000,00	281.666.667,00	1.018.333.333,00		
142	05010010016000019	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.5.3.1.1.6.1	14	Kajian	2023	647.500.000,00	0,00	0,00	647.500.000,00	3	10	21.583.334,00	(1)	21.583.333,00	64.750.000,00	64.750.000,00	129.500.000,00	151.083.333,00	496.416.667,00		
143	05010010016000020	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.5.3.1.1.6.1	15	Kajian	2023	1.395.630.000,00	0,00	0,00	1.395.630.000,00	3	10	46.521.000,00	0	46.521.000,00	139.563.000,00	139.563.000,00	279.126.000,00	325.647.000,00	1.069.983.000,00		
144	05010010016000021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.5.3.1.1.6.1	16	Kajian	2023	798.400.000,00	0,00	0,00	798.400.000,00	3	10	26.613.334,00	(1)	26.613.333,00	79.840.000,00	79.840.000,00	159.680.000,00	186.293.333,00	612.106.667,00		
145	05010010016000022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.5.3.1.1.6.1	17	Kajian	2023	838.000.000,00	0,00	0,00	838.000.000,00	3	10	27.933.334,00	(1)	27.933.333,00	83.800.000,00	83.800.000,00	167.600.000,00	195.533.333,00	642.466.667,00		
146	05010010016000023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.5.3.1.1.6.1	18	Kajian	2023	642.600.000,00	0,00	0,00	642.600.000,00	3	10	21.420.000,00	0	21.420.000,00	64.260.000,00	64.260.000,00	128.520.000,00	149.940.000,00	492.660.000,00		
147	05010010016000024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.5.3.1.1.6.1	19	Kajian	2023	3.898.000.000,00	0,00	0,00	3.898.000.000,00	3	3	584.700.000,00	0	584.700.000,00	389.800.000,00	389.800.000,00	779.600.000,00	1.364.300.000,00	2.533.700.000,00		
148	05010010016000025	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.5.3.1.1.6.1	20	Kajian	2023	1.648.000.000,00	0,00	0,00	1.648.000.000,00	3	3	247.200.000,00	0	247.200.000,00	164.800.000,00	164.800.000,00	329.600.000,00	576.800.000,00	1.071.200.000,00		
149	05010010016000026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.5.3.1.1.6.1	21	Kajian	2023	99.700.000,00	0,00	0,00	99.700.000,00	3	8	6.646.667,00	0	6.646.667,00	9.970.000,00	9.970.000,00	19.940.000,00	26.586.667,00	73.113.333,00		
150	05010010016000027	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.5.3.1.1.6.1	22	Kajian	2023	749.000.000,00	0,00	0,00	749.000.000,00	3	11	12.483.334,00	(1)	12.483.333,00	74.900.000,00	74.900.000,00	149.800.000,00	162.283.333,00	586.716.667,00		
151	05010010016000028	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.5.3.1.1.5.1	2	Software	2023	199.500.000,00	0,00	0,00	199.500.000,00	3	11	3.325.000,00	0	3.325.000,00	19.950.000,00	19.950.000,00	39.900.000,00	43.225.000,00	156.275.000,00		
152	05010010016000029	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.5.3.1.1.6.1	23	Kajian	2023	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	3	11	5.833.334,00	(1)	5.833.333,00	35.000.000,00	35.000.000,00	70.000.000,00	75.833.333,00	274.166.667,00		
153	05010010016000030	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.5.3.1.1.6.1	24	Kajian	2023	89.800.000,00	0,00	0,00	89.800.000,00	3	11	1.496.667,00	0	1.496.667,00	8.980.000,00	8.980.000,00	17.960.000,00	19.456.667,00	70.343.333,00		
154	05010010016000031	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.5.3.1.1.6.1	4	Kajian	2024	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	4	11	0,00	0	0,00	0,00	3.333.333,00	3.333.333,00	3.333.333,00	196.666.667,00		
155	05010010016000032	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.5.3.1.1.6.1	5	Kajian	2024	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	4	11	0,00	0	0,00	0,00	3.333.333,00	3.333.333,00	3.333.333,00	196.666.667,00		
156	05010010016000033	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.5.3.1.1.6.1	25	Kajian	2024	0,00	0,00	675.123.000,00	675.123.000,00	4	11	0,00	0	0,00	0,00	11.252.050,00	11.252.050,00	11.252.050,00	663.870.950,00		
157	05010010016000034	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.5.3.1.1.6.1	26	Kajian	2024	0,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	4	11	0,00	0	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	1.475.000.000,00		
158	05010010016000035	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.5.3.1.1.6.1	27	Kajian	2024	0,00	0,00	1.266.510.000,00	1.266.510.000,00	4	11	0,00	0	0,00	0,00	21.108.500,00	21.108.500,00	21.108.500,00	1.245.401.500,00		
159	05010010016000036	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.5.3.1.1.6.1	28	Kajian	2024	0,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	4	11	0,00	0	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	1.475.000.000,00		
160	05010010016000037	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.5.3.1.1.6.1	29	Kajian	2024	0,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	4	11	0,00	0	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	2.950.000.000,00		
161	05010010016000038	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.5.3.1.1.6.1	30	Kajian	2024	0,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	4	11	0,00	0	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	2.950.000.000,00		
162	05010010016000039	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.5.3.1.1.6.1	31	Kajian	2024	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	4	11	0,00	0	0,00	0,00	6.666.667,00	6.666.667,00	6.666.667,00	393.333.333,00		
163	05010010016000040	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.5.3.1.1.6.1	32	Kajian	2024	0,00	0,00	1.488.510.000,00	1.488.510.000,00	4	11	0,00	0	0,00	0,00	24.808.500,00	24.808.500,00	24.808.500,00	1.463.701.500,00		
164	05010010016000041	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.5.3.1.1.6.1	33	Kajian	2024	0,00	0,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	4	11	0,00	0	0,00	0,00	28.333.333,00	28.333.333,00	28.333.333,00	1.671.666.667,00		
165	05010010016000042	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.5.3.1.1.6.1	34	Kajian	2024	0,00	0,00	1.497.945.000,00	1.497.945.000,00	4	11	0,00	0	0,00	0,00	24.965.750,00	24.965.750,00	24.965.750,00	1.472.979.250,00		
166	05010010016000043	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.5.3.1.1.6.1	35	Kajian	2024	0,00	0,00	888.000.000,00	888.000.000,00	4	11	0,00	0	0,00	0,00	14.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00	873.200.000,00		
167	05010010016000044	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.5.3.1.1.6.1	36	Kajian	2024	0,00	0,00	597.000.000,00	597.000.000,00	4	11	0,00	0	0,00	0,00	9.950.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00	587.050.000,00		
168	05010010016000045	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.5.3.1.1.6.1	37	Kajian	2024	0,00	0,00	597.000.000,00	597.000.000,00	4	11	0,00	0	0,00	0,00	9.950.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00	587.050.000,00		
169	05010010016000046	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.5.3.1.1.6.1	38	Kajian	2024	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	4	11	0,00	0	0,00	0,00	3.333.333,00	3.333.333,00	3.333.333,00	196.666.667,00		
170	05010010016000047	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.5.3.1.1.6.1	39	Kajian	2024	0,00	0,00	597.000.000,00	597.000.000,00	4	11	0,00	0	0,00	0,00	9.950.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00	587.050.000,00		
171	05010010016000048	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.5.3.1.1.6.1	40	Kajian	2024	0,00	0,00	998.000.000,00	998.000.000,00	4	11	0,00	0	0,00	0,00	16.633.333,00	16.633.333,00	16.633.333,00	981.366.667,00		
172	05010010016000049	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.5.3.1.1.6.1	41	Kajian	2024	0,00	0,00	797.940.000,00	797.940.000,00	4	11	0,00	0	0,00	0,00	13.299.000,00	13.299.000,00	13.299.000,00	784.641.000,00		
173	05010010016000050	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.5.3.1.1.6.1	42	Kajian	2024	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	4	11	0,00	0	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	8.333.333,00	491.666.667,00		
174	05010010016000051	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.5.3.1.1.6.1	43	Kajian	2024	0,00	0,00	99.750.000,00	99.75												

NO.	ID OPD & Aset	Nama UPB	Kode Aset	No Reg	Nama Aset	Tahun	Saldo Audited 2023	Koreksi Saldo Awal	Penambahan 2024	Nilai Perolehan 2024	Sisa masa		Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2023	Koreksi Saldo Awal Amortisasi	Akumulasi Amortisasi 01 Januari 2024	Beban Amortisasi Tahun 2024				Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2024	Nilai Buku 2024
											Tahun	Bulan				Semester 1	Semester 2	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 + 16	18 = 8 - 17	
172	16010010016000012	Dinas Lingkungan Hidup	1.5.3.1.1.6.2	13	Kajian Lainnya	2024	0,00	0,00	498.500.000,00	498.500.000,00	4	11	0,00	0	0,00	0,00	8.308.333,00	8.308.333,00	8.308.333,00	490.191.667,00	
173	16010010016000013	Dinas Lingkungan Hidup	1.5.3.1.1.6.2	14	Kajian Lainnya	2024	0,00	0,00	498.500.000,00	498.500.000,00	4	11	0,00	0	0,00	0,00	8.308.333,00	8.308.333,00	8.308.333,00	490.191.667,00	
		Sub Total Dinas Lingkungan Hidup					3.813.790.010,00	0,00	2.531.119.200,00	6.344.909.210,00			434.446.312,00	(1)	434.446.311,00	381.379.001,00	453.489.320,00	834.868.321,00	1.269.314.632,00	5.075.594.578,00	
169	210100100160000001	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	1.5.3.1.1.5.2	1	Software Lainnya	2022	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	2	5	7.916.667,00		7.916.667,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	12.916.667,00	12.083.333,00	
170	210100100160000002	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	1.5.3.1.1.5.2	2	Software Lainnya	2023	194.971.000,00	0,00	0,00	194.971.000,00	3	2	32.495.167,00		32.495.167,00	19.497.100,00	19.497.100,00	38.994.200,00	71.489.367,00	123.481.633,00	
171	210100100160000003	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	1.5.3.1.1.5.2	3	Software Lainnya	2023	99.150.000,00	0,00	0,00	99.150.000,00	3	5	11.567.500,00		11.567.500,00	9.915.000,00	9.915.000,00	19.830.000,00	31.397.500,00	67.752.500,00	
172	210100100160000004	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	1.5.3.1.1.5.2	4	Software Lainnya	2023	98.870.000,00	0,00	0,00	98.870.000,00	3	4	13.182.667,00		13.182.667,00	9.887.000,00	9.887.000,00	19.774.000,00	32.956.667,00	65.913.333,00	
173	210100100160000005	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	1.5.3.1.1.5.2	5	Software Lainnya	2023	198.500.000,00	0,00	0,00	198.500.000,00	3	9	9.925.000,00		9.925.000,00	19.850.000,00	19.850.000,00	39.700.000,00	48.625.000,00	148.875.000,00	
174	210100100160000006	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	1.5.3.1.1.6.1	1	Kajian	2023	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	3	11	5.833.334,00	(1)	5.833.333,00	35.000.000,00	35.000.000,00	70.000.000,00	75.833.333,00	274.166.667,00	
175	210100100160000007	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	1.5.3.1.1.6.1	2	Kajian	2023	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	3	11	5.833.334,00	(1)	5.833.333,00	35.000.000,00	35.000.000,00	70.000.000,00	75.833.333,00	274.166.667,00	
176	210100100160000008	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	1.5.3.1.1.5.1	1	Software	2024	0,00	0,00	323.400.000,00	323.400.000,00	4	6	0,00		0,00	0,00	32.340.000,00	32.340.000,00	32.340.000,00	291.060.000,00	
		Sub Total Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian					1.316.491.000,00	0,00	323.400.000,00	1.639.891.000,00			86.753.669,00	(2)	86.753.667,00	131.640.100,00	163.989.100,00	295.638.200,00	382.391.867,00	1.257.499.133,00	
176	040100200160000001	Kantor Pengelola Perbatasan	1.5.3.1.1.5.1	1	Software	2023	97.800.000,00	0,00	0,00	97.800.000,00	3	6	11.410.000,00	(1.630.000)	9.780.000,00	9.780.000,00	9.780.000,00	19.560.000,00	29.340.000,00	68.460.000,00	
176	040100200160000002	Kantor Pengelola Perbatasan	1.5.3.1.1.6.1	1	Software	2024	0,00	0,00	499.078.200,00	499.078.200,00	4	11	0,00	0	0,00	0,00	8.317.970,00	8.317.970,00	8.317.970,00	490.760.230,00	
		Sub Total Kantor Pengelola Perbatasan					97.800.000,00	0,00	499.078.200,00	596.878.200,00			11.410.000,00	(1.630.000)	9.780.000,00	9.780.000,00	18.097.970,00	27.877.970,00	37.657.970,00	559.220.230,00	
177	110100100160000001	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.5.3.1.1.5.1	1	Software	2023	3.333.334,00	0,00	0,00	100.000.000,00	3	10	3.333.333,00	(1)	3.333.333,00	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	23.333.333,00	76.666.667,00	
178	110100100160000002	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.5.3.1.1.6.2	1	Kajian Lainnya	2024	0,00	0,00	749.963.568,00	749.963.568,00	4	10	0,00		0,00	0,00	24.998.786,00	24.998.786,00	24.998.786,00	724.964.782,00	
178	110100100160000003	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.5.3.1.1.6.2	2	Kajian Lainnya	2024	0,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	4	7	0,00		0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	165.000.000,00	
180	110100100160000004	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.5.3.1.1.6.2	3	Kajian Lainnya	2024	0,00	0,00	268.438.000,00	268.438.000,00	4	7	0,00		0,00	0,00	22.369.833,00	22.369.833,00	22.369.833,00	246.068.167,00	
181	110100100160000005	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.5.3.1.1.6.2	4	Kajian Lainnya	2024	0,00	0,00	220.000.000,00	220.000.000,00	4	7	0,00		0,00	0,00	18.333.333,00	18.333.333,00	18.333.333,00	201.666.667,00	
182	110100100160000006	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.5.3.1.1.6.2	5	Kajian Lainnya	2024	0,00	0,00	328.217.800,00	328.217.800,00	4	7	0,00		0,00	0,00	27.351.483,00	27.351.483,00	27.351.483,00	300.866.317,00	
183	110100100160000007	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.5.3.1.1.6.2	6	Kajian Lainnya	2024	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	4	7	0,00		0,00	0,00	16.666.667,00	16.666.667,00	16.666.667,00	183.333.333,00	
184	110100100160000008	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.5.3.1.1.6.2	7	Kajian Lainnya	2024	0,00	0,00	296.973.600,00	296.973.600,00	4	7	0,00		0,00	0,00	24.747.800,00	24.747.800,00	24.747.800,00	272.225.800,00	
185	110100100160000009	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.5.3.1.1.6.2	8	Kajian Lainnya	2024	0,00	0,00	198.376.865,00	198.376.865,00	4	10	0,00		0,00	0,00	6.612.562,00	6.612.562,00	6.612.562,00	191.764.303,00	
186	110100100160000010	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.5.3.1.1.6.2	9	Kajian Lainnya	2024	0,00	0,00	449.630.000,00	449.630.000,00	4	10	0,00		0,00	0,00	14.987.667,00	14.987.667,00	14.987.667,00	434.642.333,00	
187	110100100160000011	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.5.3.1.1.6.2	10	Kajian Lainnya	2024	0,00	0,00	394.338.855,00	394.338.855,00	4	10	0,00		0,00	0,00	13.144.629,00	13.144.629,00	13.144.629,00	381.194.226,00	
		Sub Total Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian					3.333.334,00	0,00	3.285.938.688,00	3.385.938.688,00			3.333.334,00		3.333.333,00	10.000.000,00	194.212.760,00	204.212.760,00	207.546.093,00	3.178.392.595,00	
179	140100100160000001	Inspektorat	1.5.3.1.1.5.1	1	Software	2023	3.293.634,00	0,00	0,00	98.809.000,00	3	10	3.293.634,00	(1)	3.293.633,00	9.880.900,00	9.880.900,00	19.761.800,00	23.055.433,00	75.753.567,00	
180	140100100160000002	Inspektorat	1.5.3.1.1.5.1	2	Software	2024	0,00	0,00	98.240.000,00	98.240.000,00	4	4	0,00		0,00	3.274.667,00	9.824.000,00	13.098.667,00	13.098.667,00	85.141.333,00	
		Sub Total Inspektorat					3.293.634,00	0,00	98.240.000,00	197.040.000,00			3.293.634,00	(1)	3.293.633,00	13.155.567,00	19.704.900,00	32.860.467,00	36.154.100,00	160.894.900,00	
181	130300100160000001	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.5.3.1.1.5.1	1	Software	2023	13.291.734,00	0,00	0,00	199.376.000,00	3	8	13.291.734,00	(1)	13.291.733,00	19.937.600,00	19.937.600,00	39.875.200,00	53.166.933,00	146.209.067,00	
182	130300100160000002	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.5.3.1.1.5.1	2	Software	2024	0,00	0,00	178.500.000,00	178.500.000,00	4	10	0,00		0,00	0,00	5.950.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00	172.550.000,00	
183	130300100160000003	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.5.3.1.1.5.1	3	Software	2024	0,00	0,00	198.445.800,00	198.445.800,00	4	10	0,00		0,00	0,00	6.614.860,00	6.614.860,00	6.614.860,00	191.830.940,00	
		Sub Total Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah					13.291.734,00	0,00	376.945.800,00	576.321.800,00			13.291.734,00	(1)	13.291.733,00	19.937.600,00	32.502.460,00	52.440.060,00	65.731.793,00	510.590.007,00	
180	500300100160000001	Kecamatan Long Bagan	1.5.3.1.1.5.2	1	Software Lainnya	2022	97.902.000,00	0,00	0,00	97.902.000,00	2	11	21.212.100,00		21.212.100,00	9.790.200,00	9.790.200,00	19.580.400,00	40.792.500,00	57.109.500,00	
		Sub Total Kecamatan Long Bagan					97.902.000,00	0,00	0,00	97.902.000,00			21.212.100,00		21.212.100,00	9.790.200,00	9.790.200,00	19.580.400,00	40.792.500,00	57.109.500,00	
		TOTAL ATB KABUPATEN MAHAKAM ULU					86.806.285.092,00	0,00	45.087.866.981,00	132.555.395.971,00			36.253.839.571,00	1.457.485.636,00	37.711.325.207,00	6.865.093.404,00	8.468.030.502,00	15.333.123.906,00	53.044.449.113,00	79.194.044.902,00	

06



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
ASET LAIN - LAIN
PER 31 DESEMBER 2024

No	Keterangan	Nilai	
A.	ASET LAIN-LAIN		
1	Aset Rusak Berat (Nilai Realisasi Bersih)	Rp	63.590.500.147,00
2	Aset Lainnya (aset SMA/SMK yang akan diserahkan ke Provinsi)	Rp	13.430.396.668,00
3	Aset Lainnya (aset Dinas Pendidikan yang akan diserahkan ke Swasta yaitu SD WR Soepratman)	Rp	197.769.167,00
4	Aset Pinjam Pakai Bagian Umum Sekretariat Daerah	Rp	1.613.290.564,89
TOTAL		Rp	78.831.956.546,89



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
ASET RUSAK BERAT
PER 31 DESEMBER 2024

NO	UPB	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	Neraca
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.629.962.211,00	1.503.431.217,00	8.126.530.994,00
2	SMP Negeri 1 Long Apari	1.303.694.000,00	60.071.520,00	1.243.622.480,00
3	SMP Negeri 1 Long Pahangai	128.237.000,00	89.655.667,00	38.581.333,00
4	SMP Negeri 2 Long Pahangai	57.000.000,00	51.837.503,00	5.162.497,00
5	SMP Negeri 1 Long Bagun	544.617.507,00	377.736.335,00	166.881.172,00
6	SMP Negeri 2 Long Bagun	91.650.000,00	54.342.500,00	37.307.500,00
7	SMP Negeri 3 Long Bagun	76.500.000,00	47.559.720,00	28.940.280,00
8	SMP Negeri 4 Long Bagun	0,00	0,00	0,00
9	SMP Negeri 5 Long Bagun	5.000.000,00	2.812.500,00	2.187.500,00
10	SMP Negeri 1 Laham	45.000.000,00	37.150.000,00	7.850.000,00
11	SMP Negeri 2 Laham	0,00	0,00	0,00
12	SMP Negeri 1 Long Hubung	485.349.351,00	284.102.179,00	201.247.172,00
13	SMP Negeri 2 Long Hubung	183.593.000,00	153.943.000,00	29.650.000,00
14	SMP Negeri 3 Long Hubung	62.475.000,00	45.861.249,00	16.613.751,00
15	SMP Negeri 4 Long Hubung	42.900.000,00	23.429.166,00	19.470.834,00
16	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.770.042.251,00	1.142.422.720,00	627.619.531,00
17	Puskesmas Long Apari	968.053.050,00	566.787.805,00	401.265.245,00
18	Puskesmas Long Pahangai	165.575.450,00	114.270.830,00	51.304.620,00
19	Puskesmas Long Bagun	754.404.000,00	286.709.493,00	467.694.507,00
20	Puskesmas Laham	232.342.955,00	72.513.981,00	159.828.974,00
21	Puskesmas Long Hubung	1.258.404.000,00	218.520.877,00	1.039.883.123,00
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	40.264.038.800,00	18.504.554.576,00	21.759.484.224,00
23	Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	51.250.000,00	11.713.547,00	39.536.453,00
24	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	181.356.515,00	123.944.432,00	57.412.083,00
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00
26	Dinas Lingkungan Hidup	8.479.400,00	2.162.204,00	6.317.196,00
27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	674.192.800,00	523.352.906,00	150.839.894,00
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	0,00	0,00	0,00
29	Dinas Perhubungan	9.412.574.259,00	3.053.642.326,00	6.358.931.933,00
30	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	225.650.000,00	154.128.750,00	71.521.250,00
31	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	31.325.100,00	6.530.210,00	24.794.890,00
32	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.512.345.500,00	85.168.495,00	1.427.177.005,00

[Handwritten signature]

NO	UPB	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	Neraca
1	2	3	4	5
33	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	654.551.550,00	419.848.035,00	234.703.515,00
34	Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00
35	Bagian Pengelolaan Perbatasan Negara	469.118.000,00	352.718.569,00	116.399.431,00
36	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	0,00	0,00	0,00
37	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	141.400.000,00	141.400.000,00	0,00
38	Bagian Kesejahteraan Rakyat	35.265.100,00	16.420.264,00	18.844.836,00
39	Bagian Umum	17.956.751.257,00	4.372.335.947,00	13.584.415.310,00
40	Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00
41	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	0,00	0,00	0,00
42	Sekretariat DPRD	1.220.790.600,00	751.038.406,00	469.752.194,00
43	Kecamatan Long Apari	3.802.580.000,00	1.969.049.416,00	1.833.530.584,00
44	Kecamatan Long Pahangai	1.363.974.000,00	375.961.717,00	988.012.283,00
45	Kecamatan Long Bagun	2.136.212.345,00	676.875.955,00	1.459.336.390,00
46	Kecamatan Laham	598.920.000,00	77.353.083,00	521.566.917,00
47	Kecamatan Long Hubung	1.461.166.000,00	381.689.333,00	1.079.476.667,00
48	Inspektorat	735.813.000,00	581.983.059,00	153.829.941,00
49	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.095.556.222,00	745.188.938,00	350.367.284,00
50	Badan Pendapatan Daerah	426.859.000,00	406.306.862,00	20.552.138,00
51	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	629.318.580,00	446.537.364,00	182.781.216,00
52	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	83.400.000,00	74.125.000,00	9.275.000,00
TOTAL		102.977.687.803,00	39.387.187.656,00	63.590.500.147,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
ASET LAIN - LAIN
PER 31 DESEMBER 2024

No	Keterangan	Nilai	
A.	ASET LAIN-LAIN		
1	Aset Rusak Berat (Nilai Realisasi Bersih)	Rp	63.590.500.147,00
2	Aset Lainnya (aset SMA/SMK yang akan diserahkan ke Provinsi)	Rp	13.430.396.668,00
3	Aset Lainnya (aset Dinas Pendidikan yang akan diserahkan ke Swasta yaitu SD WR Soepratman)	Rp	197.769.167,00
4	Aset Pinjam Pakai Bagian Umum Sekretariat Daerah	Rp	1.613.290.564,89
TOTAL		Rp	78.831.956.546,89



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
ASET LAINNYA (ASET DINAS PENDIDIKAN YANG AKAN DISERAHKAN KE SWASTA)
PER 31 DESEMBER 2024

No	Keterangan	Nilai Bruto 2024	Akumulasi Aset lain-lain	Saldo Akhir 2024
A.	ASET LAIN-LAIN			
1	Aset Lainnya (aset Dinas Pendidikan yang akan diserahkan ke Swasta yaitu SD WR Soepratman)	Rp 280.833.600,00	Rp 83.064.433,00	Rp 197.769.167,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
ASET PINJAM PAKAI BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PER 31 DESEMBER 2024

No	Keterangan	Nilai Bruto 2024	Akumulasi Aset lain-lain	Saldo Akhir 2024
A.	ASET LAIN-LAIN			
1	Aset Pinjam Pakai Bagian Umum Sekretariat Daerah	Rp 3.993.335.850,00	Rp 2.380.045.285,11	Rp 1.613.290.564,89



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
TREASURY DEPOSIT FACILITY
PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	SALDO 2023	REALISASI 2024	PENAMBAHAN 2024	SALDO 2024
1	DBH SDA Minyak Bumi 15%	5.972.666.000,00	-	1.240.185.000,00	7.212.851.000,00
2	DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota	4.855.543.000,00	-	-	4.855.543.000,00
3	DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota	35.491.000,00	-	-	35.491.000,00
4	DBH PPh Pasal 21	3.940.661.000,00	-	-	3.940.661.000,00
5	DBH PPh Pasal 25/29 OP	152.483.000,00	-	-	152.483.000,00
6	DBH SDA Gas Bumi 0.5%	462.729.000,00	-	-	462.729.000,00
7	DBH SDA Gas Bumi 30%	20.471.592.000,00	-	10.118.470.000,00	30.590.062.000,00
8	DBH SDA Kehutanan - IIUPH	2.131.520.000,00	-	6.000,00	2.131.526.000,00
9	DBH SDA Minerba- Iuran Tetap	446.393.000,00	-	238.848.000,00	685.241.000,00
10	DBH SDA Minerba- Royalti	875.930.908.000,00	35.725.863.446,00	105.360.710.000,00	945.565.754.554,00
11	Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	-	-	1.000,00	1.000,00
JUMLAH		914.399.986.000,00	35.725.863.446,00	116.958.220.000,00	995.632.342.554,00

[Handwritten Signature]



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK)
PER 31 DESEMBER 2024

Kode SKPD	SKPD	NILAI
5.02.4.01.0.00.23.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	38.210.631,00
1.02.2.14.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	495.495,00
JUMLAH		38.706.126,00

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters and a flourish.



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
REKAPITULASI PENDAPATAN TERIMA DIMUKA
PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	JUMLAH
I	PAJAK DAERAH	
	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	17.377.538,75
	Jasa Boga/Katering (Lebih Bayar/Non Ketetapan)	-
II	RETRIBUSI DAERAH	
	Penggunaan ruas jalan tertentu	-
	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	-
	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan	-
TOTAL		17.377.538,75

PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
REKAPITULASI HUTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2024

NO.	SKPD	JENIS UTANG BELANJA	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL	SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	PEMBAYARAN UTANG	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2024	SALDO AKHIR	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	10 = (6 + 8 + 9) - 7	11
1.01.2.22.5.04.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 198.670.000	Rp 198.670.000,00	
1.01.2.22.5.04.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 60.000.000,00	Rp -	Rp 60.000.000	Rp -	Rp -	Rp 60.000.000,00	
1.02.2.14.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	Utang Belanja Barang	Rp 539.983.390,00	Rp -	Rp 539.983.390	Rp 519.143.790	Rp 55.827.800	Rp 76.667.400,00	
1.02.2.14.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	Utang Belanja Jasa	Rp 482.504.697,00	Rp -	Rp 482.504.697	Rp 60.000.000	Rp 7.316.500	Rp 429.821.197,00	
1.02.2.14.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 993.369.000,00	Rp -	Rp 993.369.000	Rp 972.828.000	Rp -	Rp 20.541.000,00	
1.02.2.14.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp 222.228.864,00	Rp -	Rp 222.228.864	Rp 98.930.000	Rp -	Rp 123.298.864,00	
1.02.2.14.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 231.783.118,00	Rp -	Rp 231.783.118	Rp 186.411.118	Rp 381.668.000	Rp 427.040.000,00	
1.02.2.14.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	Utang Belanja Pemeliharaan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 33.200.000	Rp 33.200.000,00	
1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang	Rp 2.950.477.089,00	Rp -	Rp 2.950.477.089	Rp 2.076.708.000	Rp 9.385.065.458	Rp 10.258.834.546,79	
1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 576.361.000,00	Rp -	Rp 576.361.000	Rp 19.934.000	Rp -	Rp 556.427.000,00	
1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp 7.303.907.883,00	Rp -	Rp 7.303.907.883	Rp 4.934.174.882	Rp 1.542.842.991	Rp 3.912.575.991,87	
1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 756.900.000,00	Rp -	Rp 756.900.000	Rp 756.900.000	Rp -	Rp -	
1.05.0.00.0.00.26.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Utang Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp 292.007.960,00	Rp -	Rp 292.007.960	Rp 292.007.960	Rp -	Rp -	
1.06.2.08.0.00.05.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	Utang Belanja Jasa	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 194.688.573	Rp 194.688.573,00	
1.06.2.08.0.00.05.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	Utang Belanja Pegawai	Rp 9.885.018,00	Rp -	Rp 9.885.018	Rp 9.885.018	Rp -	Rp -	
2.11.0.00.0.00.06.0000	Dinas Lingkungan Hidup	Utang Belanja Pegawai	Rp 5.596.823,00	Rp 110,00	Rp 5.596.933	Rp 5.596.933	Rp -	Rp -	
2.12.0.00.0.00.07.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Utang Belanja Pegawai	Rp 5.596.823,00	Rp 110,00	Rp 5.596.933	Rp 5.596.933	Rp -	Rp -	
2.13.0.00.0.00.08.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	Utang Belanja Bantuan Keuangan	Rp 9.214.686.164,00	Rp -	Rp 9.214.686.164	Rp -	Rp -	Rp 9.214.686.164,00	
2.13.0.00.0.00.08.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	Utang Belanja Pegawai	Rp 16.790.799,00	Rp -	Rp 16.790.799	Rp -	Rp -	Rp 16.790.799,00	
2.15.0.00.0.00.09.0000	Dinas Perhubungan	Utang Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp 202.320.000,00	Rp -	Rp 202.320.000	Rp -	Rp -	Rp 202.320.000,00	
2.15.0.00.0.00.09.0000	Dinas Perhubungan	Utang Belanja Barang	Rp 358.867.000,00	Rp -	Rp 358.867.000	Rp -	Rp -	Rp 358.867.000,00	
2.15.0.00.0.00.09.0000	Dinas Perhubungan	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp 4.010.000,00	Rp -	Rp 4.010.000	Rp -	Rp -	Rp 4.010.000,00	
2.15.0.00.0.00.09.0000	Dinas Perhubungan	Utang Belanja Pegawai	Rp 16.790.799,00	Rp -	Rp 16.790.799	Rp 16.790.799	Rp -	Rp -	
2.16.2.21.2.20.10.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	Utang Belanja Pegawai	Rp 25.366.859,00	Rp -	Rp 25.366.859	Rp 25.366.859	Rp -	Rp -	
2.16.2.21.2.20.10.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	Utang Belanja Jasa	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.153.773.815	Rp 3.153.773.814,55	
2.18.0.00.0.00.11.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	Utang Belanja Pegawai	Rp 11.193.646,00	Rp -	Rp 11.193.646	Rp 11.193.646	Rp -	Rp -	
3.26.2.19.0.00.12.0000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Utang Belanja Pegawai	Rp 11.193.866,00	Rp -	Rp 11.193.866	Rp 11.193.866	Rp -	Rp -	
3.27.2.09.3.25.13.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Utang Belanja Pegawai	Rp 26.675.487,00	Rp -	Rp 26.675.487	Rp 26.675.487	Rp -	Rp -	
4.01.0.00.0.00.14.0000	Sekretariat Daerah	Utang Belanja Barang	Rp 77.200.000,00	Rp -	Rp 77.200.000	Rp 77.200.000	Rp 91.746.000	Rp 91.746.000,00	
4.01.0.00.0.00.14.0000	Sekretariat Daerah	Utang Belanja Pegawai	Rp 44.774.584,00	Rp -	Rp 44.774.584	Rp 44.774.584	Rp -	Rp -	
5.01.5.02.5.05.21.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Utang Belanja Jasa	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 41.070.000	Rp 41.070.000,00	
5.02.0.00.0.00.22.0000	Badan Pendapatan Daerah	Utang Belanja Pegawai	Rp 5.596.823,00	Rp -	Rp 5.596.823	Rp 5.596.823	Rp -	Rp -	
5.02.4.01.0.00.23.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Utang Belanja Pegawai	Rp 5.596.823,00	Rp -	Rp 5.596.823	Rp 5.596.823	Rp -	Rp -	
5.02.4.01.0.00.23.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Utang Belanja Tidak Terduga	Rp 4.760.000,00	Rp -	Rp 4.760.000	Rp -	Rp -	Rp 4.760.000,00	
5.03.5.04.0.00.24.0000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Utang Belanja Pegawai	Rp 54.659.602,00	Rp -	Rp 54.659.602	Rp 54.659.602	Rp -	Rp -	
6.01.0.00.0.00.21.0000	Inspektorat	Utang Belanja Pegawai	Rp 11.193.646,00	Rp -	Rp 11.193.646	Rp 11.193.646	Rp -	Rp -	

NO.	SKPD	JENIS UTANG BELANJA	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL	SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	PEMBAYARAN UTANG	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2024	SALDO AKHIR	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	10 = (6 + 8 + 9) - 7	11
7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Long Apari	Utang Belanja Pegawai	Rp 5.595.823,00	Rp -	Rp 5.595.823	Rp 5.595.823	Rp -	Rp -	
7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Long Pahangai	Utang Belanja Pegawai	Rp 4.288.195,00	Rp -	Rp 4.288.195	Rp 4.288.195	Rp -	Rp -	
Total Utang Belanja Pegawai			Rp 260.795.616	Rp 220,00	Rp 260.795.836	Rp 244.005.037	Rp -	Rp 16.790.799,00	
Total Utang Belanja Barang			Rp 3.926.527.479	Rp -	Rp 3.926.527.479	Rp 2.673.051.790	Rp 9.532.639.258	Rp 10.786.114.946,79	
Total Utang Belanja Jasa			Rp 482.504.697	Rp -	Rp 482.504.697	Rp 60.000.000	Rp 3.396.848.888	Rp 3.819.353.584,55	
Total Utang Belanja Pemeliharaan			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 33.200.000	Rp 33.200.000,00	
Total Utang Belanja Perjalanan Dinas			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
Total Utang Belanja Hibah			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
Total Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin			Rp 1.048.683.118	Rp -	Rp 1.048.683.118	Rp 943.311.118	Rp 381.668.000	Rp 487.040.000,00	
Total Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan			Rp 1.569.730.000	Rp -	Rp 1.569.730.000	Rp 992.762.000	Rp 198.670.000	Rp 775.638.000,00	
Total Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			Rp 7.530.146.747	Rp -	Rp 7.530.146.747	Rp 5.033.104.882	Rp 1.542.842.991	Rp 4.039.884.855,87	
Total Utang Belanja Aset Tetap Lainnya			Rp 494.327.960	Rp -	Rp 494.327.960	Rp 292.007.960	Rp -	Rp 202.320.000,00	
Total Utang Belanja Tidak Terduga			Rp 4.760.000	Rp -	Rp 4.760.000	Rp -	Rp -	Rp 4.760.000,00	
Total Utang Belanja Bantuan Keuangan			Rp 9.214.686.164	Rp -	Rp 9.214.686.164	Rp -	Rp -	Rp 9.214.686.164,00	
Total Hutang Belanja			24.532.161.781,00	220,00	24.532.162.001,00	10.238.242.787,00	15.085.869.136,21	29.379.788.350,21	

PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU DAFTAR KEGIATAN YANG TERMAUK DALAM HUTANG BELANJA PER 31 DESEMBER 2024												
Tahun Pengisian Rencana	Kode OPD	Nama OPD	Jenis Hutang Belanja	Uraian Nama Kegiatan/Pekerjaan	Nama Rekanan	Nomor Kontrak	SALDO UTANG 2023	Koreksi	saldo setelah koreksi	NOMOR SP2D	NILAI SP2D	SALDO UTANG 2024
2018	1.02.2.14.0.00.02.0000	Diras Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Hutang Beban	Pembayaran Obat-obatan	PT. ANUGRAH PAMINDO LESTARI	440.027123.00PPK- DINKES/2020/016	5.760.000,00	-	5.760.000,00	-	-	5.760.000,00
2018	1.02.2.14.0.00.02.0000	Diras Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Hutang Beban	Pembayaran tagihan claim SKTM dan RSUD. Aw. Sgairwae Samarinda	RSUD A WAHAB SUAHRANE SAMARINDA		176.179.902,00	-	176.179.902,00	-	-	176.179.902,00
2018	1.02.2.14.0.00.02.0000	Diras Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Hutang Jangka Pendek Lainnya	KAROSERI MOBIL	PT. ALFARAYA MITRABUNGA	440.027138.00PPK- DINKES/2020/0017	38.995.000,00	-	38.995.000,00	-	-	38.995.000,00
2018	2.15.0.00.0.00.09.0000	Diras Perhubungan	Hutang Beban	Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPPIDA) Kab. Mahakam Ulu			202.320.000,00	-	202.320.000,00	-	-	202.320.000,00
2018	2.15.0.00.0.00.09.0000	Diras Perhubungan	Hutang Beban	Penyelesaian Administrasi Pembangunan Tangga Tiban Ji. Datab Belau RT. 001 Kampung Long Huta	CV. ERA KERYA	027043D0GHUBAR- TUNJ2018	125.600.000,00	-	125.600.000,00	-	-	125.600.000,00
2018	2.15.0.00.0.00.09.0000	Diras Perhubungan	Hutang Beban	Pembangunan Tangga Tiban Sungai Perant Long Apai	CV. KARYA CELEBS	TS.130431PL.03SAPR AS-HUBM/J002017	103.850.000,00	-	103.850.000,00	-	-	103.850.000,00
2018	2.15.0.00.0.00.09.0000	Diras Perhubungan	Hutang Beban	Pembangunan Tangga Tiban dan Dermaga Dirang Osung Noha Tiba	CV. CAHAYA UTAMA	TS.130423PL.03SAPR AS-HUBM/J002017	106.700.000,00	-	106.700.000,00	-	-	106.700.000,00
2018	2.15.0.00.0.00.09.0000	Diras Perhubungan	Hutang Beban	Pembangunan tangga tiisan dan penyeberangan kung ulang	CV. TIGA PERMATA	TS.130448PL.04SAPR AS-HUBM/J002017	1.280.000,00	-	1.280.000,00	-	-	1.280.000,00
2018	2.15.0.00.0.00.09.0000	Diras Perhubungan	Hutang Beban	Pembangunan tangga tiisan dan gapura ku mulang	CV. TIGA PERMATA	TS.130476PL.04SAPR AS-HUBM/J002017	4.690.000,00	-	4.690.000,00	-	-	4.690.000,00
2018	2.15.0.00.0.00.09.0000	Diras Perhubungan	Hutang Beban	Pembangunan dermaga belau adad RT.07 Iham ulu	CV. FIRSHA MANDIRI	TS.130538PL.05SAPR AS-HUBM/J002017	3.217.000,00	-	3.217.000,00	-	-	3.217.000,00
2018	2.15.0.00.0.00.09.0000	Diras Perhubungan	Hutang Beban	Pembangunan tangga tiisan pukekmes Iham	CV. ANUGRAH CENDIKIA MANDIRI	TS.130547PL.05SAPR AS-HUBM/J002017	4.010.000,00	-	4.010.000,00	-	-	4.010.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Diras Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Penyelesaian Administrasi Semesta Jalan Kampung Lu Mulang (4 x 650 meter)	CV. TIGA MUTIARA	4205PK-075CK- APB000CPL.06/2020/016	309.531.120,00	-	309.531.120,00	-	-	309.531.120,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Diras Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Penyelesaian Administrasi Perumahan Jalan Sei. Kawai Long Gelawang	PT. KARYA NASIONAL ABADI	4205PK-075CK- APB000CPL.06/2020/016	18.326.000,00	-	18.326.000,00	-	-	18.326.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Diras Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Penyelesaian Administrasi Perumahan Jalan Darum Bang - Tagah Huras (8 km)	PT. BORNED KIDAH RAKA	4002218M- P4SPK/APB000CPL.06/2020/016	13.909.890,00	-	13.909.890,00	-	-	13.909.890,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Diras Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Penyelesaian Administrasi Perumahan Jalan Menaji Bumi Perumahan	CV. Sinar Putera	4006000M- S3SPK/APB000CPL.06/2020/016	35.900.000,00	-	35.900.000,00	-	-	35.900.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Diras Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Penyelesaian Administrasi Kegiatan Pengawasan Perumahan GedungKantor Balai Tahun Anggaran 2014			23.868.000,00	-	23.868.000,00	-	-	23.868.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Diras Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Penyelesaian Administrasi Perencanaan Pembangunan Jembatan Kampung Wara Pang Tahun Anggaran 2014			29.854.000,00	-	29.854.000,00	-	-	29.854.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Diras Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Perencanaan Pembangunan Rumah Gaset Kampung Mamah Besar			11.900.000,00	-	11.900.000,00	-	-	11.900.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Diras Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Perencanaan Pembangunan Rumah Gaset Bumi perumahan pramuka kab. Mahakam Ulu			9.848.000,00	-	9.848.000,00	-	-	9.848.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Diras Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Pengawasan semesta halaman sekolah SDN 007 kampung Mantas			14.900.000,00	-	14.900.000,00	-	-	14.900.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Diras Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Pembangunan MCK RT. 1-3 Long Tuyong			189.800.000,00	-	189.800.000,00	-	-	189.800.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Diras Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Pembangunan MCK Kombrasi 4PPL Kominkasi di Kampung Long Inqok Kecamatan Long Jalei " OAK Gerasan Belau - Santasi	CV. KARYA MURNI	6405PK-10LCK- P4SPK/APB000CPL.06/2020/016	273.241.000,00	-	273.241.000,00	-	-	273.241.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Diras Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Perencanaan Jalan Usaha Tani Blok A Long Hubung Ulu	CV. REVINDA PILAR UTAMA	0605PKPL.31PRC-APB D-PISDA/PUPR- MU/002017	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Diras Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Perencanaan Jalan Usaha Tani Blok B Long Hubung Ulu	CV. SACHO JAYA CONSULT	0605PKPL.32PRC-APB D-PISDA/PUPR- MU/002017	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Diras Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Perencanaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Melahan Segitara (120X4 4 METER)	CV. ARCHITLA BORNEO KONSULTAN	0605PKPL.42PRC-APB D-PISDA/PUPR- MU/002017	9.887.000,00	-	9.887.000,00	-	-	9.887.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Diras Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Perencanaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Hunge Ulu Long Lunuk	CV. RI N RA ARTHA KARYA	0605PKPL.11PRC-APB D-PISDA/PUPR- MU/002017	4.980.000,00	-	4.980.000,00	-	-	4.980.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Diras Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Pembangunan Jalan Usaha Tani Ungu Delang Krohng	CV. TIGA PERMATA	0605PKPL.04PRC- PISDA/PUPR-MU/002017	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Diras Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Perencanaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Dewag Tulang Delang Krohng	CV. BILANT TEKNIK KONSULTAN	0605PKPL.02PRC-APB D-PISDA/PUPR- MU/002017	4.980.000,00	-	4.980.000,00	-	-	4.980.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Diras Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Perencanaan Pembangunan Jalan usaha Tani Sungai Laj Datab Naha	CV. BILANT TEKNIK KONSULTAN	0605PKPL.13PRC-APB D-PISDA/PUPR- MU/002017	4.980.000,00	-	4.980.000,00	-	-	4.980.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Diras Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Perencanaan Pembangunan Pembukaan Jalan Usaha Tani Dengan Ukuran 1740 M Yang Berleksi di Sei Dading Perdatangan Dasi Perhubungan	CV. RIMA CPTA CONSULTANT	0605PKPL.20PRC-APB D-PISDA/PUPR- MU/002017	4.980.000,00	-	4.980.000,00	-	-	4.980.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Diras Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Perencanaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Ulu Sungai Selaq Mamahak Ulu	CV. BILANT TEKNIK KONSULTAN	0605PKPL.24PRC-APB D-PISDA/PUPR- MU/002017	4.980.000,00	-	4.980.000,00	-	-	4.980.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Diras Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Perencanaan Pembukaan Jalan Usaha Tani Kedawan Laham	CV. RAJA KONSULTAN	0605PKPL.34PRC-APB D-PISDA/PUPR- MU/002017	4.980.000,00	-	4.980.000,00	-	-	4.980.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Diras Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Pembangunan Jembatan Tiban Juhau Adat (CPU) Rt. 1 Kampung Mamahak Tebog	CV. ANUGRAH CENDIKIA MANDIRI (MC. 1009)	0605PKPL.08PRB00M- APB00PUPR-MU/002017	15.699.400,00	-	15.699.400,00	-	-	15.699.400,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Diras Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Pengawasan Pembangunan Jembatan Usaha Tani Sungai Doq Ulu Long Lunuk Baru	CV. ARCHITLA BORNEO KONSULTAN	07001LPWS- 060PRK0M- APB00PUPR-MU/002017	4.990.000,00	-	4.990.000,00	-	-	4.990.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Diras Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Pengawasan Pembangunan Jembatan Usaha Tani Lubu Tingang Sungai Peqak Long Pihangai I	CV. SACHO JAYA CONSULT	07001LPWS- 060PRK0M- APB00PUPR-MU/002017	4.990.000,00	-	4.990.000,00	-	-	4.990.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Diras Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Pengawasan Pembangunan Pembukaan Jalan Wisata Dengan Ukuran 1500m Yang Berleksi di Air Terjun Telang Anying	CV. SACHO JAYA CONSULT	07001LPWS- 060PRK0M- APB00PUPR-MU/002017	7.490.000,00	-	7.490.000,00	-	-	7.490.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Diras Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Perencanaan Semesta Gang RT 1 Long Penawah I	CV. ARYA MUDA KONSULINDO	0605PKPRCPL.06LCK- APB0-PUPR- MU/002017	6.230.000,00	-	6.230.000,00	-	-	6.230.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Diras Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Perencanaan Pembangunan Gapura Dan Pagor Kelling Play Group Adat Mula 5 Long Tuyong	CV. ARCHITLA BORNEO KONSULTAN	0605PKPRCPL.06LCK- APB0-PUPR- MU/002017	9.980.000,00	-	9.980.000,00	-	-	9.980.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Diras Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Perencanaan Semesta jalan kaplingan Rt. 04 Lutan	CV. RIMA CPTA CONSULTANT	0605PKPRCPL.08LCK- APB0-PUPR- MU/002017	5.980.000,00	-	5.980.000,00	-	-	5.980.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Diras Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Beban	Perencanaan Pembangunan Dapur Lamin dan Toilet Long Penawah II	CV. DE DIDA	0605PKPRCPL.06LCK- APB0-PUPR- MU/002017	11.980.000,00	-	11.980.000,00	-	-	11.980.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Diras Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Perencanaan Semesta Gang sampang Bank BPD Long Bagun II	CV. RIMA CPTA CONSULTANT	0605PKPRCPL.07LCK- APB0-PUPR- MU/002017	4.980.000,00	-	4.980.000,00	-	-	4.980.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Diras Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Perencanaan Semesta Jalan Buq RT 004 Datab Bilang Iir	CV. RI N RA Artha Karya	0605PKPRCPL.08LCK- APB0-PUPR- MU/002017	5.980.000,00	-	5.980.000,00	-	-	5.980.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Diras Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Perencanaan Pembangunan Drainase Rt. 03 Lutan	CV. RAJA KONSULTAN	0605PKPRCPL.02LCK- APB0-PUPR- MU/002017	6.140.000,00	-	6.140.000,00	-	-	6.140.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Diras Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Perencanaan Semesta Jalan Geraga Protesan Noha Boan	CV. RAJA KONSULTAN	0605PKPRCPL.05LCK- APB0-PUPR- MU/002017	6.780.000,00	-	6.780.000,00	-	-	6.780.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Diras Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Perencanaan Semesta Jalan Rt. 06 Datab Bilang Bara	CV. SAWI MAHAKAM CONSULTANT	0605PKPRCPL.08LCK- APB0-PUPR- MU/002017	9.480.000,00	-	9.480.000,00	-	-	9.480.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Diras Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Perencanaan Semesta Gang Baru Rt. 02 Matlabang	CV. ARCHITLA BORNEO KONSULTAN	0605PKPRCPL.07LCK- APB0-PUPR- MU/002017	5.980.000,00	-	5.980.000,00	-	-	5.980.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Diras Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Perencanaan Tiban Lapangan Boli Long Bagun Ulu	CV. REVINDA PILAR UTAMA	0605PKPRCPL.07LCK- APB0-PUPR- MU/002017	8.580.000,00	-	8.580.000,00	-	-	8.580.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Diras Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Perencanaan Semesta Jalan Dalam Kampung Muara Rahat	CV. RIMA CPTA CONSULTANT	0605PKPRCPL.08LCK- APB0-PUPR- MU/002017	5.660.000,00	-	5.660.000,00	-	-	5.660.000,00

Tahun Pengakuan Hutang	Kode OPD	Nama OPD	Jenis Hutang Belanja	Uraian Nama Kegiatan/Pekerjaan	Nama Rekanan	Nomor Kontrak	SALDO UTANG 2023	Koreksi	saldo setelah koreksi	NOMOR SP2D	NLAI SP2D	SALDO UTANG 2024
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Pengawasan Pembangunan Jalan Usaha Tani Sungai Sawan Long Pahangai	CV. RAJA KONSULTAN	763SPKPL.18PW.APB D-PSDAPUPR-MU0002017	4.990.000,00	-	4.990.000,00	-	-	4.990.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Pembangunan Jalan Menuju Makam Dath Mering	CV. BAGA BORNEO GROUP	603SPKPL.003PERKAM-APBOPUPR-MU0002017	84.950.000,00	-	84.950.000,00	-	-	84.950.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Beban	Perencanaan Pembangunan Gapura Gok Maria Laham Ulu	CV.ARCHITILA BORNEO KONSULTAN	056SPKPRCP.L-081CK-APBOPUPR-MU0002017	5.660.000,00	-	5.660.000,00	-	-	5.660.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Beban	Perencanaan Pembangunan Drainase Gang Gerye Rt. 6 Batu Majang	CV. SAWI MAHAKAM CONSULTANT	056SPKPRCP.L-008CK-APBOPUPR-MU0002017	9.980.000,00	-	9.980.000,00	-	-	9.980.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Perencanaan Semensasi gang Rt. 1 batok Kelo	CV. RI N RA ARTHA KARYA	056SPKPRCP.L-002CK-APBOPUPR-MU0002017	5.980.000,00	-	5.980.000,00	-	-	5.980.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Pengawasan Pembangunan Jalan Usaha Tani Devau Tutang Delang Krohlong	CV. DE DIDA	763SPKPL.03PW.APB D-PSDAPUPR-MU0002017	4.990.000,00	-	4.990.000,00	-	-	4.990.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Pengawasan Pembangunan Jalan Usaha Tani Duta Buan Diri Delang Krohlong	CV. SAWI MAHAKAM CONSULTANT	763SPKPL.03PW.APB D-PSDAPUPR-MU0002017	4.990.000,00	-	4.990.000,00	-	-	4.990.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Pengawasan Pembangunan Jalan Usaha Tani Sungai Ungu Delang Krohlong	CV. REVINDA PILAR UTAMA	763SPKPL.04PW.APB D-PSDAPUPR-MU0002017	4.990.000,00	-	4.990.000,00	-	-	4.990.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Pengawasan Pembangunan Jalan Usaha Tani Sungai Dahng Yaang Long Pulau Baru	CV. SHACIO JAYA CONSULTANT	763SPKPL.05PW.APB D-PSDAPUPR-MU0002017	4.990.000,00	-	4.990.000,00	-	-	4.990.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Pengawasan Pembangunan Jalan Usaha Tani Daang Umeng Long Pakaz	CV. RAJA KONSULTAN	763SPKPL.07PW.APB D-PSDAPUPR-MU0002017	4.990.000,00	-	4.990.000,00	-	-	4.990.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Pengawasan Pembangunan Jalan Usaha Lub Saling II Long Lunuk Baru	CV. RI N RA ARTHA KARYA	763SPKPL.10PW.APB D-PSDAPUPR-MU0002017	4.990.000,00	-	4.990.000,00	-	-	4.990.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Pengawasan Pembangunan Jalan Usaha Tani Hunge Ulu Long Lunuk Baru	CV. ARYA MUDA KONSULINDO	763SPKPL.11PW.APB D-PSDAPUPR-MU0002017	4.990.000,00	-	4.990.000,00	-	-	4.990.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Pengawasan Pembangunan Jalan Usaha Tani Nyari Dath Mering	CV. BRLIANT TEKNIK KONSULTAN	763SPKPL.12PW.APB D-PSDAPUPR-MU0002017	4.990.000,00	-	4.990.000,00	-	-	4.990.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Pengawasan Pembangunan Jalan Usaha Tani Sungai Kali Lirung Uling	CV. REVINDA PILAR UTAMA	763SPKPL.15PW.APB D-PSDAPUPR-MU0002017	4.990.000,00	-	4.990.000,00	-	-	4.990.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Pengawasan Pembangunan Jalan Usaha Tani Lubu Jai Naha Anaz	CV. SHACIO JAYA CONSULTANT	763SPKPL.16PW.APB D-PSDAPUPR-MU0002017	4.990.000,00	-	4.990.000,00	-	-	4.990.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Pengawasan Pembangunan Jalan Usaha Tani Sungai Isau Long Pahangai 8	CV. ARYA MUDA KONSULINDO	763SPKPL.18PW.APB D-PSDAPUPR-MU0002017	4.990.000,00	-	4.990.000,00	-	-	4.990.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Pengawasan Pembangunan Jalan Usaha Tani Batok Pulau Mameah Besar	CV. BRLIANT TEKNIK KONSULTAN	763SPKPL.23PW.APB D-PSDAPUPR-MU0002017	4.990.000,00	-	4.990.000,00	-	-	4.990.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Pengawasan Pembangunan Jalan Usaha Tani Ulu Sungai Lash Mameah Ulu	CV. DE DIDA	763SPKPL.24PW.APB D-PSDAPUPR-MU0002017	4.980.000,00	-	4.980.000,00	-	-	4.980.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Pengawasan Pembangunan Jalan Kelompok Tani Permatia Long Melaham	CV. SAWI MAHAKAM CONSULTANT	763SPKPL.26PW.APB D-PSDAPUPR-MU0002017	4.990.000,00	-	4.990.000,00	-	-	4.990.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Pengawasan Pembangunan Jalan Usaha Tani Sungai Nemaux Mozabaz	CV. REVINDA PILAR UTAMA	763SPKPL.27PW.APB D-PSDAPUPR-MU0002017	7.850.000,00	-	7.850.000,00	-	-	7.850.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Pengawasan Pembangunan Jalan Usaha Tani Blok A Long Hubung Ulu	CV. SHACIO JAYA CONSULTANT	763SPKPL.31PW.APB D-PSDAPUPR-MU0002017	8.360.000,00	-	8.360.000,00	-	-	8.360.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Pengawasan Pembangunan Jalan Usaha Tani Blok B Long Hubung Ulu	CV. ARCHITILA BORNEO KONSULTAN	763SPKPL.33PW.APB D-PSDAPUPR-MU0002017	5.990.000,00	-	5.990.000,00	-	-	5.990.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Pengawasan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kedawan Laham	CV. RIMA CIPITA CONSULTANT	763SPKPL.34PW.APB D-PSDAPUPR-MU0002017	4.990.000,00	-	4.990.000,00	-	-	4.990.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Pengawasan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kampung Darum Paray	CV. RAJA KONSULTAN	763SPKPL.35PW.APB D-PSDAPUPR-MU0002017	4.990.000,00	-	4.990.000,00	-	-	4.990.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Pengawasan Pembangunan Jalan Usaha Tani Nangai Bareng Kang Long Hubung	CV. RI N RA ARTHA KARYA	763SPKPL.39PW.APB D-PSDAPUPR-MU0002017	8.360.000,00	-	8.360.000,00	-	-	8.360.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Pengawasan Pembangunan Jalan Usaha Tani Sungai Bareng Ayeik Long Hubung	CV. ARYA MUDA KONSULINDO	763SPKPL.39PW.APB D-PSDAPUPR-MU0002017	5.990.000,00	-	5.990.000,00	-	-	5.990.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Pengawasan Pembangunan Jalan Usaha Tani Batok Kelo	CV. BRLIANT TEKNIK KONSULTAN	763SPKPL.42PW.APB D-PSDAPUPR-MU0002017	5.990.000,00	-	5.990.000,00	-	-	5.990.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Beban	Perencanaan Rumah Inap Pastoran Long Melaham	CV.GALA TECHNOLOGIES CONSULTANT	056PRC-PL.103PRC-APBOPUPR-MU0002017	5.980.000,00	-	5.980.000,00	-	-	5.980.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Perencanaan Semensasi gang RT.06 Dath Blang Baru Kec. Long Hubung	CV. SAWI MAHAKAM CONSULTANT	763SPKPL.003PERKAM-APBOPUPR-MU0002017	9.840.000,00	-	9.840.000,00	-	-	9.840.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Perencanaan SPAM Di Laham	CV.RAJA KONSULTAN	056PRC-SPK-01LCK-APBOPUPR-MU0002017	23.100.000,00	-	23.100.000,00	-	-	23.100.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Pembangunan Turap Jalan Depan Puskesmas Kampung Laham (100 meter) (Program Ulang)	CV. MALBU	603SPKPL.008CK-APBOPUPR-MU0002017	23.878.100,00	-	23.878.100,00	-	-	23.878.100,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Perencanaan Semensasi Gang Kampung Muara Ratah	CV. RAJA KONSULTAN	056SPKPRCP.L-088CK-APBOPUPR-MU0002017	5.660.000,00	-	5.660.000,00	-	-	5.660.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Beban	Perencanaan Pembangunan Pagar Masjid Al-Yasin Long Bagun Ulu	CV.ARCHITILA BORNEO KONSULTAN	056SPKPRCP.L-108CK-APBOPUPR-MU0002017	9.980.000,00	-	9.980.000,00	-	-	9.980.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Perencanaan Pembangunan Semensasi Lapangan SDN 004 Jalan Lah Dng RT 03 Long Bagun Ulu	CV.ARCHITILA BORNEO KONSULTAN	056SPKPRCP.L-101CK-APBOPUPR-MU0002017	7.980.000,00	-	7.980.000,00	-	-	7.980.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Drainase 8 Lapangan Boks Long Bagun Ulu	CV. ANUGRAH CENDOK MANDIRI	6215SPKPL.008CK-APBOPUPR-MU0002017	99.950.000,00	-	99.950.000,00	-	-	99.950.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Perencanaan Rehab jalan Joramba Long Merah	CV.ARCHITILA BORNEO KONSULTAN	056SPKPL.05APB02AS-REH0002017	5.990.000,00	-	5.990.000,00	-	-	5.990.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Penyelenggaraan Administrasi Pengingatn Jalan Long Gelawang Ser Kowang	PT.NANGSGRO INVESTAMA	600902BM-06AS0PAP06IDPU-MU0002018	23.988.000,00	-	23.988.000,00	-	-	23.988.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	SEMENSASIGANG KELUARGA 1 RT.XI KAMPUNG UJOH BILANG	CV. ORBIT SETA	602PL-SPK-132-APBOPUPR-MU0002017	27.750.000,00	-	27.750.000,00	-	-	27.750.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Perencanaan Semensasi Gang RT 5 Long Melaham	CV. DE DIDA	056SPKPRCP.L-075CK-APBOPUPR-MU0002017	4.980.000,00	-	4.980.000,00	-	-	4.980.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Perencanaan Semensasi Jalan Koperasi RT 02 Dath Blang Ulu	CV. BRLIANT TEKNIK KONSULTAN	056SPKPRCP.L-084CK-APBOPUPR-MU0002017	5.610.000,00	-	5.610.000,00	-	-	5.610.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Perencanaan Semensasi Gang Rt. 2 Tung Buu	CV. REVINDA PILAR UTAMA	056SPKPRCP.L-054CK-APBOPUPR-MU0002017	8.980.000,00	-	8.980.000,00	-	-	8.980.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Perencanaan Pembangunan Lapangan voly SMPN 001 Tiong Buu	CV. ARYA MUDA KONSULINDO	056SPKPRCP.L-003CK-APBOPUPR-MU0002017	6.980.000,00	-	6.980.000,00	-	-	6.980.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Perencanaan Semensasi Lapangan voly Kec. Long Api	CV. RI N RA ARTHA KARYA	056SPKPRCP.L-060CK-APBOPUPR-MU0002017	7.230.000,00	-	7.230.000,00	-	-	7.230.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Perencanaan Pembangunan Drainase Belakang Kantor KPU Long Bagun Ulu	CV. RAJA KONSULTAN	056SPKPRCP.L-009CK-APBOPUPR-MU0002017	9.980.000,00	-	9.980.000,00	-	-	9.980.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Beban	Perencanaan Pembangunan Kantor Kepala Kampung Satu Atap Uphi Blang	CV.MUTAIRA DESIGN KONSULTAN	056PRC-PL.153CK-APBOPUPR-MU0002017	49.980.000,00	-	49.980.000,00	-	-	49.980.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hutang Beban	Pembangunan Rumah Kulturasi Tolak Masyarakat (Ah) Bagaik Senggang Hang Di Kampung Naha Anaz (Program Ulang)	CV. ANUGRAH CENDOK MANDIRI	620SPKPL.001CK-APBOPUPR-MU0002017	199.980.000,00	-	199.980.000,00	-	-	199.980.000,00

Tahun Pelaksanaan	Kode DIPA	Nama DIPA	Jenis Kegiatan/Berkas	Catatan Nama Kegiatan/Pelaksanaan	Nama Rekanan	Nomor P/SPK	SALDO UTANG 2023	Konsep	saldo setelah koreksi	NOMOR SP2D	NILAI SP2D	SALDO UTANG 2024
2018	1.03.1.04.0.00.00.0000	Dinas Pelayanan Umum dan Pemertan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hutang Beban	Semesta Laka Parken Gergo Korp Kampung Datuk Bilag Ulu Kec. Long Hubung	CV QJMAL TRIMARK BERSAUDARA	B205PVP/123/CIK-APEDIPUPU-MUJ02017	87.220.000,00	-	87.220.000,00	-	-	87.220.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.00.0000	Dinas Pelayanan Umum dan Pemertan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hutang Beban	Penyediaan Administrasi Pencananaan Semesta Jalan RT. 06 Kampung Manatik Tabet Tahun Anggaran 2014	CV SAWI MAHAKAM COSITAN	956000M/017/PRC/AP-BDKPC/KPU-MUJ02014	9.924.000,00	-	9.924.000,00	-	-	9.924.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.00.0000	Dinas Pelayanan Umum dan Pemertan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hutang Beban	Penyediaan Administrasi Pencananaan Semesta Halaman Peleir BPU Kampung Dasik Bangkai Ulu	CV SHADAO JAYA CONSALT	658PM/CL-DCLIC-APEDIPUPU-MUJ02016	14.990.000,00	-	14.990.000,00	-	-	14.990.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.00.0000	Dinas Pelayanan Umum dan Pemertan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hutang Beban	PEMBANGUNAN GEREJA SAKTA VERONIKA BATU MALANG	CV CANYA REJEKI AGAMA	960SPK-GRAICK-ARDEBUD-SALV02016	355.626.950,00	-	355.626.950,00	-	-	355.626.950,00
2018	1.03.1.04.0.00.00.0000	Dinas Pelayanan Umum dan Pemertan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hutang Beban	Restorasi Pembangunan Aula Gereja Katolik St. Yohanes Kampung Rung Damal	CV PUTRA HUVUNG MANDIRI	640SPK-GOSICK-APEDIPUPU-MUJ02017	20.060.100,00	-	20.060.100,00	-	-	20.060.100,00
2018	1.03.1.04.0.00.00.0000	Dinas Pelayanan Umum dan Pemertan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hutang Beban	Restorasi Pembangunan Asrama Polisi Polsek Long Pahelaga	CV BUSUR FUTERA	640SPK-GOSICK-APEDIPUPU-MUJ02017	23.087.900,00	-	23.087.900,00	-	-	23.087.900,00
2018	1.03.1.04.0.00.00.0000	Dinas Pelayanan Umum dan Pemertan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hutang Beban	Penyediaan Administrasi Pencananaan Pembangunan Lapangan Volley Desa Komtek Kec. Long Anai	PT. HQMAH ALDINA PRIMA	6300PM-KLBBANKULU-PUSRI-MUJ02018	19.815.000,00	-	19.815.000,00	-	-	19.815.000,00
2018	1.03.1.04.0.00.00.0000	Dinas Pelayanan Umum dan Pemertan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hutang Beban	Pengelolaan Jalan Retes KUBAR - SPK RT (BANUE)	CV KARYA MUJINI	640SPKPL-0205PKP-APEDIPUPU-MUJ02018	2.014.700,00	-	2.014.700,00	-	-	2.014.700,00
2018	1.03.1.04.0.00.00.0000	Dinas Pelayanan Umum dan Pemertan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hutang Beban	RENOVASI KUBURAN KATOLIK DI TAMAN DOA MARIA	CV KARYA MUJINI	640SPKPL-0205PKP-APEDIPUPU-MUJ02018	6.554.700,00	-	6.554.700,00	-	-	6.554.700,00
2019	2.15.0.00.00.09.00.0000	Dinas Perhubungan	Hutang Beban	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DERAGAS PRAMUKA	CV XFOUR ENGINEERING	951.30246/PRCS/SPPKL-0125APRAS-APEDIPUPU-MUJ02019	6.765.000,00	-	6.765.000,00	-	-	6.765.000,00
2019	2.15.0.00.00.09.00.0000	Dinas Perhubungan	Hutang Beban	PERENCANAAN PEMBANGUNAN TITAN PRAMUKA	CV XFOUR ENGINEERING	951.30246/PRCS/SPPKL-0125APRAS-APEDIPUPU-MUJ02019	6.765.000,00	-	6.765.000,00	-	-	6.765.000,00
2020	1.02.2.14.0.0.00.00.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Hutang Beban	Lanjutan Pengadaan dan Konsultasi Pengawasan Rp Rs GSM	CV BANGUN BUMI TAMBA	440.027182CONTRAKTOR-NESPO-CRIP-PIV02013	123.298.854,00	-	123.298.854,00	-	-	123.298.854,00
2020	1.02.2.14.0.0.00.00.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Hutang Beban	Belanja Pembelian Kebersihan dan Bahan Pembersih	BENDAHARA DINIKS	-	8.787.600,00	-	8.787.600,00	-	-	8.787.600,00
2020	1.02.2.14.0.0.00.00.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Hutang Beban	Belanja Jasa Pemeliharaan ransService Kondensasi drmsOperasional	BENDAHARA DINIKS	-	1.705.000,00	-	1.705.000,00	-	-	1.705.000,00
2020	1.02.2.14.0.0.00.00.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Hutang Beban	Belanja Belanja Kelengkapan Kostensi dalam Rangka Operasional Rumah sakit Gerdans Sahet Mahuku	BENDAHARA DINIKS	-	2.427.000,00	-	2.427.000,00	-	-	2.427.000,00
2020	1.02.2.14.0.0.00.00.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Hutang Beban	Belanja Jasa Pengisian Tabung Gas	BENDAHARA DINIKS	-	2.160.000,00	-	2.160.000,00	-	-	2.160.000,00
2020	1.02.2.14.0.0.00.00.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Hutang Beban	Pembayaran 100% Pembangunan dan Rehab RS(Gedung KID-NOD)	CV KARYA BERSAMA	-	20.541.000,00	-	20.541.000,00	-	-	20.541.000,00
2020	1.02.2.14.0.0.00.00.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Hutang Beban	Jasa Pengangkutan ObatBarang	CV BATTUANAY JAWA MANDIRI	440.02752573PKDNKE-SPOBMS-APEDIPUPU-MUJ02021	38.500.000,00	-	38.500.000,00	-	-	38.500.000,00
2021	1.02.2.14.0.0.00.00.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Hutang Beban	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kurangi Tingkat Daerah Kalkitas, Belanja Penyedia Jasa Komunikasi / Internet	PT Limas Maya Mulidreka	440.0275939PKP-Cities-PEDIPUPU-MUJ02021	57.750.000,00	-	57.750.000,00	-	-	57.750.000,00
2021	1.03.1.22.5.04.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Hutang Beban	Pembayaran 100% Belanja Alat Penilaian dan Penitlinggaraan Kantor pada SMPN2 Long Bagan	CV OLICI	421.3025253SPMN2-LB-02021	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00
2021	2.13.0.00.00.08.00.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Gampong	Hutang Beban	Akasi Cane Kampung	PT. PESICNA PRIMA GEMILANG	671.1115SPK-GSLFRNAL QUANTITY KEC. APEDIPUPU-MUJ02020	33.520.439,00	-	33.520.439,00	-	-	33.520.439,00
2021	1.03.1.04.0.00.00.0000	Dinas Pelayanan Umum dan Pemertan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hutang Beban	Penyediaan Administrasi Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Kampung Manatik Bera***	PT. HQMAH ALDINA PRIMA	630000SPK-FSRBMS-000						

Tahun Pengukuran	Kode OPD	Nama OPD	Uraian Nama Kegiatan/Pekerjaan	Nama Rekanan	Nomor Kontrak	SALDO UTANG 2023	Koreksi	saldo setelah koreksi	NOMOR SP2D	NLAI SP2D	SALDO UTANG 2024
2023	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemertahan dan Kawasan Pemukiman	Uang Belanja Barang untuk Dijamin/Berangkas	PERENCANAAN SEMEREMAS PELEBARAN JALAN MENUJU PEMUKJAMAN LUMAJANG KAWASAN PEMUKJAMAN MAMU	CV. ARYA MUDA CONSULTING	086/7731/PRC / SPK-219 / CK-APRO P / GRUPU MU / X 2023	-	9.967.000,00	64.1104.0000690/SI.03.1.04.0.00.03.0000PPRU/120204 (27Dec/2024)	9.967.000,00	-
2023	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemertahan dan Kawasan Pemukiman	Uang Belanja Model Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Perencanaan Semeremasi Dan Drainase Keluk Bt Urip	CV. KHALID PRIMA SAKI	084774PRC/SPK-125CK/ APED PDPUPR- MUN/2023	-	9.967.000,00	64.1104.0000690/SI.03.1.04.0.00.03.0000PPRU/120204 (27Dec/2024)	9.967.000,00	-
2023	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemertahan dan Kawasan Pemukiman	Uang Belanja Barang untuk Dijamin/Berangkas	Perencanaan Pembangunan Drainase Gang Mawar Kampung Long Melahan	CV. RIMA NUORAH	086 / 773 / PRC / SPK-109 / CK-APRO P / GRUPU MU / X 2023	-	9.967.000,00	64.1104.0000690/SI.03.1.04.0.00.03.0000PPRU/120204 (27Dec/2024)	9.967.000,00	-
2023	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemertahan dan Kawasan Pemukiman	Uang Belanja Model Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Perencanaan Pembangunan Rumah Pastor / GUSA Hal Baga Long Melahan	CV. MODESTLY PRATAMA CONSULTANT	048774PRC/SPK-44CK/ APED PDPUPR- MUN/2023	-	9.967.000,00	-	-	9.967.000,00
2023	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemertahan dan Kawasan Pemukiman	Uang Belanja Barang untuk Dijamin/Berangkas	Rigit Beto, Jalan Kampung Mamahak Teboq - Jalan Poros	PT. ARTAKULYA ARIDYIA PERKASA	620463SPK/SPK- BM 31-APROD/PPUR- MUN/2023	-	4.884.394.882,00	64.1104.0000547/SI.03.1.04.0.00.03.0000PPRU/120204	4.884.394.882,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obat-Lainnya	Oselebrat 75 mg tab	PT. Rajawali Nusantara	440.0271232PPK- DINKESS POKB/W/2021	-	75.000.000,00	64.1104.0000693/SI.02.2.14.0.0.02.0000PPRU/120204 (09Dec/2024)	75.000.000,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obat-Lainnya	Sabun Whitefil	PT. Rajawali Nusantara	440.0271202PPK- DINKESS POKB/W/2021	-	3.636.600,00	64.1104.0000694/SI.02.2.14.0.0.02.0000PPRU/120204 (09Dec/2024)	3.636.600,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obat-Lainnya	Aprone One Plastic	PT. Sumber Rejeki Medika Jaya	440.0271762PPK- DINKESS POKB/W/2021	-	140.660.000,00	64.1104.0000695/SI.02.2.14.0.0.02.0000PPRU/120204 (23Dec/2024)	140.660.000,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Model Perawatan dan Mesin	Regulator Oksigen OEA	PT. Sumber Rejeki Medika Jaya	440.0271304PPK- DINKESS POKB/W/2021	-	51.122.500,00	64.1104.0000695/SI.02.2.14.0.0.02.0000PPRU/120204 (23Dec/2024)	51.122.500,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Model Perawatan dan Mesin	Stetoscope Dual Membran dewasa dan Pediatric	PT. Sumber Rejeki Medika Jaya	440.0271244PPK- DINKESS POKB/W/2021	-	81.391.118,00	64.1104.0000693/SI.02.2.14.0.0.02.0000PPRU/120204 (23Dec/2024)	81.391.118,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obat-Lainnya	Plasma Roll	PT. Anugrah Putra Mahan	440.0271228PPK- DINKESS POKB/W/2021	-	8.800.000,00	64.1104.0000694/SI.02.2.14.0.0.02.0000PPRU/120204 (23Dec/2024)	8.800.000,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obat-Lainnya	Battery For pasien Monitor Infus Omicron II	PT. Sumber Rejeki Medika Jaya	440.0271252PPK- DINKESS POKB/W/2021	-	60.556.540,00	64.1104.0000695/SI.02.2.14.0.0.02.0000PPRU/120204 (23Dec/2024)	60.556.540,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obat-Lainnya	Oliven Midway	PT. Sumber Rejeki Medika Jaya	440.0271829PPK- DINKESS POKB/W/2021	-	210.592.800,00	64.1104.0000693/SI.02.2.14.0.0.02.0000PPRU/120204 (26Dec/2024)	210.592.800,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Model Gedung dan Bangunan	Perencanaan Pembangunan Gedung Perkantoran RS GSM	CV. ZAMAN CONSULTING	440.0271303DINKESSPK B-PPK/2020/23	-	81.096.000,00	64.1104.0000672/SI.02.2.14.0.0.02.0000PPRU/120204 (18Dec/2024)	81.096.000,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Model Gedung dan Bangunan	Perencanaan Pembangunan UGD RS. GSM	CV. ZAMAN CONSULTING	440.0271803DINKESSPK B-PPK/2020/23	-	75.880.000,00	64.1104.0000700/SI.02.2.14.0.0.02.0000PPRU/120204 (26Dec/2024)	75.880.000,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Model Gedung dan Bangunan	Perencanaan Pembangunan Pembangunan Gedung OK RS GSM	CV. ZAMAN CONSULTING	440.0271803DINKESSPK B-PPK/2020/23	-	59.799.000,00	64.1104.0000730/SI.02.2.14.0.0.02.0000PPRU/120204 (18Dec/2024)	59.799.000,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Model Perawatan dan Mesin	Belanja Model AC PANASONIC 1PK CSUCL1N1WKKV INDOOR (7 Unit)	CV. TERAPA TECHNO	440.0271203SPK/SPK-38-PPK/2020/23	-	49.997.500,00	64.1104.0000527/SI.02.2.14.0.0.02.0000PPRU/120204 (27Dec/2024)	49.997.500,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Model Gedung dan Bangunan	Perencanaan Pembangunan Rehab Kelengkapan Gudang Alat dan Obat Kontrasepi Gudang Aleson Kac. Long Bagun	CV. Brillan Teknik Konsultan	440.0271253PPK- DINKESS POKB/W/2023	-	5.542.000,00	64.1104.0000690/SI.02.2.14.0.0.02.0000PPRU/120204 (23Dec/2024)	5.542.000,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Model Gedung dan Bangunan	Rehab Plafon RS GSM 440.0271771.14DINKESSPK-B-PPK/2020/23	CV. Dua Putra	440.0271771.14DINKESSPK-B-PPK/2020/23	-	149.961.000,00	64.1104.0000711/SI.02.2.14.0.0.02.0000PPRU/120204 (18Dec/2024)	149.961.000,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Model Gedung dan Bangunan	Pengawasan Clean RS GSM 440.0271202SPK/DINKESSPK-B-PPK/2020/23	CV. Brillan Teknik Konsultan	440.0271202SPK/DINKESSPK-B-PPK/2020/23	-	49.964.000,00	64.1104.0000724/SI.02.2.14.0.0.02.0000PPRU/120204 (26Dec/2024)	49.964.000,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Model Gedung dan Bangunan	Pengawasan Pembangunan Gedung CSRD RS GSM	CV. RANTAU JAYA TEKNIK	440.0271130B-SPK / DINKESSPK-B-PPK / X 2023	-	33.979.000,00	64.1104.0000571/SI.02.2.14.0.0.02.0000PPRU/120204 (26Dec/2024)	33.979.000,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Model Gedung dan Bangunan	Pengawasan Pembangunan Gedung Obat RS GSM	CV. RANTAU JAYA TEKNIK	440.0271130B-SPK / DINKESSPK-B-PPK / X 2023	-	14.981.000,00	64.1104.0000569/SI.02.2.14.0.0.02.0000PPRU/120204 (26Dec/2024)	14.981.000,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Model Gedung dan Bangunan	Pengawasan Rehab Pustu Kampung Batu Majang	CV. ARORI TEKNIKA	440.0271177B-17 / DINKESSPK-B-PPK / X 2023	-	9.933.000,00	64.1104.0000726/SI.02.2.14.0.0.02.0000PPRU/120204 (18Dec/2024)	9.933.000,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Model Gedung dan Bangunan	Bangunan Rumah Gawat Puskemas lahian	CV. YONDKART BERSAUDARA	440.0271178B-17 / DINKESSPK-B-PPK / X 2023	-	60.328.000,00	64.1104.0000741/SI.02.2.14.0.0.02.0000PPRU/120204 (19Dec/2024)	60.328.000,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Model Perawatan dan Mesin	Belanja Model Dispenser (3 Unit) PKM Mantabes	CV. Tepan Techno	440.02711315SPK/PPK- M MB-PPK/2020/23	-	977.000,00	-	-	977.000,00
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Model Perawatan dan Mesin	Belanja Model Tandon Air (1 Unit) PKM Mantabes	CV. Tepan Techno	440.02711315SPK/PPK- M MB-PPK/2020/23	-	3.900.000,00	64.1104.0000310B/SI.02.2.14.0.0.02.0000PPRU/120204 (27Dec/2024)	3.900.000,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Model Gedung dan Bangunan	Pengawasan Sarana Pemukiman Unit Transisi Darah RS GSM	CV. RANTAU JAYA TEKNIK	440.0271203DINKESSPK-B-PPK/2020/23	-	79.200.000,00	64.1104.0000584/SI.02.2.14.0.0.02.0000PPRU/120204 (26Dec/2024)	79.200.000,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Model Perawatan dan Mesin	Belanja Model Kipas Angin (3 Unit) PKM Mantabes	CV. Tepan Techno	440.02711712 SPK/PPK- M MB-PPK/2020/23	-	5.400.000,00	-	-	5.400.000,00
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Model Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Perencanaan Pembangunan TPS Pem Lahang Tanggal 08 Nov 2023	CV. Raya Tenika Konsultan	440.027171621LONKESSPK-B-PPK/2020/23	-	19.830.000,00	64.1104.0000615/SI.02.2.14.0.0.02.0000PPRU/120204 (09Dec/2024)	19.830.000,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Model Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Perencanaan Pembangunan TPS Mamahak Besar 08 Nov 2023	CV. Raya Tenika Konsultan	440.027171621LONKESSPK-B-PPK/2020/23	-	11.854.000,00	64.1104.0000698/SI.02.2.14.0.0.02.0000PPRU/120204 (26Dec/2024)	11.854.000,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Model Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Pemayaran perencanaan Pembangunan TPS PKM Tong Chang Tanggal 08 Nov 2023	CV. Raya Tenika Konsultan	440.027171621LONKESSPK-B-PPK/2020/23	-	11.854.000,00	64.1104.0000576/SI.02.2.14.0.0.02.0000PPRU/120204 (26Dec/2024)	11.854.000,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Model Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Perencanaan Pembangunan TPS Pem Long Pahangal 08 November 2023	CV. Raya Tenika Konsultan	440.027171621LONKESSPK-B-PPK/2020/23	-	11.854.000,00	64.1104.0000576/SI.02.2.14.0.0.02.0000PPRU/120204 (26Dec/2024)	11.854.000,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Model Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Perencanaan Pembangunan TPS Pem Long Hubang 08 November 2023	CV. Raya Tenika Konsultan	440.027171621LONKESSPK-B-PPK/2020/23	-	11.854.000,00	64.1104.0000693/SI.02.2.14.0.0.02.0000PPRU/120204 (09Dec/2024)	11.854.000,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Model Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Perencanaan Pembangunan TPS PKM Lahang Tanggal 08 Nov 2023	CV. Raya Tenika Konsultan	440.027171621LONKESSPK-B-PPK/2020/23	-	11.854.000,00	64.1104.0000576/SI.02.2.14.0.0.02.0000PPRU/120204 (26Dec/2024)	11.854.000,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Model Gedung dan Bangunan	Pengawasan Rehab Pustu Upan Bilang 440.0271718-ASPK/DINKESSPK-B-PPK/2020/23	CV. KARYA MAHAHAK GROUP	440.0271718-ASPK/DINKESSPK-B-PPK/2020/23	-	14.970.000,00	64.1104.0000723/SI.02.2.14.0.0.02.0000PPRU/120204 (18Dec/2024)	14.970.000,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Model Gedung dan Bangunan	Pengawasan Rehab Mccs Pustu Satu Asep Long Bagun Ir	CV. KARYA MAHAHAK GROUP	440.0271718-3SPK/DINKESSPK-B-PPK/2020/23	-	14.994.000,00	64.1104.0000725/SI.02.2.14.0.0.02.0000PPRU/120204 (18Dec/2024)	14.994.000,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Model Gedung dan Bangunan	Pengawasan Rehab PUSBAN Naha Anut Kecamatan Tanggal 10 Pahangal	CV. KARYA MAHAHAK GROUP	440.0271718-4Asp/DINKESSPK-B-PPK/2020/23	-	14.997.000,00	64.1104.0000740/SI.02.2.14.0.0.02.0000PPRU/120204 (18Dec/2024)	14.997.000,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Model Gedung dan Bangunan	Pembayaran Kelling Pustu Delang Kertang Tanggal 01 September 2023	CV. BUDI PERMAI	440.0271718-4Asp/DINKESSPK-B-PPK/2020/23	-	198.576.000,00	64.1104.0000698/SI.02.2.14.0.0.02.0000PPRU/120204 (26Dec/2024)	198.576.000,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Model Gedung dan Bangunan	Pembayaran Klag. Perencanaan Pemertahan Lahian Puskemas Mamahak Besar dengan re. kontrak 440.0271718-4Asp/DINKESSPK-B-PPK/2020/23 tanggal 07 november 2023	CV. Raya Tenika Konsultan	440.0271718-4Asp/DINKESSPK-B-PPK/2020/23	-	49.360.000,00	64.1104.0000617/SI.02.2.14.0.0.02.0000PPRU/120204 (09Dec/2024)	49.360.000,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Model Gedung dan Bangunan	Perencanaan Pembangunan Gudang Kantor Dinas Kesehatan tanggal 10 Nov 2023	CV. Raya Tenika Konsultan	440.0271718-6DINKESSPK-B-PPK/2020/23	-	29.580.000,00	64.1104.0000625/SI.02.2.14.0.0.02.0000PPRU/120204 (09Dec/2024)	29.580.000,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Model Gedung dan Bangunan	Perencanaan Penambatan Ruang Promkes Kantor Dinas Kesehatan	CV. Raya Tenika Konsultan	440.0271718-6DINKESSPK-B-PPK/2020/23	-	14.847.000,00	64.1104.0000624/SI.02.2.14.0.0.02.0000PPRU/120204 (09Dec/2024)	14.847.000,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Model Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Perencanaan Semeremasi Halaman Kantor Dinas Kesehatan 10 Nov 2023	CV. ZAMAN CONSULTING	440.0271718-14DINKESSPK-B-PPK/2020/23	-	19.830.000,00	64.1104.0000626/SI.02.2.14.0.0.02.0000PPRU/120204 (09Dec/2024)	19.830.000,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Model Gedung dan Bangunan	Perencanaan Perbaikan Atap dan Plafon Kantor Dinas Kesehatan	CV. ZAMAN CONSULTING	440.0271718-14DINKESSPK-B-PPK/2020/23	-	14.841.000,00	64.1104.0000626/SI.02.2.14.0.0.02.0000PPRU/120204 (09Dec/2024)	14.841.000,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Belanja Transportasi Spesimen Dalam Rangka Pengiriman Sampel Sputum Suspek TB Dari RSP NDO Ka Upan Bilang Padas Tanggal 24 Agustus Tahun 2022 Dengan nota Dan Kuitansi Testimoni	Harung/Speedboat Emren Putra Taxi	Harung/Speedboat Emren Putra Taxi	Harung/Speedboat Emren Putra Taxi	-	450.000,00	64.1106.00002114APU/SI.02.2.14.0.0.02.0000P/120204	450.000,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Belanja Transportasi Spesimen Dalam Rangka Pengiriman Sampel Sputum Suspek TB Dari RSP NDO Ka Upan Bilang Padas Tanggal 05 Oktober Tahun 2022 Dengan nota Dan Kuitansi Testimoni	Harung/Speedboat Emren Putra Taxi	Harung/Speedboat Emren Putra Taxi	Harung/Speedboat Emren Putra Taxi	-	450.000,00	64.1106.00002114APU/SI.02.2.14.0.0.02.0000P/120204	450.000,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Belanja Transportasi Spesimen Dalam Rangka Pengiriman Sampel Sputum Suspek TB Dari RSP NDO Ka Upan Bilang Padas Tanggal 17 Oktober Tahun 2022 Dengan nota Dan Kuitansi Testimoni	Harung/Speedboat Emren Putra Taxi	Harung/Speedboat Emren Putra Taxi	Harung/Speedboat Emren Putra Taxi	-	450.000,00	64.1106.00002114APU/SI.02.2.14.0.0.02.0000P/120204	450.000,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Belanja Transportasi Spesimen Dalam Rangka Pengiriman Sampel Sputum Suspek TB Dari RSP NDO Ka Upan Bilang Padas Tanggal 02 September Tahun 2022 Dengan nota Dan Kuitansi Testimoni	Harung/Speedboat Emren Putra Taxi	Harung/Speedboat Emren Putra Taxi	Harung/Speedboat Emren Putra Taxi	-	450.000,00	64.1106.00002114APU/SI.02.2.14.0.0.02.0000P/120204	450.000,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Model Gedung dan Bangunan	Belanja Transportasi Spesimen Dalam Rangka Pengiriman Sampel Sputum Suspek TB Dari RSP NDO Ka Upan Bilang Padas Tanggal 03 September Tahun 2022 Dengan nota Dan Kuitansi Testimoni	Harung/Speedboat Emren Putra Taxi	Harung/Speedboat Emren Putra Taxi	-	450.000,00	64.1106.00002114APU/SI.02.2.14.0.0.02.0000P/120204	450.000,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Model Gedung dan Bangunan	Belanja Transportasi Spesimen Dalam Rangka Pengiriman Sampel Sputum Suspek TB Dari RSP NDO Ka Upan Bilang Padas Tanggal 03 September Tahun 2022 Dengan nota Dan Kuitansi Testimoni	Harung/Speedboat Emren Putra Taxi	Harung/Speedboat Emren Putra Taxi	-	450.000,00	64.1106.00002114APU/SI.02.2.14.0.0.02.0000P/120204	450.000,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Model Gedung dan Bangunan	Belanja Transportasi Spesimen Dalam Rangka Pengiriman Sampel Sputum Suspek TB Dari RSP NDO Ka Upan Bilang Padas Tanggal 03 September Tahun 2022 Dengan nota Dan Kuitansi Testimoni	Harung/Speedboat Emren Putra Taxi	Harung/Speedboat Emren Putra Taxi	-	450.000,00	64.1106.00002114APU/SI.02.2.14.0.0.02.0000P/120204	450.000,00	-
2023	1.02.2.14.0.0.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keb	Uang Belanja Model Gedung dan Bangunan	Belanja Transportasi Spesimen Dalam Rangka Pengiriman Sampel Sputum Suspek TB Dari RSP NDO Ka Upan Bilang Padas Tanggal 03 September Tahun 2022 Dengan nota Dan Kuitansi Testimoni	Harung/Speed						

Tahun Pengukuran Revisi	Kode OPD	Nama OPD	Jenis Hutang Belanja	Uraian Nama Kegiatan/Pekerjaan	Nama Rekanan	Nomor Kontrak	SALDO UTANG 2023	Koreksi	saldo setelah koreksi	NOMOR SP2D	N-LAI SP2D	SALDO UTANG 2024
2023	5.02.0.00.00.22.0000	Badan Pendidikan Daerah		Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK			5.596.823,00	-	5.596.823,00	64.11.04.000003125L.SP.02.0.00.0.00.22.0000PPK120204 (29Des/2024)		-
2023	6.01.0.00.00.21.0000	Inspektat		Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK			11.193.646,00	-	11.193.646,00	64.11.04.00000445L.SP.01.0.00.0.00.21.0000M120204 (03Jan/2024)		-
2023	5.03.5.04.0.00.24.0000	Badan Kependidikan, Pendidikan dan Pelatihan		Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK			54.659.602,00	-	54.659.602,00	64.11.04.00000004L.SP.03.1.04.0.00.24.0000M120204 (08Mar/2024)		-
2023	3.27.2.09.3.25.13.0000	Dinas Ketersahatan Pangan dan Pertanian		Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK			26.675.487,00	-	26.675.487,00	64.11.04.00001305L.SP.03.1.04.0.00.24.0000PPK120204 (18Des/2024)		-
2023	5.02.4.01.0.00.23.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK			5.596.823,00	-	5.596.823,00	64.11.04.0000083L.SP.02.4.01.0.00.23.0000M120204		5.596.823,00
2023	2.13.0.0.0.0.00.08.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK			16.790.799,00	-	16.790.799,00	-		16.790.799,00
2023	7.01.0.0.0.0.00.16.0000	Kecamatan Long Apai		Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK			5.595.823,00	-	5.595.823,00	64.11.04.00000029L.SP.01.0.0.0.0.00.16.0000M120204 (11Jan/2024)		5.595.823,00
2023	7.01.0.0.0.0.00.17.0000	Kecamatan Long Pahangai		Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK			4.288.195,00	-	4.288.195,00	64.11.04.00000429L.SP.01.0.0.0.0.00.17.0000M120204 (08Jan/2024)		4.288.195,00
2023	2.18.0.0.0.0.00.11.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu		Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK			11.193.646,00	-	11.193.646,00	64.11.04.00000096L.SP.02.1.0.0.0.00.11.0000M120204 (20Mar/2024)		11.193.646,00
2023	2.11.0.0.0.0.00.06.0000	Dinas Lingkungan Hidup		Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK			5.596.933,00	110,00	5.596.933,00	64.11.04.00000151L.SP.2.1.1.0.0.00.06.0000M120204 (18Mar/2024)		5.596.933,00
2023	1.06.2.08.0.00.05.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK			9.985.018,00	-	9.985.018,00	64.11.04.00000471L.SP.06.2.08.0.00.05.0000M120204		9.985.018,00
2023	2.16.2.21.2.20.10.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Dokumentasi		Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK			25.366.899,00	-	25.366.899,00	64.11.04.00001500L.SP.18.2.21.2.20.10.0000PPK120204 (24Des/2024)		25.366.899,00
2023	2.12.0.0.0.0.00.07.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK			5.596.933,00	110,00	5.596.933,00	64.11.04.00000476L.SP.12.0.0.0.0.00.07.0000M120204 (04Jul/2024)		5.596.933,00
2023	3.26.2.19.0.00.12.0000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK			11.193.866,00	-	11.193.866,00	64.11.04.00000096L.SP.26.2.19.0.00.12.0000M120204 (22Mar/2024)		11.193.866,00
2023	2.15.0.0.0.0.00.09.0000	Dinas Perhubungan		Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK			16.790.799,00	-	16.790.799,00	64.11.04.00000095L.SP.15.0.0.0.00.09.0000M120204 (19Mar/2024)		16.790.799,00
2024	1.02.2.14.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Barang Pakai Habis-AsalBahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Belanja AsialBahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fotocopy) dalam rangka kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Operasional Rumah Tunggu Kelahiran Rumah Singgah Pasien di Samarinda) Bulan September 2024 sesuai dengan buku-buku terlampir	BENDAHARA PENGELUARAN	-	105.500,00	-	105.500,00	-	-	105.500,00
2024	1.02.2.14.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Barang Pakai Habis-AsalBahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Belanja AsialBahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fotocopy) dalam rangka kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Operasional Rumah Tunggu Kelahiran Rumah Singgah Pasien di Kubi Barai) Bulan September 2024 sesuai dengan buku-buku terlampir	BENDAHARA PENGELUARAN	-	76.500,00	-	76.500,00	-	-	76.500,00
2024	1.02.2.14.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Barang Pakai Habis-AsalBahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Belanja AsialBahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fotocopy) dalam rangka kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Operasional Rumah Tunggu Kelahiran Rumah Singgah Pasien di Samarinda) Bulan November 2024 sesuai dengan buku-buku terlampir	BENDAHARA PENGELUARAN	-	70.000,00	-	70.000,00	-	-	70.000,00
2024	1.02.2.14.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Barang Pakai Habis-AsalBahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Belanja AsialBahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fotocopy) dalam rangka kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Operasional Rumah Tunggu Kelahiran Rumah Singgah Pasien di Samarinda) Bulan Desember 2024 sesuai dengan buku-buku terlampir	BENDAHARA PENGELUARAN	-	127.750,00	-	127.750,00	-	-	127.750,00
2024	1.02.2.14.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Barang Pakai Habis-AsalBahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Belanja AsialBahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fotocopy) dalam rangka kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Operasional Rumah Tunggu Kelahiran Rumah Singgah Pasien di Samarinda) Bulan Desember 2024 sesuai dengan buku-buku terlampir	BENDAHARA PENGELUARAN	-	165.250,00	-	165.250,00	-	-	165.250,00
2024	1.02.2.14.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Ige)	Belanja Pemeliharaan AC dengan nomor SPB: 440.0275643DINKES POKB-TU.P/2024 Dalam Rangka Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Tiong Chang dan Pustu tanggal 21 October 2024, Sesuai dengan Nota dan Buku Terlampir.	BENDAHARA PENGELUARAN	-	1.600.000,00	-	1.600.000,00	-	-	1.600.000,00
2024	1.02.2.14.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Ige)	Belanja Pemeliharaan AC dengan nomor SPB: 440.0274071DINKES POKB-TU.P/2024 Dalam Rangka Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Tiong Chang dan Pustu tanggal 15 November 2024, Sesuai dengan Nota dan Buku Terlampir.	BENDAHARA PENGELUARAN	-	1.600.000,00	-	1.600.000,00	-	-	1.600.000,00
2024	1.02.2.14.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan Lainnnya	Belanja obat-obat lainnya /Lipid No. SPB : 440.0270807PPK-DINKES POKB/2024, dalam rangka kegiatan operasional pelayanan Puskesmas Laham bulan November 2024 sesuai nota terlampir	BENDAHARA PENGELUARAN	-	984.000,00	-	984.000,00	-	-	984.000,00
2024	1.02.2.14.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Jasa Kantor-Taghian Listrik	Belanja Taghian Listrik dengan nomor SPB: 440.001.10027DINKES POKB-TU.P Dalam Rangka Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Tiong Chang tanggal 18 Desember 2024, Sesuai dengan Nota dan Buku Terlampir.	BENDAHARA PENGELUARAN	-	1.002.750,00	-	1.002.750,00	-	-	1.002.750,00
2024	1.02.2.14.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Jasa Kantor-Taghian Listrik	Belanja Taghian Listrik dengan nomor SPB: 440.001.10295DINKES POKB-TU.P Dalam Rangka Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Tiong Chang tanggal 24 September 2024, Sesuai dengan Nota dan Buku Terlampir.	BENDAHARA PENGELUARAN	-	1.002.750,00	-	1.002.750,00	-	-	1.002.750,00
2024	1.02.2.14.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Jasa Kantor-Taghian Listrik	Belanja Taghian Listrik dengan nomor SPB: 440.001.10333DINKES POKB-TU.P Dalam Rangka Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Tiong Chang tanggal 11 October 2024, Sesuai dengan Nota dan Buku Terlampir.	BENDAHARA PENGELUARAN	-	1.002.750,00	-	1.002.750,00	-	-	1.002.750,00
2024	1.02.2.14.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Jasa Kantor-Taghian Listrik	Belanja Taghian Listrik dengan nomor SPB: 440.001.10384DINKES POKB-TU.P Dalam Rangka Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Tiong Chang tanggal 01 November 2024, Sesuai dengan Nota dan Buku Terlampir.	BENDAHARA PENGELUARAN	-	1.002.750,00	-	1.002.750,00	-	-	1.002.750,00
2024	1.02.2.14.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Jasa Kantor-Taghian Listrik	Belanja Taghian Listrik dengan nomor SPB: 440.001.10424DINKES POKB-TU.P Dalam Rangka Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Tiong Chang tanggal 20 November 2024, Sesuai dengan Nota dan Buku Terlampir.	BENDAHARA PENGELUARAN	-	2.005.500,00	-	2.005.500,00	-	-	2.005.500,00
2024	1.02.2.14.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Jasa Kantor-Taghian Air	Belanja pengisian ulang air Galon dalam rangka Operasional UPTD Puskesmas Long Pahangai bulan November 2024, Sesuai dengan nota dan Buku Terlampir.	BENDAHARA PENGELUARAN	-	200.000,00	-	200.000,00	-	-	200.000,00
2024	1.02.2.14.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Jasa Kantor-Taghian Air	Belanja Pengisian ulang air Galon dalam rangka Operasional UPTD Puskesmas Long Pahangai bulan Desember 2024, sesuai dengan nota dan Buku Terlampir.	BENDAHARA PENGELUARAN	-	200.000,00	-	200.000,00	-	-	200.000,00
2024	1.02.2.14.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Jasa Kantor-Taghian Air	Belanja Taghian Air ke Ulang Air Galon Sebanyak 15 Galon Dengan Nomor SPB : 440.001.10024DINKES POKB TU.P Dalam Rangka Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Tiong Chang Bulan November 2024, Sesuai dengan Nota dan Buku Terlampir.	BENDAHARA PENGELUARAN	-	150.000,00	-	150.000,00	-	-	150.000,00
2024	1.02.2.14.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Jasa Kantor-Taghian Air	Belanja ke Ulang Air Minum 25 Jergen Dalam Rangka Kegiatan Optimalsasi Pelayanan Puskesmas Mamahak Besar Bulan Oktober 2024 sesuai dengan Nota dan Buku Terlampir.	BENDAHARA PENGELUARAN	-	250.000,00	-	250.000,00	-	-	250.000,00
2024	1.02.2.14.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Jasa Kantor-Taghian Air	Belanja ke Ulang Air Minum 25 Jergen Dalam Rangka Kegiatan Optimalsasi Pelayanan Puskesmas Mamahak Besar Bulan November 2024 sesuai dengan Nota dan Buku Terlampir.	BENDAHARA PENGELUARAN	-	250.000,00	-	250.000,00	-	-	250.000,00
2024	1.02.2.14.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Jasa Kantor-Taghian Air	Belanja ke Ulang Air Minum 25 Jergen Dalam Rangka Kegiatan Optimalsasi Pelayanan Puskesmas Mamahak Besar Bulan November 2024 sesuai dengan Nota dan Buku Terlampir.	BENDAHARA PENGELUARAN	-	250.000,00	-	250.000,00	-	-	250.000,00
2024	1.02.2.14.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Barang Pakai Habis-AsalBahan untuk Kegiatan Kantor-Perengkapan Dinas	Belanja Perengkapan Kantor (Baju, Celak, Rapi) Dalam Rangka Kegiatan Optimalsasi Pelayanan Puskesmas Mamahak Besar Bulan Desember 2024 sesuai dengan Nota dan Buku Terlampir.	BENDAHARA PENGELUARAN	440.000549SDINKES - 295-TU.P	8.342.400,00	-	8.342.400,00	-	-	8.342.400,00
2024	1.02.2.14.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Barang Pakai Habis-AsalBahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Kegiatan Belanja AsialBahan Perabot Kantor Puskesmas Tiong Chang (Kursi Lipat) dengan nomor SPK : 440.02748791.1PPK-DINKES POKB pada tanggal 20 Desember 2024.	CV. MAHESA SWANABAHUMI	440.0274879.11PPK-DINKES POKB	12.630.000,00	-	12.630.000,00	-	-	12.630.000,00
2024	1.02.2.14.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Barang Pakai Habis-AsalBahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Penyediaan Administrasi Belanja Model Dispenser (1 unit) PKM Members, CV. Tepian Teknologi, dengan nomor SPK : 440.0271712.575PPKPKMAMB-PPK/2023, Tanggal 01 November 2023	CV. TEPIAN TEKNOLOGI	440.0271712.575PPKPKMAMB-PPK/2023	977.000,00	-	977.000,00	-	-	977.000,00
2024	1.02.2.14.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Barang Pakai Habis-AsalBahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Penyediaan Administrasi Belanja Model Kipas Angin (3 unit) PKM Members, CV. Tepian Teknologi, 440.0271712.585PPKPKMAMB-PPK/2023	CV. TEPIAN TEKNOLOGI	440.0271712.585PPKPKMAMB-PPK/2023	5.400.000,00	-	5.400.000,00	-	-	5.400.000,00
2024	1.02.2.14.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Barang Pakai Habis-AsalBahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Belanja Alat Listrik: Booster Lilium No. SPB : 440.0274688PPK-DINKES POKB/2024, Kegiatan Pelayanan Operasional Puskesmas Laham Bulan Desember 2024 sesuai nota terlampir.	CV. BUNTU LIMBONG	440.0274688PPK-DINKES POKB/2024	37.190.000,00	-	37.190.000,00	-	-	37.190.000,00
2024	1.02.2.14.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Model Alat Rumah Tangga-Mebel	Belanja Model Perabotan: Kipas Angin No. SPB : 440.0274634PPK-DINKES POKB/2024, Kegiatan Pelayanan Operasional Puskesmas Laham Bulan Desember 2024 sesuai nota terlampir.	CV. BUNTU LIMBONG	440.0274634PPK-DINKES POKB/2024	4.518.000,00	-	4.518.000,00	-	-	4.518.000,00
2024	1.02.2.14.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja barang Pakai Habis-AsalBahan untuk Kegiatan Kantor-AlatBahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Belanja Bahan Untuk Kegiatan Kantor (Container Box) No. SPB : 440.0274634PPK-DINKES POKB/2024, kegiatan pelayanan operasional Puskesmas Laham bulan Desember 2024 sesuai nota terlampir	CV. BUNTU LIMBONG	440.0274634PPK-DINKES POKB/2024	1.164.000,00	-	1.164.000,00	-	-	1.164.000,00

Tahun Pengisian Hutang	Kode OPD	Nama OPD	Jenis Hutang Belanja	Urutan Nama Kegiatan/Pekerjaan	Nama Rekanan	Nomor Kontrak	SALDO UTANG 2023	Koreksi	saldo setelah koreksi	NOMOR SP2D	NLAI SP2D	SALDO UTANG 2024
2024	1.02.2.14.0.02.02.000	Diras Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Cat Chisel-Cat- Obat Lain-lainya	Belanja Obat Chisel RSL NDD dengan Nomor SPK : 440.02776.3182PPK-DINKES POKB	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA	440.0276.3182PPK- DINKES POKB	1.225.400,00	-	1.225.400,00	-	-	1.225.400,00
2024	1.02.2.14.0.02.02.000	Diras Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Cibat KB dengan nomor SPK : 440.0275275.7059PKDINKES POKB/PKX/2024, pada tanggal 2 Desember 2024	CV. HANZ ATHALLAH GROUP	440.0275275.7059PKDIN KES POKB-PPKX/2024	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00
2024	1.02.2.14.0.02.02.000	Diras Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Model Komputer Unit-Personal Computer	Pengadaan Perlatan dan Perengkapan Kantor Dampak Pasca Bangi Putu Nohu Tribu-Belanja Model Perlatan Kantor Laptop dengan Nomor SPK : 440.0275005PPK-DINKES POKB/X/2024 pada tanggal 23 November 2024	CV. MASHA	440.0275005PPK- DINKES POKB/X/2024	7.850.000,00	-	7.850.000,00	-	-	7.850.000,00
2024	1.02.2.14.0.02.02.000	Diras Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Model Komputer Unit Lainnya	Pengadaan Perlatan dan Perengkapan Kantor Dampak Pasca Bangi Putu Nohu Tribu-Belanja Model Perlatan Kantor Laptop dengan nomor SPK : 440.0275006PPK-DINKES POKB/X/2024 pada tanggal 28 November 2024	CV. MASHA	440.0275006PPK- DINKES POKB/X/2024	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
2024	1.02.2.14.0.02.02.000	Diras Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Model Alat Rumah Tangga-Mebel	Pengadaan Perlatan dan Perengkapan Kantor Dampak Pasca Bangi Putu Nohu Tribu-Belanja Model Perlatan Kantor Kursi Selektasi dengan nomor SPK : 440.0274836PPK-DINKES POKB/X/2024 PADA TANGGAL 15 November 2024	CV. MASHA	440.0274836PPK- DINKES POKB/X/2024	11.200.000,00	-	11.200.000,00	-	-	11.200.000,00
2024	1.02.2.14.0.02.02.000	Diras Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Model Perlatan Komputer Peralatan Personal Computer	Pengadaan Perlatan dan Perengkapan Kantor Dampak Pasca Bangi Putu Nohu Tribu-Belanja Model Perlatan kantor Mesin Printer dengan nomor SPK : 440.0275059.61PPK-DINKES POKB/X/2024 pada tanggal 23 November 2024	CV. MASHA	440.0275059.61PPK- DINKES POKB/X/2024	4.600.000,00	-	4.600.000,00	-	-	4.600.000,00
2024	1.02.2.14.0.02.02.000	Diras Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Model Perlatan Komputer Peralatan Personal Computer	Pengadaan Perlatan dan Perengkapan Kantor Dampak Pasca Bangi Putu Nohu Tribu-Belanja Model Perlatan kantor Mesin Printer dengan nomor SPK : 440.0275007PPK-DINKES POKB/X/2024 pada tanggal 23 November 2024	CV. MASHA	440.0275007PPK- DINKES POKB/X/2024	4.600.000,00	-	4.600.000,00	-	-	4.600.000,00
2024	1.02.2.14.0.02.02.000	Diras Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Model Alat Rumah Tangga-Mebel	Pengadaan Perlatan dan Perengkapan Kantor Dampak Pasca Bangi Putu Nohu Tribu-Belanja Model Perlatan kantor AC Split dengan nomor SPK : 440.0275009PPK-DINKES POKB/X/2024 pada tanggal 25 November 2024	CV. MASHA	440.0275009PPK- DINKES POKB/X/2024	9.450.000,00	-	9.450.000,00	-	-	9.450.000,00
2024	1.02.2.14.0.02.02.000	Diras Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Model Alat Rumah Tangga-Mebel	Pengadaan Perlatan dan Perengkapan Kantor Dampak Pasca Bangi Putu Nohu Tribu-Belanja Model Perlatan Rumah Tangga Kipas Angin dengan nomor SPK : 440.0275010PPK-DINKES POKB/X/2024 pada tanggal 25 November 2024	CV. MASHA	440.0275010PPK- DINKES POKB/X/2024	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00
2024	1.02.2.14.0.02.02.000	Diras Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Model Alat Rumah Tangga-Mebel	Pengadaan Perlatan dan Perengkapan Kantor Dampak Pasca Bangi Putu Nohu Tribu-Belanja Model Perlatan Rumah Tangga Kipas Angin dengan nomor SPK : 440.0275011PPK-DINKES POKB/X/2024 pada tanggal 02 Desember 2024	CV. MASHA	440.0275011PPK- DINKES POKB/X/2024	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
2024	1.02.2.14.0.02.02.000	Diras Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Model Komputer Unit Lainnya	Pengadaan Perlatan dan Perengkapan Kantor Dampak Pasca Bangi Putu Nohu Tribu-Belanja Model Perlatan Rumah Tangga Desktop dengan nomor SPK : 440.0275059.58PPK-DINKES POKB/X/2024 pada tanggal 23 November 2024	CV. MASHA	440.0275059.58PPK- DINKES POKB/X/2024	12.900.000,00	-	12.900.000,00	-	-	12.900.000,00
2024	1.02.2.14.0.02.02.000	Diras Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Model Alat Rumah Tangga-Mebel	Pengadaan Perlatan dan Perengkapan Kantor Dampak Pasca Bangi Putu Nohu Tribu-Belanja Model Perlatan Rumah Tangga Desktop dengan nomor SPK : 440.0275012PPK-DINKES POKB/X/2024 pada tanggal 20 November 2024	CV. MASHA	440.0275012PPK- DINKES POKB/X/2024	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
2024	1.02.2.14.0.02.02.000	Diras Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Model Alat Rumah Tangga-Mebel	Pengadaan Perlatan dan Perengkapan Kantor Dampak Pasca Bangi Putu Nohu Tribu-Belanja Model Perlatan Rumah Tangga Dispenser dengan nomor SPK : 440.0275013PPK-DINKES POKB/X/2024 pada tanggal 02 Desember 2024	CV. MASHA	440.0275013PPK- DINKES POKB/X/2024	6.020.000,00	-	6.020.000,00	-	-	6.020.000,00
2024	1.02.2.14.0.02.02.000	Diras Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Model Alat Kantor Lainnya	Pengadaan Perlatan dan Perengkapan Kantor Dampak Pasca Bangi Putu Nohu Tribu-Belanja Model Perlatan Kantor Projector dengan nomor SPK : 440.0275059.58PPK-DINKES POKB/X/2024 pada tanggal 25 November 2024	CV. MASHA	440.0275059.58PPK- DINKES POKB/X/2024	12.900.000,00	-	12.900.000,00	-	-	12.900.000,00
2024	1.02.2.14.0.02.02.000	Diras Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Model Alat Rumah Tangga-Mebel	Pengadaan Perlatan dan Perengkapan Kantor Dampak Pasca Bangi Putu Nohu Tribu-Belanja Model Perlatan Rumah Tangga dengan nomor SPK : 440.0275059.62PPK-DINKES POKB/X/2024 pada tanggal 23 November 2024	CV. MASHA	440.0275059.62PPK- DINKES POKB/X/2024	51.000.000,00	-	51.000.000,00	-	-	51.000.000,00
2024	1.02.2.14.0.02.02.000	Diras Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Model Alat Kantor Lainnya	Pengadaan Perlatan dan Perengkapan Kantor Dampak Pasca Bangi Putu Nohu Tribu-Belanja Model Perlatan Rumah Tangga Kipas Angin dengan nomor SPK : 440.0275014PPK-DINKES POKB/X/2024 pada tanggal 20 November 2024	CV. MASHA	440.0275014PPK- DINKES POKB/X/2024	1.450.000,00	-	1.450.000,00	-	-	1.450.000,00
2024	1.02.2.14.0.02.02.000	Diras Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Model Alat Rumah Tangga-Mebel	Pengadaan Perlatan dan Perengkapan Kantor Dampak Pasca Bangi Putu Nohu Tribu-Belanja Model Perlatan Rumah Tangga Kipas Angin dengan nomor SPK : 440.0275015PPK-DINKES POKB/X/2024 pada tanggal 23 November 2024	CV. MASHA	440.0275015PPK- DINKES POKB/X/2024	9.300.000,00	-	9.300.000,00	-	-	9.300.000,00
2024	1.02.2.14.0.02.02.000	Diras Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Model Perlatan Komputer Peralatan Personal Computer	Pengadaan Perlatan dan Perengkapan Kantor Dampak Pasca Bangi Putu Nohu Tribu-Belanja Model Perlatan PC Desktop dengan nomor SPK : 440.0275023.38PPK-DINKES POKB/X/2024 pada tanggal 30 November 2024	CV. MASHA	440.0275023.38PPK- DINKES POKB/X/2024	32.000.000,00	-	32.000.000,00	-	-	32.000.000,00
2024	1.02.2.14.0.02.02.000	Diras Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Model Perlatan Komputer Peralatan Personal Computer	Pengadaan Perlatan dan Perengkapan Kantor Dampak Pasca Bangi Putu Nohu Tribu-Belanja Model Perlatan Cctv dengan nomor SPK : 440.0275239.43PPK-DINKES POKB/X/2024 pada tanggal 30 November 2024	CV. MASHA	440.0275239.43PPK- DINKES POKB/X/2024	11.400.000,00	-	11.400.000,00	-	-	11.400.000,00
2024	1.02.2.14.0.02.02.000	Diras Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Model Perlatan Komputer Peralatan Personal Computer	Pengadaan Perlatan dan Perengkapan Kantor Dampak Pasca Bangi Putu Nohu Tribu-Belanja Model Perlatan Kanvas Printer dengan nomor SPK : 440.0275059.88PPK-DINKES POKB/X/2024 pada tanggal 23 November 2024	CV. MASHA	440.0275059.88PPK- DINKES POKB/X/2024	11.200.000,00	-	11.200.000,00	-	-	11.200.000,00
2024	1.02.2.14.0.02.02.000	Diras Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Model Alat Studio Peralatan Studio Audio	Pengadaan Perlatan dan Perengkapan Kantor Dampak Pasca Bangi Putu Nohu Tribu-Belanja Model Perlatan Komputer (UPS) dengan nomor SPK : 440.0275059PPK-DINKES POKB/X/2024 pada tanggal 25 November 2024	CV. MASHA	440.0275059PPK- DINKES POKB/X/2024	6.350.000,00	-	6.350.000,00	-	-	6.350.000,00
2024	1.02.2.14.0.02.02.000	Diras Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Model Komputer Unit Lainnya	Pengadaan Perlatan dan Perengkapan Kantor Dampak Pasca Bangi Putu Nohu Tribu-Belanja Model Perlatan Kantor Mesin Printer dengan nomor SPK : 440.0275011PPK-DINKES POKB/X/2024 pada tanggal 23 November 2024	CV. MASHA	440.0275011PPK- DINKES POKB/X/2024	31.800.000,00	-	31.800.000,00	-	-	31.800.000,00
2024	1.02.2.14.0.02.02.000	Diras Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Model Alat Studio Peralatan Studio Audio	Pengadaan Perlatan dan Perengkapan Kantor Dampak Pasca Bangi Putu Nohu Tribu-Belanja Model Perlatan Laptop dengan nomor SPK : 440.0275239.43PPK-DINKES POKB/X/2024 pada tanggal 23 November 2024	CV. MASHA	440.0275239.43PPK- DINKES POKB/X/2024	47.100.000,00	-	47.100.000,00	-	-	47.100.000,00
2024	1.02.2.14.0.02.02.000	Diras Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Model Komputer Unit Lainnya	Pengadaan Perlatan dan Perengkapan Kantor Dampak Pasca Bangi Putu Nohu Tribu-Belanja Model Perlatan Kantor PC Desktop dengan nomor SPK : 440.0275010.9PPK-DINKES POKB/X/2024 pada tanggal 23 November 2024	CV. MASHA	440.0275010.9PPK- DINKES POKB/X/2024	15.900.000,00	-	15.900.000,00	-	-	15.900.000,00
2024	1.02.2.14.0.02.02.000	Diras Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	Utang Belanja Model Komputer Unit Lainnya	Pengadaan Perlatan dan Perengkapan Kantor Dampak Pasca Bangi Putu Nohu Tribu-Belanja Model Perlatan PC Desktop dengan nomor SPK : 440.0275005PPK-DINKES POKB/X/2024 pada tanggal 23 November 2024	CV. MASHA	440.0275005PPK- DINKES POKB/X/2024	64.000.000,00	-	64.000.000,00	-	-	64.000.000,00
2024	1.01.2.22.5.04.01.000	Diras Pendidikan dan Kebudayaan	Utang Belanja Model Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pembayaran 100% PERENCANAAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SDN 007 MAMAHAK	CV. MSP ENGINEERING	425/7642Dikdas.104bud	99.335.000,00	-	99.335.000,00	-	-	99.335.000,00
2024	1.01.2.22.5.04.01.000	Diras Pendidikan dan Kebudayaan	Utang Belanja Model Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pembayaran 100% PERENCANAAN PEMBANGUNAN KANTOR SDN 003 LONG BAGUN ILIR	CV. MSP ENGINEERING	425/7641.3Dikdas.104ibu g	99.335.000,00	-	99.335.000,00	-	-	99.335.000,00
2024	1.03.1.04.0.03.03.000	Diras Pelayanan Umum dan Pemasaran Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Respon untuk	PERENCANAAN MASJID DATAH-BILANG ILIR	CV. SAMAR TEKNIK PUSKES II T	066905PPK-PLDPPK- JLSNPPK-APBN PUSKES II T	99.999.700,00	-	99.999.700,00	-	-	99.999.700,00
2024	1.03.1.04.0.03.03.000	Diras Pelayanan Umum dan Pemasaran Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Respon untuk	LANJUTAN SEMENASIS JALAN SMA DATAH-BILANG	CV. BENUA KARYA	62010275PPK-SPPK- JLSNPPK-APBN PUSKES II T	199.998.000,00	-	199.998.000,00	-	-	199.998.000,00
2024	1.03.1.04.0.03.03.000	Diras Pelayanan Umum dan Pemasaran Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Respon untuk	SEMENASIS HALAMAN MASJID DAN DRAINASE PUSKESMAS LONG BILANG ILIR	CV. ABEL GJ C/NOB/1719	6200966PPK-1719PPK- JLSNPPK-APBN PUSKES II T	390.166.068,00	-	390.166.068,00	-	-	390.166.068,00
2024	1.03.1.04.0.03.03.000	Diras Pelayanan Umum dan Pemasaran Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Respon untuk	SEMENASIS JALAN MASJID AL PAJAN LONG HUBUNG	CV. BENUA KARYA	62010248PPK-SPPK- JLSNPPK-APBN PUSKES II T	179.565.000,00	-	179.565.000,00	-	-	179.565.000,00
2024	1.03.1.04.0.03.03.000	Diras Pelayanan Umum dan Pemasaran Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Respon untuk	PEMBANGUNAN JEMBATAN DI KAMPUNG LUTAN	CV. MAHESA SWARNA BAHUI	62010103PPK-SPPK- JLSNPPK-APBN PUSKES II T	179.864.000,00	-	179.864.000,00	-	-	179.864.000,00
2024	1.03.1.04.0.03.03.000	Diras Pelayanan Umum dan Pemasaran Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Respon untuk	SEMENASIS JALAN KAMPUNG DATAH-BILANG ILIR	CV. JALBER MARITIM	62010111PPK-SPPK- JLSNPPK-APBN PUSKES II T	179.694.000,00	-	179.694.000,00	-	-	179.694.000,00
2024	1.03.1.04.0.03.03.000	Diras Pelayanan Umum dan Pemasaran Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Respon untuk	SEMENASIS JALAN KAMPUNG LUTAN	CV. JALBER MARITIM	62010111PPK-SPPK- JLSNPPK-APBN PUSKES II T	179.694.000,00	-	179.694.000,00	-	-	179.694.000,00
2024	1.03.1.04.0.03.03.000	Diras Pelayanan Umum dan Pemasaran Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Respon untuk	SEMENASIS LANTAH BALAI DESA DATAH-BILANG BARU	CV. MAHESA SWARNA BAHUI	62010106PPK-SPPK- JLSNPPK-APBN PUSKES II T	179.565.000,00	-	179.565.000,00	-	-	179.565.000,00
2024	1.03.1.04.0.03.03.000	Diras Pelayanan Umum dan Pemasaran Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Respon untuk	SEMENASIS DI KAMPUNG MAMAHAK TEBEQ RTC	CV. BENUA KARYA	62010166PPK-SPPK- JLSNPPK-APBN PUSKES II T	179.962.000,00	-	179.962.000,00	-	-	179.962.000,00

Handwritten signature or mark.

Tahun Pengukuran Hutang	Kode OPD	Nama OPD	Jenis Hutang Belanja	Urutan Nama Kegiatan/Pekerjaan	Nama Rekanan	Nomor Kontrak	SALDO UTANG 2023	Koreksi	saldo setelah koreksi	NOMOR SP2D	NLAI SP2D	SALDO UTANG 2024
2024	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	SEMENISASI GANG PUNCAK KAMPUNG DATAH BILANG BARU	CV.JALBER MARITIM	62010206FSKSPK- 0806K-APRO PCDUPPR- MUN02023	179.565.000,00	-	179.565.000,00	-	-	179.565.000,00
2024	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	REHAB MESSE POLSEK LONG HUBUNG	CV.BENUA KARYA	64001031FSKSPK- 0817CK-APRO PCDUPPR- MUN02023	199.977.000,00	-	199.977.000,00	-	-	199.977.000,00
2024	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	SEMENISASI JALAN DATAH BILANG ULU RT.03	CV.BENUA KARYA	620988FSKSPK- 0540CK-APRO PCDUPPR- MUN02023	199.998.000,00	-	199.998.000,00	-	-	199.998.000,00
2024	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	SEMENISASI GEREJA GPO KAMPUNG SIRAU	CV.BENUA KARYA	62010121FSKSPK- 0316CK-APRO PCDUPPR- MUN02023	179.953.000,00	-	179.953.000,00	-	-	179.953.000,00
2024	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	PENAMBAHAN PEMBANGUNAN GEREJA GKJ DATAH BILANG BARU	CV.SENTOSA TARUNA YASA	62010121FSKSPK- 0316CK-APRO PCDUPPR- MUN02023	199.960.000,00	-	199.960.000,00	-	-	199.960.000,00
2024	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	SEMENISASI JALAN KAMPUNG NYARIBUNGAN	CV. BENUA KARYA	62010311FSKSPK- 0760CK-APRO PCDUPPR- MUN02023	198.546.000,00	-	198.546.000,00	-	-	198.546.000,00
2024	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	PEMBANGUNAN GORONG-GORONG SADA I DATAH BILANG ULU	CV. JALBER MARITIM	611.37102031FSKSPK- 0910CK-APRO PCDUPPR- MUN02023	81.639.000,00	-	81.639.000,00	-	-	81.639.000,00
2024	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Modal Jalan- Jalan Kabupaten	SEMENISASI BADAN JALAN SMPAN RT KE SMPN 4 MAMAHAK TEROQ	CV. BENUA KARYA	027.28020420FSKSPK- TDRSPK-JALUKU- APROCDUPPR-MUN02023	258.300.000,00	-	258.300.000,00	-	-	258.300.000,00
2024	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	SEMENISASI RT. 3 DATAH BILANG ULU	CV. BENUA KARYA	620987FSKSPK- 0503CK-APRO PCDUPPR- MUN02023	199.998.000,00	-	199.998.000,00	-	-	199.998.000,00
2024	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	PEMBANGUNAN GEDUNG PKK	CV. AXEL GJ CONTRACTOR	64001031FSKSPK- 2004APROCDUPPR- MUN02023	840.000.000,00	-	840.000.000,00	-	-	840.000.000,00
2024	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Modal Jalan- Jalan Kabupaten	LANJUTAN PENINGKATAN JALAN POROS PU DATAH BILANG	CV. SENTOSA TARUNA YASA	6205717SPKSPK- BM 4JAAPROCDUPPR- MUN02023	680.328.990,87	-	680.328.990,87	-	-	680.328.990,87
2024	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	PEMBANGUNAN JEMBATAN MENUJU JALAN POROS KAMPUNG LONG HURAI	CV. MAGDALENA ZASKA MAHAMAK	68010201FSKSPK- 0817CK-APRO PCDUPPR- MUN02023	124.900.000,00	-	124.900.000,00	-	-	124.900.000,00
2024	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	PEMBANGUNAN PAGAR GEREJA LONG HURAI	CV. MAGDALENA ZASKA MAHAMAK	621.82102031FSKSPK- 0806CK-APRO PCDUPPR- MUN02023	124.900.000,00	-	124.900.000,00	-	-	124.900.000,00
2024	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Modal Jalan- Jalan Kabupaten	Pembukaan dan Peningkatan Jalan Mengarah Batu Dinding Setengah	CV. CAHYA BUKU	62010310FSKSPK-BM- 36APROCDUPPR- JALUKU02023	1.488.604.000,00	-	1.488.604.000,00	16.1604.00000931/5/1.03.1.04.0.00.03.0000P.021202023	864.200.000,00	864.214.000,00
2024	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Pembukaan Badan Jalan Sungai Arau Long Melaham	CV. RAHEN JAYA ABADI	6201178SPKFSK-PL-BM- 63JAPRO PCDUPPR- MUN02023	199.700.000,00	-	199.700.000,00	-	-	199.700.000,00
2024	4.01.0.00.0.00.14.0000	Selektariat Daerah	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang-Bahan Bakar dan Pelumas	PENGISAPAN TAMBAHAN BBM DI DEPOT KUBAH TERING MENUJU KE PENYINGGAHAN UNTUK MEMBAWA BAPAK BUDIATI KAB MAHULU DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS KE PROPINSI KALTIM DI SAMARINDA (SB MAHULU 01 BARU 300 HP X 3 UNIT) SESUAI NOTA BELANJA TANGGAL 27 DESEMBER 2024 AN SOMON DALEQ.	BENDAHARA PENGEUARAN	-	6.750.000,00	-	6.750.000,00	-	-	6.750.000,00
2024	4.01.0.00.0.00.14.0000	Selektariat Daerah	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang-Bahan Bakar dan Pelumas	PENGISAPAN TAMBAHAN BBM DI DEPOT TOKO AJULA PENYINGGAHAN MENUJU KE KOTA BANGUN UNTUK MEMBAWA BAPAK BUDIATI KAB MAHULU DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS KE PROPINSI KALTIM DI SAMARINDA (SB MAHULU 01 BARU 300 HP X 3 UNIT) SESUAI NOTA BELANJA TANGGAL 27 DESEMBER 2024 AN SOMON DALEQ.	BENDAHARA PENGEUARAN	-	5.360.000,00	-	5.360.000,00	-	-	5.360.000,00
2024	4.01.0.00.0.00.14.0000	Selektariat Daerah	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang-Bahan Bakar dan Pelumas	PENGISAPAN TAMBAHAN BBM DI DEPOT PANCAR MAS KOTA BANGUN MENUJU KE SAMARINDA UNTUK MEMBAWA BAPAK BUDIATI KAB MAHULU DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS KE PROPINSI KALTIM DI SAMARINDA (SB MAHULU 01 BARU 300 HP X 3 UNIT) SESUAI NOTA BELANJA TANGGAL 27 DESEMBER 2024 AN SOMON DALEQ.	BENDAHARA PENGEUARAN	-	7.920.000,00	-	7.920.000,00	-	-	7.920.000,00
2024	4.01.0.00.0.00.14.0000	Selektariat Daerah	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang-Bahan Bakar dan Pelumas	PERSIAPAN PENGISAPAN TAMBAHAN BBM DI DEPOT TEPIAN INDAH SAMARINDA MENUJU KE KOTA BANGUN UNTUK MEMBAWA BAPAK BUDIATI KAB MAHULU DALAM RANGKA PULANG KEMBALI SETELAH SELESA MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS KE PROPINSI KALTIM DI SAMARINDA (SB MAHULU 01 BARU 300 HP X 3 UNIT) SESUAI NOTA BELANJA TANGGAL 28 DESEMBER 2024 AN SOMON DALEQ.	BENDAHARA PENGEUARAN	-	9.100.000,00	-	9.100.000,00	-	-	9.100.000,00
2024	4.01.0.00.0.00.14.0000	Selektariat Daerah	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang-Bahan Bakar dan Pelumas	PENGISAPAN TAMBAHAN BBM DI DEPOT PANCAR MAS KOTA BANGUN KE PENYINGGAHAN UNTUK MEMBAWA BAPAK BUDIATI KAB MAHULU DALAM RANGKA PULANG KEMBALI SETELAH SELESA MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS KE PROPINSI KALTIM DI SAMARINDA (SB MAHULU 01 BARU 300 HP X 3 UNIT) SESUAI NOTA BELANJA TANGGAL 29 DESEMBER 2024 AN SOMON DALEQ.	BENDAHARA PENGEUARAN	-	10.296.000,00	-	10.296.000,00	-	-	10.296.000,00
2024	4.01.0.00.0.00.14.0000	Selektariat Daerah	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang-Bahan Bakar dan Pelumas	PENGISAPAN TAMBAHAN BBM DI DEPOT TOKO AJULA PENYINGGAHAN MENUJU KE TERING UNTUK MEMBAWA BAPAK BUDIATI KAB MAHULU DALAM RANGKA PULANG KEMBALI SETELAH SELESA MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS KE PROPINSI KALTIM DI SAMARINDA (SB MAHULU 01 BARU 300 HP X 3 UNIT) SESUAI NOTA BELANJA TANGGAL 29 DESEMBER 2024 AN SOMON DALEQ.	BENDAHARA PENGEUARAN	-	6.030.000,00	-	6.030.000,00	-	-	6.030.000,00
2024	4.01.0.00.0.00.14.0000	Selektariat Daerah	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang-Bahan Bakar dan Pelumas	PENGISAPAN TAMBAHAN BBM DI DEPOT KUBAH TERING MENUJU KE LUKUH BILANG UNTUK MEMBAWA BAPAK BUDIATI KAB MAHULU DALAM RANGKA PULANG KEMBALI SETELAH SELESA MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS KE PROPINSI KALTIM DI SAMARINDA (SB MAHULU 01 BARU 300 HP X 3 UNIT) SESUAI NOTA BELANJA TANGGAL 29 DESEMBER 2024 AN SOMON DALEQ.	BENDAHARA PENGEUARAN	-	8.910.000,00	-	8.910.000,00	-	-	8.910.000,00
2024	4.01.0.00.0.00.14.0000	Selektariat Daerah	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang-Bahan Bakar dan Pelumas	PENGISAPAN TAMBAHAN BBM DAN PELUMAS DI DEPOT PANCAR MAS KOTA BANGUN MENUJU KE SAMARINDA UNTUK MEMBAWA SEKRETARIS DAERAH KAB MAHULU DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS DI SAMARINDA PROPINSI KALTIM (SB MAHULU 04) SESUAI NOTA BELANJA TANGGAL 27 DESEMBER 2024 AN LUKAS TULU.	BENDAHARA PENGEUARAN	-	9.450.000,00	-	9.450.000,00	-	-	9.450.000,00
2024	4.01.0.00.0.00.14.0000	Selektariat Daerah	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang-Bahan Bakar dan Pelumas	PERSIAPAN PENGISAPAN TAMBAHAN BBM DAN PELUMAS DI DEPOT TEPIAN INDAH SAMARINDA MENUJU KE KOTA BANGUN UNTUK MEMBAWA SEKRETARIS DAERAH KAB MAHULU DALAM RANGKA PULANG KEMBALI SETELAH SELESA MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS DI SAMARINDA PROPINSI KALTIM (SB MAHULU 04) SESUAI NOTA BELANJA TANGGAL 28 DESEMBER 2024 AN LUKAS TULU.	BENDAHARA PENGEUARAN	-	7.800.000,00	-	7.800.000,00	-	-	7.800.000,00
2024	4.01.0.00.0.00.14.0000	Selektariat Daerah	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang-Bahan Bakar dan Pelumas	PENGISAPAN TAMBAHAN BBM DAN PELUMAS DI DEPOT PANCAR MAS KOTA BANGUN MENUJU KE TERING UNTUK MEMBAWA SEKRETARIS DAERAH KAB MAHULU DALAM RANGKA PULANG KEMBALI SETELAH SELESA MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS DI SAMARINDA PROPINSI KALTIM (SB MAHULU 04) SESUAI NOTA BELANJA TANGGAL 29 DESEMBER 2024 AN LUKAS TULU.	BENDAHARA PENGEUARAN	-	10.770.000,00	-	10.770.000,00	-	-	10.770.000,00
2024	4.01.0.00.0.00.14.0000	Selektariat Daerah	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang-Bahan Bakar dan Pelumas	PENGISAPAN TAMBAHAN BBM DAN PELUMAS DI DEPOT KUBAH TERING MENUJU KE LUKUH BILANG UNTUK MEMBAWA SEKRETARIS DAERAH KAB MAHULU DALAM RANGKA PULANG KEMBALI SETELAH SELESA MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS DI SAMARINDA PROPINSI KALTIM (SB MAHULU 04) SESUAI NOTA BELANJA TANGGAL 29 DESEMBER 2024 AN LUKAS TULU.	BENDAHARA PENGEUARAN	-	9.360.000,00	-	9.360.000,00	-	-	9.360.000,00
2024	5.01.5.02.5.05.21.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Utang Belanja Jasa Komor- Kawaf(Faksimil)InternetTV Reflektansi	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik - Belanja Kawaf(Faksimil)InternetTV, Pengembangan/Internet Voad Bulat Juli 2024)	PT. Lintasmaya Multi Media	075045.5/8uppelttangsda	41.070.000,00	-	41.070.000,00	-	-	41.070.000,00

Tahun Pengisian Hutang	Kode OPD	Nama OPD	Jenis Hutang Belanja	Uraian Nama Kegiatan/Pekerjaan	Nama Rekanan	Nomor Kontrak	SALDO UTANG 2023	Koreksi	saldo setelah koreksi	NOMOR SP2D	NLAI SP2D	SALDO UTANG 2024
2024	1.06.2.08.0.00.05.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perindungan Anak	Utang Belanja Jasa yang Dibebankan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat/ Jasa yang Dibebankan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Utang Pembayaran Layanan Kesehatan Pasien Jiwa di RSJ Awa Husada dan Tahun 2025 s/d 2022	BENDAHARA PENGELUARAN	-	194.688.573,00	-	194.688.573,00	-	-	194.688.573,00
2024	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai, Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Perencanaan Semenisasi RT 3 Datarah Bilang Ulu	CV. SAMAR TEKNIK CONSULT	056934PRIC-PLUSPK-053CK-APBD PJPUPR-MUN2023	11.965.800,00	-	11.965.800,00	-	-	11.965.800,00
2024	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai, Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Pengawasan Optimalisasi SPAM Datarah Bilang	CV DIVANIA DESIGN CONSULTANT	700010SPKPKWS-053CK-APBD PJPUPR-MUN2023	99.700.000,00	-	99.700.000,00	-	-	99.700.000,00
2024	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai, Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Perencanaan Semenisasi Jalan Datarah Bilang Ulu RT 03	CV SAMAR TEKNIK CONSULT	056936PRIC-PLUSPK-054CK-APBD PJPUPR-MUN2023	14.962.800,00	-	14.962.800,00	-	-	14.962.800,00
2024	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai, Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Perencanaan Pembangunan Jembatan Tasak Datarah Bilang Ilir	CV. SAMAR TEKNIK CONSULT	056937PRIC-PLUSPK-052CK-APBD PJPUPR-MUN2023	11.965.800,00	-	11.965.800,00	-	-	11.965.800,00
2024	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai, Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Perencanaan Penambatan Pembangunan Gereja GKI Datarah Bilang Baru	CV SAMAR TEKNIK CONSULT	056938PRIC-PLUSPK-053CK-APBD PJPUPR-MUN2023	24.841.800,00	-	24.841.800,00	-	-	24.841.800,00
2024	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai, Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Perencanaan Pembangunan Gorong Gorong Seta 1 Datarah Bilang Ulu	CV SAMAR TEKNIK CONSULT	056939PRIC-PLUSPK-053CK-APBD PJPUPR-MUN2023	7.969.800,00	-	7.969.800,00	-	-	7.969.800,00
2024	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai, Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Perencanaan Semenisasi Jalan Kampung Datarah Bilang Ilir	CV SAMAR TEKNIK CONSULT	056940PRIC-PLUSPK-054CK-APBD PJPUPR-MUN2023	9.967.800,00	-	9.967.800,00	-	-	9.967.800,00
2024	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai, Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Perencanaan Pembangunan Jembatan Jalan Poros PU Datarah Bilang	CV SAMAR TEKNIK CONSULT	056950PRIC-PLUSPK-071CK-APBD PJPUPR-MUN2023	9.967.800,00	-	9.967.800,00	-	-	9.967.800,00
2024	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai, Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Perencanaan Semenisasi Gang Puncak di Kampung Datarah Bilang Baru	CV. SAMAR TEKNIK CONSULT	056952PRIC-PLUSPK-053CK-APBD PJPUPR-MUN2023	9.967.800,00	-	9.967.800,00	-	-	9.967.800,00
2024	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai, Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Perencanaan Semenisasi Lantai Balok Datarah Bilang Baru	CV. SAMAR TEKNIK CONSULT	056943PRIC-PLUSPK-053CK-APBD PJPUPR-MUN2023	9.967.800,00	-	9.967.800,00	-	-	9.967.800,00
2024	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai, Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Perencanaan Pembangunan Drainase Kampung Metalibag	CV. SAMAR TEKNIK CONSULT	056944PRIC-PLUSPK-043CK-APBD PJPUPR-MUN2023	11.965.800,00	-	11.965.800,00	-	-	11.965.800,00
2024	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai, Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Perencanaan Rehabit Gereja Katolik SP 1	CV. SAMAR TEKNIK CONSULT	056945PRIC-PLUSPK-053CK-APBD PJPUPR-MUN2023	11.965.800,00	-	11.965.800,00	-	-	11.965.800,00
2024	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai, Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Perencanaan Pembangunan Jembatan di Kampung Lutan	CV. SAMAR TEKNIK CONSULT	056946PRIC-PLUSPK-034CK-APBD PJPUPR-MUN2023	9.967.800,00	-	9.967.800,00	-	-	9.967.800,00
2024	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai, Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Perencanaan Semenisasi Jalan Kampung Lutan	CV. SAMAR TEKNIK CONSULT	-	9.967.800,00	-	9.967.800,00	-	-	9.967.800,00
2024	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai, Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Perencanaan Semenisasi Gerga GPD di Kampung Srau	CV. SAMAR TEKNIK CONSULT	056948PRIC-PLUSPK-053CK-APBD PJPUPR-MUN2023	9.967.800,00	-	9.967.800,00	-	-	9.967.800,00
2024	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai, Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Perencanaan Semenisasi Jalan Masjid Al-Fajar Long Hubung	CV SAMAR TEKNIK CONSULT	056950PRIC-PLUSPK-071CK-APBD PJPUPR-MUN2023	9.967.800,00	-	9.967.800,00	-	-	9.967.800,00
2024	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai, Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Perencanaan Rehabit Mess Polsek Long Hubung	CV. SAMAR TEKNIK CONSULT	056951PRIC-PLUSPK-057CK-APBD PJPUPR-MUN2023	19.991.100,00	-	19.991.100,00	-	-	19.991.100,00
2024	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai, Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Perencanaan Semenisasi di Kampung Mamahak Teboq RTC	CV. SAMAR TEKNIK CONSULT	056952PRIC-PLUSPK-053CK-APBD PJPUPR-MUN2023	9.967.800,00	-	9.967.800,00	-	-	9.967.800,00
2024	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai, Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Lanjutan Semenisasi Jalan Menuju Gang Sungai Liang	CV. MQQAD RASSYA	-	561.750.931,77	-	561.750.931,77	-	-	561.750.931,77
2024	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai, Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Pemecangan Travo Distribusi	PT. MADURA ENERGI INFRASTRUKTUR	670247FISK-TDR/SPK-2841JCK-APBD PJPUPR-MUN2024	149.060.850,00	-	149.060.850,00	-	-	149.060.850,00
2024	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai, Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Pembangunan Gerbang Makro Korbimob Poho	CV. VENUS MAGESTY	027-2840FISK-TDR/SPK-2841JCK-APBD PJPUPR-MUN2024	948.309.102,00	-	948.309.102,00	-	-	948.309.102,00
2024	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai, Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Pembangunan Gudang Gas Air Mata Komp Korbimob Poho	CV. VENUS MAGESTY	-	1.363.250.956,23	-	1.363.250.956,23	-	-	1.363.250.956,23
2024	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai, Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Pembangunan Gudang Abus Komp Korbimob Poho	CV. VENUS MAGESTY	640565FISK-TDR/SPK-103AD0-03CK-APBD PJPUPR-MUN2023	1.462.640.549,79	-	1.462.640.549,79	-	-	1.462.640.549,79
2024	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Utang Belanja Barang Pakai, Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Pengisian Pembangunan Jembatan Bhyangkari	CV. HARSINDO	700514PWS-PLU	44.999.400,00	-	44.999.400,00	-	-	44.999.400,00
2024	2.16.2.21.2.20.10.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	Utang Belanja Jasa Kantor Kawasif dan lain-lain w/TV Berlangganan	LAYANAN INTERNET TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU	PT. Dwi Tunggal Putra	-	3.153.773.834,95	-	3.153.773.834,95	-	-	3.153.773.834,95
TOTAL UTANG BELANJA							40.448.923.137,21	-	40.448.923.137,21	-	11.070.102.789,06	26.378.789.250,24

PEMERINTAH KABUPATEN MAHAHAM ULU
KOREKSI EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2024

No	Uraian	No. Bukti/ Dok. Sumber	SKPD	Debit	Kredit	Saldo
1	JURNAL BALIK UTANG BELANJA PEGAWAI - TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PPPK	0003/JB-PPPK/KPS/I/2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	110,00	0,00	(110,00)
2	Jurnal Penyesuaian Koreksi saldo Utang TPP PPPK bulan Desember 2023	003/JP-UTANG/DLH/I/2024	Dinas Lingkungan Hidup	110,00	0,00	(220,00)
3	Jurnal penyesuaian saldo awal Peralatan dan mesin	0001/JP/AT/SEKTA/2024	Sekretariat Daerah	34.359.060,00	0,00	(34.359.280,00)
4	Jurnal Penyesuaian saldo awal peralatan dan mesin	0001/JP/AT/BAPENDA/2024	Badan Pendapatan Daerah	0,00	34.359.060,00	(220,00)
5	Jurnal Penyesuaian Saldo awal Penyusutan	0001/JP/PENYUSUTAN/SETWAN/2024	Sekretariat DPRD	930.135.500,00	0,00	(930.135.720,00)
6	Jurnal Koreksi Saldo Awal Amortisasi BKPSDM	1/JP-Amortisasi/BKPSDM/2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	46.412.785,00	(883.722.935,00)
7	Jurnal penyesuaian saldo awal penyusutan	0002/JP/PENYUSUTAN/BAPENDA/2024	Badan Pendapatan Daerah	34.359.060,00	0,00	(918.081.995,00)
8	Jurnal Koreksi Saldo Awal Amortisasi	1/JP-AMORTISASI/BPBD/2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	1,00	(918.081.994,00)
9	Jurnal Koreksi Saldo Awal Amortisasi	1/JP-AMORTISASI/BP4D/2024	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.349.338.741,00	0,00	(2.267.420.735,00)
10	Jurnal Penyesuaian saldo awal penyusutan	0001/JP/PENYUSUTAN/BPKAD/2024	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	714.749.500,00	0,00	(2.982.170.235,00)
11	Jurnal Koreksi Saldo Awal Amortisasi	1/JP-AMORTISASI/BPKAD/2024	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	1,00	(2.982.170.234,00)
12	Jurnal Penyesuaian Koreksi Saldo Awal Akumulasi Amortisasi	1/JP-AMORTISASI/CAPIL/2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	2,00	(2.982.170.232,00)
13	Jurnal Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	1/JP-AKUMULASI/DKPP/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	1,00	(2.982.170.231,00)
14	Jurnal Koreksi Saldo Awal Amortisasi BPBD	0003/JP-Amortisasi/BPBD/2024	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	1.630.000,00	(2.980.540.231,00)
15	Jurnal Koreksi Saldo Awal Amortisasi	1/JP-AMORTISASI/DLH/2024	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	1,00	(2.980.540.230,00)
16	Jurnal Koreksi Saldo Awal Akumulasi Amortisasi	1/JP-AMORTISASI/DPUPR/2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	8,00	(2.980.540.222,00)
17	Jurnal Koreksi Saldo Awal Amortisasi Inspektorat	0002/JP-Amortisasi/Inspektorat/2024	Inspektorat	0,00	1,00	(2.980.540.221,00)
18	Jurnal Koreksi Saldo Awal Akumulasi Amortisasi	1/JP-AMORTISASI/DISKOMINFO/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	0,00	2,00	(2.980.540.219,00)
19	Jurnal Koreksi Saldo Awal Akumulasi Amortisasi	1/JP-AMORTISASI/DINKES/2024	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	16.648.801,00	(2.963.891.418,00)
20	Jurnal Koreksi Saldo Awal Akumulasi Amortisasi	1/JP-AMORTISASI/SEKTA/2024	Sekretariat Daerah	172.838.498,00	0,00	(3.136.729.916,00)
21	Jurnal Penyesuaian Koreksi saldo utang TPP PPPK bulan Desember 2023	0001/JP-Koreksi/DINSOSP2PA/XII/2024	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.307.648,00	0,00	(3.138.037.564,00)
22	Jurnal Penyesuaian Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin dari BPKAD	005/JP-ASET/INSPEKTORAT/XII/2024	Inspektorat	0,00	229.061.400,00	(2.908.976.164,00)
23	JURNAL PENYESUAIAN KENDARAAN DINAS RODA 2	00006/jp-aset/BPD/XII/2024	Badan Pendapatan Daerah	0,00	57.825.350,00	(2.851.150.814,00)
24	Jurnal Penyesuaian Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin dari BPKAD	002/JP-ASET/KECLA/XII/2024	Kecamatan Long Apari	0,00	588.675.108,00	(2.262.475.706,00)
25	Jurnal penyesuaian Tambahan Kendaraan Dinas Roda Dua	00006/JP-ASET/DKPP/XII/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	32.990.000,00	(2.229.485.706,00)
26	Jurnal Penyesuaian Mutasi Tambah KIB B antar OPD dari BPKAD	005/JP-ASET/DLH/XII/2024	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	1.652.790.000,00	(576.695.706,00)
27	Jurnal Penyesuaian Mutasi Tambah KIB - B Dari BPKAD	008/JP-Aset/KECLP/XII/2024	Kecamatan Long Pahangai	0,00	518.964.408,00	(57.731.298,00)
28	Terdapat Mutasi Kurang Belanja Modal Jalan Jaringan Irigasi Ke OPD Lain	015	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	454.416.680,00	0,00	(512.147.978,00)
29	Jurnal Penyesuaian Mutasi tambah peralatan dan mesin dari bagian umum Setkab	002/JP-ASET/SETWAN/XII/2024	Sekretariat DPRD	0,00	7.946.480.500,00	7.434.332.522,00
30	Jurnal Penyesuaian mutasi tambah peralatan dan mesin dari BPKAD	003/JP-ASET/SETWAN/XII/2024	Sekretariat DPRD	0,00	2.168.960.000,00	9.603.292.522,00
31	Jurnal Penyesuaian Mutasi tambah Peralatan dan Mesin dari BPKAD	001/JP-ASET/KECLAHAM/XII/2024	Kecamatan Laham	0,00	72.664.408,00	9.675.956.930,00
32	Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin Dari BPKAD	003/JP-ASET/KECLH/XII/2024	Kecamatan Long Hubung	0,00	518.964.408,00	10.194.921.338,00
33	Jurnal Penyesuaian Terdapat Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin Dari BPKAD	0003/JP-ASET/KESBANGPOL/XII/2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	69.710.700,00	10.264.632.038,00
34	Jurnal Penyesuaian MUTASI MASUK ANTAR OPD	001/JP-ASET/DINSOS/XII/2024	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	524.089.758,00	10.788.721.796,00
35	Jurnal Penyesuaian Mutasi Kendaraan dari BPKAD	0002/JP/AT/KOMINFO/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	0,00	578.266.612,00	11.366.988.408,00
36	Jurnal Koreksi Atas Mutasi Tambah Antar OPD Peralatan dan Mesin dari BPKAD (Kendaraan Dinas) dan Peralatan Rumah Tangga (Umum)	001	Kecamatan Long Bagun	0,00	2.871.334.408,00	14.238.322.816,00
37	Jurnal Penyesuaian Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin dari BPKAD (Kendaraan Dinas NDD)	03/JP-ASET/DINKES/2024	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	446.300.000,00	14.684.622.816,00
38	Jurnal Penyesuaian inputan Transaksi Non Anggaran Dana Desa	0001/JP/TNA-DANA DESA/DPMK/2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	52.247.805.936,00	0,00	(37.563.183.120,00)
39	Jurnal Penyesuaian inputan Transaksi non anggaran dana desa	0001/JP/TNA-DANA DESA/BPKAD/2024	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	52.247.805.936,00	14.684.622.816,00
40	Mutasi BM peralatan dan Mesin Ke BP4D	01/JP-ASET/SEKTA/2024	Sekretariat Daerah	6.179.050.000,00	0,00	8.505.572.816,00
41	Mutasi BM Peralatan dan Mesin Ke DPR	02/JP-ASET/SEKTA/2024	Sekretariat Daerah	7.011.345.000,00	0,00	1.494.227.816,00
42	Terdapat Mutasi Keluar Peralatan dan Mesin Ke DPRD	03/JP-ASET/SEKTA/2024	Sekretariat Daerah	935.135.500,00	0,00	559.092.316,00
43	Mutasi Ke Kec. Long Bagun	04/JP-ASET/SEKTA/2024	Sekretariat Daerah	2.798.670.000,00	0,00	(2.239.577.684,00)
44	Terdapat Mutasi Keluar Peralatan dan Mesin Ke BPKAD	05/JP-ASET/SEKTA/2024	Sekretariat Daerah	714.749.500,00	0,00	(2.954.327.184,00)
45	Terdapat Mutasi Gedung Bangunan dari Bagian Umum Ke Dinas PU (Panel Kantor Bupati)	07/JP-ASET/SEKTA/2024	Sekretariat Daerah	11.060.760.000,00	0,00	(14.015.087.184,00)
46	Terdapat Mutasi Masuk Peralatan dan Mesin Dari BPKAD	08/JP-ASET/SEKTA/2024	Sekretariat Daerah	0,00	1.181.513.604,00	(12.833.573.580,00)
47	Jurnal Penyesuaian Utang Pembayaran Layanan Kesehatan Pasien Jiwa di RSJ Atma Husada dari Tahun 2016 s/d 2022	01/JP-UTANG/DINSOS/2024	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	194.688.573,00	0,00	(13.028.262.153,00)
48	Jurnal Penyesuaian Mutasi Tambah Peralatan Dan Mesin Dari BPKAD	01/JP-ASET/DISHUB/2024	Dinas Perhubungan	0,00	250.601.400,00	(12.777.660.753,00)
49	Jurnal Penyesuaian Mutasi Keluar BM Peralatan Dan Mesin Antar OPD	01/JP-ASET/BPKAD/2024	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.652.925.972,00	0,00	(22.430.586.725,00)
50	Jurnal Penyesuaian Mutasi Tambah Peralatan Dan Mesin Dari Bag.Umum Setkab	02/JP-ASET/BPKAD/2024	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	714.749.500,00	(21.715.837.225,00)
51	Jurnal Penyesuaian Terdapat Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin dari Bag. Umum Sekretariat Daerah	01/JP-ASET/BP4D/2024	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	6.179.050.000,00	(15.536.787.225,00)
52	Jurnal Penyesuaian Terdapat Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin dari BPKAD	02/JP-ASET/BP4D/2024	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	295.384.408,00	(15.241.402.817,00)
53	Jurnal Penyesuaian TGR NON BENDAHARA	0001/PIUTANG LAINNYA/BPKAD/2024	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.900.000,00	0,00	(15.249.302.817,00)
54	Jurnal penyesuaian penyisihan dana bergulir 2024	0003/JP/DANA BERGULIR/BPKAD/2024	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	6.555.000,00	(15.242.747.817,00)
55	Jurnal penyesuaian Mutasi Masuk Belanja Modal Gedung Bangunan dari Setkab	0017/JP-AT/DPUPR/2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	11.060.760.000,00	(4.181.987.817,00)
56	Jurnal Penyesuaian Mutasi Masuk KIB B Dari BPKAD	0018/JP-AT/DPUPR/2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	393.500.000,00	(3.788.487.817,00)
57	Jurnal Penyesuaian mutasi tambah tanah yang bersertifikasi	0020/JP-AT/DINKES/2024	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	12.260.000,00	(3.776.227.817,00)
58	Jurnal Penyesuaian tanah bersertifikat	000/JP/AT/TANAH/DISDIK/2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	204.350.000,00	(3.571.877.817,00)
59	Jurnal Penyesuaian Mutasi tambah JII dari PUPR (Drainase SMPN 1 Long Bagun)	0010/JP/AT/DISDIKBUD/2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	454.416.680,00	(3.117.461.137,00)
60	Jurnal Penyisihan Piutang PAD	0001/JP/PENYISIHAN-PIUTANG PAD/BAPENDA/2024	Badan Pendapatan Daerah	0,00	45.968.895,31	(3.071.492.241,69)
61	Jurnal Penyisihan Piutang Lainnya	0001/PENYISIHAN PIUTANG LAINNYA	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	7.900.000,00	(3.063.592.241,69)
62	Jurnal Penyesuaian Saldo awal Penyusutan	0001/JP/PENYUSUTAN/SEKTA/2024	Sekretariat Daerah	0,00	2.269.798.318,00	(793.793.923,69)
63	Jurnal koreksi utang LAYANAN INTERNET TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHAHAM ULU Pt. Dwi Tunggal Putra	0001/JUR-KOR-BPK/DISKOMINFO/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	3.153.773.814,55	0,00	(3.947.567.738,24)
JUMLAH				97.648.309.202,55	93.700.741.464,31	(3.947.567.738,24)



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
PER 31 DESEMBER 2024

KODE	NAMA DESA	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTO			SILPA TAHUN BERJALAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
01	KECAMATAN LONG BAGUN	57.801.322.300,00	53.262.869.680,00	92,15	63.615.181.507,00	47.633.319.107,00	74,88	7.320.207.918,00	7.306.685.504,00	99,82	1.506.348.711,00	12.938.643.079,00	858,94
01.2001.	PEMERINTAH DESA LONG HURAI	3.601.614.400,00	1.435.111.960,00	39,85	4.166.136.814,00	1.297.364.585,00	31,14	564.522.414,00	0,00	0,00	0,00	137.747.375,00	0,00
01.2002.	PEMERINTAH DESA LONG MELAHAM	5.777.092.400,00	5.777.092.400,00	100,00	6.684.357.746,00	5.560.897.160,00	83,19	907.265.346,00	1.283.265.346,00	141,44	0,00	1.501.889.586,00	0,00
01.2003.	PEMERINTAH DESA MEMAHAK BESAR	5.034.960.700,00	5.034.960.700,00	100,00	6.762.102.014,00	5.268.475.725,00	77,91	1.727.141.314,00	1.727.141.314,00	100,00	0,00	1.493.626.289,00	0,00
01.2004.	PEMERINTAH DESA MEMAHAK ULU	5.744.996.400,00	5.741.708.400,00	99,94	5.905.293.698,00	4.691.894.560,00	79,45	160.297.298,00	160.297.298,00	100,00	0,00	1.210.111.138,00	0,00
01.2005.	PEMERINTAH DESA BATU MAJANG	5.669.701.700,00	4.316.584.280,00	76,13	6.919.314.941,00	4.512.150.600,00	65,21	1.249.613.241,00	924.613.241,00	73,99	0,00	729.046.921,00	0,00
01.2006.	PEMERINTAH DESA UJOH BILANG	7.159.231.000,00	6.809.621.965,00	95,12	7.352.511.317,00	4.804.266.404,00	65,34	1.699.629.028,00	1.699.629.028,00	100,00	1.506.348.711,00	3.704.964.589,00	245,96
01.2007.	PEMERINTAH DESA LONG BAGUN ILIR	4.993.743.400,00	4.986.593.930,00	99,86	5.703.096.348,00	5.066.618.709,00	88,84	709.352.948,00	709.352.948,00	100,00	0,00	629.326.169,00	0,00
01.2008.	PEMERINTAH DESA LONG BAGUN ULU	4.928.859.400,00	4.855.664.012,00	98,51	4.646.612.525,00	4.066.170.469,00	87,51	(282.246.875,00)	(282.246.875,00)	100,00	0,00	507.246.668,00	0,00
01.2009.	PEMERINTAH DESA BATUQ KELO	5.717.954.900,00	5.713.804.227,00	99,93	5.781.803.594,00	5.066.074.921,00	87,62	63.848.694,00	63.848.694,00	100,00	0,00	711.578.000,00	0,00
01.2010.	PEMERINTAH DESA LONG MERAH	5.196.466.000,00	4.615.025.806,00	88,81	5.770.867.510,00	3.716.947.108,00	64,41	574.401.510,00	574.401.510,00	100,00	0,00	1.472.480.210,00	0,00
01.2011.	PEMERINTAH DESA RUKUN DAMAI	3.976.702.000,00	3.976.702.000,00	100,00	3.923.085.000,00	3.582.458.866,00	91,32	(53.617.000,00)	446.383.000,00	(832,54)	0,00	840.626.134,00	0,00
02	KECAMATAN LONG HUBUNG	48.207.138.600,00	47.852.997.091,00	99,27	54.730.467.735,00	38.628.008.378,00	70,58	6.576.349.795,00	6.727.759.795,00	102,30	53.020.660,00	15.932.748.312,00	30.050,08
02.2001.	PEMERINTAH DESA LONG HUBUNG	4.301.648.600,00	4.308.360.153,00	100,16	5.311.375.834,00	3.426.464.723,00	64,51	1.009.727.234,00	1.009.727.234,00	100,00	0,00	1.891.622.664,00	0,00
02.2002.	PEMERINTAH DESA MEMAHAK TEBQ	4.967.563.000,00	4.974.510.389,00	100,14	5.466.805.025,00	3.762.421.040,00	68,82	499.242.025,00	499.242.025,00	100,00	0,00	1.691.331.178,00	0,00
02.2003.	PEMERINTAH DESA LUTAN	4.751.568.400,00	4.751.568.400,00	100,00	5.278.035.511,00	4.590.852.167,00	86,98	526.467.111,00	526.467.111,00	100,00	0,00	687.183.344,00	0,00
02.2004.	PEMERINTAH DESA MATALIBAQ	4.841.086.000,00	4.843.638.139,00	100,05	4.978.229.236,00	3.753.300.639,00	75,39	137.143.236,00	137.143.236,00	100,00	0,00	1.227.480.736,00	0,00
02.2005.	PEMERINTAH DESA DATAH BILANG ILIR	4.358.637.900,00	4.360.343.525,00	100,04	4.824.912.015,00	4.365.080.146,00	90,47	519.094.775,00	519.094.775,00	100,00	52.820.660,00	514.358.154,00	973,78
02.2006.	PEMERINTAH DESA DATAH BILANG ULU	4.484.412.500,00	4.484.412.500,00	100,00	5.015.183.833,00	4.074.673.300,00	81,25	530.771.333,00	682.181.333,00	128,53	0,00	1.091.920.533,00	0,00
02.2007.	PEMERINTAH DESA TRI PARIQ MAKMUR	3.960.322.500,00	3.960.322.500,00	100,00	4.873.526.441,00	2.685.820.280,00	55,11	913.203.941,00	913.203.941,00	100,00	0,00	2.187.706.161,00	0,00
02.2008.	PEMERINTAH DESA WANA PARIQ	3.888.038.000,00	3.511.961.067,00	90,33	4.647.940.224,00	2.152.079.164,00	46,30	759.902.224,00	759.902.224,00	100,00	0,00	2.119.784.127,00	0,00
02.2009.	PEMERINTAH DESA DATAH BILANG BARU	4.812.081.000,00	4.813.510.280,00	100,03	5.089.748.174,00	4.059.943.504,00	79,77	277.667.174,00	277.667.174,00	100,00	0,00	1.031.233.950,00	0,00
02.2010.	PEMERINTAH DESA SIRAU	3.830.196.000,00	3.829.483.452,00	99,98	4.453.378.972,00	2.227.468.289,00	50,02	623.382.972,00	623.382.972,00	100,00	200.000,00	2.225.398.135,00	1.112.699,07
02.2011.	PEMERINTAH DESA LONG HUBUNG ULU	4.011.584.700,00	4.014.886.686,00	100,08	4.791.332.470,00	3.529.905.126,00	73,67	779.747.770,00	779.747.770,00	100,00	0,00	1.264.729.330,00	0,00
03	KECAMATAN LAHAM	22.610.193.200,00	19.958.225.407,00	88,27	24.694.116.778,00	19.346.484.035,00	78,34	2.083.923.578,00	2.659.994.785,00	127,64	0,00	3.271.581.266,00	0,00
03.2001.	PEMERINTAH DESA LAHAM	5.289.948.900,00	5.289.948.900,00	100,00	6.126.576.356,00	5.394.524.000,00	88,05	836.627.456,00	836.627.456,00	100,00	0,00	731.897.465,00	0,00
03.2002.	PEMERINTAH DESA LONG GELAWANG	3.835.090.200,00	2.974.978.309,00	77,57	4.943.607.615,00	3.094.264.529,00	62,59	1.108.517.415,00	1.108.517.415,00	100,00	0,00	989.231.195,00	0,00
03.2003.	PEMERINTAH DESA MUARA RATAH	3.816.128.000,00	2.062.530.600,00	54,05	3.816.128.000,00	1.888.173.800,00	49,48	0,00	0,00	0,00	0,00	174.356.800,00	0,00
03.2004.	PEMERINTAH DESA DANUM PAROY	5.013.886.700,00	4.975.624.770,00	99,24	5.568.469.514,00	4.913.468.306,00	88,24	554.582.814,00	654.582.814,00	118,03	0,00	716.739.278,00	0,00
03.2005.	PEMERINTAH DESA NYARIBUNGAN	4.655.139.400,00	4.655.142.828,00	100,00	4.239.335.293,00	4.056.053.400,00	95,68	(415.804.107,00)	60.267.100,00	(14,49)	0,00	659.356.528,00	0,00
04	KECAMATAN LONG APARI	45.855.057.060,00	41.574.936.658,00	90,67	48.493.054.409,00	35.036.171.634,00	72,25	2.637.997.349,00	2.687.997.349,00	101,90	0,00	9.226.762.373,00	0,00
04.2001.	PEMERINTAH DESA LONG PENANEH I	5.190.930.500,00	5.190.930.500,00	100,00	5.567.601.588,00	4.882.290.000,00	87,69	376.671.088,00	376.671.088,00	100,00	0,00	685.311.588,00	0,00
04.2002.	PEMERINTAH DESA LONG KERIOQ	4.742.681.400,00	4.742.681.400,00	100,00	5.105.406.460,00	4.503.221.577,00	88,20	362.725.060,00	362.725.060,00	100,00	0,00	602.184.883,00	0,00
04.2003.	PEMERINTAH DESA LONG PENANEH II	4.095.956.500,00	4.095.956.500,00	100,00	4.226.956.500,00	3.753.087.060,00	88,79	131.000.000,00	131.000.000,00	100,00	0,00	473.869.440,00	0,00
04.2004.	PEMERINTAH DESA TIONG OHANG	5.626.921.960,00	5.573.108.400,00	99,04	5.581.870.049,00	2.848.925.000,00	51,04	(45.051.911,00)	4.948.089,00	(10,98)	0,00	2.729.131.489,00	0,00
04.2005.	PEMERINTAH DESA LONG PENANEH III	4.292.577.700,00	4.292.577.700,00	100,00	4.533.223.700,00	3.853.367.595,00	85,00	240.646.000,00	240.646.000,00	100,00	0,00	679.856.105,00	0,00
04.2006.	PEMERINTAH DESA TIONG BUU	4.970.745.100,00	4.592.745.100,00	92,40	5.005.041.443,00	4.405.182.433,00	88,01	34.296.343,00	34.296.343,00	100,00	0,00	221.859.010,00	0,00
04.2007.	PEMERINTAH DESA NAHA BUAN	4.658.776.900,00	4.659.228.302,00	100,01	4.911.739.982,00	4.483.980.103,00	91,29	252.963.082,00	252.963.082,00	100,00	0,00	428.211.281,00	0,00
04.2008.	PEMERINTAH DESA NAHA TIFAB	4.046.907.900,00	3.246.450.856,00	80,22	4.492.174.001,00	2.475.633.916,00	55,11	445.266.101,00	445.266.101,00	100,00	0,00	1.216.083.041,00	0,00
04.2009.	PEMERINTAH DESA NAHA SILAT	4.220.047.700,00	2.993.914.900,00	70,95	4.797.555.286,00	2.429.214.950,00	50,63	577.507.586,00	577.507.586,00	100,00	0,00	1.142.207.536,00	0,00
04.2010.	PEMERINTAH DESA LONG APARI	4.009.511.400,00	2.187.343.000,00	54,55	4.271.485.400,00	1.401.269.000,00	32,81	261.974.000,00	261.974.000,00	100,00	0,00	1.048.048.000,00	0,00

KODE	NAMA DESA	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTO			SILPA TAHUN BERJALAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
05	KECAMATAN LONG PAHANGAI	56.187.836.402,00	51.701.483.528,00	92,02	62.311.987.653,00	44.572.189.522,00	71,53	6.301.279.898,00	6.640.579.663,00	105,38	177.128.647,00	13.732.652.367,00	7.752,93
05.2001.	PEMERINTAH DESA DELANG KEROHONG	3.576.906.900,00	3.580.516.018,00	100,10	4.321.765.202,00	3.667.667.459,00	84,87	744.858.302,00	744.858.302,00	100,00	0,00	657.706.862,00	0,00
05.2002.	PEMERINTAH DESA LONG PAKAQ	4.759.311.700,00	4.760.768.746,00	100,03	4.234.992.484,00	3.766.363.273,00	88,93	(524.319.216,00)	(524.319.216,00)	100,00	0,00	470.086.257,00	0,00
05.2003.	PEMERINTAH DESA LONG LUNUK	4.092.612.600,00	4.101.426.690,00	100,22	4.692.780.807,00	2.012.167.160,00	42,88	600.168.207,00	600.168.207,00	100,00	0,00	2.689.427.737,00	0,00
05.2004.	PEMERINTAH DESA LONG ISUN	4.591.814.128,00	4.198.316.943,00	91,43	4.645.118.523,00	3.571.168.253,00	76,88	53.304.395,00	53.304.395,00	100,00	0,00	680.453.085,00	0,00
05.2005.	PEMERINTAH DESA NAHA ARU	4.188.823.734,00	2.617.009.200,00	62,48	5.078.139.466,00	2.793.259.757,00	55,01	889.315.732,00	889.315.732,00	100,00	0,00	713.065.175,00	0,00
05.2006.	PEMERINTAH DESA DATAH NAHA	4.195.459.000,00	4.224.578.422,00	100,69	4.358.481.252,00	4.128.075.810,00	94,71	163.022.252,00	163.022.252,00	100,00	0,00	259.524.864,00	0,00
05.2007.	PEMERINTAH DESA LIRUNG UBING	4.201.717.480,00	4.202.926.205,00	100,03	4.455.804.700,00	4.023.096.171,00	90,29	254.087.220,00	254.087.220,00	100,00	0,00	433.917.254,00	0,00
05.2008.	PEMERINTAH DESA LONG PAHANGAI I	4.735.825.373,00	4.723.637.641,00	99,74	6.177.893.741,00	3.843.088.172,00	62,21	1.442.068.368,00	1.442.068.368,00	100,00	0,00	2.322.617.837,00	0,00
05.2009.	PEMERINTAH DESA LONG PAHANGAI II	4.491.981.000,00	3.935.834.733,00	87,62	5.223.918.624,00	2.632.267.833,00	50,39	731.937.624,00	731.937.624,00	100,00	0,00	2.035.504.524,00	0,00
05.2010.	PEMERINTAH DESA LONG TUYOQ	4.744.530.900,00	4.657.393.807,00	98,16	4.802.475.827,00	4.128.093.415,00	85,96	57.944.927,00	214.881.527,00	370,84	0,00	704.037.640,00	0,00
05.2011.	PEMERINTAH DESA LIU MULANG	4.493.687.587,00	3.887.735.005,00	86,52	4.865.373.109,00	3.646.918.364,00	74,96	371.685.522,00	574.458.518,00	154,55	0,00	815.275.159,00	0,00
05.2012.	PEMERINTAH DESA LONG PAKAQ BARU	4.768.973.600,00	4.599.429.786,00	96,44	5.323.011.990,00	4.187.823.725,00	78,67	731.167.037,00	731.167.037,00	100,00	177.128.647,00	1.142.773.098,00	645,17
05.2013.	PEMERINTAH DESA LONG LUNUK BARU	3.346.192.400,00	2.211.910.332,00	66,10	4.132.231.928,00	2.172.200.130,00	52,57	786.039.528,00	765.629.697,00	97,40	0,00	808.262.875,00	0,00
	JUMLAH	230.661.547.562,00	214.350.512.364,00	92,93	253.844.808.082,00	185.216.172.676,00	72,96	24.919.758.538,00	26.023.017.096,00	104,43	1.736.498.018,00	55.102.387.397,00	3.173,19



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
LAPORAN REALISASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN UMUM PROVINSI KEPADA DESA
PER 31 DESEMBER 2024

Tanggal	Uraian	No. Bukti/ Dok. Sumber	Nilai
1/7/2024	5.4.02.05.01.0002 - Belanja Bantuan Keuangan Umum Provinsi kepada Desa	Umum Provinsi Kepada Desa	1.500.000.000,00
1/7/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi Kepada Desa (BANPROV 100%) Kepada Kampung Noha Boan	64.11/04.0/000136/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/M/6/2024	75.000.000,00
1/7/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi Kepada Desa (BANPROV 100%) Kepada Kampung Long Tuyog	64.11/04.0/000138/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/M/6/2024	75.000.000,00
1/7/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi Kepada Desa (BANPROV 100%) Kepada Kampung Long Penaneh I	64.11/04.0/000139/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/M/6/2024	75.000.000,00
1/7/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi Kepada Desa (BANPROV 100%) Kepada Kampung Long Pakag Baru	64.11/04.0/000137/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/M/6/2024	75.000.000,00
3/7/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi Kepada Desa (BANPROV 100%) Kepada Kampung Liu Mulang	64.11/04.0/000155/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/M/7/2024	75.000.000,00
3/7/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi Kepada Desa (BANPROV 100%) Kepada Kampung Wana Parigi	64.11/04.0/000150/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/M/7/2024	75.000.000,00
3/7/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi Kepada Desa (BANPROV 100%) Kepada Kampung Muara Ratah	64.11/04.0/000148/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/M/7/2024	50.000.000,00
3/7/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi Kepada Desa (BANPROV 100%) Kepada Kampung Muara Ratah	64.11/04.0/000148/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/M/7/2024	25.000.000,00
3/7/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi Kepada Desa (BANPROV 100%) Kepada Kampung Laham	64.11/04.0/000144/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/M/7/2024	75.000.000,00
3/7/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi Kepada Desa (BANPROV 100%) Kepada Kampung Lutan	64.11/04.0/000151/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/M/7/2024	75.000.000,00
3/7/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi Kepada Desa (BANPROV 100%) Kepada Kampung Sirau	64.11/04.0/000152/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/M/7/2024	75.000.000,00
3/7/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi Kepada Desa (BANPROV 100%) Kepada Kampung Tiong Ohang	64.11/04.0/000153/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/M/7/2024	75.000.000,00
3/7/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi Kepada Desa (BANPROV 100%) Kepada Kampung Long Gelawang	64.11/04.0/000154/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/M/7/2024	75.000.000,00
3/7/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi Kepada Desa (BANPROV 100%) Kepada Kampung Delang Kerohong	64.11/04.0/000149/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/M/7/2024	75.000.000,00
4/7/2024	Sp2d Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi Kepada Desa (BANPROV 100%) Kepada Kampung Noha Tiwab	64.11/04.0/000170/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/M/7/2024	75.000.000,00
4/7/2024	Sp2d Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi Kepada Desa (BANPROV 100%) Kepada Kampung Nyaribungan	64.11/04.0/000166/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/M/7/2024	75.000.000,00
4/7/2024	Sp2d Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi Kepada Desa (BANPROV 100%) Kepada Kampung Long Merah	64.11/04.0/000161/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/M/7/2024	75.000.000,00
4/7/2024	Sp2d Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi Kepada Desa (BANPROV 100%) Kepada Kampung Tri Pariq Makmur	64.11/04.0/000167/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/M/7/2024	75.000.000,00
4/7/2024	Sp2d Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi Kepada Desa (BANPROV 100%) Kepada Kampung Naha Aruq	64.11/04.0/000164/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/M/7/2024	75.000.000,00
4/7/2024	Sp2d Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi Kepada Desa (BANPROV 100%) Kepada Kampung Mamahak Besar	64.11/04.0/000162/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/M/7/2024	75.000.000,00
10/7/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi Kepada Desa (BANPROV 100%) Kepada Kampung Batu Majang	64.11/04.0/000178/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/M/7/2024	75.000.000,00
12/8/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi Kepada Desa (BANPROV 100%) Kepada Kampung Lirung Ubung	64.11/04.0/000199/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/P/2/8/2024	75.000.000,00
21/08/2024	sp2d Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi Kepada Desa (BANPROV 100%) Kepada Kampung Danum Paroy	64.11/04.0/000213/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/P/2/8/2024	75.000.000,00
17/09/2024	Pembayaran Belanja Keuangan Umum Daerah Provinsi Kepada Desa (BANPROV) Kepada Kampung Long Melaham	64.11/04.0/000231/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/P/2/9/2024	75.000.000,00
7/10/2024	SP2D Pembayaran Belanja Keuangan Umum Daerah Provinsi Kepada Desa (BANPROV) Kepada Kampung Long Melaham	64.11/04.0/000243/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/P/2/10/2024	75.000.000,00
20/12/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi Kepada Desa (BANPROV 100%) Kepada Kampung Long Bagun Ilir	64.11/04.0/000326/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/PPR1/12/2024	75.000.000,00
27/12/2024	SP2D-LS Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi Kepada Desa (BANPROV 100%) Kepada Kampung Rukun Damai	64.11/04.0/000369/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/PPR1/12/2024	75.000.000,00
JUMLAH			3.450.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
LAPORAN REALISASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA
PER 31 DESEMBER 2024

Tanggal	Uraian	No. Bukti/ Dok. Sumber	Nilai
1/7/2024	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa		41.153.584.000,00
3/7/2024	Sp2d Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.1) Kepada Kampung Long Isun	64.11/04.0/000157/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/M/7/2024	936.269.600,00
3/7/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.1) Kepada Kampung Long Bagun Ilir	64.11/04.0/000147/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/M/7/2024	914.829.600,00
3/7/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.1) Kepada Kampung Rukun Damai	64.11/04.0/000145/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/M/7/2024	943.574.000,00
3/7/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.1) Kepada Kampung Muara Ratah	64.11/04.0/000146/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/M/7/2024	815.451.200,00
4/7/2024	Sp2d Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap I 40%) Kepada Kampung Long Gelawang	64.11/04.0/000163/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/M/7/2024	48.922.080,00
4/7/2024	Sp2d Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap I 40%) Kepada Kampung Laham	64.11/04.0/000169/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/M/7/2024	34.944.360,00
4/7/2024	Sp2d Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap I 40%) Kepada Kampung Long Hubung Ulu	64.11/04.0/000173/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/M/7/2024	27.955.480,00
4/7/2024	Sp2d Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap I 40%) Kepada Kampung Mamahak Besar	64.11/04.0/000174/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/M/7/2024	27.955.480,00
4/7/2024	Sp2d Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap I 40%) Kepada Kampung Long Bagun Ilir	64.11/04.0/000165/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/M/7/2024	13.977.760,00
4/7/2024	Sp2d Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap I 40%) Kepada Kampung Wana Parigi	64.11/04.0/000171/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/M/7/2024	27.955.480,00
4/7/2024	Sp2d Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap I 40%) Kepada Kampung Mamahak Ulu	64.11/04.0/000168/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/M/7/2024	13.977.760,00
4/7/2024	Sp2d Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap I 40%) Kepada Kampung Lutan	64.11/04.0/000172/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/M/7/2024	55.910.960,00
4/7/2024	Sp2d Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap I 40%) Kepada Kampung Lutan	64.11/04.0/000175/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/M/7/2024	27.955.480,00
4/7/2024	Sp2d Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap I 40%) Kepada Kampung Long Bagun Ulu	64.11/04.0/000160/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/M/7/2024	13.977.760,00
10/7/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.1) Kepada Kampung Batu Majang	64.11/04.0/000180/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/M/7/2024	993.346.400,00
10/7/2024	SP2D Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap I 40%) Kepada Kampung Batu Majang	64.11/04.0/000179/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/M/7/2024	27.955.480,00
15/07/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) Kepada Kampung Tiong Bu,u	64.11/04.0/000181/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/M/7/2024	989.717.200,00
19/07/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) Kepada Kampung Mamahak Ulu	64.11/04.0/000188/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/M/7/2024	925.569.600,00
29/07/2024	STS Pengembalian Belanja atas Kelebihan Penyaluran ADK Tahap 1 Kampung Long Isun.	64.11/07.0/000001/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P/2/8/2024	(936.269.600,00)
12/8/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) Kepada Kampung Datah Bilang Baru	64.11/04.0/000196/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P/2/8/2024	1.057.300.000,00
12/8/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) Kepada Kampung Long Pakag Baru	64.11/04.0/000202/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P/2/8/2024	966.629.200,00
12/8/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) Kepada Kampung Lirung Ubing	64.11/04.0/000200/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P/2/8/2024	834.708.800,00
12/8/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) Kepada Kampung Datah Naha	64.11/04.0/000198/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P/2/8/2024	858.868.000,00

[Handwritten Signature]

Tanggal	Uraian	No. Bukti/ Dok. Sumber	Nilai
12/8/2024	SP2D Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap II 60%) Kepada Kampung Long Pakag Baru	64.11/04.0/000201/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/P2/8/2024	36.691.560,00
12/8/2024	SP2D Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap II 60%) Kepada Kampung Datah Bilang Baru	64.11/04.0/000203/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/P2/8/2024	52.416.540,00
12/8/2024	SP2D Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap II 60%) Kepada Kampung Lirung Ubing	64.11/04.0/000197/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/P2/8/2024	52.416.540,00
16/08/2024	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring Dan Evaluasi Realisasi Anggaran Kampung Ta 2024, Guna Dalam Pelaporan Realisasi Tahap I. Kampung Tripariq Makmur Kecamatan Long Hubung 09 s/d 11 Juli 2024. Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Jalan K.Bulan,S.Sos DKK ST,090/1110/DPMK-MU,02	64.11/06.0/000154/UP/2.13.0.00.0.00.08.0000/P2/8/2024	15.190.000,00
16/08/2024	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Sosialisasi Perbup Perubahan Pembagian Alokasi Dana Kampung Ta 2024. Kampung Nyaribungan Kecamatan Laham 29 s/d 31 Juli 2024. Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Jalan K.Bulan,S.Sos DKK ST,090/1224/DPMK-MU,02	64.11/06.0/000153/UP/2.13.0.00.0.00.08.0000/P2/8/2024	12.850.000,00
16/08/2024	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring Dan Evaluasi Realisasi Anggaran Kampung Ta 2024, Guna Dalam Pelaporan Realisasi Tahap I. Kampung Nyaribungan Kecamatan Laham 03 s/d 05 Juli 2024. Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Jalan K.Bulan,S.Sos DKK ST,090/1077/DPMK-MU,02	64.11/06.0/000155/UP/2.13.0.00.0.00.08.0000/P2/8/2024	17.990.000,00
16/08/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) Kepada Kampung Danum Paroy	64.11/04.0/000206/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/P2/8/2024	1.006.205.600,00
16/08/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) Kepada Kampung Tiong Ohang	64.11/04.0/000207/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/P2/8/2024	936.002.000,00
20/08/2024	sp2d Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap II 60%) Kepada Kampung Long Pakag	64.11/04.0/000209/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/P2/8/2024	41.933.220,00
20/08/2024	sp2d Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) Kepada Kampung Long Penaneh I	64.11/04.0/000210/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/P2/8/2024	872.686.800,00
20/08/2024	sp2d Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap II 60%) Kepada Kampung Tiong Ohang	64.11/04.0/000212/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/P2/8/2024	26.208.240,00
20/08/2024	sp2d Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) Kepada Kampung Delang Kerohong	64.11/04.0/000211/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/P2/8/2024	822.899.600,00
21/08/2024	sp2d Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) Kepada Kampung Long Penaneh II	64.11/04.0/000214/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/P2/8/2024	831.906.400,00
21/08/2024	sp2d Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) Kepada Kampung Long Penaneh III	64.11/04.0/000216/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/P2/8/2024	822.992.400,00
21/08/2024	sp2d Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) Kepada Kampung Long Keriog	64.11/04.0/000218/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/P2/8/2024	875.976.000,00
21/08/2024	sp2d Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) Kepada Kampung Noha Boan	64.11/04.0/000217/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/P2/8/2024	929.300.000,00
21/08/2024	sp2d Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap II 60%) Kepada Kampung Noha Boan	64.11/04.0/000215/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/P2/8/2024	28.304.940,00
21/08/2024	sp2d Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) Kepada Kampung Long Pakag	64.11/04.0/000219/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/P2/8/2024	958.188.000,00
9/9/2024	Sp2d Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap II 60%) Kepada Kampung Long Penaneh I	64.11/04.0/000222/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/P2/9/2024	31.449.900,00
9/9/2024	Sp2d Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap II 60%) Kepada Kampung Long Penaneh II	64.11/04.0/000223/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/P2/9/2024	31.449.900,00
9/9/2024	Sp2d Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap II 60%) Kepada Kampung Delang Kerohong	64.11/04.0/000224/LS/2.13.0.00.0.00.08.0000/P2/9/2024	52.416.540,00

Tanggal	Uraian	No. Bukti/ Dok. Sumber	Nilai
17/09/2024	Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (ADK Tahap II 40%) Kepada Kampung Lutan.	64.11/04.0/000229/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P2/9/2024	957.984.000,00
17/09/2024	Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (ADK Tahap II 40%) Kepada Kampung Long Melaham	64.11/04.0/000230/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P2/9/2024	1.066.877.600,00
18/09/2024	SP2D Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap II 60%) Kepada Kampung Batog Kelo	64.11/04.0/000234/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P2/9/2024	52.416.540,00
18/09/2024	SP2D Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (ADK Tahap II 40%) Kepada Kampung Long Lunuk	64.11/04.0/000232/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P2/9/2024	859.020.800,00
18/09/2024	SP2D Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (ADK Tahap II 40%) Kepada Kampung Batog Kelo	64.11/04.0/000233/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P2/9/2024	1.086.450.800,00
20/09/2024	SP2D Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap II 60%) Kepada Kampung Long Pahangai I	64.11/04.0/000236/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P2/9/2024	52.416.540,00
20/09/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) Kepada Kampung Long Pahangai I	64.11/04.0/000235/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P2/9/2024	917.064.400,00
24/09/2024	Sp2d Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) Kepada Kampung Long Isun	64.11/04.0/000238/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P2/9/2024	936.269.600,00
24/09/2024	Sp2d Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap II 60%) Kepada Kampung Long Isun	64.11/04.0/000237/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P2/9/2024	41.933.220,00
24/09/2024	Sp2d Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) Kepada Kampung Laham	64.11/04.0/000239/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P2/9/2024	1.031.822.400,00
24/09/2024	Sp2d Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) Kepada Kampung Matalibag	64.11/04.0/000242/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P2/9/2024	976.767.600,00
30/09/2024	Sp2d Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap II 60%) Kepada Kampung Tiong Bu'u	64.11/04.0/000241/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P2/9/2024	62.899.860,00
30/09/2024	Sp2d Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.1) Kepada Kampung Long Hurai	64.11/04.0/000281/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/11/2024	891.986.000,00
4/10/2024	SP2D Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap II 60%) Kepada Kampung Nyaribungan	64.11/04.0/000245/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P2/10/2024	20.966.640,00
7/10/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) Kepada Kampung Nyaribungan	64.11/04.0/000244/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P2/10/2024	890.948.800,00
9/10/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) Kepada Kampung Sirau	64.11/04.0/000247/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P2/10/2024	804.598.400,00
9/10/2024	Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap II 60%) Kepada Kampung Datah Bilang Ilir	64.11/04.0/000248/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P2/10/2024	52.416.540,00
9/10/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) Kepada Kampung Mamahak Teboq	64.11/04.0/000246/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P2/10/2024	1.047.894.137,00
9/10/2024	Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap II 60%) Kepada Kampung Mamahak Teboq	64.11/04.0/000249/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P2/10/2024	57.658.200,00
15/10/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) Kepada Kampung Long Bagun Ulu	64.11/04.0/000255/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P2/10/2024	1.016.296.000,00
15/10/2024	Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap I 40%) Kepada Kampung Long Hurai	64.11/04.0/000257/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P2/10/2024	13.977.760,00
15/10/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) Kepada Kampung Datah Bilang Ilir	64.11/04.0/000256/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P2/10/2024	1.005.893.200,00
18/10/2024	SP2D Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap II 60%) Kepada Kampung Wana Parigi	64.11/04.0/000264/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P2/10/2024	41.933.220,00
18/10/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) Kepada Kampung Wana Parigi	64.11/04.0/000258/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P2/10/2024	799.867.200,00
18/10/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) Kepada Kampung Datah Bilang Ulu	64.11/04.0/000259/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P2/10/2024	985.038.000,00

Tanggal	Uraian	No. Bukti/ Dok. Sumber	Nilai
18/10/2024	Sp2d Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) Kepada Kampung Tri Pariq Makmur	64.11/04.0/000263/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P2/10/2024	35.883.503,00
18/10/2024	Sp2d Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) Kepada Kampung Tri Pariq Makmur	64.11/04.0/000263/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P2/10/2024	792.688.897,00
18/10/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) Kepada Kampung Long Hubung Ulu	64.11/04.0/000260/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P2/10/2024	839.968.000,00
18/10/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) Kepada Kampung Long Tuyog	64.11/04.0/000261/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P2/10/2024	983.722.400,00
18/10/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) Kepada Kampung Long Hubung	64.11/04.0/000262/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P2/10/2024	920.256.800,00
18/10/2024	Sp2d Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) Kepada Kampung Batu Majang	64.11/04.0/000265/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P2/10/2024	993.346.400,00
25/10/2024	Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap II 60%) Kepada Kampung Long Hubung Ulu	64.11/04.0/000267/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P2/10/2024	41.933.220,00
25/10/2024	Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap II 60%) Kepada Kampung Mamahak Ulu	64.11/04.0/000266/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P2/10/2024	20.966.640,00
30/10/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) Kepada Kampung Long Bagun	64.11/04.0/000269/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P2/10/2024	914.829.600,00
30/10/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) Kepada Kampung Mamahak Besar	64.11/04.0/000268/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P2/10/2024	1.115.750.800,00
31/10/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) Kepada Kampung Ujoh Bilang.	64.11/04.0/000274/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P2/10/2024	1.483.793.600,00
31/10/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) Kepada Kampung Naha Arug.	64.11/04.0/000272/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P2/10/2024	831.183.200,00
31/10/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (BKK TAHAP.2) Kepada Kampung Naha Arug.	64.11/04.0/000271/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P2/10/2024	104.833.080,00
31/10/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) Kepada Kampung Muara Ratah.	64.11/04.0/000273/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/P2/10/2024	815.451.200,00
19/11/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Mamahak Ulu.	64.11/04.0/000287/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/11/2024	1.247.330.800,00
21/11/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.1) kepada Kampung Long Lunuk Baru	64.11/04.0/000289/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/11/2024	871.593.360,00
21/11/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Lirung Ubing.	64.11/04.0/000288/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/11/2024	1.122.953.400,00
21/11/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.1) kepada Kampung Long Apari	64.11/04.0/000290/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/11/2024	1.071.594.000,00
26/11/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) kepada Kampung Noha Tivab	64.11/04.0/000291/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/11/2024	846.279.200,00
26/11/2024	Sp2d Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap II 60%) Kepada Kampung Noha Tivab	64.11/04.0/000292/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/11/2024	52.416.540,00
2/12/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Datah Naha.	64.11/04.0/000305/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/11/2024	1.151.619.000,00
3/12/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (BKK TAHAP.2) kepada Kampung Noha Tivab	64.11/04.0/000304/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/11/2024	47.174.880,00
5/12/2024	SP2D-LS Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) kepada Kampung Rukun Damai	64.11/04.0/000312/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	943.574.000,00
5/12/2024	SP2D-LS Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap II 60%) Kepada Kampung Long Gelawang	64.11/04.0/000311/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	73.383.120,00
6/12/2024	Sp2d Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Long Isun	64.11/04.0/000313/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	1.243.459.800,00

Tanggal	Uraian	No. Bukti/ Dok. Sumber	Nilai
6/12/2024	Sp2d Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) kepada Kampung Liu Mulang	64.11/04.0/000314/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	1.395.229.600,00
7/12/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap II 60%) Kepada Kampung Long Penaneh III	64.11/04.0/000319/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	41.933.220,00
7/12/2024	Sp2d Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) kepada Kampung Long Gelawang	64.11/04.0/000315/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	967.803.600,00
7/12/2024	Sp2d Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Danum Paroy	64.11/04.0/000316/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	1.641.206.800,00
7/12/2024	Sp2d Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) kepada Kampung Noha Silat	64.11/04.0/000322/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	858.457.600,00
7/12/2024	Sp2d Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap II 60%) Kepada Kampung Noha Silat	64.11/04.0/000323/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	41.933.220,00
7/12/2024	Sp2d Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Datab Bilang Baru	64.11/04.0/000318/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	1.403.635.000,00
7/12/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Long Pakag Baru	64.11/04.0/000317/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	1.296.049.600,00
9/12/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Long Penaneh III	64.11/04.0/000325/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	1.109.051.200,00
18/12/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Tiong Ohang	64.11/04.0/000335/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	1.243.143.000,00
19/12/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap II 60%) Kepada Kampung Long Keriog	64.11/04.0/000337/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	20.966.640,00
20/12/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Tiong Bu'u	64.11/04.0/000330/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	1.323.444.600,00
20/12/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Long Penaneh I	64.11/04.0/000338/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	1.482.781.400,00
20/12/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap II 60%) Kepada Kampung Long Bagun Ulu	64.11/04.0/000341/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	20.966.640,00
20/12/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap II 60%) Kepada Kampung Laham	64.11/04.0/000334/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	52.416.540,00
20/12/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Datab Bilang Ilir	64.11/04.0/000331/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	1.326.072.600,00
20/12/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Noha Boan	64.11/04.0/000344/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	1.235.190.000,00
20/12/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap II 60%) Kepada Kampung Long Melaham	64.11/04.0/000342/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	20.966.640,00
20/12/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Long Pakag	64.11/04.0/000329/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	1.269.467.000,00
20/12/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Long Keriog	64.11/04.0/000343/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	1.171.918.000,00
20/12/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Bato Kelo	64.11/04.0/000333/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	1.736.421.400,00
20/12/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Matalibag	64.11/04.0/000328/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	1.291.511.800,00
20/12/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Long Bagun Ulu	64.11/04.0/000339/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	1.338.415.000,00
20/12/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Laham	64.11/04.0/000336/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	1.356.837.200,00
20/12/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Delang Kerohong	64.11/04.0/000345/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	1.108.941.800,00

Tanggal	Uraian	No. Bukti/ Dok. Sumber	Nilai
20/12/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Long Tuyog	64.11/04.0/000332/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	1.299.764.200,00
20/12/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Long Pahangai I	64.11/04.0/000327/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	1.535.473.000,00
20/12/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Long Melaham	64.11/04.0/000340/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	1.713.196.800,00
21/12/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Lutan	64.11/04.0/000348/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	1.269.225.000,00
21/12/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Long Penaneh II	64.11/04.0/000346/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	1.119.628.200,00
21/12/2024	SP2D Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap II 60%) Kepada Kampung Lutan	64.11/04.0/000353/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	83.866.440,00
21/12/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Mamahak Tebog	64.11/04.0/000351/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	1.375.455.400,00
21/12/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Long Hubung	64.11/04.0/000352/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	1.224.460.400,00
21/12/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Long Bagun Ilir	64.11/04.0/000355/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	1.218.019.800,00
21/12/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Long Hubung Ulu	64.11/04.0/000350/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	1.129.194.000,00
21/12/2024	SP2D Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Ujoh Bilang	64.11/04.0/000354/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	1.893.122.800,00
21/12/2024	SP2D Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap II 60%) Kepada Kampung Long Hubung	64.11/04.0/000349/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	36.691.560,00
27/12/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Nyaribungan	64.11/04.0/000360/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	1.189.684.400,00
27/12/2024	SP2D-LS Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Wana Parigi	64.11/04.0/000377/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	1.081.614.900,00
27/12/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) kepada Kampung Long Lunuk Baru	64.11/04.0/000370/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	246.856.640,00
27/12/2024	Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap II 60%) Kepada Kampung Tri Parigi Makmur	64.11/04.0/000375/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	31.449.900,00
27/12/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Sirau	64.11/04.0/000376/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	1.087.225.200,00
27/12/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Long Lunuk	64.11/04.0/000365/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	1.151.800.400,00
27/12/2024	Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap II 60%) Kepada Kampung Mamahak Besar	64.11/04.0/000362/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	41.933.220,00
27/12/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Muara Ratah	64.11/04.0/000372/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	1.100.103.600,00
27/12/2024	SP2D-LS Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Naha Arug	64.11/04.0/000366/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	1.118.770.600,00
27/12/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Tri Parigi Makmur	64.11/04.0/000368/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	1.115.672.200,00
27/12/2024	SP2D-LS Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Mamahak Besar	64.11/04.0/000364/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	1.456.422.400,00
27/12/2024	SP2D-LS Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.2) kepada Kampung Long Merah	64.11/04.0/000374/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	1.456.730.400,00
27/12/2024	SP2D-LS Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap II 60%) Kepada Kampung Long Lunuk	64.11/04.0/000367/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	36.691.560,00

Tanggal	Uraian	No. Bukti/ Dok. Sumber	Nilai
27/12/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Datah Bilang Ulu	64.11/04.0/000361/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	1.317.892.000,00
27/12/2024	SP2D-LS Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Rukun Damai	64.11/04.0/000373/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	1.252.127.000,00
27/12/2024	Pembayaran Belanja Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (BKK Tahap II 60%) Kepada Kampung Datah Bilang Ulu	64.11/04.0/000363/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	31.449.900,00
27/12/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa (ADK TAHAP.3) kepada Kampung Long Pahangai II	64.11/04.0/000371/LS/2.13.0.00.0.00.08.000/PPR1/12/2024	1.402.301.600,00
JUMLAH			147.239.506.777,00



Rincian Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Gedung Bangunan Pada Sekretariat Daerah

NO	Nama Barang/Pekerjaan	Kontrak		Nilai Pekerjaan	Penerima
		Nomor	Tanggal		
1	Sticker Kaca Frosted Glass+Pemasangan	027/SP260324.195/UMUM/III/2024	26 maret 2024	191.540.000,00	Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2	Vinyl Wallpaper	027/SP260324.195/UMUM/III/2024	26 maret 2024	36.000.000,00	Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3	Panel Dinding Custom	027/SP260324.195/UMUM/III/2024	26 maret 2024	1.669.350.000,00	Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	Panel Dinding Custom	027.4/BAS050824.736/ /UMUM/II/2024	19 Februari 2024	1.209.000.000,00	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah
5	Panel Dinding Kayu Jati Ukiran	027.4/BAS111124.412/UMUM/XI/2024	11-Nov-24	7.309.910.000,00	Kantor Bupati Mahakam Ulu
6	Panel Dinding Custom	027.4/BAS171224.2.098/UMUM/XI/2024	17 Desember 2024	644.960.000,00	Kantor Bupati Mahakam Ulu
Jumlah				11.060.760.000,00	



BUPATI MAHAKAM ULU

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H.,M.E

Jabatan : Bupati Mahakam Ulu

Alamat : Ujoh Bilang

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertanggungjawab penuh atas :

1. Kebenaran pelaksanaan Layanan Internet Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu periode Januari sampai dengan Maret Tahun 2021 oleh PT. Dwi Tunggal Putra (PT. DTP) selaku penyedia layanan;
2. Pembayaran yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu kepada Penyedia PT. DTP

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sadar dan penuh rasa tanggungjawab.



Bupati Mahakam Ulu,

Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H.,M.E

96



BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Jalan M. Yamin No. 19, Samarinda
Telp. (0541) 765029, Fax. (0541) 744680
www.kaltim.bpk.go.id